



**PEMERINTAH
KABUPATEN LEBAK**



LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH (LPPD)

**KABUPATEN LEBAK
TAHUN ANGGARAN 2021**



Hj. ITI OCTAVIA JAYABAYA, SE, MM
Bupati Lebak

H. ADE SUMARDI, SE
Wakil Bupati Lebak



KATA PENGANTAR

Bismillahirrahmanirrahim

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Puji syukur kehadirat Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa karena atas rahmat dan hidayahNya, Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) Kabupaten Lebak Tahun anggaran 2021 dapat diselesaikan dengan baik dan tepat waktu.

Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah berpedoman pada Pasal 69 ayat (1) dan Pasal 70 ayat (4) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Peraturan Pemerintah No 3 Tahun 2007 tentang Pedoman Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Kepada Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah Kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Kepada Masyarakat, dan Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor : 120.04/9804/OTDA tanggal 17 Desember 2018 perihal Pedoman Penyusunan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Tahun 2018.

Penyusunan LPPD merupakan salah satu wujud pertanggungjawaban pelaksanaan tugas, fungsi dan strategi Pemerintah Daerah Kabupaten Lebak berdasarkan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2021, sebagaimana pelaksanaan dari Visi, Misi dan Tujuan yang telah ditetapkan dan untuk mengetahui perkembangan yang terjadi sebagai bahan untuk pembinaan, pengawasan dan pengendalian penyelenggaraan pemerintahan di Daerah.

Kami sampaikan juga terima kasih dan penghargaan kepada semua pihak yang telah membantu dan berkontribusi dalam penyelesaian penyusunan buku Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) Kabupaten Lebak Tahun 2021.



Semoga materi LPPD ini dapat menjadi referensi bagi Pemerintah Pusat dalam memberikan panduan dan pembinaan Pemerintah Daerah serta bagi Pemerintah Daerah untuk melakukan perbaikan dan penyempurnaan lebih lanjut di masa yang akan datang.

Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Rangkasbitung, Maret 2022



BUPATI LEBAK,

Hj. ITI OCTAVIA JAYABAYA, SE, MM



DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	iii
DAFTAR TABEL DAN GAMBAR	v
BAB I PENDAHULUAN	
1.1. Latar Belakang	I-1
1.1.1. Penjelasan Umum	I-2
A. Undang-Undang Pembentukan Daerah	I-3
B. Data Geografis Wilayah	I-3
1. Kondisi Geografis dan Batas Administrasi Daerah	I-3
2. Kondisi Topografi	I-5
3. Kelerengan	I-7
4. Iklim	I-9
C. Jumlah Penduduk	I-10
1. Jumlah Penduduk dan Komposisi Penduduk menurut Jenis Kelamin per Kecamatan	I-10
2. Struktur Usia	I-12
3. Jumlah Penduduk Menurut Jenis Pekerjaan Per Jenis Kelamin	I-13
4. Jumlah Penduduk Menurut Pendidikan Per Jenis Kelamin	I-15
D. Jumlah Kecamatan Dan Desa/Kelurahan	I-16
E. Jumlah Perangkat Daerah, Unit Kerja Perangkat Daerah Dan Pegawai Pemerintah	I-20
F. Realisasi Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah	I-22
1. Target dan Realisasi Pendapatan Daerah	I-23
2. Target dan Realisasi Belanja Daerah	I-24
3. Target dan Realisasi Pembiayaan Daerah	I-25
1.1.2. Perencanaan Pembangunan Daerah	I-25
A. Permasalahan Strategis Pemerintah Daerah	I-26
1. Pembangunan Manusia	I-26
2. Pemulihan Ekonomi	I-28
3. Pembangunan Kewilayahan: Infrastruktur, Lingkungan Hidup, Penataan Ruang, dan Kebencanaan	I-30
4. Tata Kelola Pemerintahan yang Baik	I-31
B. Visi dan Misi	I-38
1. Visi	I-38
2. Misi	I-39
C. Program Pembangunan Daerah Berdasarkan Dokumen Perencanaan Jangka Menengah	I-41
D. Kegiatan Pembangunan Daerah Berdasarkan Dokumen Perencanaan Tahunan	I-80
1.1.3. Penerapan Standar Pelayanan Minimal	I-102



BAB II CAPAIAN KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN

DAERAH

2.1. Capaian Kinerja Makro	II-1
2.2. Capaian Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan	II-2
2.2.1 Indikator Kinerja Kunci Keluaran (Output)	II-2
2.2.2 Indikator Kinerja Kunci Hasil (Outcome)	II-31
2.2.3 Indikator Kinerja Kunci Untuk Fungsi Penunjang Urusan Pemerintahan	II-39
2.3. Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah	II-41
A. Target Kinerja Dalam Perjanjian Kinerja	II-41
B. Pengukuran Capaian Kinerja Dibandingkan Dengan Target Perjanjian Kinerja	II-42
C. Pengukuran Capaian Kinerja Dibandingkan Dengan Tahun Sebelumnya	II-43
D. Pengukuran Capaian Kinerja Dibandingkan Dengan Target Dalam Pembangunan Jangka Menengah	II-45
E. Analisis Efisiensi Penggunaan Sumber Daya Dikaitkan Dengan Hasil (Kinerja) Yang Telah Dicapai	II-46
F. Analisis Program Dan Kegiatan Yang Mendukung Pencapaian Target Kinerja	II-48

BAB III CAPAIAN KINERJA PELAKSANAAN TUGAS PEMBANTUAN

1. Dasar Hukum Penyelenggaraan Tugas Pembantuan	III-1
2. Gambaran Umum Pelaksanaan Tugas Pembantuan	III-2
3. Capaian Kinerja Pelaksanaan Tugas Pembantuan	III-3
3.1. Tugas Pembantuan Pusat yang Dilaksanakan oleh Daerah Kabupaten	III-3
3.1.1. Target Kinerja	III-3
3.1.2. Realisasi	III-5
3.2. Tugas Pembantuan Provinsi yang Dilaksanakan oleh Daerah Kabupaten	III-11
3.2.1. Target Kinerja	III-11
3.2.2. Realisasi	III-11
3.3. Permasalahan dan Kendala	III-14
3.4. Saran dan Tindak Lanjut	III-15

BAB IV PENERAPAN DAN PENCAPAIAN STANDAR PELAYANAN MINIMAL

4.1. Urusan Pendidikan	IV-1
4.2. Urusan Kesehatan	IV-4
4.3. Urusan Pekerjaan Umum	IV-9
4.4. Urusan Perumahan Rakyat	IV-12
4.5. Urusan Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat	IV-14
4.6. Urusan Sosial	IV-18
4.7. Program dan Kegiatan	IV-22

BAB V PENUTUP



DAFTAR TABEL DAN GAMBAR

Gambar 1.1	Peta Orientasi Wilayah Kabupaten Lebak	I-4
Tabel 1.1	Luas Kabupaten Lebak Menurut Kecamatan	I-4
Gambar 1.2	Peta Kondisi Topografi Kabupaten Lebak	I-6
Tabel 1.2	Ketinggian Wilayah Menurut Kecamatan	I-6
Gambar 1.3	Peta Kemiringan Kabupaten Lebak	I-8
Tabel 1.3	Kelerengan Wilayah Kabupaten Lebak Menurut Kecamatan	I-8
Gambar 1.4	Peta Curah Hujan Kabupaten Lebak	I-9
Tabel 1.4	Morfologi Wilayah Kabupaten Lebak Menurut Kecamatan	I-10
Tabel 1.5	Penduduk Kabupaten Lebak Menurut Jenis Kelamin Per Kecamatan Tahun 2021	I-11
Tabel 1.6	Jumlah dan Proporsi Penduduk Berdasarkan Kelompok Umur dan Jenis Kelamin Kabupaten Lebak Tahun 2021	I-12
Gambar 1.5	Piramida Penduduk	I-13
Tabel 1.7	Jumlah Penduduk berdasarkan Pekerjaan Per Jenis Kelamin Kabupaten Lebak Tahun 2021	I-14
Tabel 1.8	Jumlah Penduduk Menurut Pendidikan Terakhir Per Jenis Kelamin Kabupaten Lebak Tahun 2021	I-16
Tabel 1.9	Nama Kecamatan dan Desa/Kelurahan Kabupaten Lebak Tahun 2021	I-17
Tabel 1.10	Jumlah Perangkat Daerah dan Pegawai Pemerintah Daerah Kabupaten Lebak Tahun 2021	I-20
Tabel 1.11	PNS Kabupaten Lebak Berdasarkan Pendidikan Tahun 2021	I-22
Tabel 1.12	Target dan Realisasi Pendapatan Daerah Kabupaten Lebak Tahun 2021	I-23
Tabel 1.13	Target dan Realisasi Belanja Daerah Kabupaten Lebak Tahun 2021	I-24
Tabel 1.14	Target dan Realisasi Pembiayaan Daerah Kabupaten Lebak Tahun 2021	I-25
Tabel 1.15	Identifikasi Permasalahan Pembangunan Daerah	I-32
Tabel 1.16	Identifikasi Akar Masalah Berdasar Urusan	I-34
Tabel 1.17	Indikasi Rencana Program Prioritas yang disertai Kebutuhan Pendanaan Kabupaten Lebak	I-41
Tabel 1.18	Kegiatan Pembangunan Daerah Berdasarkan Dokumen Perencanaan Tahunan	I-80
Tabel 1.19	Target Dan Indikator Penerima Layanan Standar Pelayanan Minimal	I-103
Tabel 2.1	Perbandingan Capaian Kinerja Makro Kabupaten Lebak Tahun 2020 dan Tahun 2021	II-1
Tabel 2.2	Capaian Indikator Kinerja Kunci Keluaran Kab. Lebak	II-2
Tabel 2.3	Capaian Indikator Kinerja Kunci Hasil Kab. Lebak	II-31
Tabel 2.4	Capaian Indikator Kinerja Kunci Fungsi Penunjang Urusan Pemerintahan Kab. Lebak	II-39
Tabel 2.5	Perjanjian Kinerja Tahun 2021	II-41



Tabel 2.6	Perbandingan Capaian Kinerja Dengan Target Perjanjian Kinerja	II-42
Tabel 2.7	Capaian Kinerja Dibandingkan Dengan Tahun Sebelumnya	II-43
Tabel 2.8	Capaian Kinerja Dibandingkan Dengan Target Dalam Pembangunan Jangka Menengah	II-45
Tabel 2.9	Analisis Pencapaian Sasaran	II-46
Tabel 3.1	Matriks Capaian Kinerja Pelaksanaan Tugas Pembantuan Pusat yang Dilaksanakan oleh Daerah	III-6
Tabel 3.2	Matriks Capaian Kinerja Pelaksanaan Tugas Pembantuan Provinsi yang Dilaksanakan oleh Daerah	III-12
Tabel 4.1	Target Pencapaian Standar Pelayanan Minimal Urusan Pendidikan	IV-1
Tabel 4.2	Realisasi Pencapaian Standar Pelayanan Minimal Urusan Pendidikan	IV-2
Tabel 4.3	Jumlah Pegawai Dinas Pendidikan Kabupaten Lebak Tahun 2021	IV-2
Tabel 4.4	Target Pencapaian Standar Pelayanan Minimal Urusan Kesehatan	IV-5
Tabel 4.5	Realisasi Pencapaian Standar Pelayanan Minimal Urusan Kesehatan	IV-5
Tabel 4.6	Jumlah Tenaga Kesehatan di Kabupaten Lebak Tahun 2021	IV-6
Tabel 4.7	Target Pencapaian Standar Pelayanan Minimal Urusan Pekerjaan Umum	IV-10
Tabel 4.8	Realisasi Pencapaian Standar Pelayanan Minimal Urusan Pekerjaan Umum	IV-10
Tabel 4.9	Jumlah PNS dan Non PNS Dinas PUPR 2021	IV-11
Tabel 4.10	Target Pencapaian Standar Pelayanan Minimal Urusan Perumahan Rakyat	IV-12
Tabel 4.11	Realisasi Pencapaian Standar Pelayanan Minimal Urusan Perumahan Rakyat	IV-13
Tabel 4.12	Jumlah PNS dan Non PNS Dinas PRKPP 2021	IV-14
Tabel 4.13	Target Pencapaian Standar Pelayanan Minimal Urusan Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat	IV-15
Tabel 4.14	Realisasi Pencapaian Standar Pelayanan Minimal Urusan Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat	IV-15
Tabel 4.15	Target Pencapaian Standar Pelayanan Minimal Urusan Sosial	IV-19
Tabel 4.16	Realisasi Pencapaian Standar Pelayanan Minimal Urusan Sosial	IV-19
Tabel 4.17	Jumlah Tenaga Sosial Kabupaten Lebak Tahun 2021	IV-20
Tabel 4.18	Program dan Kegiatan Penunjang SPM	IV-22



BAB I PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) merupakan salah satu laporan yang wajib yang disusun dan disampaikan oleh Kepala Daerah sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 69 Undang Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) Kabupaten disampaikan oleh Bupati kepada Menteri Dalam Negeri melalui Gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat. Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) disampaikan paling lambat 3 (tiga) bulan setelah tahun anggaran berakhir dan akan digunakan sebagai bahan evaluasi dan pembinaan penyelenggaraan pemerintahan daerah oleh Pemerintah Pusat. Seluruh data dan informasi yang dimasukkan ke dalam Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) disusun berdasarkan prinsip transparansi, akuntabilitas, akurasi dan objektif.

Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (LPPD) Kabupaten Lebak Tahun Anggaran 2021 menggambarkan perkembangan pelaksanaan pembangunan pada Tahun Anggaran 2021. Dalam Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) Kabupaten Lebak Tahun Anggaran 2021 tertuang Visi, Misi, maupun strategi dan arah kebijakan yang dijabarkan dalam berbagai program dan kegiatan yang terukur yang disusun berdasarkan Rancangan Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Lebak Tahun 2021 dengan berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Lebak Tahun 2019-2024 dan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Lebak Tahun 2005-2025, yang memuat hasil penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang dilaksanakan Pemerintah Kabupaten Lebak selama tahun 2021. Selanjutnya sebagaimana diatur pada Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, bahwa ruang lingkup Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (LPPD) Kabupaten Lebak Tahun Anggaran 2021 memuat capaian kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah yang terdiri atas capaian kinerja makro, capaian kinerja penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah, dan capaian akuntabilitas kinerja pemerintah daerah serta capaian kinerja pelaksanaan tugas pembantuan. Untuk memenuhi kewajiban konstitusional tersebut, maka disusunlah Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) Kabupaten Lebak Tahun Anggaran 2021 untuk disampaikan kepada Pemerintah sebagai bahan evaluasi kinerja pemerintah daerah sehingga diketahui prestasinya secara nasional.



1.1.1. Penjelasan Umum

Sebagaimana diketahui bahwa Kabupaten Lebak bagian dari wilayah Kesultanan Banten dan tidak dapat dipisahkan dari sejarah Kesultanan Banten. Pada masa kependudukan Belanda di Indonesia tepatnya tanggal 19 Maret 1813, Kesultanan Banten dibagi 4 (empat) wilayah yaitu Wilayah Banten Lor, Wilayah Banten Kulon, Wilayah Banten Tengah dan Wilayah Banten Kidul. Pada tahun 1828 Pembagian Wilayah Keresidenan Banten mengalami perubahan berdasarkan Staatsblad Nomor 81 tahun 1828. Wilayah Keresidenan Banten dibagi menjadi 3 (tiga) Kabupaten yaitu Kabupaten Serang, Kabupaten Caringin dan Kabupaten Lebak.

Wilayah Kabupaten Lebak, berdasarkan pembagian diatas memiliki batas-batas yang meliputi District dan Onderdistrict yaitu :

1. District Sajira, yang terdiri dari Onderdistrict Ciangsa, Somang dan Onderdistrict Sajira;
2. District Lebak Parahiang, yang terdiri dari Onderdistrict Koncang dan Lebak Parahiang;
3. District Parungkujang, yang terdiri dari Onderdistrict Parungkujang dan Kosek;
4. District Madhour (Madur) yang terdiri dari Onderdisricit Binuangeun, Sawarna dan Berdasarkan Surat Keputusan Komisaris Onderdistrict Madhour (Madur).

Pada tahun yang sama Wilayah Kabupaten Lebak mengalami perubahan District Kembali dengan terbitnya Surat Keputusan Gubernur Jenderal Hindia Belanda tanggal 29 Oktober 1828, Staatsblad nomor 266 tahun 1828 diubah menjadi :

1. District Rangkasbitung, meliputi Onderdistrict Rangkasbitung, Kolelet Wetan, Warunggunung dan Onderdistrict Cikulur;
2. District Lebak, meliputi Onderdistrict Lebak, Muncang, Cilaki dan Cikeuyeup;
3. District Sajira meliputi Onderdistrict Sajira, Sajjah, Candi dan Maja;
4. District Parungkujang, meliputi Onderdistrict Parungkujang, Kumpay, Cileles dan Bojongmanik;
5. District Cilangkahan, meliputi Onderdistrict Cilangkahan, Ciplabuh, Cihara dan Bayah.

Pada tahun 1851, berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Jenderal Hindia Belanda Nomor 15 tanggal 17 Januari 1849, Ibukota Kabupaten Lebak yang saat itu berada di Warunggunung di pindahkan ke Rangkasbitung. Pelaksanaan pemindahannya secara resmi baru dilaksanakan pada tanggal 31 Maret 1851. Pada tanggal 14 Agustus 1925 Berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Jenderal Hindia Belanda, Staatsblad nomor 381 tahun 1925 Kabupaten Lebak menjadi daerah Pemerintahan yang berdiri sendiri dengan wilayah meliputi District Parungkujang, Rangkasbitung, Lebak dan Cilangkahan.

Setelah Indonesia merdeka tepatnya tanggal 8 Agustus 1950 berdasarkan Undang-Undang Nomor 14 tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah



Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Barat, Kabupaten Lebak menjadi bagian Karesidenan/Pembantu Gubernur Wilayah I Banten. Dan setelah ditetapkannya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Banten, maka secara resmi Karesidenan/Pembantu Gubernur Wilayah I Banten ditetapkan menjadi salah satu Provinsi dan Kabupaten Lebak berpisah dari Provinsi Jawa Barat bersama dengan Kabupaten Pandeglang, Kabupaten Serang, Kabupaten Tangerang, Kota Tangerang, Kota Cilegon. Kabupaten Lebak berbatasan dengan Kabupaten Serang dan Kabupaten Tangerang di utara, Kabupaten Bogor dan Kabupaten Sukabumi di timur, Samudra Hindia di selatan, serta Kabupaten Pandeglang di barat. Ibukota Kabupaten berada di Kecamatan Rangkasbitung, dengan Hari Jadi Kabupaten Lebak jatuh pada tanggal 2 Desember 1828 berdasarkan Keputusan DPRD nomor 14/172.2/D-II/SK/X/1986.

A. Undang-Undang Pembentukan Daerah

1. Undang-Undang Nomor 14 tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Barat;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Banten.

B. Data Geografis Wilayah

Data Geografis Wilayah meliputi paparan tentang kondisi geografis, batas administrasi daerah, kondisi topografi, kelerengan dan iklim di Kabupaten Lebak. Secara rinci mengenai hal-hal tersebut dipaparkan sebagai berikut :

1. Kondisi Geografis dan Batas Administrasi Daerah

Kabupaten Lebak merupakan salah satu Kabupaten yang terletak di Provinsi Banten. Kabupaten Lebak beribukota di Rangkasbitung yang secara geografis terletak pada koordinat $105^{\circ} 25' - 106^{\circ} 30'$ Bujur Timur dan antara $6^{\circ} 18' - 7^{\circ} 00'$ Lintang Selatan. Kabupaten Lebak terdiri dari 28 kecamatan, 340 desa dan 5 kelurahan. Berdasarkan Berita Acara Asistensi dan Supervisi Peta Dasar Revisi RTRW Kabupaten Lebak dengan Badan Informasi Geospasial pada tanggal 20 Desember 2018, maka hasil perhitungan luas wilayah Kabupaten Lebak dengan menggunakan batas wilayah terbaru menjadi 331.203,97 Ha berdasarkan :

- a. Permendagri No. 4 Th. 2016 tentang Batas Kabupaten Lebak dengan Kabupaten Pandeglang;
- b. Permendagri No. 43 Th. 2012 tentang Batas Kabupaten Lebak dengan Kabupaten Serang;
- c. Permendagri No. 47 Th. 2015 tentang Batas Kabupaten Lebak dengan Kabupaten Tangerang;
- d. Permendagri No. 55 Th. 2012 tentang Batas Kabupaten Lebak dengan Kabupaten Bogor;
- e. Permendagri No. 57 Th. 2012 tentang Batas Kabupaten Lebak dengan Kabupaten Sukabumi.

Adapun batas administrasi Kabupaten Lebak dengan wilayah lainnya adalah sebagai berikut :

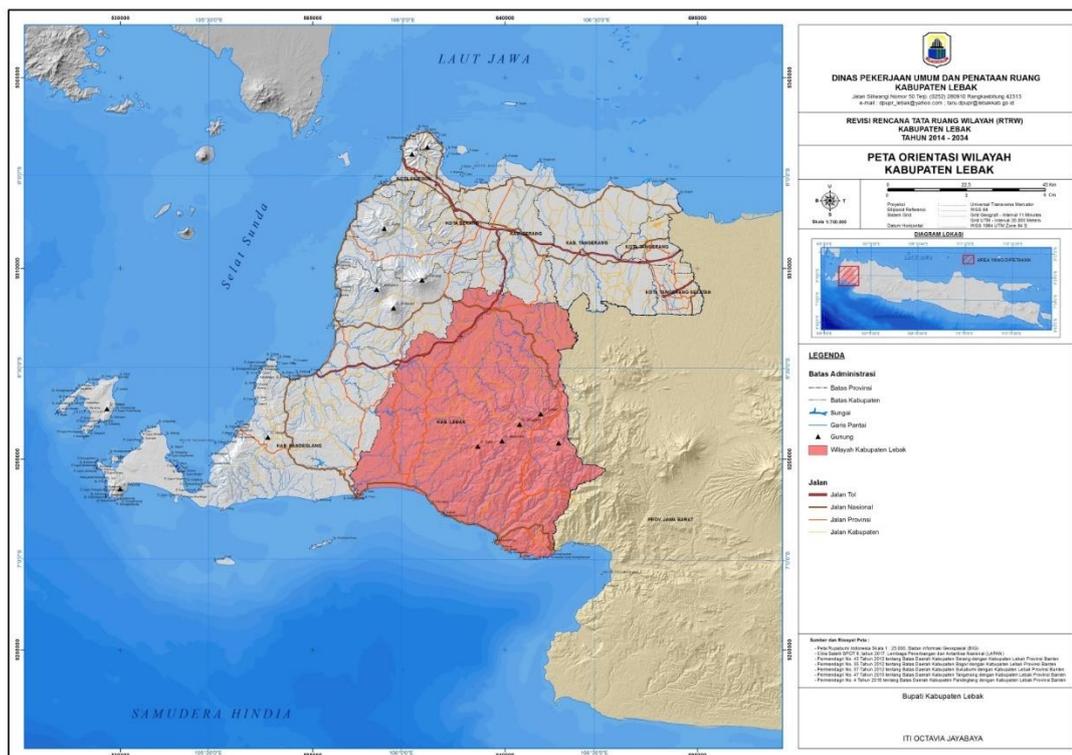
- a. Sebelah Utara berbatasan dengan Kab. Serang dan Kab. Tangerang;



- b. Sebelah Timur berbatasan dengan Kab. Bogor dan Kab. Sukabumi;
- c. Sebelah Barat berbatasan dengan Kabupaten Pandeglang;
- d. Sebelah Selatan berbatasan dengan Samudera Hindia.

Untuk lebih jelasnya mengenai administrasi Kabupaten Lebak dapat dilihat pada peta dan tabel berikut :

Gambar 1.1
Peta Orientasi Wilayah Kabupaten Lebak



Sumber : RTRW Kab. Lebak 2021-2041.

Dengan rincian luas wilayah perkecamatan sebagai berikut :

Tabel 1.1
Luas Kabupaten Lebak Menurut Kecamatan

NO.	Kecamatan	Lokasi Kantor Kecamatan	Jumlah		Luas Wilayah	
			Desa	Kelurahan	Ha	%
1	Banjarsari	Cidahu	20		15,185.97	4.59
2	Bayah	Bayah Barat	11		14,358.46	4.34
3	Bojongmanik	Bojongmanik	9		9,595.54	2.90
4	Cibadak	Pasarkeong	15		3,651.65	1.10
5	Cibeber	Warungbanten	22		40,115.25	12.11
6	Cigemblong	Cigemblong	9		15,310.82	4.62
7	Cihara	Cihara	9		12,443.43	3.76
8	Cijaku	Cijaku	10		11,473.67	3.46
9	Cikulur	Curugpanjang	13		5,462.52	1.65
10	Cileles	Cikareo	12		16,464.45	4.97
11	Cilograng	Gunungbatu	10		9,587.12	2.89



NO.	Kecamatan	Lokasi Kantor Kecamatan	Jumlah		Luas Wilayah	
			Desa	Kelurahan	Ha	%
12	Cimarga	Margajaya	17		18,711.22	5.65
13	Cipanas	Sipayung	14		6,594.18	1.99
14	Cirinten	Cirinten	10		12,259.93	3.70
15	Curugbitung	Curugbitung	10		9,134.51	2.76
16	Gunungkencana	Gunungkencana	12		14,148.57	4.27
17	Kalanganyar	Pasirkupa	7		2,890.26	0.87
18	Lebakgedong	Banjarsari	6		9,143.75	2.76
19	Leuwidamar	Lebak Parahiang	12		14,310.07	4.32
20	Maja	Maja	14		7,901.11	2.39
21	Malingping	Malingping Selatan	14		10,213.19	3.08
22	Muncang	Muncang	12		8,697.98	2.63
23	Panggarangan	Situregen	11		17,722.84	5.35
24	Rangkasbitung	Muara Ciujung Timur	11	5	7,376.26	2.23
25	Sajira	Sajira	10		10,469.34	3.16
26	Sobang	Sinarjaya	15		11,152.33	3.37
27	Wanasalam	Bejod	13		11,631.64	3.51
28	Warunggunung	Selaraja	12		5,197.88	1.57
Jumlah			340	5	331.203,97	100

Sumber : RTRW Kab. Lebak 2021-2041.

2. Kondisi Topografi

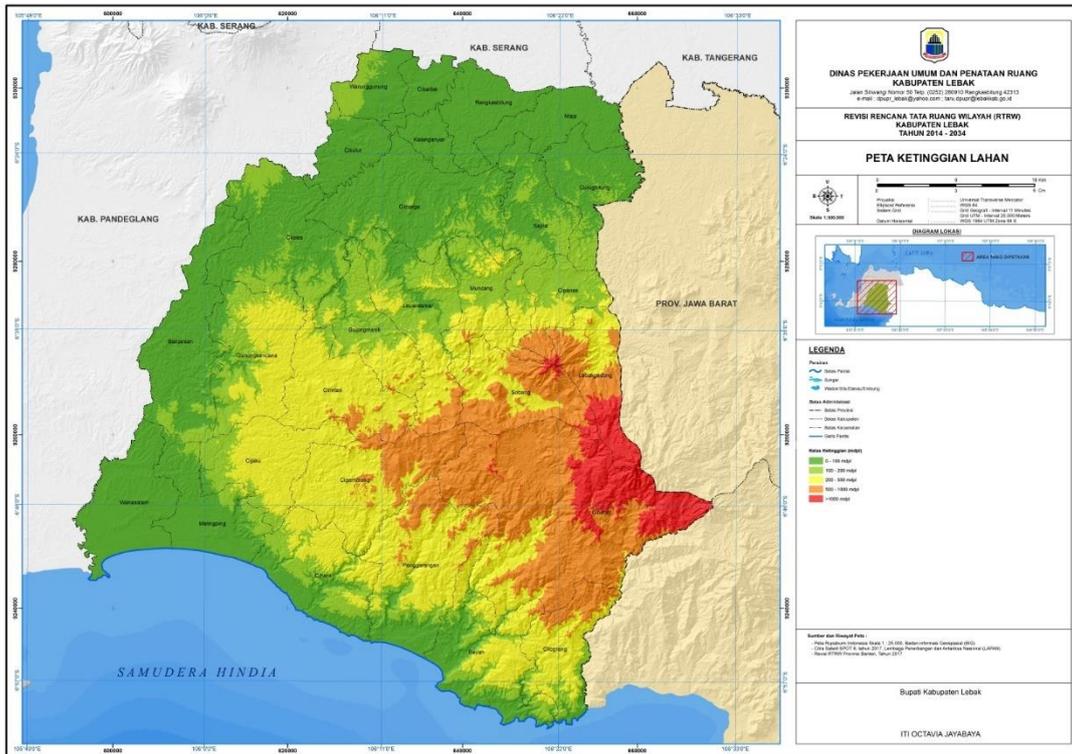
Kabupaten Lebak mempunyai keadaan topografi cukup bervariasi, mulai dari dataran tinggi hingga dataran yang relatif rendah di bagian utara dan selatan, dengan ketinggian berkisar antara 0 meter hingga di atas 1.000 meter dari permukaan laut. Daerah dengan ketinggian antara 0 sampai 500 meter di atas permukaan laut meliputi sekitar 80,62%, kawasan yang berada pada ketinggian 500 sampai 1.000 meter meliputi 15,66 % dan kawasan yang berada pada ketinggian lebih dari 1.000 meter sekitar 3,74% dari luas keseluruhan. Ketinggian wilayah dapat diklasifikasikan kedalam tiga kelas ketinggian, yaitu :

- Ketinggian antara 0-500 meter di atas permukaan air laut, tersebar di seluruh Kecamatan;
- Ketinggian antara 500-1.000 meter di atas permukaan air laut; tersebar di sebagian Kecamatan Bayah, Bojongmanik, Cibeber, Cijaku, Cileles, Cilograng, Cipanas, Gunungkencana, Lebakgedong, Leuwidamar, Panggarangan, Muncang, Panggarangan, Sajira dan Sobang;
- Ketinggian lebih dari 1.000 meter di atas permukaan air laut. Tersebar di sebagian kecil Kecamatan Cibeber, Cipanas, Muncang dan Sobang.

Keadaan topografi berdasarkan kecamatan dapat dilihat pada peta dan tabel berikut ini :



Gambar 1.2
Peta Kondisi Topografi Kabupaten Lebak



Sumber : RTRW Kab. Lebak 2021-2041.

Dengan rincian topografi wilayah perkecamatan sebagai berikut :

Tabel 1.2
Ketinggian Wilayah Menurut Kecamatan

NO.	KECAMATAN	Ketinggian (mdpl)					Jumlah
		0 - 100	100 - 200	200 - 500	500 - 1000	>1000	
1	Banjarsari	13,561.76	1,624.21				15,185.97
2	Bayah	5,095.85	3,506.50	5,416.59	339.53		14,358.46
3	Bojongmanik	553.03	5,196.18	3,721.48	124.85		9,595.54
4	Cibadak	3,651.65					3,651.65
5	Cibeber	16.31	249.78	4,930.22	26,034.78	8,884.17	40,115.25
6	Cigemblong		87.58	9,977.54	5,245.71		15,310.82
7	Cihara	4,289.93	3,942.88	4,210.62			12,443.43
8	Cijaku	406.68	2,777.89	8,182.55	106.54		11,473.67
9	Cikukur	5,184.93	277.59				5,462.52
10	Cileles	11,493.00	4,902.12	69.01	0.32		16,464.46
11	Cilograng	685.36	1,499.59	5,156.41	2,245.76		9,587.12
12	Cimarga	15,752.03	2,787.11	172.08			18,711.22
13	Cipanas	41.19	3,875.52	1,712.59	909.23	55.65	6,594.18
14	Cirinten		403.22	10,517.24	1,339.48		12,259.93
15	Curugbitung	7,032.97	2,093.24	8.30			9,134.51
16	Gunungkencana	1,811.28	5,230.79	7,048.94	1.85		14,092.86
17	Kalanganyar	2,890.26					2,890.26
18	Lebakgedong	126.46	126.48	2,777.53	3,532.87	2,706.87	9,270.21
19	Leuwidamar	2,199.92	6,387.24	4,167.30	1,555.62		14,310.07
20	Maja	7,901.11					7,901.11
21	Malingping	8,458.70	1,637.21	117.27			10,213.19
22	Muncang	384.66	3,665.80	4,079.48	510.01	58.03	8,697.98



NO.	KECAMATAN	Ketinggian (mdpl)					Jumlah
		0 - 100	100 - 200	200 - 500	500 - 1000	>1000	
23	Panggarangan	2,936.49	1,781.42	9,837.32	3,167.62		17,722.84
24	Rangkasbitung	7,376.22	0.04				7,376.26
25	Sajira	5,381.07	4,050.52	1,021.19	16.56		10,469.35
26	Sobang			3,731.11	6,733.43	687.80	11,152.33
27	Wanasalam	11,620.45	11.19				11,631.64
28	Warunggunung	3,220.64	1,977.24				5,197.88
JUMLAH		122,071.95	58,091.36	86,854.77	51,864.13	12,392.51	331,203.97

Sumber : RTRW Kab. Lebak 2021-2041.

3. Kelerengan

Selain dilihat dari ketinggian wilayah, topografi Kabupaten Lebak juga dilihat dari Angka kelerengan, dari hasil data yang didapat, angka kelerengan curam atau diatas 40% yang ada di Kabupaten Lebak hanya berkisar 12.169,95 ha atau hanya 3,68% dari luas wilayah. Dengan demikian, maka sebagian besar wilayah yang ada di Kabupaten Lebak, secara umum mudah untuk dikembangkan untuk berbagai kegiatan.

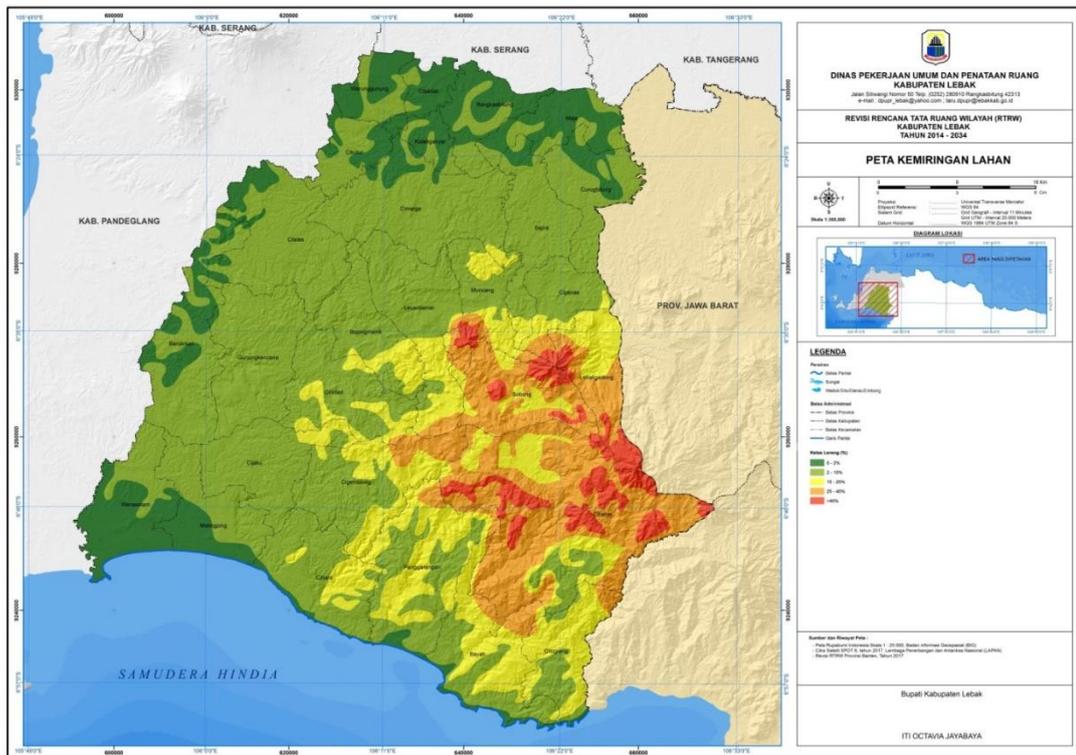
Untuk sebaran kelas lereng di Kabupaten Lebak, antara lain sebagai berikut:

- 0 – 2%, tersebar di bagian selatan, barat dan utara Kabupaten Lebak
- 2 – 5%, tersebar di bagian selatan, barat dan utara Kabupaten Lebak
- 5 – 15%, tersebar di bagian tengah dan selatan ke arah timur Kabupaten Lebak
- 15 – 25%, tersebar di bagian tengah dan selatan ke arah timur Kabupaten Lebak
- 25 – 40%, terletak di bagian timur Kabupaten Lebak
- >40%, terletak di bagian timur Kabupaten Lebak.

Pembagian klasifikasi mengenai luas wilayah berdasarkan kelerengan, dapat dilihat pada peta dan tabel berikut :



Gambar 1.3
Peta Kemiringan Kabupaten Lebak



Sumber : RTRW Kab. Lebak 2021-2041.

Dengan rincian kelerengan wilayah perkecamatan sebagai berikut :

Tabel 1.3
Kelerengan Wilayah Kabupaten Lebak Menurut Kecamatan

NO.	KECAMATAN	Kelerengan / kemiringan lahan					Jumlah
		0 - 2%	2 - 15%	15 - 25%	25 - 40%	>40%	
1.	Banjarsari	4,767.19	10,418.78				15,185.97
2.	Bayah	973.68	5,454.77	6,417.88	1,512.14		14,358.46
3.	Bojongmanik		7,467.36	2,128.18			9,595.54
4.	Cibadak	3,152.95	498.70				3,651.65
5.	Cibeber		2,673.03	6,237.25	23,902.38	7,302.60	40,115.25
6.	Cigemblong		7,419.32	5,513.63	2,377.87		15,310.82
7.	Cihara	658.39	9,260.31	2,524.73			12,443.43
8.	Cijaku		10,387.73	1,085.94			11,473.67
9.	Cikulur	1,907.46	3,555.06				5,462.52
10.	Cileles	2,264.81	14,199.65				16,464.45
11.	Cilograng	160.03	2,694.47	6,037.00	695.64		9,587.12
12.	Cimarga	1,656.47	16,651.49	403.26			18,711.22
13.	Cipanas		4,771.61	1,066.36	510.07	246.14	6,594.18
14.	Cirinten		9,240.88	2,908.18	110.87		12,259.93
15.	Curugbitung	1,823.15	7,311.36				9,134.51
16.	Gunungkenca	145.00	14,003.57				14,148.57
17.	Kalanganyar	1,830.28	1,059.98				2,890.26
18.	Lebakgedong		56.70	3,502.18	3,597.00	1,987.87	9,143.75
19.	Leuwidamar		9,992.54	3,379.65	922.29	15.59	14,310.07
20.	Maja	5,275.50	2,625.61				7,901.11
21.	Malingping	3,510.04	6,703.14				10,213.19
22.	Muncang		3,710.50	2,796.14	1,453.48	737.86	8,697.98



NO.	KECAMATAN	Kelerengan / kemiringan lahan					Jumlah
		0 - 2%	2 - 15%	15 - 25%	25 - 40%	>40%	
23.	Panggarangan	605.73	7,679.69	8,323.34	1,075.40	38.68	17,722.84
24.	Rangkasbitung	4,638.96	2,737.30				7,376.26
25.	Sajira	637.41	9,232.18	599.76			10,469.34
26.	Sobang			1,853.38	7,455.01	1,843.94	11,152.33
27.	Wanasalam	7,940.35	3,691.29				11,631.64
28.	Warunggunung	3,273.03	1,924.86				5,197.88
JUMLAH		45,220.41	175,421.87	54,776.86	43,612.14	12,172.68	331,203.97

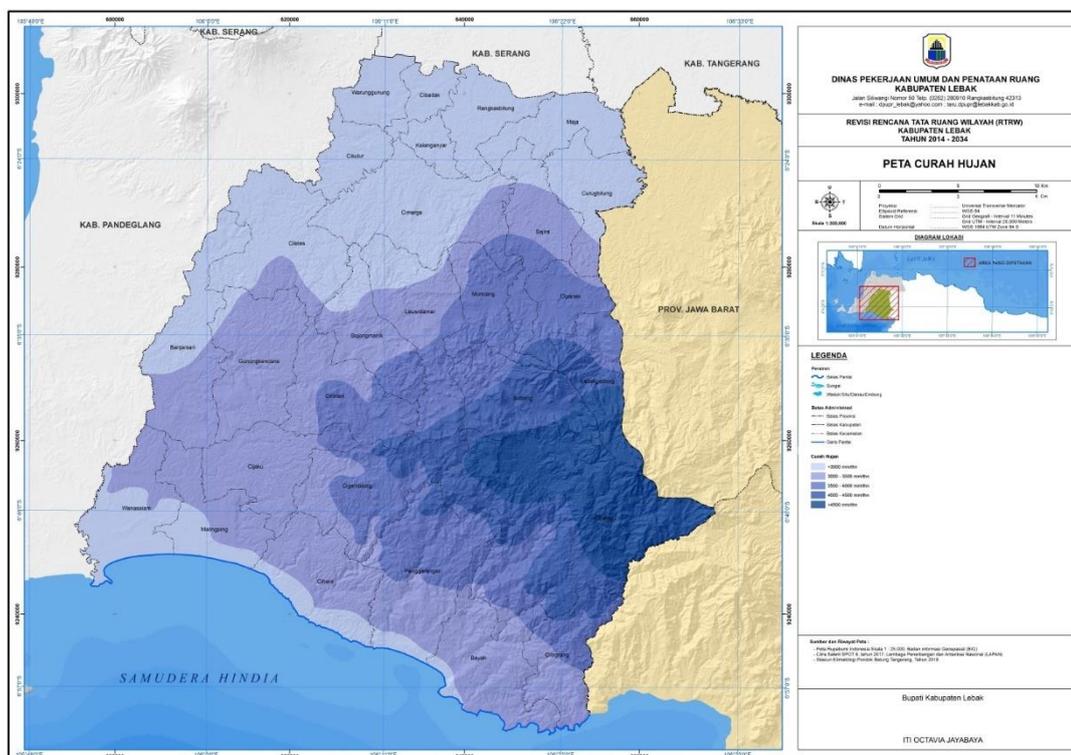
Sumber : RTRW Kab. Lebak 2021-2041.

4. Iklim

Suhu udara di wilayah perencanaan berkisar antara 22,1° celsius sampai dengan 33,1° celsius. Sedangkan suhu udara rata-rata di daratan rendah 23,8° celsius dan suhu rata-rata dataran tinggi adalah 27,0° celsius.

Curah hujan di Kabupaten Lebak adalah masuk dalam kategori signifikan, dengan presipitasi bahkan selama bulan terkering. Iklim ini dianggap menjadi Af menurut klasifikasi iklim Köppen-Geiger. Untuk lebih jelasnya mengenai curah hujan di Kabupaten Lebak dapat dilihat pada Gambar dan Tabel berikut :

Gambar 1.4
Peta Curah Hujan Kabupaten Lebak



Sumber : RTRW Kab. Lebak 2021-2041.

Dengan rincian iklim perkecamatan sebagai berikut:



Tabel 1.4
Morfologi Wilayah Kabupaten Lebak Menurut Kecamatan

NO.	KECAMATAN	Luas Curah Hujan Per Kecamatan (Ha)					JUMLAH
		<3000 mm/thn	3000 - 3500 mm/thn	3500 - 4000 mm/thn	4000 - 4500 mm/thn	>4500 mm/thn	
1	Banjarsari	8,116.01	7,069.96				15,185.97
2	Bayah	803.50	12,187.72	1,356.92	10.32		14,358.46
3	Bojongmanik	1,846.07	5,295.26	2,454.21			9,595.54
4	Cibadak	3,651.65					3,651.65
5	Cibeber		806.14	5,207.04	11,689.12	22,412.93	40,115.25
6	Cigemblong		5,052.44	6,646.94	3,611.45		15,310.82
7	Cihara	3,576.60	8,862.84	3.99			12,443.43
8	Cijaku		10,377.97	1,095.70			11,473.67
9	Cikukur	5,462.52					5,462.52
10	Cileles	13,996.83	2,467.63				16,464.46
11	Cilograng		4,811.33	3,372.21	1,403.58		9,587.12
12	Cimarga	15,301.69	2,539.81	869.71			18,711.22
13	Cipanas		366.82	5,433.15	794.21		6,594.18
14	Cirinten		6,148.29	5,833.03	278.61		12,259.93
15	Curugbitung	7,610.21	1,524.29				9,134.50
16	Gunungkencana	771.16	13,377.41				14,148.57
17	Kalanganyar	2,890.26					2,890.26
18	Lebakgedong			2,988.94	2,725.97	3,428.85	9,143.75
19	Leuwidamar	3,376.36	5,456.10	4,425.56	1,052.06		14,310.07
20	Maja	7,901.11					7,901.11
21	Malingping	3,449.50	6,763.69				10,213.19
22	Muncang	23.34	1,147.51	7,129.12	398.01		8,697.98
23	Panggarangan	1,236.51	6,455.19	8,797.66	1,233.49		17,722.84
24	Rangkasbitung	7,376.26					7,376.26
25	Sajira	2,096.11	4,885.25	3,487.99			10,469.34
26	Sobang			2,369.20	7,194.25	1,588.89	11,152.33
27	Wanasalam	7,900.06	3,731.58				11,631.64
28	Warunggunung	5,197.88					5,197.88
JUMLAH		102,583.64	109,327.23	61,471.38	30,391.06	27,430.67	331,203.97

Sumber : RTRW Kab. Lebak 2021-2041.

C. Jumlah Penduduk

Jumlah penduduk meliputi paparan tentang jumlah penduduk dan komposisi penduduk menurut jenis kelamin per kecamatan, struktur usia, jumlah penduduk menurut jenis pekerjaan per jenis kelamin serta jumlah penduduk menurut pendidikan per jenis kelamin di Kabupaten Lebak. Secara rinci mengenai hal-hal tersebut dipaparkan sebagai berikut :

1. Jumlah Penduduk dan Komposisi Penduduk menurut Jenis Kelamin per Kecamatan

Perkembangan jumlah penduduk Kabupaten Lebak pada tahun 2021 menurut sumber data Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lebak dari hasil pembersihan Dirjen Dukcapil adalah sebanyak 1.441.291 jiwa atau bertambah 4,12% dari tahun sebelumnya, yang terdiri dari laki-laki 739.913 jiwa (51,34%) dan perempuan 701.378 jiwa (48,66%). Penduduk Kabupaten Lebak tersebut tersebar di 28 (dua puluh delapan) Kecamatan. Komposisi Penduduk Kabupaten Lebak menurut jenis kelamin di tiap kecamatan adalah sebagaimana tabel di bawah ini :



Tabel 1.5
Penduduk Kabupaten Lebak Menurut Jenis Kelamin
Per Kecamatan Tahun 2021

NO	KECAMATAN	JENIS KELAMIN				PENDUDUK	
		LAKI-LAKI		PEREMPUAN		n (Jiwa)	%
		n (Jiwa)	%	n (Jiwa)	%		
1	BANJARSARI	34.931	2,42	32.841	2,28	67.772	4,70
2	BAYAH	23.811	1,65	23.063	1,60	46.874	3,25
3	BOJONGMANIK	12.945	0,90	12.323	0,85	25.268	1,75
4	CIBADAK	37.727	2,62	35.643	2,47	73.370	5,09
5	CIBEBER	29.815	2,07	28.533	1,98	58.348	4,05
6	CIGEMBLONG	11.778	0,82	10.798	0,75	22.576	1,57
7	CIHARA	17.610	1,22	16.931	1,17	34.541	2,40
8	CIJAKU	16.390	1,14	15.483	1,07	31.873	2,21
9	CIKULUR	31.681	2,20	29.446	2,04	61.127	4,24
10	CILELES	29.384	2,04	27.604	1,92	56.988	3,95
11	CILOGRANG	18.836	1,31	17.754	1,23	36.590	2,54
12	CIMARGA	38.042	2,64	35.907	2,49	73.949	5,13
13	CIPANAS	26.717	1,85	25.692	1,78	52.409	3,64
14	CIRINTEN	15.716	1,09	14.572	1,01	30.288	2,10
15	CURUG BITUNG	19.517	1,35	18.089	1,26	37.606	2,61
16	GUNUNG KENCANA	20.276	1,41	19.216	1,33	39.492	2,74
17	KALANGANYAR	20.610	1,43	19.346	1,34	39.956	2,77
18	LEBAKGEDONG	11.049	0,77	10.825	0,75	21.874	1,52
19	LEUWIDAMAR	29.820	2,07	27.568	1,91	57.388	3,98
20	MAJA	32.077	2,23	30.111	2,09	62.188	4,31
21	MALINGPING	37.644	2,61	36.489	2,53	74.133	5,14
22	MUNCANG	20.004	1,39	18.742	1,30	38.746	2,69
23	PANGGARANGAN	20.794	1,44	19.911	1,38	40.705	2,82
24	RANGKASBITUNG	71.296	4,95	68.805	4,77	140.101	9,72
25	SAJIRA	29.978	2,08	28.821	2,00	58.799	4,08
26	SOBANG	16.627	1,15	15.743	1,09	32.370	2,25
27	WANASALAM	31.381	2,18	29.570	2,05	60.951	4,23
28	WARUNGGUNUNG	33.457	2,32	31.552	2,19	65.009	4,51
KAB LEBAK		739.913	51,34	701.378	48,66	1.441.291	100,00

Sumber : Disdukcapil Kab. Lebak hasil pembersihan Dirjen Dukcapil Semester II Tahun 2021.

Dari tabel di atas, dapat dilihat bahwa jumlah penduduk Kabupaten Lebak paling banyak berada di Kecamatan Rangkasbitung dengan jumlah yaitu 140.101 jiwa atau sekitar 9,72% dari total penduduk Kabupaten Lebak. Hal ini disebabkan karena wilayah Kecamatan Rangkasbitung adalah wilayah perkotaan Kabupaten. Pembangunan perumahan baru, perkantoran, perdagangan dan transportasi berada di wilayah Kecamatan ini. Faktor tersebut menyebabkan penduduk Kabupaten Lebak terutama pendatang lebih memilih untuk bertempat tinggal di wilayah Kecamatan Rangkasbitung. Sebaliknya wilayah Kecamatan Lebakgedong mempunyai jumlah penduduk paling sedikit yaitu 21.874 jiwa atau 1,52% dari total penduduk Kabupaten Lebak.



2. Struktur Usia

Kelompok umur di Kabupaten Lebak menunjukkan bahwa Penduduk Kabupaten Lebak sebagian besar merupakan Penduduk Produktif yaitu kelompok umur antara 15-64 tahun jika di total mencapai 985.018 jiwa atau 68,34% dari jumlah penduduk yang ada di Kabupaten Lebak. Kondisi ini sangat menguntungkan karena sebagian besar merupakan penduduk usia kerja (usia produktif), namun harus menjadi perhatian karena kelompok ini akan menjadi entry tenaga kerja baru, yang memerlukan skill dan kualitas SDM yang memadai baik ketrampilan maupun etos kerja dan kepribadian dan sisanya sebanyak 27,06% merupakan penduduk usia muda (berusia dibawah 15 tahun) dan 4,60% merupakan penduduk lanjut usia (65 tahun ke atas).

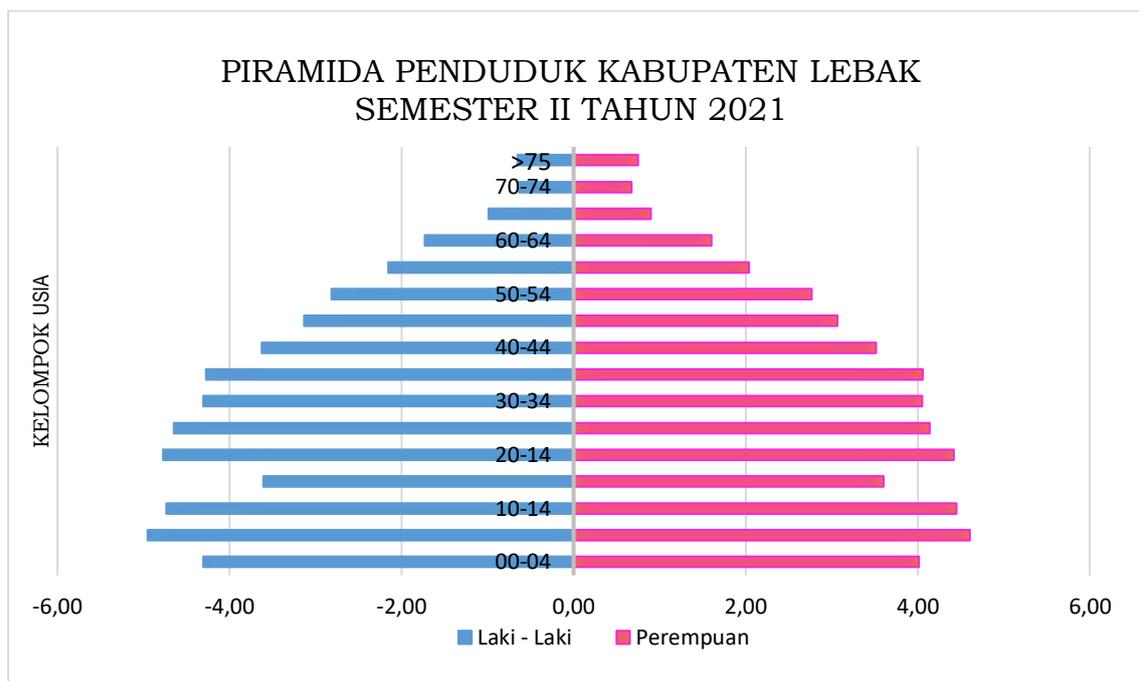
Tabel 1.6
Jumlah dan Proporsi Penduduk Berdasarkan Kelompok Umur dan Jenis Kelamin Kabupaten Lebak Tahun 2021

NO.	KELOMPOK UMUR	JENIS KELAMIN				Penduduk	
		LAKI-LAKI		PEREMPUAN		n (Jiwa)	%
		n (Jiwa)	%	n (Jiwa)	%		
1	00-04	62.014	4,30	57.892	4,01	119.906	8,31
2	05-09	71.378	4,95	66.380	4,60	137.758	9,55
3	10-14	68.247	4,73	64.120	4,45	132.367	9,18
4	15-19	51.977	3,60	51.965	3,60	103.942	7,21
5	20-24	68.815	4,77	63.677	4,41	132.492	9,19
6	25-29	66.952	4,64	59.627	4,13	126.579	8,78
7	30-34	62.082	4,30	58.411	4,05	120.493	8,36
8	35-39	61.583	4,27	58.504	4,06	120.087	8,33
9	40-44	52.268	3,63	50.693	3,51	102.961	7,14
10	45-49	45.147	3,13	44.245	3,07	89.392	6,20
11	50-54	40.616	2,81	39.901	2,76	80.517	5,58
12	55-59	31.076	2,15	29.379	2,03	60.455	4,19
13	60-64	24.973	1,73	23.127	1,60	48.100	3,33
14	65-69	14.242	0,98	12.928	0,89	27.170	1,88
15	70-74	9.105	0,63	9.696	0,67	18.801	1,30
16	> 75	9.438	0,64	10.833	0,75	20.271	1,40
TOTAL		739.913	51,34	701.378	48,66	1.441.291	100

Sumber: Disdukcapil Kab. Lebak hasil pembersihan Dirjen Dukcapil Semester II Tahun 2021.

Struktur umur penduduk menurut jenis kelamin dapat digambarkan dalam bentuk piramida penduduk. Dasar piramida penduduk menunjukkan jumlah penduduk, dan badan piramida penduduk bagian kiri dan kanan menunjukkan banyaknya penduduk laki-laki dan perempuan menurut kelompok umur lima tahunan.

Gambar 1.5
Piramida Penduduk



Sumber: Disdukcapil Kab. Lebak hasil pembersihan Dirjen Dukcapil Semester II Tahun 2021.

Grafik piramida penduduk di atas menunjukkan bahwa apabila dikelompokkan kembali, berdasarkan kelompok umur 0-4 tahun (balita) hanya sekitar 8,31% dari jumlah penduduk, kelompok umur 5-14 tahun sekitar 18,74%, sementara persentase terbesar pada kelompok 15-64 tahun (usia kerja/produktif) yaitu mencapai 68,34%, sedangkan untuk kelompok >65 tahun sekitar 4,59%. Komposisi terbesar penduduk Kabupaten Lebak adalah usia kerja/produktif, setidaknya secara ekonomi beban yang harus ditanggung akan lebih kecil. Hal tersebut bisa tercapai apabila didukung dengan sumberdaya manusia yang lebih baik dan memadai.

3. Jumlah Penduduk Menurut Jenis Pekerjaan Per Jenis Kelamin

Struktur ketenagakerjaan di Kabupaten Lebak mengalami perubahan yang signifikan. Jumlah penduduk yang bekerja mengalami kenaikan setiap tahunnya. Informasi mengenai Jumlah Penduduk Menurut Jenis Pekerjaan dapat menggambarkan Sektor Pekerjaan apa saja yang digeluti oleh Sebagian Besar Penduduk di Kabupaten Lebak. Informasi mengenai Jumlah Penduduk Menurut Jenis pekerjaan dapat di sajikan melalui Tabel berikut :



Tabel 1.7
Jumlah Penduduk berdasarkan Pekerjaan
Per Jenis Kelamin Kabupaten Lebak Tahun 2021

NO	JENIS PEKERJAAN	JENIS KELAMIN				JUMLAH	
		LAKI-LAKI		PEREMPUAN		n (jiwa)	%
		n (jiwa)	%	n (jiwa)	%		
1	Belum/Tidak Bekerja	215.694	14,96	176.804	12,26	392.498	27,23
2	Mengurus Rumah Tangga	-	0,00	380.903	26,42	380.903	26,42
3	Pelajar/Mahasiswa	125.346	8,69	99.619	6,91	224.965	15,60
4	Pensiunan	2.898	0,20	1.055	0,07	3.953	0,27
5	Pegawai Negeri Sipil	6.855	0,47	4.619	0,32	11.474	0,79
6	Tentara Nasional Indonesia	800	0,05	4	0,00	804	0,05
7	Kepolisian RI	787	0,05	33	0,00	820	0,05
8	Perdagangan	634	0,04	164	0,01	798	0,05
9	Petani/Pekebun	84.626	5,87	12.197	0,84	96.823	6,71
10	Peternak	41	0,00	7	0,00	48	0,00
11	Nelayan/Perikanan	1.265	0,08	3	0,00	1.268	0,08
12	Industri	34	0,00	8	0,00	42	0,00
13	Konstruksi	47	0,00	2	0,00	49	0,00
14	Transportasi	132	0,00	-	0,00	132	0,00
15	Karyawan Swasta	28.357	1,97	5.400	0,37	33.757	2,34
16	Karyawan BUMN	1.013	0,07	149	0,01	1.162	0,08
17	Karyawan BUMD	135	0,00	60	0,00	195	0,00
18	Karyawan Honoror	2.695	0,18	2.266	0,15	4.961	0,34
19	Buruh Harian Lepas	131.249	9,10	5.485	0,38	136.734	9,48
20	Buruh Tani/Perkebunan	13.191	0,91	1.639	0,11	14.830	1,02
21	Buruh Nelayan/Perikanan	887	0,06	13	0,00	900	0,06
22	Buruh Peternakan	51	0,00	5	0,00	56	0,00
23	Pembantu Rumah Tangga	11	0,00	409	0,02	420	0,02
24	Tukang Cukur	13	0,00	-	0,00	13	0,00
25	Tukang Listrik	19	0,00	1	0,00	20	0,00
26	Tukang Batu	26	0,00	-	0,00	26	0,00
27	Tukang Kayu	102	0,00	-	0,00	102	0,00
28	Tukang Sol Sepatu	3	0,00	-	0,00	3	0,00
29	Tukang Las/Pandai Besi	78	0,00	1	0,00	79	0,00
30	Tukang Jahit	81	0,00	14	0,00	95	0,00
31	Tukang Gigi	2	0,00	-	0,00	2	0,00
32	Penata Rias	4	0,00	7	0,00	11	0,00
33	Penata Busana	5	0,00	-	0,00	5	0,00
34	Penata Rambut	2	0,00	2	0,00	4	0,00
35	Mekanik	85	0,00	-	0,00	85	0,00
36	Seniman	21	0,00	2	0,00	23	0,00
37	Tabib	2	0,00	-	0,00	2	0,00
38	Paraji	-	0,00	29	0,00	29	0,00
40	Penterjemah	-	0,00	2	0,00	2	0,00
41	Imam Masjid	31	0,00	-	0,00	31	0,00
42	Pendeta	3	0,00	1	0,00	4	0,00
44	Wartawan	48	0,00	1	0,00	49	0,00
45	Ustadz/Mubaligh	791	0,05	40	0,00	831	0,05
46	Juru Masak	2	0,00	2	0,00	4	0,00
48	Anggota DPR-RI	1	0,00	-	0,00	1	0,00
49	Anggota BPK	-	0,00	-	0,00	-	0,00



NO	JENIS PEKERJAAN	JENIS KELAMIN				JUMLAH	
		LAKI-LAKI		PEREMPUAN		n (jiwa)	%
		n (jiwa)	%	n (jiwa)	%		
50	Bupati	-	0,00	1	0,00	-	0,00
58	Wakil Bupati	1	0,00	-	0,00	1	0,00
59	Anggota DPRD Provinsi	2	0,00	-	0,00	2	0,00
62	Anggota DPRD Kabupaten/Kota	14	0,00	-	0,00	14	0,00
63	Dosen	76	0,00	3	0,00	79	0,00
64	Guru	1.732	0,12	57	0,00	1.789	0,12
65	Pengacara	11	0,00	2.202	0,15	2.213	0,15
67	Notaris	5	0,00	3	0,00	8	0,00
68	Arsitek	3	0,00	1	0,00	4	0,00
69	Akuntan	-	0,00	-	0,00	-	0,00
70	Konsultan	20	0,00	1	0,00	21	0,00
71	Dokter	59	0,00	3	0,00	62	0,00
72	Bidan	-	0,00	81	0,00	81	0,00
73	Perawat	433	0,03	1.007	0,06	1.440	0,09
74	Apoteker	6	0,00	847	0,05	853	0,05
75	Psikiater/Psikolog	1	0,00	20	0,00	21	0,00
76	Penyiar Televisi	-	0,00	1	0,00	1	0,00
78	Penyiar Radio	-	0,00	-	0,00	-	0,00
79	Pelaut	41	0,00	1	0,00	42	0,00
80	Peneliti	22	0,00	2	0,00	24	0,00
81	Sopir	5.112	0,35	3	0,00	5.115	0,35
83	Paranormal	2	0,00	-	0,00	2	0,00
84	Pedagang	4.422	0,30	1.058	0,07	5.480	0,37
85	Perangkat Desa	419	0,03	88	0,00	507	0,03
86	Kepala Desa	93	0,00	4	0,00	97	0,00
87	Biarawati	-	0,00	-	0,00	-	0,00
88	Wiraswasta	108.700	7,54	5.219	0,36	113.919	7,90
89	Lainnya	672	0,04	190	0,01	862	0,05
JUMLAH		739.913	51,33	701.378	48,67	1.441.291	100,00

Sumber: Disdukcapil Kab. Lebak hasil pembersihan Dirjen Dukcapil Semester II Tahun 2021.

Dilihat dari Jenis Pekerjaan yang dilakukan oleh penduduk Kabupaten Lebak nampak proporsi laki-laki yang bekerja (51,33%) lebih besar dibandingkan penduduk perempuan yang bekerja (48,67%). Hal ini menunjukkan bahwa peran dan fungsi laki-laki adalah penanggungjawab ekonomi keluarga sehingga lebih banyak yang harus terjun ke pasar kerja, sementara perempuan biasanya hanya berfungsi sebagai ibu rumah tangga yang bertanggungjawab atas terselenggaranya keluarga yang bersangkutan. Meskipun demikian, perempuan pada masa kini mulai ikut terjun ke pasar kerja.

4. Jumlah Penduduk Menurut Pendidikan Per Jenis Kelamin

Tingginya rata-rata tingkat pendidikan masyarakat sangat penting bagi kesiapan bangsa menghadapi tantangan global di masa depan. Tingkat pendidikan yang lebih tinggi akan memudahkan seseorang atau masyarakat untuk menyerap informasi dan mengimplementasikannya dalam perilaku dan gaya hidup sehari-hari. Tingkat pendidikan formal membentuk nilai



bagi masyarakat terutama dalam menerima hal baru karena masyarakat merupakan target sekaligus pelaku pembangunan. Hasil pembangunan muaranya adalah meningkatnya kesejahteraan penduduk dan meningkatnya kualitas sumber daya manusia. Sumber daya manusia yang berkualitas akan lebih memacu pergerakan roda pembangunan. Semakin tinggi tingkat pendidikan yang ditamatkan semakin baik kualitas sumber daya manusia di wilayah tersebut. Secara rinci komposisi penduduk berdasarkan pendidikan adalah sebagai berikut :

Tabel 1.8
Jumlah Penduduk Menurut Pendidikan Terakhir Per Jenis Kelamin
Kabupaten Lebak Tahun 2021

NO	PENDIDIKAN TERAKHIR	JENIS KELAMIN				JUMLAH	
		LAKI-LAKI	%	PEREMPUAN	%	(n)	%
1	Tidak/Belum Sekolah	185.178	12,85	176.117	12,21	361.295	25,06
2	Belum Tamat SD/Sederajat	73.417	5,09	68.657	4,76	142.074	9,86
3	Tamat SD/Sederajat	281.271	19,51	298.610	20,71	579.881	40,23
4	SLTP/Sederajat	100.866	7,00	85.977	5,96	186.843	12,96
5	SLTA/Sederajat	82.035	5,69	56.314	3,90	138.349	9,60
6	Diploma I/II	1.423	0,10	1.410	0,10	2.833	0,20
7	Akademi/Diploma III/S. Muda	2.164	0,15	3.218	0,22	5.382	0,37
8	Diploma IV/Strata I	12.544	0,87	10.685	0,74	23.229	1,61
9	Strata II	965	0,067	366	0,025	1.331	0,092
10	Strata III	50	0,003	24	0,001	74	0,005
JUMLAH		739.913	51,34	701.378	48,66	1.441.291	100,00

Sumber: Disdukcapil Kab. Lebak hasil pembersihan Dirjen Dukcapil Semester II Tahun 2021.

Dari Tabel di atas, bahwa Jenjang Pendidikan untuk Penduduk Kabupaten Lebak masih didominasi oleh Tamat SD/Sederajat yaitu sebanyak 579.881 jiwa atau 40,23% dari seluruh penduduk Kabupaten Lebak. Sedangkan penduduk yang memiliki pendidikan terakhir Strata III berjumlah 74 jiwa. Pemerintah Kabupaten Lebak perlu memperhatikan kondisi diatas mengingat bahwa di era globalisasi berlangsung persaingan untuk mendapatkan pekerjaan lebih ketat. Peningkatan pendidikan vocational, akses pendidikan terutama untuk penduduk miskin, perlu dilakukan mengingat bahwa sebagian besar peluang kerja membutuhkan tenaga terdidik yang memiliki keterampilan khusus.

D. Jumlah Kecamatan Dan Desa/Kelurahan

Wilayah administrasi Kabupaten Lebak terdiri dari 28 kecamatan, 5 kelurahan dan 340 desa. Untuk Kecamatan Cibeber merupakan kecamatan yang paling banyak desanya dengan 22 desa sedangkan yang paling sedikit



adalah Kecamatan Lebakgedong dengan 6 Desa, untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada table di bawah ini :

Tabel 1.9

Nama Kecamatan dan Desa/Kelurahan Kabupaten Lebak Tahun 2021

No	Desa/Kelurahan	No	Desa/Kelurahan	No	Desa/Kelurahan
1.	<u>Kecamatan Banjarsari</u> 1. Kertaraharja 2. Kerta 3. BojongJuruh 4. LebakKeusik 5. Leulipuh 6. Tamansari 7. Cilegong Ilir 8. Cisapih 9. Jalupang Girang 10. Cidahu 11. Keusik 12. Ciruji 13. Cibatur keusik 14. Bendungan 15. Kumpai 16. Gunung Sari 17. Kaduhauk 18. Labanjaya 19. Umbuljaya 20. Kertarahayu	2.	<u>Kecamatan Bayah</u> 1. Bayah Barat 2. Darnasari 3. Sawarna 4. Cidikit 5. Bayah Timur 6. Cimancak 7. Suwakan 8. Pasir Gombong 9. Cisuren 10. Sawarna Timur 11. Pamubulan	3.	<u>Kecamatan Bojongmanik</u> 1. Keboncau 2. Cimayang 3. Parakanbeusi 4. Bojongmanik 5. Mekarmanik 6. Kadurahayu 7. Harjawana 8. Pasir Bitung 9. Mekar Rahayu
4.	<u>Kecamatan Cibadak</u> 1. Tambakjaya 2. Bojongleles 3. Kaduagung Timur 4. Kaduagung Barat 5. Malabar 6. Pasar Keong 7. Cibadak 8. Panancangan 9. Asem 10. Cisangu 11. Bojongcae 12. Cimenteng Jaya 13. Mekar Agung 14. Asem Margaluyu 15. Kaduagung Tengah	5.	<u>Kecamatan Cibeber</u> 1. Cikotok 2. Cibeber 3. Warungbanten 4. Neglasari 5. Mekarsari 6. Cikadu 7. Kujangjaya 8. Cisungsang 9. Hegarmanah 10. Cihambali 11. Sukamulya 12. Citorek Tengah 13. Citorek Timur 14. Citorek Kidul 15. Kujangsari 16. Situmulya 17. Sinargali 18. Wanasari 19. Gunung Wangun 20. Citorek Barat 21. Citorek Sabrang 22. Ciherang	6.	<u>Kecamatan Cigemblong</u> 1. Peucangpari 2. Cibungur 3. Cikaret 4. Cikadongdong 5. Cikaratun 6. Mugijaya 7. Cigemblong 8. Cikate 9. Wangunjaya



No	Desa/Kelurahan	No	Desa/Kelurahan	No	Desa/Kelurahan
7.	<u>Kecamatan Cihara</u> 1. PondokPanjang 2. Ciparahu 3. Cihara 4. Karangkamulyan 5. Panyaungan 6. Mekarsari 7. Lebak Peundeuy 8. Citepusaeun 9. Barunai	8.	<u>Kecamatan Cijaku</u> 1. Kandangsapi 2. Cihujan 3. Ciapus 4. Cijaku 5. Mekarjaya 6. Cipalabuh 7. Cibeureum 8. Cimenga 9. Sukasenang 10. Kapunduhan	9.	<u>Kecamatan Cikulur</u> 1. Anggalan 2. Muaradua 3. Muncangkopong 4. Tamanjaya 5. Curugpanjang 6. Cukulur 7. Cigoong Selatan 8. Cigoong Utara 9. Sumurbandung 10. Sukaharja 11. Sukadaya 12. Parage 13. Pasir Gintung
10.	<u>Kecamatan Cileles</u> 1. Mekarjaya 2. Pasindangan 3. Kujangsari 4. Parungkujang 5. Cikareo 6. Cileles 7. Margamulya 8. Cipadang 9. Daroyon 10. Prabugantungan 11. Gumuruh 12. Banjarsari	11.	<u>Kecamatan Ciligrang</u> 1. Cibareno 2. Ciligrang 3. LebakTipar 4. Cikatomas 5. Cijengkol 6. PasirBungur 7. Cikamunding 8. Girimukti 9. Cireundeu 10. GunungBatu	12.	<u>Kecamatan Cimarga</u> 1. Sarageni 2. Jayasari 3. Magatirta 4. Gunung Anten 5. Sangkan Manik 6. Sudamanik 7. Girimukti 8. Jayamanik 9. Margaluyu 10. Sangiang Jaya 11. Tambak 12. Margajaya 13. Cimarga 14. Mekarjaya 15. Intenjaya 16. Karyajaya 17. Mekarmulya
13.	<u>Kecamatan Cipanas</u> 1. Pasirhaur 2. Girilaya 3. Jayapura 4. Giriharja 5. Bintangsari 6. Cipanas 7. Luhurjaya 8. Sipayung 9. Bintangresmi 10. Malangsari 11. Sukasari 12. Haurgajrug 13. Talagahiayang 14. Harumsari	14.	<u>Kecamatan Cirinten</u> 1. Parakanlima 2. Kadudamas 3. Datarcae 4. Karoya 5. Nangerang 6. Cirinten 7. Karangnunggal 8. Cempaka 9. Badur 10. Cibarani	15.	<u>Kecamatan Curugbitung</u> 1. Guradog 2. Candi 3. Sekarwangi 4. Curugbitung 5. Ciburuy 6. Mayak 7. Cilayang 8. Cipining 9. Cidadap 10. Lebakkasih



No	Desa/Kelurahan	No	Desa/Kelurahan	No	Desa/Kelurahan
16.	<u>Kecamatan Gunungkencana</u> 1. Gunungkendeng 2. Cimanyangray 3. Keramatjaya 4. Bulakan 5. Cicaringin 6. Ciakar 7. Cisamping 8. Bojong Koneng 9. Ciginggang 10. Gunung Kencana 11. Sukanegara 12. Tanjungsari Indah	17.	<u>Kecamatan Kalanganyar</u> 1. Cilangkap 2. Pasir Kupa 3. Aweh 4. Sukamekarsari 5. Kalanganyar 6. Sangiang Tanjung 7. Cikatapis	18.	<u>Kecamatan Lebakgedong</u> 1. Lebakgedong 2. Lebaksitu 3. Ciladaeun 4. Banjarsari 5. LebaksAngka 6. Banjar Irigasi
19.	<u>Kecamatan Leuwidamar</u> 1. Kanekes 2. Nayagati 3. Bojong Menteng 4. Cisimeut 5. Margawangi 6. Sangkanwangi 7. Jalupang Mulya 8. Leuwidamar 9. Cibungur 10. Lebak Parahiang 11. Wantisari 12. Cisimeut Raya	20.	<u>Kecamatan Maja</u> 1. Cilangkap 2. Pasir Kecapi 3. Mekarsari 4. Sangiang 5. Tanjung Sari 6. Maja 7. Curug Badak 8. Pasir Kembang 9. Padasuka 10. Gubugan cibeureum 11. Binong 12. Sindangmulya 13. Buyut Mekar 14. Maja Baru	21.	<u>Kecamatan Manglingping</u> 1. Sukamanah 2. Malingping Selatan 3. Cilangkahan 4. Pagelaran 5. Kersaratu 6. Sukaraja 7. Kadujajar 8. Malingping Utara 9. Rahong 10. Sanghiang 11. Bolang 12. Sumber Waras 13. Cipeundeuy 14. Senanghati
22.	<u>Kecamatan Muncang</u> 1. Pasireurih 2. Pasirangka 3. Cikarang 4. Ciminyak 5. Leuwicoo 6. Muncang 7. Sukanagara 8. Sindangwangi 9. Jagakarsa 10. Tanjungwangi 11. Mekarwangi 12. Giri Jagabaya	23.	<u>Kecamatan Panggarangan</u> 1. Situregen 2. Sukajadi 3. Hegarmanah 4. Panggarangan 5. Mekarjaya 6. Sindangratu 7. Cimandiri 8. Gunung Gede 9. Songgong 10. Jatake 11. Cibarengkok	24.	<u>Kecamatan Rangkasbitung</u> 1. Pasir Tanjung 2. Rangkasbitung Timur 3. Rangkasbitung Barat 4. Rangkasbitung Timur 5. Jatimulya 6. Cimangeungteung 7. Citeras 8. Mekarsari 9. Nameng 10. Kolelet Wetan 11. Sukamanah 12. Pabuaran 13. Cijoro Pasir 14. Cijoro Lebak 15. Muara Ciujung Barat 16. Narimbang Mulia



No	Desa/Kelurahan	No	Desa/Kelurahan	No	Desa/Kelurahan
25.	Kecamatan Sobang 1. Sinarjaya 2. Cirompang 3. Sukamaju 4. Majasari 5. Ciparasi 6. Sindanglaya 7. Sobang 8. Sukajaya 9. Hariang 10. Sukaresmi	26.	Kecamatan Sajira 1. Maraya 2. Margaluyu 3. Sukamarga 4. Sindangsari 5. Sajiramekar 6. Sajira 7. Sukarame 8. Calungbungur 9. Sukajaya 10. Paja 11. Mekarsari 12. Pajagan 13. Parungsari 14. Bungur Mekar 15. Ciuyah	27.	Kecamatan Wanasalam 1. Muara 2. Wanasalam 3. Sukatani 4. Cikeusik 5. Bejod 6. Cipedang 7. Cisarap 8. Parungsari 9. Cipeucang 10. ParungPanjang 11. Ketapang 12. Cilangkap 13. Karang Pamidangan
28.	Kecamatan Warunggunung 1. Pasirtangkil 2. Sukarendah 3. Selaraja 4. Warunggunung		5. Cibuah 6. Baros 7. Sindangsari 8. Banjarsari		9. Cempaka 10. Padasuka 11. Sukaraja 12. Jagabaya

Sumber : RTRW Kab. Lebak 2021-2041.

E. Jumlah Perangkat Daerah, Unit Kerja Perangkat Daerah Dan Pegawai Pemerintah

Perangkat Daerah di Kabupaten Lebak diatur berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Lebak, Peraturan Daerah ini juga menetapkan tipe Perangkat Daerah Kabupaten Lebak yang didasarkan pada perhitungan jumlah nilai variabel beban kerja urusan pemerintahan. Adapun Struktur Pemerintahan Kabupaten Lebak terdiri dari Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD, Inspektorat, lembaga teknis daerah yang meliputi 23 Dinas, 5 Badan, BPBD, RSUD dr. Adjidarmo dan 28 Kecamatan. Dalam mendukung kelancaran penyelenggaraan tugas pemerintahan dan pembangunan, Pemerintah Kabupaten Lebak didukung oleh Aparatur Sipil Negara, khususnya Pegawai Negeri Sipil. Berikut kami sajikan data PNS dan OPD di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Lebak, sebagaimana tabel di bawah ini :

Tabel 1.10
Jumlah Perangkat Daerah dan Pegawai Pemerintah Daerah
Kabupaten Lebak Tahun 2021

NO.	PERANGKAT DAERAH	JENIS KELAMIN		JUMLAH
		LAKI-LAKI	PEREMPUAN	
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]
1	Sekretariat Daerah	78	29	107
2	Sekretariat DPRD	21	9	30
3	Inspektorat Daerah	23	27	50
4	RSUD dr. Adjidarmo	109	195	304
5	Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah	21	13	34



NO.	PERANGKAT DAERAH	JENIS KELAMIN		JUMLAH
		LAKI-LAKI	PEREMPUAN	
6	Badan Keuangan dan Aset Daerah	27	10	37
7	Badan Pendapatan Daerah	32	7	39
8	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	19	11	30
9	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	11		11
10	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	17	17	34
11	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	10	6	16
12	Dinas Pendidikan	2.848	3.202	6.050
13	Dinas Perikanan	16	6	22
14	Dinas Kepemudaan dan Olahraga	11	3	14
15	Dinas Kesehatan	259	748	1.007
16	Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian	18	5	23
17	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	13	11	24
18	Dinas Lingkungan Hidup	79	13	92
19	Dinas Ketahanan Pangan	11	17	28
20	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata	20	13	33
21	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	177	16	193
22	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	44	9	53
23	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	102	14	116
24	Dinas Penanaman Modal	19	8	27
25	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	29	6	35
26	Dinas Perhubungan	44	6	50
27	Dinas Pertanian	144	46	190
28	Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan	22	10	32
29	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman serta Pertanahan	18	6	24
30	Dinas Sosial	16	6	22
31	Dinas Tenaga Kerja	11	5	16
32	Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran	47	3	50
33	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	10	6	16
34	Kecamatan Rangkasbitung	33	15	48
35	Kecamatan Kalanganyar	11	1	12
36	Kecamatan Cibadak	15	1	16
37	Kecamatan Warunggunung	11	2	13
38	Kecamatan Cikurur	19	2	21
39	Kecamatan Cimarga	16	2	18
40	Kecamatan Leuwidamar	16	1	17
41	Kecamatan Bojongmanik	16	0	16
42	Kecamatan Cirinten	14	0	14
43	Kecamatan Maja	16	3	19
44	Kecamatan Curugbitung	18	1	19
45	Kecamatan Sajira	16	3	19
46	Kecamatan Cipanas	19	1	20
47	Kecamatan Lebakgedong	11	1	12
48	Kecamatan Muncang	12	0	12
49	Kecamatan Cilograng	10	1	11
50	Kecamatan Cileles	18	1	19
51	Kecamatan Gunungkencana	13	1	14
52	Kecamatan Banjarsari	14	2	16
53	Kecamatan Cijaku	14	1	15
54	Kecamatan Cigemblong	9	1	10
55	Kecamatan Malingping	14	4	18



NO.	PERANGKAT DAERAH	JENIS KELAMIN		JUMLAH
		LAKI-LAKI	PEREMPUAN	
56	Kecamatan Wanasalam	14	0	14
57	Kecamatan Sobang	7	0	7
58	Kecamatan Panggarangan	11	2	13
59	Kecamatan Cihara	16	1	17
60	Kecamatan Bayah	11	4	15
61	Kecamatan Cibeber	16	3	19
TOTAL		4.736	4.537	9.273

Sumber : BKPSDM Kab. Lebak.

Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang ada di Pemerintah Kabupaten Lebak tersebar di seluruh Perangkat Daerah dengan berbagai kualifikasi pendidikan formal mulai dari SD sampai dengan S3 sebagaimana disajikan pada tabel berikut :

Tabel 1.11

PNS Kabupaten Lebak Berdasarkan Pendidikan Tahun 2021

NO	PENDIDIKAN	JENIS KELAMIN		JUMLAH
		L	P	
1	SD	121	48	169
2	SMP	88	16	104
3	SMA	795	320	1.115
4	DI	7	7	14
5	DII	181	136	317
6	DIII	173	503	676
7	DIV/S1	2.917	3.296	6.213
8	S2	452	211	663
9	S3	2	0	2
TOTAL		4.736	4.537	9.273

Sumber : BKPSDM Kab. Lebak.

F. Realisasi Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah

Pengelolaan keuangan daerah merupakan keseluruhan proses perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, dan pertanggungjawaban yang dilaksanakan pemerintah daerah dalam mewujudkan tertib administrasi keuangan. Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, pelaksanaan Pengelolaan Keuangan Daerah dilakukan secara tertib, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan, kepatutan, manfaat untuk masyarakat, serta taat pada ketentuan peraturan perundang-undangan. Lebih lanjut disebutkan bahwa Pengelolaan Keuangan Daerah diwujudkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).

Kebijakan umum pengelolaan keuangan daerah disusun sebagai upaya untuk meningkatkan efektivitas, efisiensi dan transparansi setiap program dan kegiatan pembangunan dalam mencapai target-target pembangunan. Adapun arah dan kebijakan pengelolaan keuangan daerah tersebut meliputi kebijakan pengelolaan pendapatan daerah, kebijakan pengelolaan belanja daerah, serta kebijakan pengelolaan pembiayaan daerah.



1. Target dan Realisasi Pendapatan Daerah

Realisasi Pendapatan Daerah Kabupaten Lebak Tahun Anggaran 2021 setelah perubahan APBD dianggarkan sebesar Rp.2.642.438.919.107,00 dapat terealisasi Rp.2.643.719.867.031,00 atau 100,05% yang berarti melebihi dari target anggaran sebesar Rp.1.280.947.924,00 dengan rincian sebagai berikut :

Tabel 1.12
Target dan Realisasi Pendapatan Daerah
Kabupaten Lebak Tahun 2021

KODE REK	URAIAN	ANGGARAN	REALISASI	SISA ANGGARAN	%
1	2	3	4	5	6
4.	PENDAPATAN	2.642.438.919.107,00	2.643.719.867.031,00	1.280.947.924,00	100,05
4.1.	PENDAPATAN ASLI DAERAH	359.883.118.451,00	385.187.891.432,00	25.304.772.981,00	107,03
4.1.1.	PAJAK DAERAH	122.215.000.000,00	156.917.968.633,00	34.702.968.633,00	128,37
4.1.2.	PENDAPATAN RETRIBUSI DAERAH	15.057.569.938,00	15.138.012.060,00	62.442.122,00	100,41
4.1.3.	PENDAPATAN HASIL PENGELOLAAN KEKAYAAN DAERAH YANG DIPISAHKAN	5.941.209.868,00	5.282.756.992,00	(658.452.876,00)	88,92
4.1.4.	LAIN-LAIN PAD YANG SAH	216.651.338.645,00	207.849.153.747,00	(8.802.184.898,00)	95,94
4.2.	PENDAPATAN TRANSFER	2.047.163.238.448,00	2.052.499.442.531,00	5.336.204.083,00	100,26
4.2.1.	PENDAPATAN NTRANSFER PEMERINTAH PUSAT	1.838.997.837.761,00	1.844.334.041.844,00	5.336.204.083,00	102,29
4.2.2.	PENDAPATAN TRANSFER ANTAR DAERAH	208.165.400.687,00	208.165.400.687,00	0,00	100,00
4.3.	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	235.392.562.208,00	206.032.533.068,00	(29.360.029.140,00)	87,53
4.3.1.	PENDAPATAN HIBAH	79.570.262.208,00	41.771.463.068,00	(37.798.799.140,00)	52,50
4.3.3.	LAIN LAIN PENDAPATAN SESUAI KETENTUAN PERATURAN PERUNDANG UNDANGAN	155.822.300.000	164.261.070.000,00	8.348.770.000,00	105,42

Sumber : BKAD Kab. Lebak 2021 (unaudited).

Realisasi pendapatan yang bersumber dari Pendapatan Asli Daerah tercapai melebihi target yang ditetapkan. Hal ini seiring dengan upaya yang dilakukan oleh pemerintah daerah antara lain melalui intensifikasi dan ekstensifikasi sumber-sumber PAD. Secara keseluruhan realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) pada Tahun Anggaran 2021 mencapai sebesar 107,03% atau sebesar Rp.385.187.891.432,00 dari target sebesar Rp.359.883.118.451,00. Untuk Pendapatan Daerah dari Pendapatan Transfer terealisasi sebesar 100,26% atau sebesar Rp.2.052.449.442.531,00 dari target sebesar Rp.2.047.163.238.448,00. Pendapatan Transfer merupakan akun untuk menampung penerimaan yang berasal dari Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat dan Pendapatan Transfer Antar Daerah. Selanjutnya realisasi pendapatan daerah pada Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah mencapai Rp.206.032.533.068,00 atau sebesar 87,53% dari target Rp.235.392.562.208,00.



2. Target dan Realisasi Belanja Daerah

Rencana Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 setelah Perubahan sebesar Rp.2.920.409.223.229,00 dapat direalisasi sebesar Rp.2.643.466.844.441,00 atau 90,52% dengan selisih kurang dari anggaran sebesar Rp.276.942.378.788,00 yang terdiri dari :

- Belanja Operasi direncanakan sebesar Rp.2.150.232.172.550,00 dapat direalisasi sebesar Rp.1.915.912.290.235,00 atau 89,10% dengan selisih kurang dari anggaran sebesar Rp.234.319.882.315,00;
- Belanja Modal direncanakan sebesar Rp.317.634.916.019,00 dapat direalisasi sebesar Rp.281.854.752.747,00 atau 88,74% kurang dari anggaran sebesar Rp.35.780.163.272,00;
- Belanja Tidak terduga direncanakan sebesar Rp.29.014.066.540,00 dapat direalisasikan sebesar Rp.24.421.516.341,00 atau 84,17% kurang dari anggaran sebesar Rp.4.592.550.199,00;
- Belanja Transfer direncanakan sebesar Rp.423.528.068.120,00 dapat direalisasikan sebesar Rp.421.278.285.118,00 atau 99,47% kurang dari anggaran sebesar Rp.2.249.783.002,00.

Rincian anggaran dan realisasi belanja daerah tahun anggaran 2021 dapat kami sajikan sebagaimana tabel dibawah ini :

Tabel 1.13
Target dan Realisasi Belanja Daerah
Kabupaten Lebak Tahun 2021

KODE REK	URAIAN	ANGGARAN	REALISASI	SISA ANGGARAN	%
1	2	3	4	5	6
5.	BELANJA	2.920.409.223.229,00	2.643.466.844.441,00	(276.942.378.788,00)	90,52
5.1.	BELANJA OPERASI	2.150.232.172.550,00	1.915.912.290.235,00	(234.319.822.315,00)	89,10
5.1.1.	BELANJA PEGAWAI	1.068.572.233.185,00	992.375.160.333,00	(76.197.072.852,00)	92,87
5.1.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	949.751.006.845,00	806.590.537.922,00	(143.160.468.923,00)	84,93
5.1.5.	BELANJA HIBAH	128.949.541.560,00	114.176.801.020,00	(14.772.740.540,00)	88,54
5.1.6.	BELANJA BANTUAN SOSIAL	2.959.390.960,00	2.769.790.960,00	(189.600.000,00)	93,59
5.2.	BELANJA MODAL	317.634.916.019,00	281.854.752.747,00	(35.780.163.272,00)	88,74
5.2.1.	BELANJA MODAL TANAH	6.316.725.660,00	6.027.811.248,00	(288.914.412,00)	95,43
5.2.2.	BELANJA MODAL PERALATAN DAN MESIN	71.057.017.009,00	55.248.493.450,00	(15.808.523.559,00)	77,75
5.2.3.	BELANJA MODAL GEDUNG DAN BANGUNAN	36.229.710.830,00	27.007.051.046,00	(9.222.659.784,00)	74,54
5.2.4.	BELANJA MODAL JALAN, JARINGAN DAN IRIGASI	197.868.736.387,00	187.474.208.785,00	(10.394.527.602,00)	94,75
5.2.5.	BELANJA MODAL ASET TETAP LAINNYA	6.162.726.133,00	6.097.188.218,00	(65.537.915,00)	98,94
5.3	BELANJA TIDAK TERDUGA	29.014.066.540,00	24.421.516.341,00	(4.592.550.199,00)	84,17
5.3.1.	BELANJA TIDAK TERDUGA	29.014.066.540,00	24.421.516.341,00	(4.592.550.199,00)	84,17
5.4	BELANJA TRANSFER	423.528.068.120,00	421.278.285.118,00	(2.249.783.002,00)	99,47
5.4.1.	BELANJA BAGI HASIL	15.998.934.500,00	15.998.934.500,00		100,00
5.4.2.	BELANJA BANTUAN KEUANGAN	407.529.133.620,00	405.279.350.618,00	(2.249.783.002,00)	99,45
	SURPLUS/(DEFISIT)	(277.970.304.122,00)	253.022.590,00	278.223.326.712,00	(0,09)

Sumber : BKAD Kab. Lebak 2021 (unaudited).



3. Target dan Realisasi Pembiayaan Daerah

Pembiayaan Daerah direncanakan sebesar Rp.277.970.304.122,00 dengan realisasi sebesar Rp.287.833.959.123,05 atau 103,55%. Realisasi Pembiayaan Daerah Tahun Anggaran 2021 tersebut dapat diuraikan sebagai berikut:

- a. Penerimaan Pembiayaan direncanakan sebesar Rp.296.970.304.122,00 dan dapat direalisasi sebesar Rp.296.833.959.123,05 atau 99,95%, yang terdiri dari Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Tahun Lalu (SILPA) audited.
- b. Pengeluaran pembiayaan untuk Penyertaan Modal berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Lebak Nomor 9 Tahun 2016 tentang Penyertaan Modal Daerah. Pengeluaran Pembiayaan Kabupaten Lebak pada Tahun Anggaran 2021 dianggarkan sebesar Rp.19.000.000.000,00 dan terealisasi sebesar Rp.9.000.000.000,00 atau 47,37%, yaitu :
 - 1) PDAM Tirta Multatuli sebesar Rp.5.000.000.000,00
 - 2) PT LKM Rangkasbitung sebesar Rp.4.000.000.000,00

Uraian lebih lanjut mengenai penerimaan pembiayaan dan pengeluaran pembiayaan sebagaimana pada tabel di bawah ini.

Tabel 1.14
Target dan Realisasi Pembiayaan Daerah
Kabupaten Lebak Tahun 2021

KODE REK	URAIAN	ANGGARAN	REALISASI	SISA ANGGARAN	%
1	2	3	4	5	6
6.	PEMBIAYAAN	277.970.304.122,00	287.833.959.123,05	9.863.655.001,05	103,55
6.1.	PENERIMAAN PEMBIAYAAN	296.970.304.122,00	296.833.959.123,05	(136.344.998,95)	99,96
6.2.	PENGELUARAN PEMBIAYAAN	19.000.000.000,00	9.000.000.000,00	(10.000.000.000,00)	47,37
	PEMBIAYAAN NETTO	277.970.304.122,00	287.838.844.123,05	9.868.540.001,05	103,55
	SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN (SILPA)	-	288.086.891.713,05	288.086.891.713,05	

Sumber : BKAD Kab. Lebak 2021 (unaudited).

1.1.2. Perencanaan Pembangunan Daerah

Perencanaan pembangunan daerah akan terlaksana dengan baik, sinergis dan terarah apabila diawali dengan perencanaan yang matang, sehingga menghasilkan keluaran (output) program/kegiatan/subkegiatan yang tepat sesuai dengan tujuan yang ditetapkan. Perencanaan yang lebih menyeluruh, terarah dan terpadu diperlukan untuk menjamin laju perkembangan di Kabupaten Lebak, dalam mencapai suatu masyarakat yang adil, sejahtera dan makmur. Perencanaan Pembangunan yang baik akan mampu menjamin terlaksananya pembangunan yang menyeluruh terarah dan terpadu. Perencanaan tersebut harus disesuaikan dengan tujuan yang ingin dicapai agar apa yang hendak dilaksanakan benar-benar dapat terwujud dengan baik berdasarkan visi dan Misi Bupati dan Wakil Bupati.



A. Permasalahan Strategis Pemerintah Daerah

Hakikat perencanaan merupakan proses untuk menentukan tindakan masa depan yang tepat, melalui urutan pilihan, dengan memperhitungkan sumber daya yang tersedia. Sedangkan pembangunan nasional pada dasarnya merupakan upaya yang dilaksanakan oleh semua komponen bangsa dalam rangka mencapai tujuan bernegara (pasal 1 ayat 1-2 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional). Perencanaan merupakan proses formulasi dalam siklus kebijakan publik yang luarannya berupa rencana tindakan yang perlukan untuk mengatasi permasalahan. Itu sebabnya sebuah dokumen rencana harus memuat secara gamblang permasalahan utama yang akan diatasi sehingga tampak benang merah yang nyata, kerangka kerja logis hubungan antara masalah dan rencana tindakan yang akan dijalankan.

Dalam konteks perencanaan pembangunan, permasalahan dimaksud didefinisikan sebagai kesenjangan antara kinerja pembangunan yang dicapai saat ini dengan yang direncanakan dan antara apa yang ingin dicapai di masa datang dengan kondisi riil saat perencanaan dibuat. Oleh karenanya maka proses identifikasi terhadap permasalahan pada dasarnya juga berkaitan dan/ atau identik dengan proses analisa kebutuhan sehingga secara substantif dapat ditemukan secara cermat dan obyektif kebutuhan yang harus dipenuhi sesuai dengan tingkatan urgensinya.

Meski sejumlah indikator makro perekonomian dan keuangan daerah menunjukkan trend peningkatan yang cukup memuaskan, terutama sebelum terdampak dahsyat oleh pandemi pada tahun 2020, secara umum Kabupaten Lebak masih dihadapkan pada sejumlah permasalahan yang terkait dengan kesejahteraan dan pemerataan ekonomi, kesejahteraan sosial, daya saing daerah, serta beragam permasalahan yang terkait dengan penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah. Secara abstraktif permasalahan pembangunan daerah dimaksud diformulasi dalam beberapa hal yang diidentifikasi sebagai permasalahan utama sebagai berikut :

1. Pembangunan Manusia

Dalam perkembangannya sebagian besar indikator pembangunan manusia terus mengalami peningkatan dari tahun ke tahun, namun secara faktual pembangunan manusia di Kabupaten Lebak masih terkendala oleh sejumlah permasalahan sebagaimana tercermin dari progresifitas peningkatannya yang kurang sesuai harapan. Abstraksi akar permasalahan pembangunan manusia pada dimensi pendidikan antara lain disebabkan oleh : belum optimalnya akses dan kualitas layanan pendidikan dasar dan menengah, belum optimalnya penyelenggaraan pelayanan pendidikan dasar dan kesetaraan, serta belum optimalnya pemenuhan sarana dan prasarana penunjang layanan pendidikan dasar sebagaimana tercermin pada sejumlah indikator antara lain :

- a. Rendahnya indeks pendidikan (0,55);
- b. Angka putus SMP yang trendnya naik (0,18%), dan angka melanjutkan ke SMP yang belum optimum (98,37%);



- c. APK dan APM SMP yang baru mencapai kisaran 87%;
- d. APK PAUD yang masih rendah (38,54%);
- e. Persentase SD dan SMP terakreditasi A yang kurang dari 10%;
- f. Persentase guru bersertifikasi yang masih relatif rendah;
- g. Rata-rata lama sekolah yang baru mencapai 6,40 tahun;
- h. APS SD dan SMP yang masih berada pada kisaran 90%; dan lain-lain.

Pada dimensi kesehatan, akar masalah pembangunan manusia diidentifikasi disebabkan oleh belum optimalnya cakupan layanan kesehatan, sarana dan prasarana kesehatan untuk akses pelayanan kesehatan dasar dan rujukan yang masih relatif terbatas, Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS) pada sebagian kalangan masyarakat yang masih memprihatinkan, belum idealnya rasio tenaga medis dan paramedis terhadap satuan jumlah penduduk tertentu, belum optimalnya implementasi Sistem Jaminan Sosial Nasional; serta belum optimalnya cakupan layanan Keluarga Berencana.

Secara makro permasalahan di bidang kesehatan ini tercermin pada Usia Harapan Hidup (UHH) yang baru mencapai sekitar 67,21 tahun, angka kematian bayi yang masih berkisar 14,4 per 1000 kelahiran hidup; angka kematian ibu yang masih berkisar 164 per 100 ribu kelahiran hidup; penurunan prevalensi balita gizi buruk yang pada tahun 2020 masih mencapai 0,88%, serta prevalensi stunting sebesar 9,26%; pertolongan persalinan tenaga medis yang diperkirakan baru berkisar 72,60%; desa *Open Defecation Free* (ODF) yang baru 22,90%; persentase keluarga sehat yang baru mencapai 18,70%; tantangan meningkatkan cakupan imunisasi dasar, cakupan pemberantasan penyakit menular, cakupan kunjungan ibu hamil K4, cakupan pelayanan kesehatan balita, dan lain-lain.

Pemerintah daerah terus melakukan upaya untuk mengatasi permasalahan-permasalahan dan tantangan di atas. Upaya tersebut diantaranya dilakukan melalui penyediaan sarana dan prasarana kesehatan yang memadai dalam mendukung pelayanan kesehatan dasar kepada masyarakat, penyediaan dan pembinaan SDM kesehatan dan peningkatan kesadaran berperilaku hidup bersih dan sehat guna menekan angka kesakitan sebagai akibat dari faktor perilaku dan lingkungan, pelayanan kesehatan terhadap ibu hamil, ibu bersalin, bayi baru lahir, balita, pendidikan usia dasar, usia produktif, usia lanjut, hipertensi, diabetes mellitus, gangguan jiwa berat, TBC serta pelayanan kesehatan orang dengan resiko terinfeksi virus HIV. Hal tersebut merupakan upaya yang dilakukan melalui pelayanan kesehatan yang bersifat peningkatan/promotif dan pencegahan/ preventif untuk pencapaian target SPM pelayanan dasar kepada masyarakat.

Di samping dimensi pendidikan dan kesehatan, terdapat pula dimensi lain yang terkait dengan pembangunan manusia, yang diidentifikasi dari sejumlah urusan pemerintahan daerah yang terkait dengan isu pembangunan manusia antara lain: belum optimalnya cakupan pelayanan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, sebagaimana tercermin



dari masih terjadinya kasus-kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak yang trend-nya meningkat di era pandemi; belum optimalnya pembinaan kepemudaan dan olahraga, fasilitasi yang masih terbatas, kemandirian dan kemampuan hidup pemuda yang masih relatif rendah, serta prestasi pemuda di bidang seni budaya, olahraga, kewirausahaan, dan lain-lain yang masih belum dapat bersaing dengan daerah lain; belum optimalnya penanganan masalah-masalah sosial, yang tercermin dari sejumlah indikator antara lain: terbatasnya sarana rehabilitasi dan perlindungan sosial; cakupan pelayanan PMKS yang masih terbatas; cakupan pelayanan disabilitas dan Lanjut Usia yang masih terbatas; terbatasnya potensi sumber kesejahteraan sosial; dan lain-lain.

Isu pembangunan manusia juga berkaitan erat dengan masalah belum optimalnya pemberdayaan masyarakat dan pengentasan kemiskinan, yang secara makro perlu diarahkan pada agenda menurunkan persentase penduduk miskin melalui upaya pemberdayaan sosial-ekonomi masyarakat sehingga memiliki ketahanan pangan, ketahanan ekonomi, dan ketahanan sosial sehingga terhindar dari kerentanan sebagai akibat dari fluktuasi perekonomian nasional maupun daerah.

2. Pemulihan Ekonomi

Permasalahan utama perekonomian daerah Kabupaten Lebak dapat dilihat dari permasalahan 3 aspek utama yaitu :

a. Pertumbuhan ekonomi secara inklusif belum optimal dan tidak berkualitas

Pertumbuhan ekonomi yang terjadi di Kabupaten Lebak dalam kurun waktu 5 tahun terakhir rata – rata mengalami pertumbuhan yang positif kecuali pada tahun 2020 mengalami pertumbuhan yang negatif, namun pertumbuhan ini tidak diikuti oleh Tingkat Pengangguran dan Angka Kemiskinan yang angkanya masih relative tinggi.

Permasalahan pertumbuhan ekonomi yang tidak berkualitas di atas sejatinya dapat disebabkan oleh beberapa akar masalah yang muncul, diantaranya adalah sebagai berikut :

- 1) Belum berkembangnya sektor industri, terutama industri yang mampu menyerap secara optimal tenaga kerja lokal serta mendayagunakan sumber daya dan komoditi lokal lainnya sehingga memiliki faktor pengaruh yang tinggi dalam meningkatkan nilai tambah perekonomian daerah;
- 2) Rendahnya mutu dan daya saing tenaga kerja setempat dalam memenuhi kebutuhan pasar tenaga kerja lokal maupun regional;
- 3) Rendahnya tingkat efisiensi produksi UMKM, terbatasnya akses permodalan ke perbankan, serta terbatasnya pemasaran karena lambatnya transformasi digital di kalangan UMKM;
- 4) Lembaga keuangan dan koperasi yang bergerak di bidang pembiayaan UMKM belum berperan optimal sebagai alternatif sumber pembiayaan usaha UMKM maupun dalam pemenuhan kebutuhan masyarakat setempat;



- 5) Belum optimalnya pertumbuhan sektor perdagangan, pengendalian stabilitas harga dan distribusi pasokan barang, yang disebabkan oleh belum optimalnya infrastruktur sarana perhubungan, pengelolaan dan penataan pasar, serta pembinaan pedagang maupun PKL;
 - 6) Belum tumbuhnya semangat kewirausahaan di kalangan pemuda, sehingga ketergantungan pada ketersediaan lowongan kerja di sektor formal menjadi sangat tinggi;
 - 7) Masih rendahnya Nilai Tukar Petani dan Nelayan, disebabkan oleh belum optimalnya jumlah dan daya saing produksi, pembinaan terhadap petani dan nelayan, terbatasnya sarana dan prasarana pertanian dan perikanan;
 - 8) Kontribusi BUMD terhadap perekonomian daerah masih relatif rendah, terutama dalam memenuhi kebutuhan pelayanan kepada masyarakat, dan meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD).
 - 9) Rendahnya daya saing produk-produk usaha mikro, kecil, dan menengah yang menjadi produk unggulan daerah, sehingga kapasitas produksi maupun omzetnya kurang berkembang dan hanya mampu memenuhi kebutuhan pasar setempat.
- b. Belum optimalnya pemanfaatan pangan sebagai sumberdaya lokal untuk peningkatan kualitas dan kesejahteraan masyarakat Lebak

Apabila kita melihat indeks ketahanan pangan yang diterbitkan oleh Badan Ketahanan Pangan bahwa Kabupaten Lebak termasuk dalam status tahan pangan namun berdasarkan hasil pemetaan daerah rawan pangan yang dilakukan tahun 2019 masih terdapat 66 Desa yang masuk kategori rentan pangan, sehingga masih ditemukan beberapa kasus gizi buruk dan Stunting di beberapa wilayah Kabupaten Lebak.

- c. Belum optimalnya pemanfaatan potensi pariwisata untuk peningkatan nilai tambah ekonomi dan dapat memberikan kontribusi yang signifikan terhadap perekonomian Kabupaten Lebak.

Dalam konteks ekonomi pengembangan pariwisata secara makro berkaitan erat dengan agenda pemulihan ekonomi. Sejalan dengan penetapan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Tanjung Lesung di Kabupaten Pandeglang, serta pembangunan infrastruktur jalan dan transportasi berupa Pembangunan akses jalan tol Serang-Panimbang yang melalui wilayah Kabupaten Lebak dan Pembangunan rel kereta api jalur ganda, serta operasionalisasi Kereta Rel Listrik (KRL) Jakarta-Rangkasbitung membuka peluang bagi Kabupaten Lebak untuk mengembangkan potensi pariwisata yang sangat besar seperti *Geopark Bayah Dome*. Selain itu juga secara faktual Kabupaten Lebak telah memiliki *event* wisata berskala nasional yaitu ritual “Seba Baduy” yang sejak tahun 2015 telah masuk dalam Kalender Pariwisata Nasional, dan pada tahun 2020 memperoleh Anugerah Pesona Indonesia (API) sebagai Festival Pariwisata terpopuler Ke-2 se-Indonesia.

Pengembangan potensi pariwisata di Kabupaten Lebak diyakini dapat menjadi sebuah terobosan bagi percepatan pembangunan



ekonomi daerah yang diharapkan dapat menciptakan efek berganda bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat. Hal ini sangat dimungkinkan mengingat pengembangan sektor pariwisata akan mampu mengintegrasikan beragam sektor secara optimal baik primer, sekunder, hingga tersier dalam melayani kebutuhan wisatawan.

3. Pembangunan Kewilayahan: Infrastruktur, Lingkungan Hidup, Penataan Ruang, dan Kebencanaan

Permasalahan pembangunan kewilayahan di Kabupaten Lebak masih akan menghadapi tantangan yang besar mengingat kondisi objektif terbatasnya kapasitas fiskal daerah, dengan rasio PAD yang terkategori kurang (<20% pendapatan daerah), menggambarkan kapasitas keuangan daerah yang sebagian besar masih sangat bergantung pada dana transfer. Meski demikian, kreativitas dan inovasi pemerintah daerah yang disertai dengan identifikasi prioritas masalah yang cermat serta akuntabilitas dalam pengelolaan anggaran telah menjadikan Kabupaten Lebak sebagai daerah dengan citra infrastruktur yang semakin baik pada dua dekade terakhir, terutama pada kondisi jalan yang menjadi kewenangan kabupaten dengan persentase keadaan mantap mencapai 68,06%. Selain itu pengendalian terhadap arus dana desa yang efektif juga berhasil mendorong perbaikan infrastruktur wilayah di perdesaan.

Di samping itu, terdapat pula jalan yang menjadi kewenangan pemerintah provinsi maupun Nasional dengan panjang masing-masing mencapai 176,39 km dan 146,59 km, di mana kondisi ruas-ruas jalan tersebut sangat tergantung pada perhatian dan keberpihakan Pemerintah Provinsi Banten maupun Pemerintah Pusat. Oleh karena itu, koordinasi dan sinergi perencanaan pembangunan mutlak perlu ditingkatkan guna menjamin terpeliharanya jaringan jalan provinsi dan Nasional di wilayah Kabupaten Lebak.

Keseluruhan permasalahan di atas berimplikasi pada sejumlah hal yang menggambarkan belum optimalnya kondisi dan ketersediaan infrastruktur wilayah, pengendalian lingkungan hidup, serta penataan ruang sebagaimana dimaksud, antara lain :

- a. Meningkatnya kebutuhan akan jalan dan jembatan dalam kondisi baik guna menunjang mobilitas orang dan barang, serta perekonomian daerah sebagai upaya peningkatan aksesibilitas;
- b. Meningkatnya kebutuhan akan ketersediaan dan kondisi infrastruktur perhubungan yang memadai, seperti : Penerangan Jalan Umum (PJU), halte di kawasan perkotaan, rambu lalu lintas, pengawasan trayek angkutan umum, pengelolaan perparkiran, serta pengelolaan terminal angkutan orang maupun barang;
- c. Meningkatnya kebutuhan infrastruktur perumahan dan permukiman, pengendalian munculnya kawasan kumuh perkotaan dan non-perkotaan, peningkatan akses air bersih dan sanitasi bagi rumah tangga, penyediaan rumah layak huni, dan lain-lain;



- d. Meningkatnya kebutuhan untuk melakukan transformasi digital melalui pemenuhan infrastruktur telekomunikasi, pengembangan jenis pelayanan publik berbasis aplikasi teknologi informasi dan komunikasi guna mengoptimalkan implementasi SPBE di Kabupaten Lebak;
- e. Meningkatnya kebutuhan akan perencanaan, pemanfaatan, dan pengendalian tata ruang, pengelolaan ruang terbuka hijau, pengendalian laju alih fungsi lahan, pengendalian pencemaran, pengelolaan sampah, penangkapan ikan berlebihan, deforestasi dan penebangan ilegal, dan lain-lain.

4. Tata Kelola Pemerintahan yang Baik

Upaya mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik masih akan menjadi isu sentral, meski fokus utamanya akan berpindah pada tema berbeda seiring dengan kemajuan yang telah dicapai. RPJMN Tahun 2020-2024 misalnya memusatkan fokusnya pada tema deregulasi yang berkaitan dengan upaya simplifikasi dan sinkronisasi antar aturan perundang-undangan sehingga mencegah dan mengatasi kompleksitas peraturan perundang-undangan yang menjadi kausa atas sejumlah tumpang tindih antar aturan, serta menjadi sebab atas rendahnya kepastian hukum.

secara khusus permasalahan yang berhubungan dengan penyelenggaraan tata kelola pemerintahan di Kabupaten Lebak dapat dirumuskan sebagai berikut :

- a. Struktur birokrasi pemerintah daerah yang belum mencerminkan birokrasi yang tepat ukuran dan tepat fungsi. Penyederhanaan birokrasi menjadi kebutuhan yang urgen untuk dilakukan dalam rangka melakukan efisiensi atas sumber daya daerah yang terbatas dan terus terkoreksi karena dampak pandemi, di samping menjadi bagian dari komitmen daerah untuk ikut mensukseskan agenda dan kebijakan nasional;
- b. Belum optimalnya implementasi manajemen SDM aparatur, khususnya dalam implementasi fungsionalisasi aparatur sipil negara sebagaimana tercermin dari persentase tenaga struktural dan administasi yang jauh lebih besar dibandingkan dengan tenaga fungsional, baik fungsional umum maupun fungsional tertentu (khusus);
- c. Meski sudah terkategori baik, implementasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik sesuai standar Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 perlu dioptimalkan dengan membangun *blueprint* transformasi digital di lingkungan pemerintahan daerah Kabupaten Lebak secara terpadu dan menyeluruh;
- d. Perlunya optimalisasi peran dan fungsi kelitbangan daerah dalam mendukung pengambilan keputusan eksekutif melalui perkuatan sistem inovasi daerah, serta optimalisasi pemanfaatan hasil-hasil kelitbangan dalam meningkatkan efektivitas penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah;



- e. Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah sebagai standar akuntabilitas kinerja instansi pemerintahan daerah masih belum merata;
- f. Perlunya optimalisasi integrasi sistem perencanaan, penganggaran, pengendalian serta pengelolaan keuangan dan aset daerah melalui pemanfaatan aplikasi SIPD dan/ aplikasi sejenis lainnya;
- g. Tantangan mempertahankan opini Wajar Tanpa Pengecualian pada Laporan Hasil Pemeriksaan Keuangan oleh Badan Pemeriksa Keuangan, serta upaya meningkatkan nilai guna dari pengelolaan keuangan daerah dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat;
- h. Tantangan untuk meningkatkan efektivitas Sistem Pengawasan Internal dalam paradigma baru sebagai sistem penjaminan mutu dan konsultasi guna mengefektifkan pencegahan maupun penindakan terhadap setiap bentuk deviasi dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah;
- i. Tantangan meningkatkan kapasitas Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran dalam mengatasi gangguan ketentraman, dan ketertiban umum, serta perlindungan masyarakat;
- j. Tantangan mewujudkan standar pelayanan publik yang optimal serta peningkatan indeks kepuasan masyarakat (IKM) terhadap penyelenggaraan pelayanan publik di Kabupaten Lebak;
- k. Tantangan mewujudkan peraturan perundang-undangan daerah yang berkualitas, sesuai dengan kebutuhan masyarakat, serta berdampak pada peningkatan kesejahteraan maupun ketentraman dan ketertiban kehidupan masyarakat.

Berdasarkan paparan deskriptif permasalahan pembangunan daerah di atas, secara abstraktif permasalahan pembangunan daerah Kabupaten Lebak dapat dirumuskan sebagai berikut :

Tabel 1.15
Identifikasi Permasalahan Pembangunan Daerah

NO	MASALAH POKOK	MASALAH
1	Belum optimalnya Pembangunan Manusia	1. Terbatasnya aksesibilitas dan mutu pendidikan usia dini, serta pendidikan dasar dan menengah pertama 2. Terbatasnya cakupan pelayanan kesehatan 3. Belum optimalnya pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak 4. Belum optimalnya penanganan penyandang masalah kesejahteraan sosial (PMKS) 5. Belum optimalnya pembinaan kepemudaan dan olahraga 6. Belum optimalnya peningkatan literasi masyarakat 7. Belum optimalnya peningkatan kualitas dan daya saing tenaga kerja 8. Belum optimalnya pemberdayaan masyarakat dalam pengentasan kemiskinan 9. Belum optimalnya pembinaan, pelestarian, dan komodifikasi seni-budaya, dan kearifan lokal



NO	MASALAH POKOK	MASALAH
2	Pembangunan ekonomi dan daya saing daerah yang masih terbatas	<ol style="list-style-type: none"> 1. Penyediaan kesempatan kerja dan berusaha yang belum optimal 2. Produktifitas sektor pertanian dan peningkatan ketahanan pangan yang masih terbatas 3. Pengembangan potensi pariwisata yang masih terkendala banyak faktor 4. Pengembangan investasi pada industri pengolahan komoditi pertanian yang masih terbatas 5. Pembinaan Koperasi dan UMKM yang masih terbatas 6. Peningkatan iklim investasi yang masih terkendala banyak faktor 7. Belum optimalnya pembinaan kewirausahaan
3	Pembangunan kewilayahan yang belum optimal	<ol style="list-style-type: none"> 1. Penyediaan infrastruktur jalan dan jembatan yang masih terbatas 2. Pembangunan dan pemeliharaan jaringan irigasi, DAS, situ, danau, dll yang masih terbatas 3. Pembangunan kawasan permukiman dan penyediaan rumah layak huni yang masih terbatas 4. Penyediaan sarana dan prasarana transportasi yang masih terbatas 5. Terbatasnya sarana dan prasarana pengelolaan persampahan 6. Terbatasnya sarana dan prasarana serta kapasitas dalam konservasi lingkungan hidup dan pengendalian pencemaran 7. Terbatasnya kapasitas pengawasan dan pengendalian pemanfaatan ruang dan alih fungsi lahan 8. Belum efektifnya mitigasi bencana di daerah-daerah rawan bencana
4	Tantangan mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pelaksanaan reformasi birokrasi yang belum optimal, khususnya pelaksanaan debirokrasi dan fungsionalisasi ASN 2. Manajemen pendapatan daerah yang belum efektif dan efisien 3. Manajemen keuangan dan aset daerah yang belum optimal 4. Kualitas pengelolaan data, arsip, dan informasi publik yang belum memadai 5. Tantangan meningkatkan profesionalitas manajemen SDM Aparatur serta Pendidikan Pelatihan Aparatur dalam memenuhi kebutuhan pemerintah daerah 6. Penerapan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) yang belum optimal 7. Pemenuhan standar pelayanan publik yang belum memadai, serta belum memuaskan publik secara optimal 8. Tata kelola pemerintahan desa yang belum optimal 9. Efektifitas sistem pengawasan internal yang masih harus ditingkatkan 10. Efektifitas penegakan peraturan daerah yang masih belum sesuai harapan 11. Pemeliharaan stabilitas politik, keamanan, dan ketertiban sosial yang masih harus ditingkatkan efektifitasnya 12. Tantangan pemeliharaan stabilitas politik, keamanan, dan ketertiban sosial yang makin kompleks 13. Kolaborasi pemerintah daerah dengan sektor privat dan masyarakat sipil yang masih sangat terbatas dalam pembangunan daerah 14. Tantangan mengoptimalkan peran Kelitbang dalam mendukung pengambilan keputusan eksekutif dan meningkatkan kreatifitas dan inovasi penyelenggaraan pemerintahan daerah.

Sumber : Bapelitbangda Kab. Lebak.



Selanjutnya masalah pokok dan masalah sebagaimana dijelaskan pada tabel di atas dapat dijabarkan dalam sejumlah akar permasalahan yang diidentifikasi berdasarkan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah Kabupaten Lebak, sebagaimana dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 1.16
Identifikasi Akar Masalah Berdasar Urusan

NO	URUSAN	AKAR MASALAH
1	Pendidikan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Belum optimalnya akses dan kualitas layanan pendidikan 2. Belum optimalnya penyelenggaraan pelayanan pendidikan kesetaraan 3. Belum optimalnya pemenuhan sarana dan prasarana penunjang layanan pendidikan 4. Terbatasnya kuantitas tenaga pendidik yang bersertifikasi 5. Belum optimalnya metode pembelajaran alternatif (pembelajaran jarak jauh, dsb) dalam mengantisipasi pandemi Covid-19
2	Kesehatan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Belum optimalnya cakupan layanan kesehatan 2. Sarana dan prasarana kesehatan untuk akses pelayanan kesehatan dasar dan rujukan yang masih relatif terbatas 3. Masih rendahnya kelangsungan hidup bayi 4. Masih rendahnya Usia Harapan Hidup 5. Belum idealnya rasio tenaga medis dan paramedis terhadap satuan jumlah penduduk tertentu 6. Belum optimalnya implementasi Sistem Jaminan Kesehatan Nasional 7. Belum optimalnya cakupan layanan KIA dan Keluarga Berencana. 8. Belum optimalnya perilaku masyarakat yang sesuai dengan protokol kesehatan 9. Belum optimalnya metode pelayanan publik alternatif menghadapi pandemi
3	Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	<ol style="list-style-type: none"> 1. Program-program pemberdayaan perempuan yang belum terkelola secara sistematis dan terpadu 2. Belum optimalnya perlindungan terhadap hak anak dan perempuan 3. Belum optimalnya Pengarustamaan Gender dalam Pembangunan 4. Masih terbatasnya fasilitas pendukung Kota Layak Anak 5. Belum optimalnya peran serta masyarakat terutama perempuan dalam pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak 6. Belum optimalnya metode pelayanan publik alternatif menghadapi pandemic
4	Sosial	<ol style="list-style-type: none"> 1. Rendahnya cakupan pelayanan terhadap penyandang masalah kesejahteraan sosial (PMKS) 2. Belum tersedianya secara memadai sarana, prasarana, dan sumber daya lain dalam pelaksanaan perlindungan dan rehabilitasi sosial 3. Rendahnya validitas dan reliabilitas data PMKS, dan penerima program Bantuan Sosial, dan program lainnya 4. Terbatasnya Potensi dan Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) 5. Belum optimalnya dukungan dan kerjasama antar pihak dalam penanganan masalah-masalah kesejahteraan sosial 6. Belum optimalnya metode pelayanan publik alternatif menghadapi pandemic
5	Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	<ol style="list-style-type: none"> 1. Belum optimalnya cakupan pelayanan KB 2. Terbatasnya jumlah dan fungsi petugas lapangan KB (PLKB) 3. Belum optimalnya pendidikan kesehatan reproduksi bagi remaja dan pasangan usia subur



NO	URUSAN	AKAR MASALAH
		4. Belum optimalnya metode pelayanan publik alternatif menghadapi pandemic
6	Kepemudaan dan Olahraga	<ol style="list-style-type: none"> 1. Terbatasnya kapasitas dan cakupan layanan pembinaan kepemudaan, olahraga, dan organisasi kepemudaan 2. Terbatasnya sarana, prasarana, dan SDM pelatih berkualitas dalam pembinaan prestasi olahraga 3. Belum optimalnya pembinaan kewirausahaan pemuda dan kepramukaan 4. Terbatasnya kapasitas pembinaan dan penghargaan terhadap atlet berprestasi 5. Belum optimalnya metode pelayanan publik alternatif menghadapi pandemic
7	Kebudayaan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Terbatasnya kapasitas pemeliharaan dan pemanfaatan benda cagar budaya (BCB) 2. Terbatasnya kapasitas pembinaan terhadap masyarakat adat 3. Terbatasnya kapasitas pelestarian kekayaan seni-budaya daerah 4. Belum optimalnya metode pelayanan publik alternatif menghadapi pandemi
8	Perpustakaan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Terbatasnya jumlah perpustakaan dan/ taman baca di desa 2. Rendahnya literasi masyarakat 3. Terbatasnya kapasitas layanan perpustakaan 4. Belum optimalnya metode pelayanan publik alternatif selama pandemi
9	Kearsipan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Terbatasnya kapasitas layanan kearsipan 2. Kurangnya sarana prasarana, dan sumberdaya pendukung sistem kearsipan yang sesuai standar 3. Belum optimalnya pemanfaatan teknologi dalam pengelolaan kearsipan
10	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	<ol style="list-style-type: none"> 1. Ketersediaan dan kondisi infrastruktur wilayah yang belum memadai 2. Terbatasnya kapasitas pemeliharaan jaringan irigasi, DAS, situ, danau, dan embung 3. Belum optimalnya pengendalian dan pengawasan terhadap pemanfaatan ruang
11	Perumahan Rakyat dan Permukiman	<ol style="list-style-type: none"> 1. Ketersediaan dan kondisi PSU Perumahan dan Permukiman yang belum memadai 2. Terbatasnya kapasitas dalam penyediaan dan/ fasilitasi pembangunan rumah layak huni 3. Terbatasnya partisipasi sektor swasta dalam penyediaan PSU, dan rumah layak huni dan terjangkau bagi masyarakat
12	Pertanahan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Belum terkelolanya data pertanahan secara sistematis dan terpadu 2. Belum optimalnya sertifikasi lahan-lahan milik Pemerintah Daerah 3. Belum optimalnya pemanfaatan lahan tidur dan pengelolaan lahan kritis
13	Perhubungan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kurangnya ketersediaan sarana dan prasarana transportasi 2. Belum optimalnya pengawasan serta pengendalian lalu lintas 3. Terbatasnya interkoneksi antarmoda transportasi 4. Masih kurangnya ketersediaan rambu-rambu keselamatan jalan 5. Rendahnya kesadaran masyarakat dalam berlalu lintas
14	Lingkungan Hidup	<ol style="list-style-type: none"> 1. Terbatasnya kapasitas layanan dan pengelolaan persampahan 2. Sarana dan prasarana persampahan yang belum memadai 3. Terbatasnya kapasitas dalam pengelolaan, pengendalian, dan pengawasan lingkungan hidup 4. Belum optimalnya pelaksanaan AMDAL



NO	URUSAN	AKAR MASALAH
		5. Rendahnya kesadaran dan peran serta masyarakat dalam pengelolaan lingkungan hidup
15	Komunikasi dan Informasi	<ol style="list-style-type: none"> 1. Belum optimalnya penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) di lingkungan pemerintah daerah 2. Terbatasnya jumlah dan kualitas SDM pengelola SPBE 3. Terbatasnya cakupan layanan fasilitasi pelayanan publik berbasis elektronik bagi OPD
16	Industri	<ol style="list-style-type: none"> 1. Terbatasnya cakupan layanan pembinaan industri kecil dan menengah (IKM) 2. Rendahnya produktifitas, mutu, dan daya saing produk IKM
17	Perdagangan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Terbatasnya kapasitas layanan urusan perdagangan 2. Belum optimalnya pengelolaan pasar dan 3. Belum optimalnya pengawasan dan penanganan pelanggaran perdagangan
18	Koperasi dan UMKM	<ol style="list-style-type: none"> 1. Terbatasnya cakupan layanan pembinaan Usaha Mikro dan Kecil (UMK) dan Koperasi 2. Belum optimalnya pembinaan UMK dan Koperasi 3. Belum memadainya dukungan dan kerjasama usaha menengah dan besar terhadap UMK
19	Pertanian	<ol style="list-style-type: none"> 1. Terbatasnya cakupan layanan urusan pertanian 2. Terbatasnya sarana prasarana, dan SDM penyuluh pertanian 3. Terbatasnya kapasitas pengawasan, pengendalian, kekarantinaan pada urusan pertanian
20	Kelautan dan Perikanan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Terbatasnya cakupan layanan urusan kelautan dan perikanan 2. Terbatasnya sarana prasarana, dan SDM kelautan dan perikanan 3. Belum optimalnya pembinaan dan pemberdayaan nelayan 4. Terbatasnya kapasitas pengawasan, pengendalian, dan kekarantinaan pada urusan kelautan dan perikanan
21	Penanaman Modal	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kapasitas pelayanan penanaman modal yang belum memadai 2. Belum optimalnya pelayanan perijinan 3. Belum efektifnya promosi penanaman modal 4. Rendahnya daya saing dan daya tarik investasi
22	Tenaga Kerja	<ol style="list-style-type: none"> 1. Terbatasnya kapasitas layanan urusan ketenagakerjaan 2. Sarana, prasarana, dan sumber daya pendukung urusan ketenagakerjaan yang belum memadai 3. Belum optimalnya penanganan perselisihan hubungan industrial
23	Pariwisata	<ol style="list-style-type: none"> 1. Belum memadainya infrastruktur pendukung industri pariwisata 2. Rendahnya daya tarik dan daya saing obyek / destinasi wisata 3. Belum berkembangnya usaha jasa dan industri pariwisata 4. Rendahnya investasi dan efektifitas promosi 5. Belum suportifnya perilaku dan kesadaran masyarakat 6. Belum optimalnya "DNA" pariwisata dalam program/kegiatan perangkat daerah pendukung
24	Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	<ol style="list-style-type: none"> 1. Belum efektifnya pemberdayaan masyarakat dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat 2. Belum optimalnya pelayanan publik di tingkat Desa 3. Terbatasnya kapasitas manajerial aparaturnya pemerintahan desa 4. Belum optimalnya pengelolaan dana desa
25	Ketentraman, Ketertiban, dan Perlindungan Masyarakat	<ol style="list-style-type: none"> 1. Terbatasnya kapasitas layanan urusan Tramtib dan Linmas 2. Rendahnya kesadaran hukum dan kepatuhan masyarakat 3. Belum optimalnya kemitraan masyarakat 4. Terbatasnya sarana dan prasarana operasional penegakan Perda



NO	URUSAN	AKAR MASALAH
26	Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil	<ol style="list-style-type: none"> 1. Terbatasnya cakupan dan kapasitas layanan admindukcapil 2. Rendahnya kesadaran masyarakat terhadap tertib administrasi kependudukan 3. Belum optimalnya pelayanan PATEN di bidang Admindukcapil
27	Ketahanan Pangan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Infrastruktur pendukung kemandirian pangan yang belum memadai 2. Belum optimalnya kampanye diversifikasi bahan pangan utama 3. Rendahnya kemandirian pangan keluarga melalui produksi bahan pangan secara mandiri dengan pemanfaatan lahan pekarangan secara produktif; 4. Belum efektifnya edukasi bahan pangan dan pengolahan pangan yang sehat dan aman; 5. Belum optimalnya pengentasan seluruh desa yang terkategori rawan pangan
28	Statistik dan Persandian	<ol style="list-style-type: none"> 1. Belum memadainya ketersediaan data statistik sektoral dalam mendukung proses perencanaan pembangunan yang berkualitas 2. Kecepatan penyediaan data serta sinkronisasi data antarperangkat darah masih menjadi kendala 3. Belum optimalnya penyelenggaraan pengamanan persandian; 4. Belum optimalnya perlindungan informasi yang otentik, utuh, terbebas dari kebocoran dan kerusakan informasi, serta memiliki kepastian hukum yang tinggi.
29	Transmigrasi	<ol style="list-style-type: none"> 1. Minat bertransmigrasi yang relatif rendah 2. Rendahnya keterpaduan pengelolaan ketransmigrasian antarpemerintah pusat dan daerah 3. Rendahnya efektivitas kerjasama antardaerah pengirim dan penempatan 4. Rendahnya jaminan biaya hidup dan dukungan penghidupan bagi transmigran pada masa transisi
30	Keuangan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Belum teridentifikasinya / terpetakannya potensi obyek pajak dan retribusi daerah secara menyeluruh 2. Rendahnya kapasitas intensifikasi pajak dan retribusi daerah 3. Terbatasnya pemanfaatan teknologi dalam pengumpulan / pemungutan pajak dan retribusi 4. Terbatasnya kerjasama antarstakeholders dalam pengelolaan perpajakan dan retribusi
31	Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Terbatasnya ASN yang mengikuti diklat struktural 2. Belum optimalnya manajemen SDM aparatur, baik dalam penentuan formasi, rekrutmen, penempatan, pembinaan, promosi, mutasi, hingga terminasi 3. Belum optimalnya kompetensi ASN dalam menunjang pelaksanaan urusan pemerintahan 4. Belum teridentifikasi / terpetakannya kebutuhan Diklat fungsional yang dibutuhkan masing-masing perangkat daerah 5. Belum memadainya kapasitas penyelenggara Diklat aparatur dalam memenuhi kebutuhan
32	Pengawasan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Terbatasnya jumlah dan kompetensi auditor 2. Terbatasnya kapasitas sistem pengawasan internal 3. Rendahnya partisipasi publik dalam pencegahan maupun pengawasan penyelenggaraan pemerintahan daerah
33	Perencanaan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Belum optimalnya keterpaduan perencanaan pembangunan antarperangkat daerah



NO	URUSAN	AKAR MASALAH
		<ol style="list-style-type: none"> 2. Belum memadainya kapasitas perencana dalam mengoperasionalisasi secara terukur visi dan misi kepala daerah 3. Belum optimalnya pemanfaatan teknologi dalam meningkatkan efektifitas perencanaan
34	Penelitian dan Pengembangan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Belum terpadunya pelaksanaan kelitbangan antarperangkat daerah; 2. Terbatasnya kapasitas kelitbangan dan sistem inovasi daerah 3. Belum optimalnya pemanfaatan hasil kelitbangan dalam menunjang penyelenggaraan urusan pemerintah daerah 4. Terbatasnya kolaborasi antarkelembagaan kelitbangan

Sumber : Bapelitbangda Kab. Lebak.

B. Visi dan Misi

Visi dan Misi Pembangunan Daerah dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) adalah Visi dan Misi kepala daerah dan wakil kepala daerah terpilih yang disampaikan pada waktu Pemilihan Kepala Daerah. Visi dan Misi kepala daerah dan wakil kepala daerah terpilih menggambarkan arah pembangunan atau kondisi masa depan daerah yang ingin dicapai (*desired future*) dalam masa jabatan selama 5 (lima) tahun sesuai misi yang diemban.

Visi dan misi Kabupaten Lebak adalah gambaran tentang kondisi Kabupaten Lebak yang diharapkan terwujud pada akhir periode Rencana Pembangunan Menengah Daerah (RPJMD) yaitu tahun 2024. Rumusan visi dan misi ini terdiri dari pernyataan visi, pokok - pokok visi, penjelasan pernyataan misi, dan penjelasan pokok-pokok misi. Perumusan visi dan misi merupakan salah satu tahap penting dalam penyusunan dokumen perencanaan daerah sebagai hasil dari analisis permasalahan utama yang terjadi di Kabupaten Lebak. Dalam RPJMD Kabupaten Lebak telah ditetapkan Visi dan Misi sebagai berikut :

1. Visi

Merujuk pada Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, RPJMD disusun salah satunya dengan pendekatan politis, yaitu penterjemahan visi dan misi kepala daerah terpilih ke dalam dokumen perencanaan pembangunan jangka menengah yang dibahas bersama dengan DPRD (pasal 261 ayat 4). Karenanya substansi RPJMD pada dasarnya merupakan penjabaran dari visi, misi, dan program kepala daerah yang memuat tujuan, sasaran, strategi, arah kebijakan, pembangunan Daerah dan keuangan Daerah, serta program Perangkat Daerah dan lintas Perangkat Daerah yang disertai dengan kerangka pendanaan bersifat indikatif untuk jangka waktu 5 (lima) tahun yang disusun dengan berpedoman pada RPJPD dan RPJMN (pasal 263 ayat 3).

Visi kepala daerah terpilih yang akan difokuskan pada upaya mewujudkan **“Kabupaten Lebak sebagai Destinasi Wisata Unggulan Nasional Berbasis Potensi Lokal”** merupakan langkah terobosan yang dipilih bagi percepatan pembangunan ekonomi daerah yang sekaligus merupakan kontekstualisasi dari visi RPJPD yang bertujuan memajukan wilayah perdesaan, yang secara faktual memiliki potensi besar di sektor



kepariwisataan. Dan dengan pilihan pada sektor kepariwisataan ini diyakini akan mampu menumbuhkan dan mengintegrasikan beragam sektor secara optimal, termasuk didalamnya adalah sektor pertanian yang saat ini menjadi sumber penghidupan utama masyarakat perdesaan. Untuk mencapai Visi Kepala Daerah tersebut, tentunya diperlukan program prioritas yang akan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dalam penentuan program pembangunan pada tahun 2019-2024.

Berdasarkan visi RPJPD Tahun 2005-2025, serta visi kepala daerah sebagaimana dijelaskan di atas, maka visi RPJMD Kabupaten Lebak Tahun 2019-2024 diarahkan guna mewujudkan :

**“Lebak Sebagai Destinasi Wisata Unggulan Nasional
Berkbasis Potensi Lokal”**

Terdapat dua frasa kunci yang menjadi karakteristik kondisi yang ingin dicapai dalam visi di atas, yaitu : destinasi wisata unggulan nasional, dan berbasis potensi lokal. Destinasi wisata unggulan nasional, menggambarkan kondisi terwujudnya Kabupaten Lebak sebagai salah satu daerah tujuan wisata berskala nasional, memiliki *event* wisata yang terdaftar sebagai *event* wisata nasional dalam kalender pariwisata nasional, serta memiliki daya dukung yang memadai bagi pengembangan industri pariwisata di masa depan. Sedangkan frasa “berbasis potensi lokal” merupakan penegasan komitmen terhadap pengembangan beragam potensi lokal, baik potensi masyarakat (SDM), potensi sumber daya alam, potensi kebudayaan, serta beragam potensi sosial-ekonomi yang dimiliki Kabupaten Lebak. Beragam potensi lokal tersebut akan dikembangkan secara integratif melalui pengembangan sektor pariwisata sebagai *leading sector*-nya sehingga diharapkan mampu mengakselerasi pembangunan ekonomi daerah serta sekaligus mewujudkan peningkatan kesejahteraan masyarakat.

2. Misi

Upaya mewujudkan visi di atas akan ditempuh melalui 5 (lima) misi sebagai berikut:

- a. Mengoptimalkan pembangunan manusia;
- b. Mengoptimalkan pemulihan ekonomi daerah;
- c. Meningkatkan kualitas infrastruktur wilayah;
- d. Memelihara kualitas lingkungan hidup; dan
- e. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik.

Misi pertama, mengoptimalkan pembangunan manusia, merupakan kontekstualisasi dari rumusan misi sebelumnya yaitu meningkatkan kualitas dan daya saing sumber daya manusia. Formulasi misi pertama ini memiliki ruang lingkup yang jauh lebih luas dari rumusan sebelumnya, yang diformulasi dalam rangka menjawab permasalahan pembangunan daerah permasalahan pembangunan daerah tentang pembangunan manusia. Misi ini bertujuan meningkatnya kualitas hidup masyarakat Kabupaten Lebak, sehingga ruang lingkup misi ini mencakup beberapa urusan, yaitu: pendidikan, kesehatan, sosial, kepemudaan dan olahraga, ketenagakerjaan, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, kebudayaan,



pengendalian penduduk dan keluarga berencana, pemberdayaan masyarakat dan desa, pengentasan kemiskinan dan pemberdayaan sosial-ekonomi. Dengan misi ini diharapkan dapat diwujudkan kondisi sumberdaya manusia yang berkualitas dan berdaya saing dengan kompetensi yang mumpuni, kreatif, inovatif dan berkarakter yang didukung dengan moralitas yang berbasis nilai-nilai agama yang kokoh.

Misi kedua, mengoptimalkan pemulihan ekonomi daerah, merupakan kontekstualisasi dari rumusan misi sebelumnya yaitu meningkatkan produktifitas perekonomian daerah melalui pengembangan pariwisata. Misi ini dirumuskan dalam rangka menjawab permasalahan daerah tentang pembangunan ekonomi. Misi ini bertujuan meningkatnya pertumbuhan ekonomi yang berkualitas dan pemerataan kesejahteraan masyarakat, yang akan ditempuh melalui pencapaian sasaran strategis pada 10 (sepuluh) urusan, yaitu: urusan pariwisata, penanaman modal, ketahanan pangan; pertanian, perkebunan dan peternakan; perikanan dan kelautan; ketenagakerjaan, perdagangan, perindustrian; serta koperasi dan UMKM. Dengan menjadikan pariwisata sebagai sektor pemimpin pembangunan ekonomi, diyakini akan mengubah wajah perekonomian daerah dalam jangka panjang sehingga Kabupaten Lebak tidak lagi hanya menjadi penyedia bahan baku yang dihasilkan dari sektor pertanian, perikanan, perkebunan; namun juga semakin berkembang beragam jenis aktifitas ekonomi dan ekonomi kreatif yang mampu menggerakkan usaha/industri kecil dan menengah serta meningkatnya keberdayaan dan pemerataan kesejahteraan masyarakat.

Misi ketiga, meningkatkan kualitas infrastruktur wilayah, diformulasi dalam menjawab permasalahan pembangunan daerah tentang pembangunan kewilayahan (Infrastruktur, Lingkungan Hidup, Penataan Ruang, dan Kebencanaan).

Misi keempat, memelihara kualitas lingkungan hidup, merupakan kontekstualisasi dari rumusan misi sebelumnya yaitu meningkatkan kualitas lingkungan hidup, dipromosikan dalam rangka menjawab sejumlah permasalahan tentang Pembangunan Kewilayahan. Cakupan dari misi ini adalah mencapai sejumlah sasaran yang terdapat pada paling tidak 7 (tujuh) urusan yang menjadi kewenangan pemerintahan daerah, yaitu: urusan lingkungan hidup, ketahanan pangan, penataan ruang, kehutanan, pertanian, kepariwisataan, perindustrian, pemberdayaan masyarakat dan desa, serta kelautan dan perikanan dalam konteks konservasi sumber daya kelautan.

Misi kelima, mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik, merupakan misi yang bertujuan menjawab sejumlah permasalahan tentang upaya mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik. Ruang lingkup dari misi ini beririsan dengan sejumlah bidang yang menjadi urusan pemerintah daerah, yaitu: urusan ketentraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat; urusan pemberdayaan masyarakat dan desa; urusan komunikasi dan informatika; urusan statistik; persandian; kearsipan; serta beragam urusan penunjang yang terkait dengan pelaksanaan beragam urusan



wajib dan pilihan pemerintahan daerah, seperti: keuangan, aset, perencanaan, dan kepegawaian.

C. Program Pembangunan Daerah Berdasarkan Dokumen Perencanaan Jangka Menengah

Berdasarkan identifikasi atas 4 (empat) permasalahan dan 13 (tiga belas) isu strategis pembangunan daerah yang dikontekstualisasi dengan visi dan misi kepala daerah, operasionalisasi dalam 5 (lima) tujuan dengan 6 (enam) indikator tujuan, serta 10 (sepuluh) sasaran pembangunan daerah dengan 22 (dua puluh dua) indikator sasaran. Untuk mencapai tujuan dan sasaran dimaksud, dijabarkan dalam program perangkat daerah yang berjumlah 147 program pada Tahun 2019 dan 2020, dan mengalami perubahan menjadi 125 program untuk Tahun 2021-2024 sesuai dengan amanat Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 Tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah sebagaimana telah dimutakhirkan dengan Keputusan Menteri Nomor 050-3708 Tahun 2020, yang terbagi kedalam 6 urusan wajib yang terkait dengan pelayanan dasar, 18 urusan wajib non pelayanan dasar, 6 urusan pilihan, dan 5 unsur pelengkap pemerintahan (Unsur Pendukung, Unsur Penunjang, Unsur, Pengawas, Unsur Kewilayahan, dan Unsur Pemerintahan Umum). Secara lebih lengkap program pembangunan daerah dimaksud diuraikan pada tabel berikut :

Tabel 1.17
Indikasi Rencana Program Prioritas yang disertai Kebutuhan Pendanaan Kabupaten Lebak

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program	Indikator Kinerja Awal RPJMD	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan 2021		SKPD Penanggung Jawab
				Target	Rp.	
11		URUSAN WAJIB PELAYANAN DASAR			812.184.869.680	
11	1	PENDIDIKAN			249.208.391.600	
11	1	15	Program Pendidikan Anak Usia Dini			Dinas Pendidikan
		1	Angka Partisipasi Kasar (APK) PAUD (Satuan: %)	29.90		
11	1	16	Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun			Dinas Pendidikan
		1	Angka Partisipasi Kasar (APK) SMP (Satuan: %)	99.00		
		2	Angka Partisipasi Murni (APM) SMP (Satuan: %)	86.00		
		3	Angka Partisipasi Murni (APM) SD (Satuan: %)	98.98		
11	1	18	Program Pendidikan Non Formal			Dinas Pendidikan
		1	Angka Melek Huruf (AMH) (Satuan: %)	98.48		
		2	Jumlah bantuan Sarana dan Prasarana MDTA/Mebelair (Satuan: Ruang Kelas)	26.00		
11	1	20	Program Pendidikan Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan			Dinas Pendidikan
		1	Persentase guru bersertifikat pendidik (Satuan: %)	77.90		



Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program	Indikator Kinerja Awal RPJMD	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan 2021		SKPD Penanggung Jawab	
				Target	Rp.		
		2	Angka Kelulusan SD (Satuan: %)	98.13			
		3	Angka Kelulusan SMP (Satuan: %)	94.78			
11	1	22	Program Manajemen Pelayanan Pendidikan				Dinas Pendidikan
		1	Persentase sekolah SD berakreditasi A (Satuan: %)	4.20			
		2	Persentase sekolah SMP berakreditasi A (Satuan: %)	10.40			
11	1	23	Program BOS				Dinas Pendidikan
		1	Angka Putus sekolah SD (Satuan: %)	0.22			
		2	Angka Putus sekolah SMP (Satuan: %)	0.10			
		3	Angka Melanjutkan SD ke SMP (Satuan: %)	94.77			
		4	Angka melanjutkan SMP ke SMA (Satuan: %)	86.79			
			Program Pengelolaan Pendidikan				Dinas Pendidikan
		1	Rata-Rata Lama Sekolah	6,4 Tahun	6,47 Tahun	249.208.391.600	
11	2		KESEHATAN			229.987.042.048	
11	2	15	Program Obat dan Perbekalan Kesehatan				Dinas Kesehatan
		1	Persentase Puskesmas Terpenuhi Kebutuhan Obat Secara Tepat dan Rasional (Satuan: %)	50.00			
11	2	16	Program Upaya Kesehatan Masyarakat				Dinas Kesehatan
		1	Persentase keluarga sehat (Satuan: %)	11.00			
		2	Persentase puskesmas terakreditasi minimal madya (Satuan: %)	11.90			
		3	Rasio Rujukan kasus Non Spesialistik (RRNS) dari Puskesmas ke Rumah Sakit (Satuan: %)	4.76			
11	2	19	Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat				Dinas Kesehatan
		1	Cakupan pembinaan PHBS di tatanan kesehatan (Satuan: %)	65.00			
11	2	21	Program Pengembangan Lingkungan Sehat				Dinas Kesehatan
		1	Jumlah Desa ODF (Satuan: Desa)	33.00			
11	2	22	Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular				Dinas Kesehatan
		1	Cakupan penemuan dan penanganan penderita penyakit menular (Satuan: %)	70.00			
11	2	23	Program Standarisasi Pelayanan Kesehatan				Dinas Kesehatan
		1	Ketersediaan sumber daya manusia kesehatan sesuai dengan standar minimal ketenagaan di setiap puskesmas (Satuan: %)	10.00			
11	2	24	Program Pelayanan Kesehatan Penduduk Miskin				Sekretariat Daerah
		1	Jumlah pelaksanaan sosialisasi jamsos (Satuan: kecamatan)	28.00			
11	2	25	Program Pengadaan, Peningkatan dan Perbaikan Sarana dan Prasarana Puskesmas/ Puskesmas Pembantu dan Jaringannya				Dinas Kesehatan



Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program	Indikator Kinerja Awal RPJMD	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan 2021		SKPD Penanggung Jawab
				Target	Rp.	
		1	Persentase sarana dan prasarana dalam kondisi baik (Satuan: %)	67.00		
11 2 26	Program Pengadaan, Peningkatan Sarana dan Prasarana Rumah Sakit/ Rumah Sakit Jiwa/Rumah Sakit Paru-Paru/Rumah Sakit Mata					RSUD
		1	Persentase terpenuhinya kebutuhan Sarana dan Prasarana Rumah Sakit (Satuan: %)	80.00		
11 2 32	Program Peningkatan Keselamatan Ibu Melahirkan dan Anak					Dinas Kesehatan
		1	Persentase pelayanan kesehatan keluarga (Satuan: %)	70.00		
11 2 33	Program Peningkatan dan Pengembangan Badan Layanan Umum Daerah (BLUD)					RSUD
		1	Indek Kepuasan Masyarakat terhadap layanan RSUD (Satuan: %)	80.00		
11 2 34	Program jaminan Kesehatan Nasional					Dinas Kesehatan
		1	Cakupan Angka Kontak (Satuan: 0/00 (permil))	11.90		
11 2 35	Program Bantuan Operasional Kesehatan					Dinas Kesehatan
		1	Persentase Puskesmas yang melaksanakan manajemen sesuai standar (Satuan: %)	100.00		
11 2 36	Program Pengembangan Kesehatan Lingkungan dan Pemberdayaan Masyarakat					Dinas Kesehatan
		1	Persentase Desa ODF (Satuan: %)	9.57		
		2	Cakupan pembinaan PHBS di tatanan kesehatan (Satuan: %)	65.00		
11 2 37	Program Pencegahan dan Pengendalian Penyakit					Dinas Kesehatan
		1	Persentase pelayanan pencegahan dan pengendalian penyakit sesuai standar (Satuan: %)	67.00		
11 2 38	Program Peningkatan Kesehatan Keluarga dan Gizi Masyarakat					Dinas Kesehatan
		1	Persentase pelayanan kesehatan keluarga sesuai standar (Satuan: %)	75.28		
		2	Persentase balita kurang Gizi mendapat perawatan (Satuan: %)	80.00		
11 2 39	Program Peningkatan Sumber Daya Kesehatan, Farmasi serta Pengawasan Obat dan Makanan					Dinas Kesehatan
		1	Persentase Puskesmas dengan sarana dan prasarana sesuai standar (Satuan: %)	48.00		
		2	Persentase Puskesmas dengan tenaga kesehatan sesuai standar (Satuan: %)	20.00		
		3	Persentase ketersediaan obat dan BMHP sesuai Formularium Nasional (Fornas) (Satuan: %)	91.00		
		4	Persentase puskesmas yang melaksanakan SIKDA (Satuan: %)	82.92		



Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program	Indikator Kinerja Awal RPJMD	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan 2021		SKPD Penanggung Jawab
				Target	Rp.	
	Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan					Dinas Kesehatan
		1 Usia Harapan Hidup (UHH)		67.54	405.973.700	
	Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan					Dinas Kesehatan
		1 Indeks Keluarga Sehat				
	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat				189.991.789.328	Dinas Kesehatan
		1 Indek Kepuasan Masyarakat terhadap layanan RSUD		86 0		
		2 Terpenuhinya Kebutuhan Sarana dan Prasarana Rumah Sakit		85 Persen		
		3 Usia harapan Hidup (UHH)		67,54		
		4 Persentase tingkat capaian SPM				
	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan					Dinas Kesehatan
		1 Usia harapan Hidup (UHH)		67.54	39.401.363.020	
		2 Persentase legalitas tenaga kesehatan yang melaksanakan pelayanan kesehatan sesuai standar				
	Program Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan Dan Makanan Minuman					Dinas Kesehatan
		1 Usia Harapan Hidup (UHH)		67,54	187.916.000	
		2 persentase industri rumah tangga dan farmasi sesuai standar				
11 3	PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG				298.633.103.817	
11 3 15	Program Pembangunan Jalan dan Jembatan					PUPR
		1 Persentase jalan terbangun (Satuan: %)	68.33			
11 3 18	Program Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan dan Jembatan					PUPR
		1 Persentase jalan kabupaten terpelihara / ditingkatkan (Satuan: %)	32.39			
		2 persentase jembatan kabupaten dalam kondisi baik (Satuan: %)	50.88			
		3 persentase jalan dalam kota kabupaten yang memiliki trotoar dan drainase/saluran (Satuan: %)	14.82			
11 3 23	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Kebinamargaan					PUPR
		1 Persentase alat berat dalam kondisi baik (Satuan: %)	78.79			
11 3 24	Program Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi, Rawa dan Jaringan Pengairan Lainnya					PUPR
		1 Persentase irigasi Kabupaten dalam Kondisi Baik (Satuan: %)	69.85			
11 3 26	Program Pengembangan, Pengelolaan, dan Konservasi Sungai, Danau dan Sumber Daya Air Lainnya					PUPR
		1 Persentase pembangunan penampung air (embung) (Satuan: %)	92.96			
11 3 27	Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Air Minum dan Air Limbah					PUPR
		1 Persentase akses air minum (Satuan: %)	64.40			



Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program	Indikator Kinerja Awal RPJMD	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan 2021		SKPD Penanggung Jawab
				Target	Rp.	
		2	Persentase akses sanitasi (air limbah) (Satuan: %)	70.82		
11 3 28	Program Pengendalian Banjir					BPBD, BAPPEDA, DISTANBUN , PUPR
		1	persentase berkurangnya kawasan yang terkena dampak banjir (Satuan: %)	80.50		
11 3 29	Program Pengembangan Wilayah Strategis dan Cepat Tumbuh					PUPR
		1	Persentase ketersediaan Fasum di kecamatan (Satuan: %)	51.22		
11 3 30	Program Pembangunan Infrastruktur Perdesaan					PUPR
		1	persentase panjang Jalan perdesaan yang terbangun (Satuan: %)	76.50		
		2	Persentase jembatan pedesaan yang terbangun (Satuan: %)	53.13		
11 3 31	Program Perencanaan Tata Ruang					PUPR
		1	persentase dokumen rencana tata ruang di susun (Satuan: %)	0.00		
11 3 32	Program Pengendalian Pemanfaatan Ruang					PUPR
		1	Persentase kesesuaian pemanfaatan ruang terhadap rencana tata ruang (Satuan: %)	70.00		
11 3 33	Program Pembinaan Jasa Konstruksi					PUPR
		1	Persentase layanan informasi jasa konstruksi (Satuan: %)	75.00		
		2	Persentase tenaga kerja bersertifikat (Satuan: %)	16.67		
	Program Pengembangan Jasa Konstruksi					Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
		1	Persentase layanan informasi jasa konstruksi		100 Persen	495.000.000
	Program Penataan Bangunan Gedung					Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
		1	Persentase bangunan gedung pemerintah dalam kondisi baik		80,72 persen	7.354.137.750
	Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Drainase					Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
		1	persentase saluran drainase perkotaan dalam kondisi baik		66,35 persen	
	Program Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA)					Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
		1	Persentase ketersediaan air untuk irigasi		71,04 persen	29.956.554.500
	Program Penataan Bangunan Dan Lingkungannya					Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
		1	persentase penataan bangunan dan lingkungan		3,30 persen	4.033.824.350
	Program Penyelenggaraan Jalan					Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang



Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program	Indikator Kinerja Awal RPJMD	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan 2021		SKPD Penanggung Jawab
				Target	Rp.	
		1 persentase jalan dalam kondisi mantap		68,57 persen	212.465.306.037	
	Program Penyelenggaraan Penataan Ruang					Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
		1 persentase Kesesuaian tata ruang		100 persen	419.999.900	
	Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Air Limbah					Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
		1 persentase akses sanitasi (air Limbah)		73,07 persen	18.694.373.050	
	Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum					Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
		1 presentase cakupan air minum		65,30 persen	24.773.060.280	
	Program Pengembangan Permukiman					Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
		1 persentase jumlah desa binaan P2WKSS tertata		100 persen	440.847.950	
11 4	PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN				21.424.964.055	
11 4 15	Program Pengembangan Perumahan					DPRKPP
		1 Persentase Rumah Tidak Layak Huni (Satuan: %)	13.67			
11 4 16	Program Lingkungan Sehat Perumahan					DPRKPP
		1 Persentase Peningkatan Penanganan Perumahan dengan PSU Layak (Satuan: %)	16.00			
11 4 21	Program Pembangunan Infrastruktur Permukiman					DPRKPP
		1 Persentase Penanganan Kawasan Kumuh di Perkotaan (Satuan: %)	149.99			
	Program Kawasan Permukiman					DPRKPP
		1 Persentase kawasan kumuh di perkotaan		1,49 persen	5.627.273.400	
	Program Pengembangan Perumahan					DPRKPP
		1 Persentase rumah layak huni bagi korban bencana atau relokasi program Kabupaten		100 persen	6.797.277.935	
	Program Peningkatan Prasarana, Sarana Dan Utilitas Umum (PSU)					DPRKPP
		1 persentase perumahan dengan PSU memenuhi syarat		85,37 persen	3.332.924.700	
	Program Perumahan Dan Kawasan Permukiman Kumuh					DPRKPP
		1 persentase masyarakat yang menghuni rumah layak huni		85,55 persen	5.667.488.020	
11 5	KETENTERAMAN, KETERTIBAN UMUM DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT				8.808.337.350	
11 5 15	Program Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan					KESBANGPOL, SATPOL PP
		1 Cakupan pelaksanaan koordinasi pengendalian keamanan dan kenyamanan lingkungan (Satuan: %)	100.00			
		2 Persentase penegakan Perda (Satuan: %)	90.00			



Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program	Indikator Kinerja Awal RPJMD	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan 2021		SKPD Penanggung Jawab
				Target	Rp.	
		3	Tercapainya tingkat respon time pengaduan kebakaran (10 - 15 Menit setelah pengaduan) (Satuan: %)	100.00		
11 5 16	Program Pembinaan, Pemeliharaan Kantramtibmas dan Pencegahan Tindak Kriminal					SATPOL PP
		1	Presentase Penegakkan Perda (Satuan: %)	90.00		
11 5 19	Program Peningkatan Kesiagaan dan Pencegahan Bahaya Kebakaran					SATPOL PP
		1	Tingkat Waktu Tanggap (Response time) pengaduan kebakaran (<15 Menit Setelah Pengaduan) (Satuan: %)	80.00		
11 5 20	Program Peningkatan Pemerantasan Penyakit Masyarakat (PEKAT)					KESBANGPOL, SATPOL PP
		1	Persentase penurunan penyalahgunaan miras dan prostitusi (Satuan: %)	10.00		
		2	persentase penurunan PEKAT (Satuan: %)	100.00		
	Program Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran Dan Penyelamatan Non Kebakaran					Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran
		1	Cakupan pencegahan dan penanggulangan serta penyelamatan terhadap bahaya kebakaran dan non kebakaran		100 Persen	223.500.000
	Program Peningkatan Ketenteraman Dan Ketertiban Umum					Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran
		1	Prosentase Penegakan Perda		90 Persen	4.034.124.500
	Program Penanggulangan Bencana					BPBD
		1	cakupan penanganan bencana		100 persen	4.550.712.850
11 6	SOSIAL					4.123.030.810
11 6 15	Program Pemberdayaan Fakir Miskin Komunitas Adat Terpencil (KAT) dan Penyandang masalah Kesejahteraan Sosial Lainnya.					DINAS SOSIAL
		1	Terpenuhinya sarana prasarana usaha bagi Kelompok Usaha Bersama (KUBE), PRSE, KAT (Satuan: Klp)	10.00		
		2	Terpenuhinya sarana prasarana usaha bagi Kelompok Usaha Bersama (KUBE), PRSE, KAT (Satuan: Orang)	20.00		
		2	Terpenuhinya sarana prasarana usaha bagi Kelompok Usaha Bersama (KUBE), PRSE, KAT (Satuan: Desa)	20.00		
11 6 16	Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial					DINAS SOSIAL
		1	Cakupan PMKS memperoleh Penanganan Rehabilitasi dan	100.00		



Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program	Indikator Kinerja Awal RPJMD	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan 2021		SKPD Penanggung Jawab
				Target	Rp.	
		Pemberdayaan Sosial (Satuan: %)				
11 6 17	Program Pembinaan Anak Terlantar					DINAS SOSIAL
		1 Jumlah anak terlantar memperoleh pendidikan formal/non formal (Satuan: Orang)	20.00			
11 6 18	Program Pembinaan Para Penyandang Cacat dan Trauma					DINAS SOSIAL
		1 Jumlah penyandang disabilitas dan eks trauma yang tertangani (Satuan: Orang)	20.00			
		1 Jumlah orang dengan gangguan jiwa (ODGJ) dan orang terlantar (OT) tertangani (Satuan: Orang)	45.00			
11 6 20	Program Pembinaan Eks Penyandang Penyakit Sosial (Eks Narapidana, PSK, Narkoba dan Penyakit Sosial Lainnya)					DINAS SOSIAL
		1 Jumlah eks penyandang penyakit sosial (eks Napi, PSK, Narkoba dan Penyakit Sosial lainnya) memiliki usaha (Satuan: Orang)	20.00			
11 6 21	Program Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial					DINAS SOSIAL
		1 Persentase Pelaku-Pelaku Usaha Kesejahteraan Sosial Masyarakat (Satuan: %)	50.00			
11 6 22	Program Pengelolaan Areal Pemakaman					DINAS SOSIAL
		1 Terpeliharanya Areal Pemakaman (Satuan: Lokasi)	2.00			
		2 Jumlah Jenazah yang diurus (Satuan: orang Non PNS)	10.00			
11 6 23	Program Perlindungan dan Jaminan Sosial					DINAS SOSIAL
		1 Cakupan PMKS memperoleh Perlindungan dan Jaminan Sosial (Satuan: %)	100.00			
11 6 24	Program Rehabilitasi dan Pemberdayaan Sosial					DINAS SOSIAL
		1 Cakupan PMKS memperoleh Penanganan Rehabilitasi dan Pemberdayaan Sosial (Satuan: %)	100.00			
	Program Pemberdayaan Sosial					DINAS SOSIAL
		1 Persentase Penurunan PPKS (Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial)		100 persen	245.963.200	
		2 Persentase penanganan potensi sumber kesejahteraan sosial daerah				
	Program Penanganan Bencana					DINAS SOSIAL
		1 Persentase Penurunan PPKS (Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial)		100 persen	3.223.417.960	
		2 persentase terpenuhinya kebutuhan dasar bagi pengungsi/penyintas korban bencana				



Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program	Indikator Kinerja Awal RPJMD	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan 2021		SKPD Penanggung Jawab
				Target	Rp.	
		Program Penanganan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan				DINAS SOSIAL
		1 Persentase Penurunan PPKS (Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial)		100 persen	9.000.000	
		2 persentase pelayanan dan penanganan Warga Negara migran yang menjadi korban tindak kekerasan				
		Program Pengelolaan Taman Makam Pahlawan				DINAS SOSIAL
		1 Jumlah Taman Makam terpelihara		1 unit	51.940.800	
		2 Persentase pengelolaan taman makam pahlawan kabupaten				
		Program Rehabilitasi Sosial				DINAS SOSIAL
		1 Persentase Penurunan PPKS (Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial)		100 persen	432.194.500	
		2 persentase pelayanan rehabilitasi sosial dasar bagi PPKS				
		Program Perlindungan Dan Jaminan Sosial				DINAS SOSIAL
		1 Persentase Penurunan PPKS (Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial)		100 persen	160.514.350	
		2 persentase terpenuhinya perlindungan dan jaminan sosial bagi PPKS				
12		URUSAN WAJIB NON PELAYANAN DASAR			61.824.536.791	
12	1	TENAGA KERJA			851.560.686	
12	1	Program Peningkatan Kualitas dan Kesejahteraan Tenaga Kerja				DINAS TENAGA KERJA
		1 Rasio Daya Serap Tenaga Kerja (Satuan: %)	13.00			
		2 Standarisasi BLK (Satuan: Kelas)	0.00			
		3 Persentase Perusahaan yang tertib hukum ketenagakerjaan (Satuan: %)	38.20			
		Program Hubungan Industrial				DINAS TENAGA KERJA
		1 Presentase Penyelesaian hubungan industrial		100 persen	190.101.100	
		Program Pelatihan Kerja Dan Produktivitas Tenaga Kerja				DINAS TENAGA KERJA
		1 Produktivitas Tenaga Kerja		39.322.556.88 Rupiah	554.300.986	
		Program Penempatan Tenaga Kerja				DINAS TENAGA KERJA
		1 Rasio daya serap tenaga kerja		75 persen	107.158.600	
		2 Persentase pencari kerja yang ditempatkan				
12	2	PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK			984.740.700	
12	2	Program Keserasian Kebijakan Peningkatan Kualitas Anak dan Perempuan				DP3AP2KB
		1 Presentase Lembaga Pemenuhan hak Anak yang terbentuk dan aktif (Satuan: %)	75.00			



Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program	Indikator Kinerja Awal RPJMD	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan 2021		SKPD Penanggung Jawab
				Target	Rp.	
		2	Cakupan perempuan dan anak korban kekerasan yang mendapatkan penanganan pengaduan oleh petugas terlatih di dalam unit pelayanan terpadu (Satuan: %)	100.00		
12 2 16	Program Peningkatan Kualitas Hidup Perempuan dan Perlindungan Anak					DP3AP2KB
		1	Presentase perempuan dalam pelaksanaan pembangunan (Satuan: %)	100.00		
		2	Cakupan Stakeholder yang mampu menyusun perencanaan & penganggaran yang responsif gender (Satuan: %)	100.00		
		3	Presentase Lembaga Pemenuhan hak Anak yang terbentuk dan aktif (Satuan: %)	75.00		
		4	Cakupan perempuan dan anak korban kekerasan yang mendapatkan penanganan pengaduan oleh petugas terlatih di dalam unit pelayanan terpadu (Satuan: %)	100.00		
12 2 17	Program Peningkatan Kualitas Hidup dan Perlindungan Perempuan					DP3AP2KB
		1	Presentase perempuan dalam pelaksanaan pembangunan (Satuan: %)	100.00		
		2	Cakupan Stakeholder yang mampu menyusun perencanaan & penganggaran yang responsif gender (Satuan: %)	100.00		
	Program Pemenuhan Hak Anak (PHA)					DP3AP2KB
		1	Presentase penanganan kasus kekerasan anak		100 persen	78.284.800
		2	Presentase Lembaga Masyarakat yang Aktif dalam Lembaga Perlindungan dan Pemenuhan Hak Anak	100%		
	Program Pengarusutamaan Gender Dan Pemberdayaan Perempuan					DP3AP2KB
		1	Proporsi perempuan dalam bidang pembangunan	100%	100 Persen	449.658.900
	Program Perlindungan Khusus Anak					DP3AP2KB
		1	Presentase penanganan kasus kekerasan anak	100%	100 persen	456.797.000
12 3	KETAHANAN PANGAN					2.936.487.050
12 3 16	Program Peningkatan Ketahanan Pangan					KETAPANG
		1	Skor Pola Pangan Harapan (PPH) (Satuan: %)	73.70		
		2	Porsentase Pangan Aman (Satuan: %)	86.00		
	Program Penanganan Kerawanan Pangan					Dinas Ketahanan Pangan



Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program	Indikator Kinerja Awal RPJMD	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan 2021		SKPD Penanggung Jawab	
				Target	Rp.		
		1	Prosentase penurunan jumlah desa rawan pangan				
		1	Persentase Desa Rawan Pangan Yang Tertangani	0.00	7,58%	161.841.400	
	Program Pengawasan Keamanan Pangan						
		1	Prosentase Pangan Aman	93,40%	87%	230.530.300	
	Program Pengelolaan Sumber Daya Ekonomi Untuk Kedaulatan Dan Kemandirian Pangan						
		1	Angka Kecukupan Gizi				
	Program Pengelolaan Sumber Daya Ekonomi Untuk Kedaulatan Dan Kemandirian Pangan						
		1	Persentase Angka Kecukupan Gizi Berdasarkan Ketersediaan Pangan		90%	658.100.000	
	Program Peningkatan Diversifikasi Dan Ketahanan Pangan Masyarakat						
		1	Skor Pola Pangan Harapan	83,80 skor	83 Skor	1.886.015.350	
12	4	PERTANAHAN					786.320.000
12	4	16	Program Penataan Penguasaan, Pemilikan, Penggunaan dan Pemanfaatan Tanah			DPRKPP	
		1	Persentase penguasaan Tanah bagi Kepentingan Umum (Satuan: %)	0.00			
12	4	17	Program Penyelesaian Konflik-Konflik Pertanahan			DPRKPP	
		1	Persentase Penyelesaian Konflik Sengketa Pertanahan (Satuan: %)	0.00			
	Program Penatagunaan Tanah						
		1	persentase koordinasi dan sinkronisasi perencanaan penggunaan tanah		100 persen	75.000.000	
	Program Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan						
		1	persentase penyelesaian tanah garapan		100 persen	152.020.000	
	Program Redistribusi Tanah, Serta Ganti Kerugian Program Tanah Kelebihan Maksimum Dan Tanah Absentee						
		1	persentase penyelesaian distribusi tanah serta ganti kerugian program tanah kelebihan dan tanah absente		100 persen	559.300.000	
12	5	LINGKUNGAN HIDUP					6.898.703.225
12	5	15	Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan			DLH	
		1	Persentase Pengurangan Sampah (Satuan: %)	0.00			
		2	Persentase Penanganan Sampah (Satuan: %)	0.00			
12	5	16	Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup			DLH	
		1	Persentase ketaatan terhadap izin lingkungan (Satuan: %)	197.00			
		2	Persentase pengaduan lingkungan yang tertangani (Satuan: %)	100.00			
12	5	17	Program Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Alam			DLH	



Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program	Indikator Kinerja Awal RPJMD	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan 2021		SKPD Penanggung Jawab
				Target	Rp.	
		1	Persentase lahan kritis yang tertangani (Satuan: %)	0.00		
12	5	19	Program Peningkatan Kualitas dan Akses Informasi Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup			DLH
		1	Persentase dokumen informasi Lingkungan Hidup (Satuan: %)	100.00		
12	5	24	Program Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH)			DLH
		1	persentase ruang terbuka hijau terkelola (Satuan: %)	3.30		
			Program Pengakuan Keberadaan Masyarakat Hukum Adat (MHA), Kearifan Lokal Dan Hak Mha Yang Terkait Dengan PPLH			DLH
		1	Presentase PPLH pada MHA yang Hutan adatnya diakui			
			Program Pengelolaan Persampahan			DLH
		1	Peningkatan Indeks Kualitas Udara		4.045.461.000	
			Program Pengelolaan Persampahan			DLH
		1	Persentase jumlah sampah yang terkelola			
			Program Pembinaan Dan Pengawasan Terhadap Izin Lingkungan Dan Izin Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH)			DLH
		1	Persentase perusahaan mematuhi ijin PPLH yang diterbitkan		20 Persen	
			Program Pembinaan Dan Pengawasan Terhadap Izin Lingkungan Dan Izin Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH)			DLH
		1	persentase jumlah perusahaan aktif yang diawasi ketaatannya terhadap persetujuan lingkungan			
			Program Penanganan Pengaduan Lingkungan Hidup			DLH
		1	Persentase Pengaduan Lingkungan Hidup ditangani		100	
			Program Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (KEHATI)			DLH
		1	Peningkatan Indeks Kualitas Tutupan Lahan		59.35%	
			Program Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (KEHATI)			DLH
		1	Persentase terkelolanya Keanekaragaman hayati dalam RTH			
			Program Pengendalian Pencemaran Dan/Atau Kerusakan Lingkungan Hidup			DLH
		1	Peningkatan Indeks Kualitas Air		55,04%	1.280.684.125
			Program Pengendalian Pencemaran Dan/Atau Kerusakan Lingkungan Hidup			DLH
		1	Persentase Pemenuhan Baku Mutu Lingkungan Hidup			
			Program Penghargaan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat			DLH
		1	Persentase Penghargaan Lingkungan Hidup			74.419.000
			Program Peningkatan Pendidikan, Pelatihan Dan Penyuluhan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat			DLH



Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program	Indikator Kinerja Awal RPJMD	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan 2021		SKPD Penanggung Jawab
				Target	Rp.	
		1	Persentase Pendidikan, Pelatihan dan penyuluhan untuk masyarakat		107.044.300	
	Program Perencanaan Lingkungan Hidup					DLH
		1	Persentase Dokumen Perencanaan Lingkungan Hidup yang tersusun tepat waktu	100.00	219046200	
	Program Perencanaan Lingkungan Hidup					DLH
		1	Persentase Dokumen Perencanaan Lingkungan Hidup yang menjadi acuan perencanaan Daerah			
	Program Pengendalian Bahan Berbahaya Dan Beracun (B3) Dan Limbah Bahan Berbahaya Dan Beracun (Limbah B3)					DLH
		1	Persentase Usaha dan/atau Kegiatan yang memiliki Izin Limbah B3	15%	62.463.000	
12	6	ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL			3.376.609.600	
12	6	Program Penataan Administrasi Kependudukan				DISDUKCAPIL
		1	Prosentase Kepemilikan dokumen kependudukan (Satuan: %)	93.96		
		2	Prosentase kepemilikan akta-akta catatan sipil (Satuan: %)	72.37		
		3	Prosentase Kesesuaian database dokumen kependudukan (Satuan: %)	88.24		
	Program Pencatatan Sipil					DISDUKCAPIL
		1	Prosentase Penduduk yang mendapatkan layanan Akte Perkawinan dan Akte Perceraian sesuai SOP			
		2	Prosentase Penduduk yang mendapatkan Pelayanan Akte Kelahiran sesuai SOP			
	Program Pencatatan Sipil					DISDUKCAPIL
		1	Persentase penduduk yang mendapatkan pelayanan akta catatan sipil	79 Persen	431.938.500	
	Program Pendaftaran Penduduk					DISDUKCAPIL
		1	Prosentase Kepemilikan Dokumen Kependudukan			
	Program Pendaftaran Penduduk					DISDUKCAPIL
		1	Persentase penduduk kabupaten lebak yang memiliki dokumen kependudukan (KK, KIA, KTP-el)	96 Persen	2.816.673.850	
	Program Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan					DISDUKCAPIL
		1	Cakupan Instansi yang memanfaatkan Data dan Dokumen Kependudukan			
	Program pengelolaan informasi administrasi kependudukan					DISDUKCAPIL
		1	Persentase tersedianya data dan informasi kependudukan dan	91 Persen	127.997.250	



Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program	Indikator Kinerja Awal RPJMD	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan 2021		SKPD Penanggung Jawab
				Target	Rp.	
		pendaftaran sipil yang akurat dan terupdate				
12 7		PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA			10.580.485.750	
12 7 15		Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Pedesaan				DPMD
		1 Persentase Lembaga masyarakat yang Aktif dan Produktif (Satuan: %)	100.00			
12 7 16		Program Pengembangan Lembaga Ekonomi Perdesaan				DPMD
		1 Persentase Terbentuk BUMDes yang Aktif (Satuan: persen)	13.00			
		2 Persentase sarana usaha masyarakat yang berkembang (Satuan: persen)	13.00			
		3 Tersedianya informasi pembangunan melalui gelar TTG (Satuan: alat TTG)	3.00			
12 7 17		Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Membangun Desa				DPMD
		1 persentase pembangunan saptas perdesaan yang melibatkan masyarakat (Satuan: persen)	70.00			
		2 Persentase Keswadyaan Masyarakat dalam Kegiatan pembangunan Desa (Satuan: persen)	70.00			
12 7 18		Program Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa				DPMD
		1 Persentase Perangkat Desa Baru yang mengikuti Pelatihan Dasar (Satuan: %)	100.00			
12 7 19		Program Peningkatan Peran Perempuan di Perdesaan				DPMD
		1 Persentase perempuan yang aktif dalam TP PKK (Satuan: %)	100.00			
		2 Jumlah KK Pra sejahtera yang dibina (Satuan: %)	100.00			
12 7 20		Program Pembinaan dan Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa				DPMD
		1 Cakupan pengelolaan keuangan desa dengan kategori baik (Satuan: %)	100.00			
12 7 21		Program Pemberdayaan Kelembagaan dan Peningkatan Partisipasi Masyarakat Desa				DPMD
		1 Persentase LKD yang produktif (Satuan: persen)	100.00			
		2 Persentase Lembaga Perempuan yang Aktif dan Produktif (Satuan: persen)	100.00			
		3 Pengurus LKD yang terlatih di bidang kewirausahaan (Satuan: orang)	60.00			
		4 Jumlah Perempuan yang mendapatkan pembinaan (Satuan: TP PKK)	345.00			
12 7 22		Program Tata Kelola Pemerintahan Desa dan Pembinaan Kapasitas Aparatur Pemerintahan Desa				PMD
		1 Persentase Desa dengan pengelolaan administrasi Pemerintahan Desa, dan	100.00			



Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program	Indikator Kinerja Awal RPJMD	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan 2021		SKPD Penanggung Jawab	
				Target	Rp.		
		Administrasi Keuangan yang baik dan Pengelolaan Asetnya Tertib (Satuan: persen)					
		2 Jumlah desa yang mengikuti penilaian kinerja peyelenggaraan pembangunan desa/kelurahan dan pembinaan desa percontohan (Satuan: desa)	340.00				
		3 Jumlah Aparatur Pemerintahan desa yang terlatih dalam pengelolaan aset desa (Satuan: orang)	340.00				
		4 Jumlah perangkat desa baru yang mengikuti pelatihan dasar manajemen pemerintahan desa (Satuan: orang)	100.00				
		5 Jumlah desa yang terfasilitasi penyaluran bantuan keuangan kepada desa (Satuan: desa)	340.00				
		6 Jumlah rancangan perdes yang terevaluasi (Satuan: perdes)	5.00				
		7 Jumlah anggota BPD yang mendapatkan pelatihan (Satuan: orang)	0.00				
	Program Peningkatan Kerjasama Desa					DPMD	
		1 Persentase pemerintahan desa yang telah melakukan kerjasama antar desa		0 Persen			
	Program Administrasi Pemerintahan Desa					DPMD	
		1 Cakupan Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa		100 Persen			
		2 Persentase Penyelenggaraan Pemerintahan Desa yang berkinerja baik					
	Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat Dan Masyarakat Hukum Adat					DPMD	
		1 Persentase Kelembagaan tingkat Desa yang aktif			96.782.950		
		2 Persentase meningkatnya Pemberdayaan lembaga kemasyarakatan Desa, Lembaga Adat dan Masyarakat Hukum Adat					
	Program Penataan Desa					DPMD	
		1 Cakupan Sarana dan Prasarana Transportasi antar wilayah dalam kondisi baik			450.000.000		
		2 Persentase Pemerintahan Desa yang melakukan penataan dan pengelolaan desa yang baik					
12	8	PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA					11.534.853.000
12	8	15	Program Keluarga Berencana			DP3AP2KB	



Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program	Indikator Kinerja Awal RPJMD	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan 2021		SKPD Penanggung Jawab
				Target	Rp.	
		1	Cakupan PKB/PLKB yang didayagunakan Perangkat Daerah KB untuk perencanaan dan pelaksanaan pembangunan daerah di bidang pengendalian penduduk (Satuan: %)	100.00		
		2	Persentase pasangan usia subur (PUS) yang menjadi peserta KB aktif (Satuan: %)	67.57		
12	8	16	Program Kesehatan Reproduksi Remaja			DP3AP2KB
		1	Cakupan Remaja dalam Pusat Informasi Dan Konseling Remaja/Mahasiswa (Satuan: %)	1.36		
12	8	17	Program Pelayanan Kontrasepsi			DP3AP2KB
		1	Ratio Akseptor KB (Satuan: %)	7.13		
		2	Persentase Angka pemakaian kontrasepsi/CPR bagi perempuan menikah usia 15 - 49 (Satuan: %)	70.17		
12	8	18	Program Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana			DP3AP2KB
		1	Ratio Akseptor KB (Satuan: %)	7.13		
		2	Persentase pasangan usia subur (PUS) yang menjadi peserta KB aktif (Satuan: %)	67.57		
		3	Cakupan Remaja dalam Pusat Informasi Dan Konseling Remaja/Mahasiswa (Satuan: %)	1.36		
		4	Persentase Angka Pemakaian Kontrasepsi (CPR) bagi perempuan menikah usia 15 - 49 tahun (Satuan: %)	70.17		
		5	Cakupan Anggota Bina Keluarga berKB (Satuan: Orang)	40,177.00		
		6	Jumlah Pusat Pelayanan KKBPK yang terbina & aktif (BKB, BKR, BKL) (Satuan: Kelompok)	847.00		
		7	Cakupan PKB/PLKB yang didayagunakan Perangkat Daerah KB untuk perencanaan dan pelaksanaan pembangunan daerah di bidang pengendalian penduduk (Satuan: %)	100.00		
			Program Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana			DP3AP2KB
		1	Persentase tingkat penurunan TFR (Total Fertility Rate)	2.25%		



Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program	Indikator Kinerja Awal RPJMD	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan 2021		SKPD Penanggung Jawab
				Target	Rp.	
12 8 19	Program Promosi Kesehatan Ibu, Bayi dan Anak melalui Kelompok Kegiatan di Masyarakat					DP3AP2KB
		1 Jumlah Pusat Pelayanan KKBPK yang terbina & aktif (BKB) (Satuan: Kelompok)	379.00			
		2 Jumlah Pusat Pelayanan KKBPK yang terbina & aktif (BKR) (Satuan: Kelompok)	209.00			
		3 Jumlah Pusat Pelayanan KKBPK yang terbina & aktif (BKL) (Satuan: Kelompok)	259.00			
	Program Pembinaan Keluarga Berencana (KB)					DP3AP2KB
		1 Presentase tingkat penurunan TFR (Total Fertility Rate)	100%	2,20%	11.496.773.000	
		2 mCPR (Modern Contraceptive Prevalancy Rate)				
	Program Pemberdayaan Dan Peningkatan Keluarga Sejahtera (KS)					DP3AP2KB
		1 Presentase tingkat penurunan TFR (Total Fertility Rate)	100%	100 persen	24.770.000	
		2 persentase terbinanya kelompok ketahanan dan kesejahteraan keluarga				
	Program Pengendalian Penduduk					DP3AP2KB
		1 Presentase tingkat penurunan TFR (Total Fertility Rate)	100%	100 persen	13.310.000	
		2 TFR (Total Fertility Rate)				
12 9	PERHUBUNGAN				5.939.910.000	
12 9 16	Program Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana dan Fasilitas LLAJ					DISHUB
		1 Persentase prasarana perhubungan dalam kondisi baik (Satuan: %)	83.00			
		2 Persentase alat uji kendaraan bermotor dalam kondisi baik (Satuan: %)	28.57			
12 9 17	Program Peningkatan Pelayanan Angkutan					DISHUB
		1 Persentase pelayanan terminal (Satuan: %)	83.33			
12 9 18	Program Pembangunan Sarana dan Prasarana Perhubungan					DISHUB
		1 persentase pembangunan prasarana perhubungan (Satuan: %)	75.00			
12 9 19	Program Pengendalian dan Pengamanan Lalu Lintas					DISHUB
		1 Persentase Pengendalian dan Pengamanan Lalu Lintas (Satuan: %)	100.00			
		2 Persentase rambu - rambu terpasang (Satuan: %)	63.29			
12 9 20	Program Peningkatan Kelaikan Pengoperasian Kendaraan Bermotor					DISHUB
		1 Persentase kepemilikan KIR angkutan umum (Satuan: %)	34.89			
	Program Penyelenggaraan Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan (LLAJ)					DISHUB
		1 Persentase Penurunan Pelanggaran Lalu Lintas		1.79%	5.939.910.000	
12 10	KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA				3.693.250.810	



Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program	Indikator Kinerja Awal RPJMD	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan 2021		SKPD Penanggung Jawab
				Target	Rp.	
121015	Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa					SETDA, DISKOMINFO
		1	Persentase terlayannya informasi publik (Satuan: %)	100.00		
		2	Persentase terlayannya informasi publik (Satuan: %)	100.00		
121016	Program Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik					DISKOMINFO
		1	Persentase pengelolaan informasi dan komunikasi publik pemerintah daerah (Satuan: %)	0.00		
121017	Program Pengelolaan Aplikasi Informatika					DISKOMINFO
		1	Persentase pengelolaan aplikasi informatika pemerintah daerah (Satuan: %)	0.00		
121018	Program Kerjasama Informasi dengan Mas Media					SETDA, DISKOMINFO
		1	Persentase tersebarluaskannya informasi penyelenggaraan pemerintah daerah (Satuan: %)	100.00		
		2	Cakupan informasi tentang kegiatan SKPD dan penyelenggaraan pemerintahan serta pembangunan di Kabupaten Lebak (Satuan: Kali)	22.00		
121023	Program Optimalisasi Pemanfaatan Teknologi Informasi					INSPEKTORAT, DISKOMINFO, PMD
		1	Persentase Pengelolaan sistem Aplikasi berbasis Teknologi Informatika (Satuan: %)	100.00		
		2	Persentase pemanfaatan Teknologi Informatika untuk layanan publik (Satuan: %)	100.00		
		3	Persentase pemanfaatan persandian dalam pengamanan informasi pemerintah daerah (Satuan: %)	100.00		
	Program Aplikasi Informatika					Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian
		1	Persentase pengelolaan aplikasi informatika pemerintah daerah		100 Persen	2.572.193.380
	Program Informasi Dan Komunikasi Publik					Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian
		1	Persentase pengelolaan informasi dan komunikasi publik pemerintah daerah		100 Persen	1.121.057.430
1211	KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH					2.002.863.950
121116	Program Pengembangan Kewirausahaan dan Keunggulan Kompetitif Usaha Kecil Menengah					DINKOP UKM



Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program	Indikator Kinerja Awal RPJMD	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan 2021		SKPD Penanggung Jawab
				Target	Rp.	
		1	Prosentase UMK yang berdaya saing (Satuan: %)	10.87		
12.11.18	Program Peningkatan Kualitas Kelembagaan Koperasi					DINKOP UKM
		1	Prosentase Koperasi Aktif (Satuan: %)	19.67		
	Program Pemberdayaan Dan Perlindungan Koperasi					DINKOP UKM
		1	Persentase koperasi berkinerja baik	8,82%	221.099.550	
	Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil, Dan Usaha Mikro (UMKM)					DINKOP UKM
		1	Rasio Kewirausahaan		0.01%	
	Program Pendidikan Dan Latihan Perkoperasian					DINKOP UKM
		1	Persentase pengurus dan pengawas koperasi yang kompeten	3,88%	662.943.700	
	Program Pengawasan Dan Pemeriksaan Koperasi					DINKOP UKM
		1	Persentase Koperasi Sehat	2,29%	222.102.800	
	Program Pengembangan UMKM					DINKOP UKM
		1	Persentase Usaha Mikro ke Usaha Kecil	0.0001%	0.0001%	
12.12	PENANAMAN MODAL				1.815.633.240	
12.12.15	Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi					SETDA, DPMPSTP
		1	Jumlah Investor PMA dan PMDN berskala nasional (Satuan: investor)	18.00		
		2	Jumlah pameran tingkat regional dan nasional yang termonitoring dan terevaluasi (Satuan: %)	100.00		
12.12.16	Program Peningkatan Iklim Investasi dan Realisasi Investasi					SETDA, DPMPSTP
		1	Jumlah nilai investasi berskala nasional(PMDN/PMA) (Satuan: Rupiah)	20.95		
		2	Jumlah termonitoring dan terevaluasi Akses Keuangan Daerah (Satuan: %)	100.00		
		3	Jumlah termonitoring dan terevaluasi penerima Kredit Usaha Rakyat (Satuan: %)	100.00		
		4	Jumlah penyelesaian Kredit Peduli Lebak (Satuan: %)	100.00		
		1	Jumlah nilai investasi berskala nasional PMA/PMDN nasional(PMDN/PMA)	20.95 Rupiah	1.144.900.000.000 0	
		2	Jumlah termonitoring dan terevaluasi Akses Keuangan Daerah	1.00	100.00	
		3	Jumlah termonitoring dan terevaluasi penerima Kredit Usaha Rakyat	1.00	100.00	
		4	Jumlah penyelesaian Kredit Peduli Lebak	1.00	0.00	
	Program Pelayanan Penanaman Modal					DPM
		1	Indeks Kepuasan Masyarakat Pelayanan Perizinan Penanaman Modal	86,36 Poin	85 poin 616.167.540	



Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program	Indikator Kinerja Awal RPJMD	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan 2021		SKPD Penanggung Jawab
				Target	Rp.	
		Program Pengelolaan Data Dan Sistem Informasi Penanaman Modal				DPM
		1 Persentase Pemanfaatan Informasi Penanaman Modal	100 Persen	100%		
		Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal				DPM
		1 Persentasi Pertumbuhan Investasi	22,85%		177.596.650	
		Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal				DPM
		1 Jumlah Realisasi Investasi PMA/PMDN (satuan:Rp)	3,241,666,830,000		714.415.950	
		Program Promosi Penanaman Modal				DPM
		1 Jumlah Rencana Investasi PMA/PMDN (satuan:Rp)		1,5 Trilyun Rupiah		
12 13		KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA			6.993.721.890	
12 13 16		Program Peningkatan Peran Serta Kepemudaan				DISPORA
		1 Prosentase lembaga pemuda yang terbina (Satuan: %)	50.00			
		2 jumlah pemuda yang berprestasi di Tk. Provinsi dan nasional (Satuan: Orang)	13.00			
		1 Jumlah pemuda yang berprestasi	15.00	15.00		
12 13 17		Program Peningkatan Upaya Penumbuhan Kewirausahaan dan Kecakapan Hidup Pemuda				DISPORA
		1 Prosentase wirausaha muda baru yang memperoleh akses modal (Satuan: %)	10.00			
		Program Peningkatan Upaya Penumbuhan Kewirausahaan dan Kecakapan Hidup Pemuda				DISPORA
		1 Prosentase wirausaha muda baru yang memperoleh akses modal (satuan:%)		10%		
12 13 18		Program Peningkatan Peran Serta Kepemudaan, Kewirausahaan dan Kecakapan Hidup Pemuda				DISPORA
		1 Prosentase lembaga pemuda yang aktif (Satuan: %)	50.00			
		2 jumlah pemuda yang berprestasi di Tk. Provinsi dan nasional (Satuan: Orang)	15.00			
		3 Persentase wirausaha muda baru yang memperoleh akses modal (Satuan: %)	10.00			
12 13 20		Program Pembinaan dan Pemasyarakatan Olahraga				DISPORA
		1 Prosentase Atlet yang berprestasi (Satuan: %)	72.00			
		2 Prosentase Cabor yang berprestasi (Satuan: %)	58.00			
12 13 21		Program peningkatan sarana dan prasarana olahraga				DISPORA
		1 Prosentase Sarana dan prasarana yang berfungsi dengan baik (Satuan: %)	100.00			
		2 Jumlah Sarana dan Prasarana olahraga yang terbangun (Satuan: Unit)	2.00			



Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program	Indikator Kinerja Awal RPJMD	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan 2021		SKPD Penanggung Jawab
				Target	Rp.	
		1	Prosentase Sarana dan prasarana yang berfungsi dengan baik (Satuan: %)	100.00	100.00	
	Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Keolahragaan					DISPORA
		1	Prosentase Atlet yang Berprestasi		76 persen	4.857.336.990
		2	Jumlah perolehan medali	10		
	Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Kepemudaan					DISPORA
		1	Prosentase Kelembagaan Pemuda yang Aktif	60%	60 persen	1.986.384.900
	Program Pengembangan Kapasitas Kepramukaan					DISPORA
		1	Persentase pembina dan pelatih yang bersertifikat		100 persen	150.000.000
12 14	STATISTIK					276.955.850
12 14 15	Program Pengembangan Data/Informasi/Statistik Daerah					DISTANBUN , DISKOMINFO
		1	cakupan ketersediaan data dan informasi kinerja pembangunan daerah (Satuan: %)	100.00		
12 14 16	Program Penyelenggaraan Statistik Sektoral					DISKOMINFO
		1	Persentase ketersediaan data statistik sektoral yang lengkap (Satuan: %)	0.00		
	Program Penyelenggaraan Statistik Sektoral					Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian
		1	Persentase Penyelenggaraan Statistik Sektoral Pemerintah Daerah		100 Persen	276.955.850
12 15	PERSANDIAN					100.119.840
12 15 16	Program Penyelenggaraan Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah					DISKOMINFO
		1	Persentase pengamanan informasi pemerintah daerah (Satuan: %)	0.00		
	Program Penyelenggaraan Persandian Untuk Pengamanan Informasi					Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian
		1	Persentase Penyelenggaraan Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah		100 Persen	100.119.840
12 16	KEBUDAYAAN					1.817.354.450
12 16 15	Program Pengembangan Nilai Budaya					Dinas Pariwisata
		1	persentase pelestarian adat budaya daerah (Satuan: %)	11.76		
12 16 16	Program Pengelolaan Kekayaan Budaya					Dinas Pariwisata
		1	Persentase cagar budaya yang dilestarikan (Satuan: %)	21.95		
12 16 17	Program Pengelolaan Keragaman Budaya					Dinas Pariwisata
		1	Persentase terpenuhinya kebutuhan event seni dan budaya daerah (Satuan: %)	100.00		
	Program Pelestarian Dan Pengelolaan Cagar Budaya					Dinas Kebudayaan dan Pariwisata



Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program	Indikator Kinerja Awal RPJMD	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan 2021		SKPD Penanggung Jawab	
				Target	Rp.		
		1	Persentase cagar budaya yang dilestarikan (satuan: %)		1.59%	866.036.500	
	Program Pengembangan Kebudayaan						Dinas Kebudayaan dan Pariwisata
		1	Jumlah Warisan Budaya Tak Benda yang diakui secara nasional (satuan unit)			115.888.950	
	Program Pengelolaan Permuseuman						Dinas Kebudayaan dan Pariwisata
		1	Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan Museum			600.000.000	
	Program Pengembangan Kesenian Tradisional						Dinas Kebudayaan dan Pariwisata
		1	Persentase kesenian tradisional yang mendapat pengakuan nasional (satuan %)			235.429.000	
	Program Pembinaan Sejarah						Dinas Kebudayaan dan Pariwisata
		1	Persentase sejarah yang dipublikasikan				
12 17	PERPUSTAKAAN					761.670.200	
12 17 21	Program Pengembangan Budaya Baca dan Pembinaan Perpustakaan						DISKERPUS, DISDIK
		1	Jumlah pengunjung perpustakaan (Satuan: Orang)	56,502.00			
		2	Jumlah Perpustakaan yang dibina (Satuan: Unit)	157.00			
		3	Cakupan TBM yang sesuai standar (Satuan: Lembaga)	2.00			
	Program Pembinaan Perpustakaan						
		1	Persentase Minat Baca Masyarakat (PMBM)	35 Persen	47 persen	761.670.200	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
12 18	KEARSIPAN					473.296.550	
12 18 15	Program Perbaikan Sistem Administrasi Kearsipan						DISKERPUS
12 18 16	Program Penyelamatan dan Pelestarian Dokumen /Arsip Daerah						DISKERPUS
		1	Jumlah OPD yang mengelola arsip sesuai Perbup (Satuan: Buah)	55.00			
		1	Persentase Sarana dan Prasarana Kearsipan dalam kondisi baik (Satuan: %)	0.00			
12 18 17	Program Pemeliharaan Rutin/Berkala Sarana dan Prasarana Kearsipan						SETDA, DISKERPUS
		1	Jumlah Dokumen Keuangan Setda yang terpelihara (Satuan: dokumen)	8.00			
12 18 18	Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Informasi						DISKERPUS
		1	Persentase Perangkat Daerah yang terintegrasi dalam sistem layanan kearsipan (Satuan: %)	25.00			
		2	Persentase pengelolaan kearsipan (Satuan: %)	0.00			
	Program Pengelolaan Arsip						DISKERPUS



Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program	Indikator Kinerja Awal RPJMD	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan 2021		SKPD Penanggung Jawab		
				Target	Rp.			
		1	Tertibnya Pengelolaan Kearsipan Pemerintah Daerah		95 Persen	273.590.300		
		2	Persentase Ketertiban Pengelolaan Kearsipan (PKPK)	90 Persen				
	Program Perlindungan Dan Penyelamatan Arsip						DISKERPUS	
		1	Jumlah Arsip Yang terdata, tertata dan terpelihara di DEPO unit Kerasipan I		650 buah	199.706.250		
		2	Cakupan Arsip Yang terdata, tertata dan terpelihara di DEPO unit Kerasipan I					
20	URUSAN PILIHAN					80.982.962.793		
20	1	KELAUTAN DAN PERIKANAN				1.823.152.511		
20	1	25	Program Peningkatan Produksi Perikanan					DINAS PERIKANAN
		1	Produksi Ikan Budidaya (Satuan: ton)	3,751.41				
		2	Produksi Ikan Tangkap (Satuan: ton)	6,019.97				
20	1	26	Program Peningkatan Kualitas dan Pengelolaan Hasil Produksi Perikanan					DINAS PERIKANAN
		1	Persentase peningkatan kelas kelompok perikanan (Satuan: %)	1.98				
	Program Pengawasan Sumber Daya Kelautan Dan Perikanan						DINAS PERIKANAN	
		1	persentase ketaatan usaha perikanan			-		
	Program Pengelolaan Perikanan Budidaya						DINAS PERIKANAN	
		1	Persentase Peningkatan Produksi Ikan Budidaya	-0,01%	1 persen	1.145.463.261		
	Program Pengelolaan Perikanan Tangkap						DINAS PERIKANAN	
		1	persentase peningkatan produksi ikan tangkap	-7,88%	0,2 Persen	677.689.250		
20	2	PARIWISATA				11.752.382.177		
20	2	15	Program Pengembangan Pemasaran Pariwisata					Dinas Pariwisata
		1	Jumlah kunjungan wisatawan mancanegara (Satuan: Orang)	500.00				
		2	Jumlah kunjungan wisatawan nusantara (Satuan: Orang)	749,500.00				
20	2	16	Program Pengembangan Destinasi Pariwisata					Dinas Pariwisata
		1	Cakupan peningkatan sarana prasarana objek wisata dalam kondisi baik (Satuan: %)	23.00				
		2	Jumlah Desa Wisata yang dikembangkan (Satuan: Desa)	7.00				
20	2	17	Program Peningkatan Daya Dukung Kelembagaan Kepariwisata					Dinas Pariwisata
		1	Persentase kelembagaan di 23 ODTW (Satuan: %)	40.00				
		2	Persentase sektor ekonomi kreatif yang berkembang (Satuan: %)	18.00				
	Program Pemasaran Pariwisata						Dinas Kebudayaan dan Pariwisata	
		1	Prosentase pertumbuhan jasa usaha pariwisata		10%	4.702.849.640		



Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program	Indikator Kinerja Awal RPJMD	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan 2021		SKPD Penanggung Jawab
				Target	Rp.	
	Program Pengembangan Sumber Daya Pariwisata Dan Ekonomi Kreatif					Dinas Kebudayaan dan Pariwisata
		1 Persentase sumber daya manusia pariwisata dan pelaku ekonomi kreatif yang tersertifikasi		10%	1.460.080.390	
	Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata					Dinas Kebudayaan dan Pariwisata
		1 Rata-rata lama tinggal				
		1 Rata-rata Lama Tinggal Wisatawan		1,5 hari	5.589.452.147	
20 3	PERTANIAN				52.954.368.150	
20 3 21	Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Ternak					DISNAK
		1 Persentase Pelayanan Kesehatan Hewan (Satuan: %)	2.00			
20 3 22	Program Peningkatan Produksi Hasil Peternakan					DISNAK
		1 Jumlah Produksi Daging (Satuan: ton)	8,847.00			
20 3 25	Program Peningkatan Kualitas dan Pengelolaan Hasil Produksi Pertanian					DISNAK, DISTANBUN
		1 Pertumbuhan Nilai Produksi yang terjual (Satuan: %)	2.00			
		2 Pertumbuhan Nilai Produksi (Satuan: %)	1.00			
20 3 26	Program Peningkatan Kualitas Sumberdaya Manusia Pertanian					DISNAK, DISTANBUN
		1 Jumlah Peningkatan Kelas Kelompok : Pemula (Satuan: Kelompok)	1,628.00			
		2 Lanjut (Satuan: Kelompok)	838.00			
		3 Madya (Satuan: Kelompok)	38.00			
		4 Utama (Satuan: Kelompok)	1.00			
20 3 27	Program Peningkatan Produksi Pertanian/Perkebunan					DISTANBUN
		1 Jumlah Produksi : Padi (Satuan: ton)	595,485.00			
		2 Palawija (Satuan: ton)	34,256.00			
		3 Hortikultura (Satuan: ton)	184,059.00			
		4 Perkebunan (Satuan: ton)	32,543.00			
	Program Pengendalian Dan Penanggulangan Bencana Pertanian					Dinas Pertanian
		1 Persentase Penurunan Luas Lahan Terdampak		10 persen	163.641.800	
	Program Penyediaan Dan Pengembangan Prasarana Pertanian					Dinas Pertanian
		1 Persentase prasarana pertanian dan perkebunan dalam kondisi baik				
	Program Penyediaan Dan Pengembangan Prasarana Pertanian					
		1 Persentase prasarana pertanian dan perkebunan dalam kondisi baik	75 Persen	75 persen	42.746.897.950	Dinas Pertanian
		2 Persentase penyediaan dan pengembangan sarana peternakan dalam kondisi baik	75%	0%		Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan
	Program Penyediaan Dan Pengembangan Sarana Pertanian					
		1 Jumlah Produksi Pertanian	1000679 Ton	863,238.64	5.486.691.400	Dinas Pertanian



Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program	Indikator Kinerja Awal RPJMD	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan 2021		SKPD Penanggung Jawab		
				Target	Rp.			
		2	Persentase meningkatnya jumlah bibit ber sklb sesuai SNI	5 Persen	5 persen	1.088.858.125	Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan	
	Program Penyuluhan Pertanian							
		1	Jumlah peningkatan kelas kelompok	39 Kelompok	30 kelompok	2.741.685.750	Dinas Pertanian	
		2	Persentase Kelompok Ternak yang dibina	100 Persen	100 persen	69.343.000	Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan	
	Program Perizinan Usaha Pertanian							
		1	Persentase Usaha Pertanian yang Berizin		14 persen	130.150.000	Dinas Pertanian	
		2	Persentase Usaha Peternakan yang dibina	100 Persen	100 persen	70.000.000	Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan	
	Program Pengendalian Kesehatan Hewan Dan Kesehatan Masyarakat Veteriner							
		1	Persentase Peningkatan Pelayanan Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner	1%	2 persen	457.100.125	Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan	
20	4	PERDAGANGAN					14.216.423.355	
20	4	15	Program Perlindungan Konsumen dan Pengamanan Perdagangan					DISPERINDAG
		1	Prosentase Jumlah Penanganan Terhadap Pelanggaran Perdagangan (Satuan: %)	70.00				
		2	Prosentase alat UTTP yang bertanda tera sah ulang (Satuan: %)	75.00				
20	4	18	Program Peningkatan Efisien Perdagangan Dalam Negeri					DISPERINDAG
		1	Persentase sarana perdagangan yang representatif (Satuan: %)	15.00				
	Program Penggunaan Dan Pemasaran Produk Dalam Negeri							
		1	Prosentase proporsi produk dalam negeri yang diperdagangkan di pasar domestik		90 persen	68.344.500		
	Program Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan							
		1	Prosentase Pertumbuhan Sektor Perdagangan (%)	-3,69%	-0.23	11.937.651.655	DISPERINDAG	
	Program Perizinan Dan Pendaftaran Perusahaan							
		1	Prosentase kesadaran pelaku usaha dan konsumen dalam mengkonsumsi barang dan jasa (%)	70.00	90	226.825.500		
	Program Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok Dan Barang Penting							
		1	Prosentase terjaganya Stabilisasi harga barang kebutuhan pokok (%)	90.00	90 persen	1.227.956.900		
		2	Tingkat Inflasi					
	Program Standardisasi Dan Perlindungan Konsumen							
		1	Prosentase UTTP bertanda Tera Sah	100.00			DISPERINDAG	
	Program Standardisasi Dan Perlindungan Konsumen							
		1	Indeks Tertib Ukur (poin)	55 Poin	59 Poin	755.644.800	DISPERINDAG	
20	7	PERINDUSTRIAN					236.636.600	



Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program	Indikator Kinerja Awal RPJMD	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan 2021		SKPD Penanggung Jawab
				Target	Rp.	
20 7 16	Program Pengembangan Industri kecil dan Menengah					DISPERINDAG
		1 Prosentase Industri Kecil dan Menengah yang Memiliki Standar Mutu (Satuan: %)	1.70			
	Program Pengendalian Izin Usaha Industri Kabupaten/Kota					DISPERINDAG
		1 Persentase Perusahaan Berijin		90 persen	130.262.000	
	Program Perencanaan Dan Pembangunan Industri					DISPERINDAG
		1 Prosentase Evaluasi Rencana Pengembangan Industri		90 Persen	106.374.600	
20 8	TRANSMIGRASI					
20 8 15	Program Pengembangan Wilayah Transmigrasi					DISNAKERTRANS
		1 Prosentase Keluarga Transmigran yang berhasil (Satuan: %)	60.00			
6	UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAH				61.195.923.644	
	SEKRETARIAT DAERAH				19.150.353.430	SETDA
6 16	Program Peningkatan Pelayanan Kedinasan Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah					SETDA
		1 Persentase Terpenuhinya layanan kedinasan KDH/WKDH (Satuan: %)	100.00			
6 19	Program Penataan Peraturan Perundang-Undangan					SETWAN, SETDA
		1 Jumlah rencana kerja dan Rancangan Peraturan Perundang-undangan (Satuan: Perda)	7.00			
		1 cakupan Penetapan Perda dan Perbup (Satuan: %)	100.00			
6 20	Program Penataan Daerah Otonomi Baru					SETDA
		1 jumlah dokumen persiapan daerah otonomi baru (Satuan: dokumen)	10.00			
6 21	Program Pematapan Otonomi Daerah dan Sistem Administrasi Daerah					SETDA
		1 Jumlah jenis administrasi daerah yang berjalan dengan baik (Satuan: dokumen)	7.00			
6 22	Program Peningkatan dan Pengembangan Layanan Pengadaan Barang dan Jasa					SETDA
		1 Persentase penggunaan E-Procurement terhadap Belanja Pengadaan Barang dan jasa (Satuan: %)	100.00			
	Program Pemerintahan Dan Kesejahteraan Rakyat					Sekretariat Daerah
		1 Persentase Implementasi Kebijakan Administrasi Tata Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Berjalan dengan Baik	100 Persen	100 persen	16.196.187.400	
	Program Perekonomian Dan Pembangunan					Sekretariat Daerah
		1 Persentase Evaluasi Pelaksanaan Kebijakan Perekonomian dan Pembangunan yang disusun dan disampaikan tepat waktu	100 Persen	100 persen	2.954.166.030	
	SEKRETARIAT DPRD				42.045.570.214	SETWAN



Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program	Indikator Kinerja Awal RPJMD	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan 2021		SKPD Penanggung Jawab
				Target	Rp.	
6 15	Program Peningkatan Kapasitas Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah					SETWAN
		1	Persentase indek kepuasan pelayanan kepada Anggota DPRD Kab. Lebak (Satuan: %)	85.00		
		2	Rara-rata waktu fasilitasi penyampaian aspirasi masyarakat kepada Anggota DPRD melalui Komisi-Komisi (Satuan: %)	87.00		
	Program Dukungan Pelaksanaan Tugas Dan Fungsi DPRD					Sekretariat DPRD
		1	Indeks kepuasan Pelayanan kepada Anggota DPRD Kabupaten Lebak	56.70	83.00	42.045.570.214
30	UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH				470.561.790.390	
30 1	PERENCANAAN				2.426.907.920	
30 1 15	Program Pengembangan Data/Informasi					BAPPEDA, DISPERINDAG, PERIKANAN, DISKOP, DPPKBP3A, NAKERTRANS, DINSOS, PERKIM, PUPR
		1	Persentase ketersediaan data perencanaan pembangunan daerah (Satuan: persen)	70.00		
30 1 16	Program Kerjasama Pembangunan					SETDA
		1	jumlah kerjasama antar pemerintah daerah (Satuan: %)	100.00		
30 1 21	Program Perencanaan Pembangunan Daerah					Cilograng, Cibeber, Bayah, Cihara, Panggarangan, Wanasalam, Malingping, Cigemblong, Cijaku, Banjarsari, Cileles, Gunungkencana, Lebakgedong, Cipanas, Cirinten, Bojongmanik, Sobang, Muncang, Curugbitung, Maja, Sajira, Leuwidamar, Cikulur, Cimarga, Warunggunung, Cibadak, Kalanganyar, Rangkasbitung, Bpbd, Kesbangpol, Setwan, Setda, Inspektorat, BKPP, Bapenda, BPKAD, Bappeda, Disperindag, Disnak, Dstanbun, Pariwisata, Perikanan, Diskerpus, Dispora, Dpmpstsp, Diskop, Diskominfo, Dishub, DPPKBP3A,



Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program	Indikator Kinerja Awal RPJMD	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan 2021		SKPD Penanggung Jawab
				Target	Rp.	
						Pmd, Dukcapil, DLH, Ketapang, Nakertrans, Dinsos, Satpol PP, Perkim, PUPR, RSUD, Dinkes, Disdik
		1 Cakupan sinergisitas Program pembangunan Pusat dan Daerah baik jangka pendek maupun jangka menengah (Satuan: %)	100.00			
30	1	24 Program Perencanaan Prasarana Wilayah Dan Sumber Daya alam				PERKIM, PUPR
		1 persentase ketersediaan dokumen perencanaan teknis (Satuan: Dokumen)	100.00			
		Program Koordinasi Dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah				Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah
		1 Persentase keselarasan program RPJMD dan RKP		100	1.088.097.520	
		Program Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah				Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah
		1 Persentase Capaian Kinerja RKP		100 Persen	1.338.810.400	
30	2	KEUANGAN			462.224.383.820	
30	2	15 Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah				SETDA, BAPENDA, BPKAD
		1 Persentase pertumbuhan pajak daerah (Satuan: %)	7.00			
		2 Persentase terpenuhinya kebutuhan Tenaga Ahli Perpajakan (Satuan: %)	20.00			
		3 Persentase ketaatan wajib pajak daerah (Satuan: %)	81.00			
		4 Persentase Dokumen Penganggaran yang di susun tepat waktu dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan (Satuan: %)	67.50			
		5 Persentase realisasi pendapatan dan belanja daerah (Satuan: %)	93.00			
		6 Persentase Laporan Keuangan yang di susun tepat waktu dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan (Satuan: %)	94.00			
		7 Prosentase Jumlah Aset Yang terinventarisasi, teridentifikasi dan terdokumentasi Dengan Total Seluruh Aset Yang Dimiliki Pemerintah Kabupaten Lebak (Satuan: %)	40.00			



Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program	Indikator Kinerja Awal RPJMD	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan 2021		SKPD Penanggung Jawab
				Target	Rp.	
		8	jumlah dokumen standar satuan harga yang disusun (Satuan: dok)	1.00		
	Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah					
		1	Opini BPK atas audit laporan keuangan	WTP		
		2	Persentase dokumen penganggaran yang disusun tepat waktu dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan	80%		
		3	Persentase realisasi pendapatan dan belanja	93%		
		4	Persentase laporan keuangan yang disusun tepat waktu dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan	94%		
		5	Prosentase Jumlah Aset Yang terinventarisasi, teridentifikasi dan terdokumentasi Dengan Total Seluruh Aset Yang Dimiliki Pemerintah Kabupaten Lebak	40%		
	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan					BAPENDA
		1	Prosentase pelaporan capaian kinerja dan pertanggung jawaban keuangan			
	Program Peningkatan Dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah					BAPENDA
		1	Prosentase Pengelolaan Keuangan Daerah yang Transparan, Akuntabel, Efektif dan Efisien sesuai Peraturan dan Perundang-undangan yang berlaku			
	Program Pengelolaan Barang Milik Daerah					Badan Keuangan dan Aset Daerah
		1	Kesesuaian Nilai Neraca aset dengan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD)		100 persen	3.559.648.300
	Program Pengelolaan Keuangan Daerah					Badan Keuangan dan Aset Daerah
		1	Opini BPK atas audit Laporan Keuangan Pemerintah Daerah	WTP		456.400.336.960
	Program Pengelolaan Pendapatan Daerah					Badan Pendapatan Daerah
		1	Persentase pertumbuhan pajak daerah	15,52 Persen	7%	2.264.398.560
30	3	KEPEGAWAIAN SERTA PENDIDIKAN DAN PELATIHAN				
30	3	5	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur			SETWAN, BKPP, BPKAD, BAPPEDA, DISKERPUS, DISKOMINFO, DISHUB, DLH, SATPOL PP
		1	Persentase pejabat struktural yang mengikuti	39.61		



Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program	Indikator Kinerja Awal RPJMD	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan 2021		SKPD Penanggung Jawab
				Target	Rp.	
		diklat manajerial (Satuan: %)				
		2 Persentase pegawai yang mengikuti diklat teknis (Satuan: %)	13.83			
30	3	17	Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur			SETDA, BKPP
		1 Persentase pejabat struktural yang memiliki sertifikat diklat peningkatan kompetensi manajerial (Satuan: %)	100.00			
		2 Persentase pegawai yang memiliki sertifikat diklat peningkatan kompetensi teknis (Satuan: %)	100.00			
		3 persentase aparatur kecamatan yang mendapatkan pembinaan (Satuan: %)	100.00			
30	3	18	Program Pelayanan Administrasi Kepegawaian, Pembinaan dan Pengembangan Aparatur			BKPP
		1 persentase jabatan yang terisi berdasarkan peraturan perundang-undangan (Satuan: %)	100.00			
		2 persentase ASN yang mendapat pelayanan kepegawaian tepat waktu (Satuan: %)	100.00			
		3 Persentase tertanganinya pelanggaran disiplin aparatur (Satuan: persen)	100.00			
3		KEPEGAWAIAN			5.191.925.250	
		Program Kepegawaian Daerah				Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
		1 Persentase Jabatan yang terisi berdasarkan peraturan perundang undangan		100 persen	5.191.925.250	
4		PENDIDIKAN DAN PELATIHAN			210.073.000	
		Program Pengembangan Sumber Daya Manusia				Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
		1 persentase pejabat struktural yang mengikuti diklat manajerial		38,83 persen	210.073.000	
30	5	PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN			508.500.400	
30	5	15	Program Penelitian dan Pengembangan Daerah			Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah
		1 Persentase hasil kajian yang dimanfaatkan untuk perumusan kebijakan perencanaan pembangunan daerah (Satuan: persen)	100.00	100	508.500.400	
30	6	UNSUR PENGAWASAN			3.032.707.550	
30	6	15	Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH			Inspektorat



Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program	Indikator Kinerja Awal RPJMD	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan 2021		SKPD Penanggung Jawab	
				Target	Rp.		
		1	Persentase Audit, Review dan Evaluasi yang dilaksanakan sesuai PKPT dan Standar AAIP (Satuan: persen)	100.00			
30 6 16	Program Peningkatan Profesionalisme Tenaga Pemeriksa dan Aparatur Pengawasan					Inspektorat	
		1	Persentase SDM dan Sarana Pengawasan yang tersedia (Satuan: persen)	70.00			
30 5 17	Program Penataan dan Penyempurnaan Kebijakan Sistem dan Prosedur Pengawasan					Inspektorat	
		1	Persentase OPD yang menerapkan SPIP hasil pendampingan (Satuan: persen)	28.00			
	Program Penyelenggaraan Pengawasan					Inspektorat Daerah	
		1	Persentase akuntabilitas kinerja pengelolaan keuangan	85 Persen	85 persen	2.562.326.400	
	Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan Dan Asistensi					Inspektorat Daerah	
		1	Persentase Perumusan Kebijakan, Asistensi dan Pendampingan		100 persen	470.381.150	
	UNSUR KEWILAYAHAN					9.473.861.427	
	Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik	1	Indeks Kepuasan Masyarakat Tingkat Kecamatan		100 persen	2.166.930.600	
				79,52 poin	80 poin	58.986.400	Kecamatan Rangkasbitung
				78,70 poin	79 poin	51.860.400	Kecamatan Kalanganyar
				77,48 poin	78.84 poin	94.220.800	Kecamatan Cibadak
				76,74 poin	77 poin	126.750.550	Kecamatan Warunggunung
				76,47 poin	77,65 Poin	74.581.300	Kecamatan Cimarga
				71,16 poin	74.3 poin	69.560.500	Kecamatan Cikulur
				68,40 poin	69 poin	76.128.000	Kecamatan Leuwidamar
				72,69 poin	72,75 poin	98.154.600	Kecamatan Sajira
				77,02 poin	77.42 poin	38.374.500	Kecamatan Maja
				76,70 poin	77.65 poin	32.672.000	Kecamatan Curugbitung
				71,75 poin	72,50 Point	39.249.000	Kecamatan Muncang
				77,35 poin	77.4 poin	133.161.800	Kecamatan Sobang
				76,72 poin	77 poin	48.183.000	Kecamatan Bojongmanik
				71,59 poin	72 poin	77.434.750	Kecamatan Cirinten
				77,29 poin	77.5 poin	118.342.500	Kecamatan Cipanas
				74,34 poin	75 poin	91.160.550	Kecamatan Lebakgedong
				75,80 poin	76 poin	105.116.900	Kecamatan Gunungkencana
				74,01 poin	74.03 poin	105.314.800	Kecamatan Cileles
				76,89 poin	77 poin	62.209.900	Kecamatan Banjarsari
				71,43 poin	78 poin	113.803.800	Kecamatan Cijaku
				68,69 poin	69,34 poin	59.088.650	Kecamatan Cigemblong

**BAB I****LPPD KABUPATEN LEBAK TAHUN ANGGARAN 2021**

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program	Indikator Kinerja Awal RPJMD	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan 2021		SKPD Penanggung Jawab
				Target	Rp.	
			78,15 poin	78.45 poin	60.012.400	Kecamatan Malingping
			72,47 poin	72.50 Poin	84.392.350	Kecamatan Wanasalam
			73,74 poin	75,67	106.177.800	Kecamatan Panggarangan
			75,06 poin	76 poin	58.871.800	Kecamatan Cihara
			77,82 poin	77,90 Poin	80.113.550	kecamatan Bayah
			74,81 poin	75 poin	56.610.600	Kecamatan Cibeber
			75,14 poin	76 poin	46.397.400	Kecamatan Ciligrang
	Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	1 Tingkat Kondusifitas Kecamatan dalam kondisi baik		100 persen	1.390.401.400	28 Kecamatan
				100 persen	62.100.000	Kecamatan Rangkasbitung
				100 Persen	70.980.000	Kecamatan Kalanganyar
				100 Persen	60.180.000	Kecamatan Cibadak
				100 persen	41.650.000	Kecamatan Warunggunung
				100 Persen	49.104.000	Kecamatan Cimarga
				100 Persen	45.300.000	Kecamatan Cikulur
				100 Persen	50.490.000	Kecamatan Leuwidamar
				100 Persen	49.980.000	Kecamatan Sajira
				100 Persen	49.980.000	Kecamatan Maja
				100 Persen	50.710.000	Kecamatan Curugbitung
				100,00 Persen	49.800.000	Kecamatan Muncang
				100 Persen	39.300.000	Kecamatan Sobang
				100 Persen	49.250.000	Kecamatan Bojongmanik
				100,00 Persen	49.980.000	Kecamatan Cirinten
				100 Persen	49.980.000	Kecamatan Cipanas
				100 Persen	49.615.000	Kecamatan Lebakgedong
				100 persen	49.980.000	kecamatan Gunung Kencana
				100 Persen	49.980.000	Kecamatan Cileles
				100 persen	48.520.000	Kecamatan Banjarsari
				100 Persen	78.062.400	Kecamatan Cijaku
				100 Persen	30.180.000	Kecamatan Cigemblong
				100 Persen	49.980.000	Kecamatan Malingping
				100 Persen	30.180.000	Kecamatan Wanasalam
				100 Persen	49.980.000	Kecamatan Panggarangan
				100 Persen	30.150.000	Kecamatan Cihara
				100 Persen	55.030.000	Kecamatan Bayah
				100 Persen	49.980.000	Kecamatan Cibeber
				100 Persen	49.980.000	Kecamatan Ciligrang
	Program Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Desa	1 Persentase Perdes APBDes Sesuai Peraturan Bupati		100 persen	836.522.150	28 Kecamatan



Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program	Indikator Kinerja Awal RPJMD	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan 2021		SKPD Penanggung Jawab
				Target	Rp.	
				100 persen	16.498.000	Kecamatan Rangkasbitung
				100 Persen	39.556.400	Kecamatan Kalanganyar
				100 Persen	89.324.800	Kecamatan Cibadak
				100 persen	29.688.400	Kecamatan Warunggunung
				100 Persen	59.765.400	Kecamatan Cimarga
				100 Persen	71.932.800	Kecamatan Cikulur
				100 Persen	15.133.400	Kecamatan Leuwidamar
				100.00 Persen	17.716.000	Kecamatan Sajira
				100 Persen	28.940.000	Kecamatan Maja
				100 Persen	17.410.000	Kecamatan Curugbitung
				100 Persen	24.520.000	Kecamatan Muncang
				100 Persen	25.154.000	Kecamatan Sobang
				100 Persen	9.995.000	Kecamatan Bojongmanik
				100,00 Persen	18.062.500	Kecamatan Cirinten
				100 Persen	15.264.000	Kecamatan Cipanas
				100 Persen	3.740.000	Kecamatan Lebakgedong
				100 Persen	13.316.500	Kecamatan Gunungkencana
				100 Persen	18.079.500	Kecamatan Cileles
				100 persen	19.680.000	Kecamatan Banjarsari
				100 Persen	16.634.000	Kecamatan Cijaku
				100 Persen	5.316.000	Kecamatan Cigemblong
				100 Persen	62.972.000	Kecamatan Malingping
				100 Persen	31.442.150	Kecamatan Wanasalam
				100 Persen	28.585.500	Kecamatan Panggarangan
				100 Persen	64.018.000	Kecamatan Cihara
				100 Persen	16.055.000	Kecamatan Bayah
				100 Persen	71.759.800	Kecamatan Cibeber
				100 Persen	5.963.000	Kecamatan Ciligrang
	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan	1	Persentase Lembaga Kemasyarakatan Aktif	100 persen	5.080.007.277	28 Kecamatan
				100 persen	4.071.688.627	Kecamatan Rangkasbitung
				100 Persen	28.680.000	Kecamatan Kalanganyar
				100 Persen	33.605.000	Kecamatan Cibadak
				100 Persen	31.024.000	Kecamatan Warunggunung
				100 Persen	18.600.000	Kecamatan Cimarga
				100 Persen	56.980.000	Kecamatan Cikulur
				100 Persen	41.625.000	Kecamatan Leuwidamar
				100 Persen	31.390.000	Kecamatan Sajira
				100 Persen	32.800.000	Kecamatan Maja
				100 Persen	46.146.000	Kecamatan Curugbitung



Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program	Indikator Kinerja Awal RPJMD	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan 2021		SKPD Penanggung Jawab
				Target	Rp.	
				100 Persen	22.292.750	Kecamatan Muncang
				100 Persen		Kecamatan Sobang
				100 persen	28.844.000	Kecamatan Bojongmanik
				100 Persen	46.602.000	Kecamatan Cirinten
				100 Persen	31.205.000	Kecamatan Cipanas
				100 Persen	106.312.400	Kecamatan Lebakgedong
				100 Persen	35.821.000	Kecamatan Gunungkencana
				100 Persen	67.982.500	Kecamatan Cileles
				100 Persen	72.917.000	Kecamatan Banjarsari
				100 Persen	26.280.000	Kecamatan Cijaku
				100 Persen	35.040.000	Kecamatan Cigemblong
				100 Persen	30.375.000	Kecamatan Malingping
				100 Persen	27.600.000	Kecamatan Wanasalam
				100 Persen	52.790.000	Kecamatan Panggarangan
				100 Persen	14.882.000	Kecamatan Cihara
				100 Persen	48.968.000	Kecamatan Bayah
				100 Persen	19.265.000	Kecamatan Cibeber
				100 Persen	20.292.000	Kecamatan Ciligrang
	UNSUR PEMERINTAHAN UMUM				2.017.413.610	
	KESATUAN BANGSA DAN POLITIK				2.017.413.610	
	Program Pengembangan Wawasan Kebangsaan					KESBANGPOL, SETDA
		1	Prosentase Terlaksananya Peningkatan toleransi dan pembinaan keagamaan (Satuan: %)	100.00		
	Program Kemitraan Pengembangan Wawasan Kebangsaan					KESBANGPOL
		1	Persentase Parpol yang terbina (Satuan: %)	100.00		
		2	Cakupan Pembinaan terhadap Ormas/LSM (Satuan: %)	44.44		
	Program Pemberdayaan Dan Pengawasan Organisasi Masyarakat					Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
		1	Cakupan Ormas/LSM dan Lembaga Nirlaba lainnya berkinerja baik		100 Persen	
	Program Pembinaan Dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial, Dan Budaya					Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
		1	Cakupan Penyelenggaraan Pembinaan P4GN, PAKEM, dan FKUB		100 Persen	223.710.000
	Program Penguatan Ideologi Pancasila Dan Karakter Kebangsaan					Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
		1	Cakupan penyelenggaraan Sosialisasi dan Edukasi Penguatan Ideologi Pancasila (satuan: Orang)		1500	100.820.000
	Program Peningkatan Kewaspadaan Nasional Dan Peningkatan Kualitas Dan Fasilitasi Penanganan Konflik Sosial					Badan Kesatuan Bangsa dan Politik



Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program	Indikator Kinerja Awal RPJMD	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan 2021		SKPD Penanggung Jawab
				Target	Rp.	
		1 Prosentase terpenuhinya kebutuhan Koordinasi Jaringan Deteksi Dini, FKDM dan Forum Kominda		100 Persen	334.401.600	
	Program Peningkatan Peran Partai Politik Dan Lembaga Pendidikan Melalui Pendidikan Politik Dan Pengembangan Etika Serta Budaya Politik					Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
		1 Cakupan Partai Politik yang memperoleh kursi di DPRD Kab. Lebak dan k mampu mengelola Bantuan Keuangan sesuai Peraturan		100 Persen	1.358.482.010	
	NON URUSAN				1.419.135.157.344	
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai SAKIP Perangkat Daerah			1.419.135.157.344	
			80,26 Poin	78 Poin	724.208.075.047	Dinas Pendidikan
			81,87 Poin	81.89 poin	376.867.642.812	Dinas Kesehatan
			80,17 Poin	79,90 poin	20.932.140.536	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
			80,31 Poin	80 poin	3.560.750.891	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Serta Pertanahan
			70,77 Poin	75 poin	5.695.988.909	Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran
			65,78 Poin	58,36 poin	3.060.687.330	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
			80,26 Poin	80,26 Poin	3.700.426.202	Dinas Sosial
			80,39 Poin	78 poin	2.983.053.730	Dinas Tenaga Kerja
			91,91 Poin	81 Poin	2.984.316.763	DP3AP2KB
			81,50 Poin	62 Poin	2.968.886.539	Dinas Ketahanan Pangan
			80,11 Poin	70 Poin	8.357.285.304	Dinas Lingkungan Hidup
			80,20 Poin	64 Poin	6.324.250.315	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
			77,24 Poin	77,24 Poin	3.715.107.049	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
			80,10 Poin	75 Poin	15.559.310.581	Dinas Perhubungan
			83,45 Poin	75 Poin	3.429.288.454	Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian
			80,07 Poin	80 poin	3.043.068.873	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah
			81,66 Poin	72 poin	6.107.726.038	Dinas Penanaman Modal
			80,99 Poin	80 poin	2.564.951.521	Dinas Kepemudaan dan Olahraga
			80,78 Poin	78 poin	4.994.712.869	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata
			80,15 Poin	60 Poin	2.880.687.733	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan



Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program	Indikator Kinerja Awal RPJMD	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan 2021		SKPD Penanggung Jawab
				Target	Rp.	
			81,99 Poin	78 poin	4.132.959.948	Dinas Perikanan
			81,54 Poin	82 poin	15.156.583.735	Dinas Pertanian
			80,01 Poin	80 poin	4.661.552.150	Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan
			86,21 Poin	75 point	4.300.691.234	Dinas Perindustrian dan Perdagangan
			82,83 Poin	77 poin	27.163.279.095	Sekretariat Daerah
			80,82 Poin	81 poin	36.736.822.629	Sekretariat DPRD
			88,26 Poin	89 poin	5.846.216.023	Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah
			82,46 Poin	80 poin	30.042.321.433	Badan Keuangan dan Aset Daerah
			80,69 Poin	74 Poin	13.667.543.426	Badan Pendapatan Daerah
			80,51 Poin	65 poin	4.620.146.863	BKPSDM
			84,31 Poin	80 Poin	8.407.922.924	Inspektorat Daerah
			70,78 Poin	78 poin	4.722.725.523	Kecamatan Rangkasbitung
			60,54 Poin	62 Point	1.775.323.338	Kecamatan Kalanganyar
			70,97 Poin	73 Poin	2.021.195.450	Kecamatan Cibadak
			67,35 Poin	78 poin	1.827.931.219	Kecamatan Warunggunung
			75,94 Poin	76 Poin	2.263.515.222	Kecamatan Cimarga
			76,65 Poin	78 poin	2.208.129.130	Kecamatan Cikulur
			61,39 Poin	78 poin	2.027.727.819	Kecamatan Leuwidamar
			68,33 Poin	68,35 poin	1.976.301.467	Kecamatan Sajira
			76,39 Poin	78 poin	2.223.068.961	Kecamatan Maja
			60,18 Poin	81 poin	2.330.022.578	Kecamatan Curugbitung
			71,39 Poin	80 Point	1.739.313.919	Kecamatan Muncang
			56,45 Poin	70 poin	1.522.694.439	Kecamatan Sobang
			73,38 Poin	78 poin	1.939.715.778	Kecamatan Bojongmanik
			67,67 Poin	78 poin	1.980.695.667	Kecamatan Cirinten
			72,03 Poin	73,05	2.312.465.090	Kecamatan Cipanas
			61,02 Poin	78 poin	1.631.202.607	Kecamatan Lebakgedong
			60,48 Poin	80 poin	1.964.461.428	Kecamatan Gunungkencana
			73,64 Poin	74 poin	2.208.085.628	Kecamatan Cileles
			71,39 Poin	78 poin	1.836.942.694	Kecamatan Banjarsari
			72,81 Poin	74 poin	1.927.878.900	Kecamatan Cijaku
			71,39 Poin	75,54 poin	1.752.905.031	Kecamatan Cigemblong
			68,88 Poin	70 poin	2.410.798.598	Kecamatan Malingping
			71,39 Poin	80 Poin	1.780.433.710	Kecamatan Wanasalam
			71,83 Poin	72 poin	1.871.184.585	Kecamatan Panggarangan
			76,84 Poin	78 poin	2.206.087.759	Kecamatan Cihara
			57,05 Poin	58,30 Poin	2.026.747.857	Kecamatan Bayah
			67,55 Poin	78 poin	2.232.881.827	Kecamatan Cibeber



Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program	Indikator Kinerja Awal RPJMD	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan 2021		SKPD Penanggung Jawab
				Target	Rp.	
			71,39 Poin	78 poin	1.831.172.189	Kecamatan Cilograng
			65,89 Poin	72 Poin	1.909.151.975	Kesatuan Bangsa dan Politik
30	7	FUNGSI PENUNJANG LAINNYA				
30	7	1 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran				CILOGRANG, CIBEBER, BAYAH, CIHARA, PANGGARANGAN, WANASALAM, MALINGPING, CIGEMBLONG, CIJAKU, BANJARSARI, CILELES, GUNUNGKENCANA, LEBAKGEDONG, CIPANAS, CIRINTEN, BOJONGMANIK, SOBANG, MUNCANG, CURUGBITUNG, MAJA, SAJIRA, LEUWIDAMAR, CIKULUR, CIMARGA, WARUNGGUNUNG, CIBADAK, KALANGANYAR, RANGKASBITUNG, BPBD, KESBANGPOL, SETWAN, SETDA, INSPEKTORAT, BKPP, BAPENDA, BPKAD, BAPPEDA, DISPERINDAG, DISNAK, DSTANBUN , PARIWISATA, PERIKANAN, DISKERPUS, DISPORA, DPMTSP, DISKOP, DISKOMINFO, DISHUB, DPPKBP3A, PMD, DUKCAPIL, DLH, KETAPANG, NAKERTRANS, DINSOS, SATPOL PP, PERKIM, PUPR, RSUD, DINKES, DISDIK
		1 Cakupan penyelenggaraan administrasi perkantoran (Satuan: %)	100.00			
30	7	2 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur				CILOGRANG, CIBEBER, BAYAH, CIHARA, PANGGARANGAN, WANASALAM, MALINGPING, CIGEMBLONG, CIJAKU,

**BAB I****LPPD KABUPATEN LEBAK TAHUN ANGGARAN 2021**

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program	Indikator Kinerja Awal RPJMD	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan 2021		SKPD Penanggung Jawab
				Target	Rp.	
						BANJARSARI, CILELES, GUNUNGKENCANA, LEBAKGEDONG, CIPANAS, CIRINTEN, BOJONGMANIK, SOBANG, MUNCANG, CURUGBITUNG, MAJA, SAJIRA, LEUWIDAMAR, CIKULUR, CIMARGA, WARUNGGUNUNG, CIBADAK, KALANGANYAR, RANGKASBITUNG, BPBD, KESBANGPOL, SETWAN, SETDA, INSPEKTORAT, BKPP, BAPENDA, BPKAD, BAPPEDA, DISPERINDAG, DISNAK, DSTANBUN, PARIWISATA, PERIKANAN, DISKERPUS, DISPORA, DPMPTSP, DISKOP, DISKOMINFO, DISHUB, DPPKBP3A, PMD, DUKCAPIL, DLH, KETAPANG, NAKERTRANS, DINSOS, SATPOL PP, PERKIM, PUPR, RSUD, DINKES, DISDIK
		1	Persentase Terpenuhinya kebutuhan Sarana Prasarana Aparatur dalam kondisi baik (Satuan: %)	100.00		
30	7	3	Program Peningkatan Disiplin Aparatur			SETWAN, SETDA, BAPENDA, SATPOL PP
		1	persentase pakaian dinas penunjang kebutuhan operasional POL-PP (Satuan: %)	100.00		
30	7	6	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan			CILOGRANG, CIBEBER, BAYAH, CIHARA, PANGGARANGAN, WANASALAM, MALINGPING, CIGEMBLONG, CIJAKU, BANJARSARI, CILELES, GUNUNGKENCANA, LEBAKGEDONG, CIPANAS,



Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program	Indikator Kinerja Awal RPJMD	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan 2021		SKPD Penanggung Jawab
				Target	Rp.	
						CIRINTEN, BOJONGMANIK, SOBANG, MUNCANG, CURUGBITUNG, MAJA, SAJIRA, LEUWIDAMAR, CIKULUR, CIMARGA, WARUNGGUNUNG, CIBADAK, KALANGANYAR, RANGKASBITUNG, BPBD, KESBANGPOL, SETWAN, SETDA, INSPEKTORAT, BKPP, BAPENDA, BPKAD, BAPPEDA, DISPERINDAG, DISNAK, DISTANBUN, PARIWISATA, PERIKANAN, DISKERPUS, DISPORA, DPMPSTP, DISKOP, DISKOMINFO, DISHUB, DPPKBP3A, PMD, DUKCAPIL, DLH, KETAPANG, NAKERTRANS, DINSOS, SATPOL PP, PERKIM, PUPR, RSUD, DINKES, DISDIK
		1	Persentase capaian kinerja dan Keuangan Daerah (Satuan: %)	100.00		
30	7	16	Program Pencegahan Dini dan Penanggulangan Korban Bencana Alam			BPBD
		1	Cakupan Penanggulangan Bencana (Satuan: %)	100.00		
30	7	17	Program Penyelenggaraan Pemerintahan			CILOGRANG, CIBEBER, BAYAH, CIHARA, PANGGARANGAN, WANASALAM, MALINGPING, CIGEMBLONG, CIJAKU, BANJARSARI, CILELES, GUNUNGKENCANA, LEBAKGEDONG, CIPANAS, CIRINTEN, BOJONGMANIK, SOBANG, MUNCANG, CURUGBITUNG, MAJA, SAJIRA, LEUWIDAMAR, CIKULUR, CIMARGA,



Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program	Indikator Kinerja Awal RPJMD	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan 2021		SKPD Penanggung Jawab
				Target	Rp.	
						WARUNGGUNUNG, CIBADAK, KALANGANYAR, RANGKASBITUNG, SETDA
		1 Cakupan Penyelenggaraan Pemerintahan Kecamatan (Satuan: %)	100.00			
		2 persentase peningkatan pelayanan jaminan sosial dan pemberdayaan masyarakat (Satuan: %)	100.00			
JUMLAH					2.920.409.223.229	

Sumber : Bapelitbangda Kab. Lebak.

D. Kegiatan Pembangunan Daerah Berdasarkan Dokumen Perencanaan Tahunan

Dalam mencapai strategi pembangunan sebagaimana sebelumnya, perencanaan secara partisipatif mutlak diperlukan dalam rangka menjangkau aspirasi masyarakat Kabupaten Lebak dalam pembangunan tahunan maupun lima tahunan. Perencanaan partisipatif merupakan salah satu pendekatan dalam proses perencanaan. Perencanaan partisipatif yang diterapkan di Kabupaten Lebak mengedepankan pemberian peluang kepada masyarakat yang seluas-luasnya sehingga dapat berperan serta dalam proses pengambilan keputusan secara *bottom-up* bagi kepentingan bersama. Untuk itu, titik berat dari perencanaan partisipatif tersebut diarahkan pada penggerakan seluruh sumber daya yang ada di masyarakat. Masyarakat diajak untuk berpartisipasi untuk berkolaborasi sesama warga melalui Musrembang Kecamatan dan Musrembang Kabupaten. Secara lebih lengkap program pembangunan akan diuraikan pada tabel berikut ini :

Tabel 1.18
Kegiatan Pembangunan Daerah
Berdasarkan Dokumen Perencanaan Tahunan

KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN	ANGGARAN RKPD (Rp.)
1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	946.182.048.823,00
1.01	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN	946.182.048.823,00
1.01.0.00.0.00.02.00	DINAS PENDIDIKAN	946.182.048.823,00
1.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	701.743.069.023,00
1.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	302.638.250,00
1.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	697.990.407.200,00
1.01.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	1.684.217.500,00
1.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	555.461.525,00
1.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1.103.748.210,00
1.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	106.596.338,00
1.01.02	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	244.438.979.800,00
1.01.02.2.01	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	135.624.602.731,00
1.01.02.2.02	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	85.114.458.069,00
1.01.02.2.03	Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)	16.892.565.000,00
1.01.02.2.04	Pengelolaan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	6.807.354.000,00



KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN	ANGGARAN RKPD (Rp.)
1.02	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	459.161.430.611,00
1.02.0.00.0.00.01.00	DINAS KESEHATAN	459.161.430.611,00
1.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	347.486.486.034,00
1.02.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	184.623.100,00
1.02.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	86.049.660.722,00
1.02.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	643.054.950,00
1.02.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	507.258.700,00
1.02.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	307.804.000,00
1.02.01.2.10	Peningkatan Pelayanan BLUD	259.794.084.562,00
1.02.02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	102.836.276.627,00
1.02.02.2.01	Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	10.781.207.500,00
1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	81.083.323.600,00
1.02.02.2.03	Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan secara Terintegrasi	30.437.800,00
1.02.02.2.04	Penerbitan Izin Rumah Sakit Kelas C, D dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	10.941.307.727,00
1.02.03	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN	8.076.288.700,00
1.02.03.2.02	Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumberdaya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM di Wilayah Kabupaten/Kota	8.028.196.000,00
1.02.03.2.03	Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	48.092.700,00
1.02.04	PROGRAM SEDIAAN FARMASI, ALAT KESEHATAN DAN MAKANAN MINUMAN	489.568.750,00
1.02.04.2.01	Pemberian Izin Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)	67.089.750,00
1.02.04.2.03	Penerbitan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga	422.479.000,00
1.02.05	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	272.810.500,00
1.02.05.2.02	Pelaksanaan Sehat dalam rangka Promotif Preventif Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	272.810.500,00
1.03	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	286.924.195.937,00
1.03.0.00.0.00.01.00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	286.924.195.937,00
1.03.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	23.898.162.270,00
1.03.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	964.269.300,00
1.03.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	17.324.649.970,00
1.03.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	1.033.804.000,00
1.03.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	465.850.000,00
1.03.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	581.275.000,00
1.03.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	3.528.314.000,00
1.03.02	PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)	30.029.296.500,00
1.03.02.2.01	Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai (WS) dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	19.162.792.900,00
1.03.02.2.02	Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang Luasnya dibawah 1000 Ha dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	10.866.503.600,00
1.03.03	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM	26.010.537.280,00
1.03.03.2.01	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota	26.010.537.280,00
1.03.05	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH	18.832.121.050,00
1.03.05.2.01	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota	18.832.121.050,00
1.03.07	PROGRAM PENGEMBANGAN PERMUKIMAN	440.848.000,00
1.03.07.2.01	Penyelenggaraan Infrastruktur pada Permukiman di Kawasan Strategis Daerah Kabupaten/Kota	440.848.000,00
1.03.08	PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG	5.347.745.550,00
1.03.08.2.01	Penyelenggaraan Bangunan Gedung di Wilayah Daerah Kabupaten/Kota, Pemberian Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung	5.347.745.550,00
1.03.09	PROGRAM PENATAAN BANGUNAN DAN LINGKUNGANNYA	6.032.504.350,00



KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN	ANGGARAN RKP (Rp.)
1.03.09.2.01	Penyelenggaraan Penataan Bangunan dan Lingkungannya di Daerah Kabupaten/Kota	6.032.504.350,00
1.03.10	PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN	175.527.981.037,00
1.03.10.2.01	Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota	175.527.981.037,00
1.03.11	PROGRAM PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI	495.000.000,00
1.03.11.2.01	Penyelenggaraan Pelatihan Tenaga Terampil Konstruksi	305.000.000,00
1.03.11.2.02	Penyelenggaraan Sistem Informasi Jasa Konstruksi Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	80.000.000,00
1.03.11.2.04	Pengawasan Tertib Usaha, Tertib Penyelenggaraan dan Tertib Pemanfaatan Jasa Konstruksi	110.000.000,00
1.03.12	PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG	309.999.900,00
1.03.12.2.04	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota	309.999.900,00
1.04	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN	21.983.105.358,00
1.04.2.10.0.00.02.0000	DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN SERTA PERTANAHAN	21.983.105.358,00
1.04.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	3.886.919.203,00
1.04.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	319.286.270,00
1.04.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	2.592.952.883,00
1.04.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	296.183.250,00
1.04.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	327.114.000,00
1.04.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	164.599.400,00
1.04.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	186.783.400,00
1.04.02	PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN	3.579.486.235,00
1.04.02.2.03	Pembangunan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota	3.353.476.060,00
1.04.02.2.05	Pembinaan Pengelolaan Rumah Susun Umum dan/atau Rumah Khusus	226.010.175,00
1.04.03	PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN	5.499.460.600,00
1.04.03.2.03	Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (sepuluh) Ha	5.499.460.600,00
1.04.04	PROGRAM PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN KUMUH	5.689.874.620,00
1.04.04.2.01	Pencegahan Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh pada Daerah Kabupaten/Kota	5.689.874.620,00
1.04.05	PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU)	3.327.364.700,00
1.04.05.2.01	Urusan Penyelenggaraan PSU Perumahan	3.327.364.700,00
1.05	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT	15.394.825.250,00
1.05.0.00.0.00.03.00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN	9.410.573.800,00
1.05.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	5.799.767.850,00
1.05.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	36.730.000,00
1.05.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	5.029.430.100,00
1.05.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	167.373.650,00
1.05.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	102.769.100,00
1.05.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	21.781.500,00
1.05.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	463.465.000,00
1.05.02	PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	3.387.305.950,00
1.05.02.2.01	Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	3.300.195.950,00
1.05.02.2.02	Penegakan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Bupati/Wali Kota	87.110.000,00
1.05.04	PROGRAM PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN, PENYELAMATAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NON KEBAKARAN	223.500.000,00
1.05.04.2.01	Pencegahan, Pengendalian, Pemadaman, Penyelamatan, dan Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	223.500.000,00
1.05.0.00.0.00.04.0000	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH	5.984.251.450,00
1.05.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	3.168.013.600,00
1.05.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	72.869.900,00
1.05.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	1.153.888.870,00
1.05.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	246.966.800,00
1.05.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	688.250.000,00



KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN	ANGGARAN RKP (Rp.)
1.05.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	151.720.270,00
1.05.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	854.317.760,00
1.05.03	PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA	2.816.237.850,00
1.05.03.2.01	Pelayanan Informasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota	99.955.000,00
1.05.03.2.02	Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	1.098.280.650,00
1.05.03.2.03	Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	1.618.002.200,00
1.06	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL	8.158.652.391,00
1.06.0.00.0.00.04.00	DINAS SOSIAL	8.158.652.391,00
1.06.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	3.067.805.541,00
1.06.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	27.925.750,00
1.06.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	2.168.202.941,00
1.06.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	166.648.350,00
1.06.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	465.850.000,00
1.06.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	126.232.500,00
1.06.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	112.946.000,00
1.06.02	PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL	143.688.600,00
1.06.02.2.02	Pengumpulan Sumbangan dalam Daerah Kabupaten/Kota	3.625.000,00
1.06.02.2.03	Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/Kota	140.063.600,00
1.06.03	PROGRAM PENANGANAN WARGA NEGARA MIGRAN KORBAN TINDAK KEKERASAN	9.000.000,00
1.06.03.2.01	Pemulangan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan dari Titik Debarkasi di Daerah Kabupaten/Kota untuk dipulangkan ke Desa/Kelurahan Asal	9.000.000,00
1.06.04	PROGRAM REHABILITASI SOSIAL	442.442.500,00
1.06.04.2.01	Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial	150.006.500,00
1.06.04.2.02	Rehabilitasi Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA di Luar Panti Sosial	292.436.000,00
1.06.05	PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL	140.832.750,00
1.06.05.2.01	Pemeliharaan Anak-Anak Terlantar	13.837.500,00
1.06.05.2.02	Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	126.995.250,00
1.06.06	PROGRAM PENANGANAN BENCANA	4.309.443.000,00
1.06.06.2.01	Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/Kota	4.277.351.000,00
1.06.06.2.02	Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat terhadap Kesiapsiagaan Bencana Kabupaten/Kota	32.092.000,00
1.06.07	PROGRAM PENGELOLAAN TAMAN MAKAM PAHLAWAN	45.440.000,00
1.06.07.2.01	Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota	45.440.000,00
2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	3.779.737.482,00
2.07	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA	3.779.737.482,00
2.07.0.00.0.00.01.00	DINAS TENAGA KERJA	3.779.737.482,00
2.07.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	2.928.176.796,00
2.07.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	128.719.200,00
2.07.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	2.112.366.446,00
2.07.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	259.976.750,00
2.07.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	211.778.400,00
2.07.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	215.336.000,00
2.07.03	PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA	554.300.986,00
2.07.03.2.01	Pelaksanaan Pelatihan berdasarkan Unit Kompetensi	412.678.386,00
2.07.03.2.02	Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta	141.622.600,00
2.07.04	PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA	107.158.600,00
2.07.04.2.01	Pelayanan Antarkerja di Daerah Kabupaten/Kota	107.158.600,00
2.07.05	PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL	190.101.100,00
2.07.05.2.01	Pengesahan Peraturan Perusahaan dan Pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama untuk Perusahaan yang hanya Beroperasi dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	77.670.600,00
2.07.05.2.02	Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja dan Penutupan Perusahaan di Daerah Kabupaten/Kota	112.430.500,00
2.08	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	1.034.408.700,00
2.08.2.14.0.00.02.00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK SERTA PENGENDALIAN PENDUDUK, DAN KELUARGA BERENCA	1.034.408.700,00



KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN	ANGGARAN RKP (Rp.)
2.08.02	PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN	454.618.900,00
2.08.02.2.01	Pelebagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) pada Lembaga Pemerintah Kewenangan Kabupaten/Kota	70.749.900,00
2.08.02.2.02	Pemberdayaan Perempuan Bidang Politik, Hukum, Sosial, dan Ekonomi pada Organisasi Kemasyarakatan Kewenangan Kabupaten/Kota	120.194.000,00
2.08.02.2.03	Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	263.675.000,00
2.08.06	PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA)	107.842.800,00
2.08.06.2.01	Pelebagaan PHA pada Lembaga Pemerintah, Nonpemerintah, dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota	76.964.900,00
2.08.06.2.02	Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	30.877.900,00
2.08.07	PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK	471.947.000,00
2.08.07.2.01	Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak yang Melibatkan para Pihak Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	88.432.000,00
2.08.07.2.02	Penyediaan Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus yang Memerlukan Koordinasi Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	383.515.000,00
2.09	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PANGAN	5.910.153.836,00
2.09.0.00.0.00.01.00	DINAS KETAHANAN PANGAN	5.910.153.836,00
2.09.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	2.963.420.536,00
2.09.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	217.100.750,00
2.09.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	2.087.716.000,00
2.09.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	269.669.950,00
2.09.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	144.271.380,00
2.09.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	244.662.456,00
2.09.02	PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA EKONOMI UNTUK KEDAULATAN DAN KEMANDIRIAN PANGAN	660.000.000,00
2.09.02.2.01	Penyediaan Infrastruktur dan Seluruh Pendukung Kemandirian Pangan sesuai Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	660.000.000,00
2.09.03	PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT	1.883.704.800,00
2.09.03.2.01	Penyediaan dan Penyaluran Pangan Pokok atau Pangan Lainnya sesuai dengan Kebutuhan Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan	341.843.500,00
2.09.03.2.02	Pengelolaan dan Keseimbangan Cadangan Pangan Kabupaten/Kota	813.128.000,00
2.09.03.2.04	Pelaksanaan Pencapaian Target Konsumsi Pangan Perkapita/Tahun sesuai dengan Angka Kecukupan Gizi	728.733.300,00
2.09.04	PROGRAM PENANGANAN KERAWANAN PANGAN	161.741.000,00
2.09.04.2.01	Penyusunan Peta Kerentanan dan Ketahanan Pangan Kecamatan	56.810.000,00
2.09.04.2.02	Penanganan Kerawanan Pangan Kewenangan Kabupaten/Kota	104.931.000,00
2.09.05	PROGRAM PENGAWASAN KEAMANAN PANGAN	241.287.500,00
2.09.05.2.01	Pelaksanaan Pengawasan Keamanan Pangan Segar Daerah Kabupaten/Kota	241.287.500,00
2.10	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANAHAN	775.000.000,00
1.04.2.10.0.00.02.0000	DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN SERTA PERTANAHAN	775.000.000,00
2.10.04	PROGRAM PENYELESAIAN SENGKETA TANAH GARAPAN	150.000.000,00
2.10.04.2.01	Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan dalam Daerah Kabupaten/Kota	150.000.000,00
2.10.06	PROGRAM REDISTRIBUSI TANAH, SERTA GANTI KERUGIAN PROGRAM TANAH KELEBIHAN MAKSIMUM DAN TANAH ABSENTEE	550.000.000,00
2.10.06.2.01	Penetapan Subjek dan Objek Redistribusi Tanah serta Ganti Kerugian Tanah Kelebihan Maksimum dan Tanah Absentee dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	550.000.000,00
2.10.10	PROGRAM PENATAGUNAAN TANAH	75.000.000,00
2.10.10.2.01	Penggunaan Tanah yang Hamparannya dalam satu Daerah Kabupaten/Kota	75.000.000,00
2.11	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP	15.012.202.671,00
2.11.0.00.0.00.01.00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP	15.012.202.671,00
2.11.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	8.536.732.546,00
2.11.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	116.516.000,00
2.11.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	7.474.335.396,00
2.11.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	143.323.000,00
2.11.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	224.252.150,00
2.11.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	578.306.000,00



KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN	ANGGARAN RKP (Rp.)
2.11.02	PROGRAM PERENCANAAN LINGKUNGAN HIDUP	204.218.000,00
2.11.02.2.01	Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH) Kabupaten/Kota	204.218.000,00
2.11.03	PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP	1.246.907.375,00
2.11.03.2.01	Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota	785.206.500,00
2.11.03.2.02	Penanggulangan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota	350.796.950,00
2.11.03.2.03	Pemulihan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota	110.903.925,00
2.11.04	PROGRAM PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI (KEHATI)	792.220.000,00
2.11.04.2.01	Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Kabupaten/Kota	792.220.000,00
2.11.05	PROGRAM PENGENDALIAN BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (B3) DAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (LIMBAH B3)	62.503.000,00
2.11.05.2.01	Penyimpanan Sementara Limbah B3	62.503.000,00
2.11.06	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TERHADAP IZIN LINGKUNGAN DAN IZIN PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (PPLH)	150.148.000,00
2.11.06.2.01	Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin Lingkungan dan Izin PPLH diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	150.148.000,00
2.11.08	PROGRAM PENINGKATAN PENDIDIKAN, PELATIHAN DAN PENYULUHAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT	106.600.000,00
2.11.08.2.01	Penyelenggaraan Pendidikan, Pelatihan, dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	106.600.000,00
2.11.09	PROGRAM PENGHARGAAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT	77.810.000,00
2.11.09.2.01	Pemberian Penghargaan Lingkungan Hidup Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	77.810.000,00
2.11.10	PROGRAM PENANGANAN PENGADUAN LINGKUNGAN HIDUP	119.392.000,00
2.11.10.2.01	Penyelesaian Pengaduan Masyarakat di Bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) Kabupaten/Kota	119.392.000,00
2.11.11	PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN	3.715.671.750,00
2.11.11.2.01	Pengelolaan Sampah	3.715.671.750,00
2.12	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	9.531.682.790,00
2.12.0.00.0.00.01.0000	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	9.531.682.790,00
2.12.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	6.155.173.990,00
2.12.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1.108.102.700,00
2.12.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	4.384.166.200,00
2.12.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	246.948.950,00
2.12.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	243.381.140,00
2.12.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	172.575.000,00
2.12.02	PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK	2.816.673.850,00
2.12.02.2.01	Pelayanan Pendaftaran Penduduk	2.816.673.850,00
2.12.03	PROGRAM PENCATATAN SIPIL	431.938.500,00
2.12.03.2.01	Pelayanan Pencatatan Sipil	431.938.500,00
2.12.04	PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN	127.896.450,00
2.12.04.2.03	Penyelenggaraan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	127.896.450,00
2.13	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	13.028.996.133,00
2.13.0.00.0.00.01.00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	13.028.996.133,00
2.13.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	3.648.976.833,00
2.13.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	96.065.100,00
2.13.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	3.243.262.458,00
2.13.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	101.464.200,00
2.13.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	128.071.275,00
2.13.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	80.113.800,00
2.13.02	PROGRAM PENATAAN DESA	450.000.000,00
2.13.02.2.01	Penyelenggaraan Penataan Desa	450.000.000,00
2.13.04	PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA	8.842.987.550,00
2.13.04.2.01	Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa	8.842.987.550,00
2.13.05	PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT	87.031.750,00



KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN	ANGGARAN RKPD (Rp.)
2.13.05.2.01	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Kabupaten/Kota serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakat Pelakunya Hukum Adat yang Sama dalam Daerah Kabupaten/Kota	87.031.750,00
2.14	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	14.617.440.811,00
2.08.2.14.0.00.02.00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK SERTA PENGENDALIAN PENDUDUK, DAN KELUARGA BERENCA	14.617.440.811,00
2.14.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	3.351.755.811,00
2.14.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	135.998.000,00
2.14.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	2.836.525.178,00
2.14.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	86.622.040,00
2.14.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	193.178.193,00
2.14.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	99.432.400,00
2.14.02	PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK	13.310.000,00
2.14.02.2.01	Pemaduan dan Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Daerah Provinsi dengan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Pengendalian Kuantitas Penduduk	13.310.000,00
2.14.03	PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)	11.227.605.000,00
2.14.03.2.01	Pelaksanaan Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk dan KB sesuai Kearifan Budaya Lokal	54.450.400,00
2.14.03.2.03	Pengendalian dan Pendistribusian Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi serta Pelaksanaan Pelayanan KB di Daerah Kabupaten/Kota	9.968.525.400,00
2.14.03.2.04	Pemberdayaan dan Peningkatan Peran serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota dalam Pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB	1.204.629.200,00
2.14.04	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS)	24.770.000,00
2.14.04.2.01	Pelaksanaan Pembangunan Keluarga melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga	24.770.000,00
2.15	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN	19.542.434.238,00
2.15.0.00.0.00.01.00	DINAS PERHUBUNGAN	19.542.434.238,00
2.15.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	14.223.751.838,00
2.15.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	217.999.500,00
2.15.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	5.211.938.538,00
2.15.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	396.073.600,00
2.15.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	8.060.125.400,00
2.15.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	337.614.800,00
2.15.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)	5.318.682.400,00
2.15.02.2.02	Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	1.394.239.300,00
2.15.02.2.03	Pengelolaan Terminal Penumpang Tipe C	506.756.400,00
2.15.02.2.04	Penerbitan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir	209.776.800,00
2.15.02.2.05	Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	509.232.900,00
2.15.02.2.06	Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota	1.108.356.000,00
2.15.02.2.09	Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang antar Kota dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	1.590.321.000,00
2.16	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	6.629.877.027,00
2.16.2.20.2.21.04.00	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN	6.629.877.027,00
2.16.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	3.448.996.517,00
2.16.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	111.182.700,00
2.16.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	2.773.149.132,00
2.16.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	132.126.300,00
2.16.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	314.370.385,00
2.16.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	118.168.000,00
2.16.02	PROGRAM INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK	1.035.237.430,00
2.16.02.2.01	Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	1.035.237.430,00
2.16.03	PROGRAM APLIKASI INFORMATIKA	2.145.643.080,00



KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN	ANGGARAN RKP (Rp.)
2.16.03.2.01	Pengelolaan Nama Domain yang telah Ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dan Sub Domain di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	353.393.150,00
2.16.03.2.02	Pengelolaan e-government Di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	1.792.249.930,00
2.17	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH	5.365.330.981,00
2.17.0.00.0.00.01.00	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH	5.365.330.981,00
2.17.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	3.211.858.431,00
2.17.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	97.157.200,00
2.17.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	2.897.072.081,00
2.17.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	48.157.050,00
2.17.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	119.699.700,00
2.17.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	49.772.400,00
2.17.03	PROGRAM PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN KOPERASI	230.662.800,00
2.17.03.2.01	Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi, Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/ Kota	230.662.800,00
2.17.05	PROGRAM PENDIDIKAN DAN LATIHAN PERKOPERASIAN	706.349.700,00
2.17.05.2.01	Pendidikan dan Latihan Perkoperasian Bagi Koperasi yang Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota	706.349.700,00
2.17.06	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN KOPERASI	307.049.600,00
2.17.06.2.01	Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi yang Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/Kota	307.049.600,00
2.17.07	PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM)	328.999.450,00
2.17.07.2.01	Pemberdayaan Usaha Mikro yang Dilakukan melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perizinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi dengan Para Pemangku Kepentingan	328.999.450,00
2.17.08	PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM	580.411.000,00
2.17.08.2.01	Pengembangan Usaha Mikro dengan Orientasi Peningkatan Skala Usaha Menjadi Usaha Kecil	580.411.000,00
2.18	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENANAMAN MODAL	7.289.545.475,00
2.18.0.00.0.00.01.00	DINAS PENANAMAN MODAL	7.289.545.475,00
2.18.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	5.572.378.375,00
2.18.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	87.773.000,00
2.18.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	4.093.456.673,00
2.18.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	269.299.000,00
2.18.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	272.680.000,00
2.18.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	429.594.120,00
2.18.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	419.575.582,00
2.18.02	PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL	177.847.750,00
2.18.02.2.01	Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif Dibidang Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	67.216.250,00
2.18.02.2.02	Pembuatan Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota	110.631.500,00
2.18.03	PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL	100.497.500,00
2.18.03.2.01	Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	100.497.500,00
2.18.04	PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL	584.940.200,00
2.18.04.2.01	Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan secara Terpadu Satu Pintu dibidang Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota	584.940.200,00
2.18.05	PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL	666.515.150,00
2.18.05.2.01	Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	666.515.150,00
2.18.06	PROGRAM PENGELOLAAN DATA DAN SISTEM INFORMASI PENANAMAN MODAL	187.366.500,00
2.18.06.2.01	Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan yang Terintegrasi pada Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	187.366.500,00
2.19	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA	12.629.754.844,00
2.19.0.00.0.00.01.00	DINAS KEPEMUDAAN OLAHRAGA	12.629.754.844,00
2.19.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	2.849.077.789,00
2.19.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	75.669.000,00
2.19.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	2.063.137.540,00
2.19.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	226.859.600,00
2.19.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	336.987.120,00



KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN	ANGGARAN RKP (Rp.)
2.19.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	146.424.529,00
2.19.02	PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEPEMUDAAN	1.697.384.975,00
2.19.02.2.01	Penyadaran, Pemberdayaan, dan Pengembangan Pemuda dan Kepemudaan Terhadap Pemuda Pelopor Kabupaten/Kota, Wirausaha Muda Pemula, dan Pemuda Kader Kabupaten/Kota	1.167.937.000,00
2.19.02.2.02	Pemberdayaan dan Pengembangan Organisasi Kepemudaan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	529.447.975,00
2.19.03	PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEOLAHRAGAAN	7.933.292.080,00
2.19.03.2.01	Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Pendidikan pada Jenjang Pendidikan yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	1.626.964.630,00
2.19.03.2.02	Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	3.204.381.200,00
2.19.03.2.03	Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Prestasi Tingkat Daerah Provinsi	1.601.946.250,00
2.19.03.2.04	Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Olahraga	1.500.000.000,00
2.19.04	PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS KEPRAMUKAAN	150.000.000,00
2.19.04.2.01	Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Kepramukaan	150.000.000,00
2.20	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG STATISTIK	255.243.940,00
2.16.2.20.2.21.04.00	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN	255.243.940,00
2.20.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL	255.243.940,00
2.20.02.2.01	Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	255.243.940,00
2.21	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERSANDIAN	87.719.840,00
2.16.2.20.2.21.04.00	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN	87.719.840,00
2.21.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI	87.719.840,00
2.21.02.2.01	Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	87.719.840,00
2.22	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN	2.083.386.345,00
2.22.3.26.0.00.01.00	DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA	2.083.386.345,00
2.22.02	PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN	164.143.095,00
2.22.02.2.02	Pelestarian Kesenian Tradisional yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota	164.143.095,00
2.22.03	PROGRAM PENGEMBANGAN KESENIAN TRADISIONAL	481.981.000,00
2.22.03.2.01	Pembinaan Kesenian yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota	481.981.000,00
2.22.05	PROGRAM PELESTARIAN DAN PENGELOLAAN CAGAR BUDAYA	837.262.250,00
2.22.05.2.02	Pengelolaan Cagar Budaya Peringkat Kabupaten/Kota	837.262.250,00
2.22.06	PROGRAM PENGELOLAAN PERMUSEUMAN	600.000.000,00
2.22.06.2.01	Pengelolaan Museum Kabupaten/Kota	600.000.000,00
2.23	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERPUSTAKAAN	770.638.000,00
2.23.2.24.0.00.02.00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN	770.638.000,00
2.23.02	PROGRAM PEMBINAAN PERPUSTAKAAN	770.638.000,00
2.23.02.2.01	Pengelolaan Perpustakaan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	770.638.000,00
2.24	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEARSIPAN	3.080.925.775,00
2.23.2.24.0.00.02.00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN	3.080.925.775,00
2.24.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	2.587.160.525,00
2.24.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	109.822.750,00
2.24.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	1.934.511.842,00
2.24.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	88.712.425,00
2.24.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	265.887.000,00
2.24.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	188.226.508,00
2.24.02	PROGRAM PENGELOLAAN ARSIP	285.941.000,00
2.24.02.2.03	Pengelolaan Simpul Jaringan Informasi Kearsipan Nasional Tingkat Kabupaten/Kota	285.941.000,00
2.24.03	PROGRAM PERLINDUNGAN DAN PENYELAMATAN ARSIP	207.824.250,00
2.24.03.2.03	Penyelamatan Arsip Perangkat Daerah Kabupaten/Kota yang Digabung dan/atau Dibubarkan, dan Pemekaran Daerah Kecamatan dan Desa/Kelurahan	207.824.250,00
3	URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN	5.935.248.938,00
3.25	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN	5.935.248.938,00
3.25.0.00.0.00.01.0000	DINAS PERIKANAN	5.935.248.938,00



KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN	ANGGARAN RKPD (Rp.)
3.25.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	4.108.660.427,00
3.25.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	332.918.500,00
3.25.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	3.286.903.171,00
3.25.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	162.620.290,00
3.25.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	171.763.000,00
3.25.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	154.455.466,00
3.25.03	PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP	659.734.250,00
3.25.03.2.02	Pemberdayaan Nelayan Kecil dalam Daerah Kabupaten/Kota	532.087.050,00
3.25.03.2.03	Pengelolaan dan Penyelenggaraan Tempat Pelelangan Ikan (TPI)	127.647.200,00
3.25.04	PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA	1.166.854.261,00
3.25.04.2.02	Pemberdayaan Pembudi Daya Ikan Kecil	68.955.950,00
3.25.04.2.04	Pengelolaan Pembudidayaan Ikan	1.097.898.311,00
3.26	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PARIWISATA	16.689.344.972,00
2.22.3.26.0.00.01.00	DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA	16.689.344.972,00
3.26.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	5.420.583.355,00
3.26.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	144.697.250,00
3.26.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	3.865.832.390,00
3.26.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	457.915.350,00
3.26.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	463.170.000,00
3.26.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	216.360.365,00
3.26.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	272.608.000,00
3.26.02	PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA	4.837.000.867,00
3.26.02.2.03	Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	4.746.515.067,00
3.26.02.2.04	Penetapan Tanda Daftar Usaha Pariwisata Daerah Kabupaten/Kota	90.485.800,00
3.26.03	PROGRAM PEMASARAN PARIWISATA	4.837.675.900,00
3.26.03.2.01	Pemasaran Pariwisata Dalam dan Luar Negeri Daya Tarik, Destinasi dan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota	4.837.675.900,00
3.26.05	PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF	1.594.084.850,00
3.26.05.2.01	Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Dasar	1.594.084.850,00
3.27	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN	68.183.327.156,00
3.27.0.00.0.00.01.00	DINAS PERTANIAN	61.189.269.631,00
3.27.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	16.938.772.281,00
3.27.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	291.584.200,00
3.27.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	16.097.024.831,00
3.27.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	137.230.100,00
3.27.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	207.675.650,00
3.27.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	205.257.500,00
3.27.02	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN	5.481.009.800,00
3.27.02.2.01	Pengawasan Penggunaan Sarana Pertanian	189.090.400,00
3.27.02.2.02	Pengelolaan Sumber Daya Genetik (SDG) Hewan, Tumbuhan, dan Mikro Organisme Kewenangan Kabupaten/Kota	5.291.919.400,00
3.27.03	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN	35.877.195.200,00
3.27.03.2.01	Pengembangan Prasarana Pertanian	107.865.200,00
3.27.03.2.02	Pembangunan Prasarana Pertanian	35.769.330.000,00
3.27.05	PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN	154.341.000,00
3.27.05.2.01	Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian Kabupaten/Kota	154.341.000,00
3.27.06	PROGRAM PERIZINAN USAHA PERTANIAN	130.150.000,00
3.27.06.2.01	Penerbitan Izin Usaha Pertanian yang Kegiatan Usahanya dalam Daerah Kabupaten/Kota	130.150.000,00
3.27.07	PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN	2.607.801.350,00
3.27.07.2.01	Pelaksanaan Penyuluhan Pertanian	2.607.801.350,00
3.27.0.00.0.00.08.00	DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN	6.994.057.525,00
3.27.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	5.077.916.900,00
3.27.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	120.496.900,00
3.27.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	4.048.274.075,00
3.27.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	220.784.050,00
3.27.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	414.339.575,00



KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN	ANGGARAN RKP (Rp.)
3.27.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	274.022.300,00
3.27.02	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN	1.250.998.000,00
3.27.02.2.02	Pengelolaan Sumber Daya Genetik (SDG) Hewan, Tumbuhan, dan Mikro Organisme Kewenangan Kabupaten/Kota	950.000.000,00
3.27.02.2.05	Pengendalian dan Pengawasan Penyediaan dan Peredaran Benih/Bibit Ternak, dan Hijauan Pakan Ternak dalam Daerah Kabupaten/Kota	300.998.000,00
3.27.04	PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER	514.999.625,00
3.27.04.2.01	Penjaminan Kesehatan Hewan, Penutupan dan Pembukaan Daerah Wabah Penyakit Hewan Menular Dalam Daerah Kabupaten/Kota	49.999.725,00
3.27.04.2.03	Pengelolaan Pelayanan Jasa Laboratorium dan Jasa Medik Veteriner dalam Daerah Kabupaten/Kota	415.000.000,00
3.27.04.2.04	Penerapan dan Pengawasan Persyaratan Teknis Kesehatan Masyarakat Veteriner	49.999.900,00
3.27.06	PROGRAM PERIZINAN USAHA PERTANIAN	70.000.000,00
3.27.06.2.01	Penerbitan Izin Usaha Pertanian yang Kegiatan Usahanya dalam Daerah Kabupaten/Kota	70.000.000,00
3.27.07	PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN	80.143.000,00
3.27.07.2.01	Pelaksanaan Penyuluhan Pertanian	80.143.000,00
3.30	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN	19.487.475.533,00
3.31.3.30.0.00.02.00	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN	19.487.475.533,00
3.30.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	5.018.423.678,00
3.30.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	329.727.500,00
3.30.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	3.923.236.328,00
3.30.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	218.189.550,00
3.30.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	270.841.900,00
3.30.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	276.428.400,00
3.30.02	PROGRAM PERIZINAN DAN PENDAFTARAN PERUSAHAAN	226.825.500,00
3.30.02.2.06	Pengendalian Fasilitas Penyimpanan Bahan Berbahaya dan Pengawasan Distribusi, Pengemasan dan Pelabelan Bahan Berbahaya di Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota	226.825.500,00
3.30.03	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN	11.698.049.505,00
3.30.03.2.01	Pembangunan dan Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan	8.904.113.250,00
3.30.03.2.02	Pembinaan Terhadap Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan Masyarakat di Wilayah Kerjanya	2.793.936.255,00
3.30.04	PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING	1.389.043.150,00
3.30.04.2.01	Menjamin Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota	229.573.000,00
3.30.04.2.02	Pengendalian Harga, dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Pasar Kabupaten/Kota	1.159.470.150,00
3.30.06	PROGRAM STANDARDISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN	905.133.800,00
3.30.06.2.01	Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang, dan Pengawasan	905.133.800,00
3.30.07	PROGRAM PENGGUNAAN DAN PEMASARAN PRODUK DALAM NEGERI	249.999.900,00
3.30.07.2.01	Pelaksanaan Promosi, Pemasaran dan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri	249.999.900,00
3.31	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERINDUSTRIAN	432.553.600,00
3.31.3.30.0.00.02.00	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN	432.553.600,00
3.31.02	PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI	293.489.600,00
3.31.02.2.01	Penyusunan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota	293.489.600,00
3.31.03	PROGRAM PENGENDALIAN IZIN USAHA INDUSTRI KABUPATEN/KOTA	139.064.000,00
3.31.03.2.01	Penerbitan Izin Usaha Industri (IUI), Izin Perluasan Usaha Industri (IPUI), Izin Usaha Kawasan Industri (IUKI) dan Izin Perluasan Kawasan Industri (IPKI) Kewenangan Kabupaten/Kota	139.064.000,00
4	UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN	43.873.715.556,00
4.01	SEKRETARIAT DAERAH	43.873.715.556,00
4.01.0.00.0.00.01.00	SEKRETARIAT DAERAH	43.873.715.556,00
4.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	24.673.677.706,00
4.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	240.377.970,00
4.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	15.637.927.920,00
4.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	3.314.380.550,00
4.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1.708.702.700,00



KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN	ANGGARAN RKP (Rp.)
4.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1.630.800.000,00
4.01.01.2.11	Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	766.488.616,00
4.01.01.2.13	Penataan Organisasi	529.999.950,00
4.01.01.2.14	Pelaksanaan Protokol dan Komunikasi Pimpinan	845.000.000,00
4.01.02	PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	16.717.075.850,00
4.01.02.2.01	Administrasi Tata Pemerintahan	450.000.000,00
4.01.02.2.02	Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat	15.137.076.000,00
4.01.02.2.03	Fasilitasi dan Koordinasi Hukum	864.999.850,00
4.01.02.2.04	Fasilitasi Kerjasama Daerah	265.000.000,00
4.01.03	PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN	2.482.962.000,00
4.01.03.2.01	Pelaksanaan Kebijakan Perekonomian	290.000.000,00
4.01.03.2.02	Pelaksanaan Administrasi Pembangunan	844.999.800,00
4.01.03.2.03	Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	1.347.962.200,00
4.02	SEKRETARIAT DPRD	67.316.129.587,00
4.02.0.00.0.00.01.00	SEKRETARIAT DPRD	67.316.129.587,00
4.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	35.261.778.973,00
4.02.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	399.668.340,00
4.02.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	3.896.413.513,00
4.02.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	1.109.390.750,00
4.02.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	605.110.000,00
4.02.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	610.304.200,00
4.02.01.2.15	Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD	28.531.341.800,00
4.02.01.2.16	Layanan Administrasi DPRD	109.550.370,00
4.02.02	PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD	32.054.350.614,00
4.02.02.2.01	Pembentukan Peraturan Daerah dan Peraturan DPRD	3.873.252.614,00
4.02.02.2.02	Pembahasan Kebijakan Anggaran	375.000.000,00
4.02.02.2.04	Peningkatan Kapasitas DPRD	2.809.821.400,00
4.02.02.2.05	Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat	3.339.565.600,00
4.02.02.2.08	Fasilitasi Tugas DPRD	21.656.711.000,00
5	UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN	9.657.164.676,00
5.01	PERENCANAAN	9.657.164.676,00
5.01.5.05.0.00.02.00	BADAN PERENCANAAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH	9.657.164.676,00
5.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	6.566.481.676,00
5.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	114.475.200,00
5.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	4.923.779.376,00
5.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	479.074.850,00
5.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	464.880.000,00
5.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	287.629.850,00
5.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	296.642.400,00
5.01.02	PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH	1.346.250.400,00
5.01.02.2.01	Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan	1.062.872.400,00
5.01.02.2.02	Analisis Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	130.693.000,00
5.01.02.2.03	Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	152.685.000,00
5.01.03	PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	1.744.432.600,00
5.01.03.2.01	Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	425.816.550,00
5.01.03.2.02	Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)	514.800.050,00
5.01.03.2.03	Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan	803.816.000,00
5.02	KEUANGAN	524.610.371.288,00
5.02.0.00.0.00.02.00	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH	510.293.228.444,00
5.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	51.350.357.204,00
5.02.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	208.931.600,00
5.02.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	49.777.362.954,00
5.02.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	740.570.800,00
5.02.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	407.920.050,00
5.02.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	215.571.800,00



KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN	ANGGARAN RKPD (Rp.)
5.02.02	PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	456.631.373.390,00
5.02.02.2.01	Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah	1.669.298.150,00
5.02.02.2.02	Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah	412.194.950,00
5.02.02.2.03	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah	725.452.820,00
5.02.02.2.04	Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah	453.824.427.470,00
5.02.03	PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH	2.311.497.850,00
5.02.03.2.01	Pengelolaan Barang Milik Daerah	2.311.497.850,00
5.02.0.00.0.00.03.00	BADAN PENDAPATAN DAERAH	14.317.142.844,00
5.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	12.604.444.284,00
5.02.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	500.959.600,00
5.02.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	9.684.154.384,00
5.02.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	33.750.000,00
5.02.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	1.557.520.800,00
5.02.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	446.132.250,00
5.02.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	381.927.250,00
5.02.04	PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH	1.712.698.560,00
5.02.04.2.01	Kegiatan Pengelolaan pendapatan Daerah	1.712.698.560,00
5.03	KEPEGAWAIAN	10.792.038.841,00
5.03.5.04.0.00.01.00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	10.792.038.841,00
5.03.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	5.514.203.591,00
5.03.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	91.701.000,00
5.03.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	4.809.789.991,00
5.03.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	243.964.000,00
5.03.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	223.152.200,00
5.03.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	145.596.400,00
5.03.02	PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH	5.277.835.250,00
5.03.02.2.01	Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian ASN	2.871.634.450,00
5.03.02.2.02	Mutasi dan Promosi ASN	1.346.803.850,00
5.03.02.2.03	Pengembangan Kompetensi ASN	726.776.950,00
5.03.02.2.04	Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	332.620.000,00
5.04	PENDIDIKAN DAN PELATIHAN	130.073.000,00
5.03.5.04.0.00.01.00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	130.073.000,00
5.04.02	PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	130.073.000,00
5.04.02.2.02	Sertifikasi, Kelembagaan, Pengembangan Kompetensi Manajerial dan Fungsional	130.073.000,00
5.05	PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN	273.450.000,00
5.01.5.05.0.00.02.00	BADAN PERENCANAAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH	273.450.000,00
5.05.02	PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH	273.450.000,00
5.05.02.2.01	Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan	173.450.000,00
5.05.02.2.04	Pengembangan Inovasi dan Teknologi	100.000.000,00
6	UNSUR PENGAWASAN URUSAN PEMERINTAHAN	10.894.242.991,00
6.01	INSPEKTORAT DAERAH	10.894.242.991,00
6.01.0.00.0.00.01.00	INSPEKTORAT DAERAH	10.894.242.991,00
6.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	8.274.296.441,00
6.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	43.304.400,00
6.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	6.927.384.991,00
6.01.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	276.650.000,00
6.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	422.270.950,00
6.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	218.923.700,00
6.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	385.762.400,00
6.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN	2.059.637.000,00
6.01.02.2.01	Penyelenggaraan Pengawasan Internal	853.719.600,00
6.01.02.2.02	Penyelenggaraan Pengawasan dengan Tujuan Tertentu	1.205.917.400,00
6.01.03	PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI	560.309.550,00
6.01.03.2.01	Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan dan Fasilitasi Pengawasan	4.380.000,00
6.01.03.2.02	Pendampingan dan Asistensi	555.929.550,00
7	UNSUR KEWILAYAHAN	71.087.237.537,00
7.01	KECAMATAN	71.087.237.537,00



KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN	ANGGARAN RKP (Rp.)
7.01.0.00.0.00.01.00	KECAMATAN RANGKASBITUNG	9.299.454.075,00
7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	5.288.319.948,00
7.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	58.162.400,00
7.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	4.817.261.773,00
7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	231.143.000,00
7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	124.942.775,00
7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	56.810.000,00
7.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	65.986.400,00
7.01.02.2.01	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	36.489.000,00
7.01.02.2.04	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	29.497.400,00
7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	3.866.549.727,00
7.01.03.2.01	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	42.435.000,00
7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	3.793.184.727,00
7.01.03.2.03	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	30.930.000,00
7.01.05	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	62.100.000,00
7.01.05.2.01	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	62.100.000,00
7.01.06	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	16.498.000,00
7.01.06.2.01	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	16.498.000,00
7.01.0.00.0.00.02.0000	KECAMATAN KALANGANYAR	2.012.692.091,00
7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	1.738.910.216,00
7.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	56.799.000,00
7.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	1.444.773.488,00
7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	85.810.000,00
7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	67.501.350,00
7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	84.026.378,00
7.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	104.502.000,00
7.01.02.2.01	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	22.883.000,00
7.01.02.2.04	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	81.619.000,00
7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	82.381.875,00
7.01.03.2.01	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	8.861.875,00
7.01.03.2.03	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	73.520.000,00
7.01.05	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	59.880.000,00
7.01.05.2.01	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	59.880.000,00
7.01.06	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	27.018.000,00
7.01.06.2.01	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	27.018.000,00
7.01.0.00.0.00.03.00	KECAMATAN CIBADAK	2.442.859.100,00
7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	2.156.608.500,00
7.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	69.122.400,00
7.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	1.890.539.900,00
7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	95.459.050,00
7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	44.742.150,00
7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	56.745.000,00
7.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	90.980.800,00
7.01.02.2.01	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	21.946.000,00
7.01.02.2.04	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	69.034.800,00
7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	56.745.000,00
7.01.03.2.01	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	23.140.000,00
7.01.03.2.03	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	33.605.000,00
7.01.05	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	60.180.000,00
7.01.05.2.01	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	60.180.000,00
7.01.06	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	78.344.800,00
7.01.06.2.01	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	78.344.800,00
7.01.0.00.0.00.04.00	KECAMATAN WARUNGGUNUNG	2.068.397.322,00



KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN	ANGGARAN RKPD (Rp.)
7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	1.802.804.372,00
7.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	41.874.400,00
7.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	1.523.402.322,00
7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	105.370.000,00
7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	50.777.650,00
7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	81.380.000,00
7.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	126.750.550,00
7.01.02.2.01	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	27.821.750,00
7.01.02.2.04	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	98.928.800,00
7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	67.504.000,00
7.01.03.2.01	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	15.438.000,00
7.01.03.2.03	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	52.066.000,00
7.01.05	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	41.650.000,00
7.01.05.2.01	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	41.650.000,00
7.01.06	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	29.688.400,00
7.01.06.2.01	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	29.688.400,00
7.01.0.00.0.00.05.00	KECAMATAN CIMARGA	2.616.831.000,00
7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	2.354.976.300,00
7.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	10.881.750,00
7.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	2.088.784.750,00
7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	109.978.500,00
7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	48.059.300,00
7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	97.272.000,00
7.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	109.332.300,00
7.01.02.2.01	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	21.961.000,00
7.01.02.2.04	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	87.371.300,00
7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	43.653.000,00
7.01.03.2.01	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	25.053.000,00
7.01.03.2.03	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	18.600.000,00
7.01.05	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	49.104.000,00
7.01.05.2.01	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	49.104.000,00
7.01.06	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	59.765.400,00
7.01.06.2.01	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	59.765.400,00
7.01.0.00.0.00.06.0000	KECAMATAN CIKULUR	2.460.967.317,00
7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	2.130.196.517,00
7.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	27.956.750,00
7.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	1.911.851.917,00
7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	96.960.300,00
7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	54.447.550,00
7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	38.980.000,00
7.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	128.303.000,00
7.01.02.2.01	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	34.085.000,00
7.01.02.2.04	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	94.218.000,00
7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	85.235.000,00
7.01.03.2.01	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	28.255.000,00
7.01.03.2.03	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	56.980.000,00
7.01.05	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	45.300.000,00
7.01.05.2.01	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	45.300.000,00
7.01.06	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	71.932.800,00
7.01.06.2.01	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	71.932.800,00
7.01.0.00.0.00.07.00	KECAMATAN LEUWIDAMAR	2.346.050.706,00
7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	2.132.991.256,00



KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN	ANGGARAN RKPD (Rp.)
7.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	46.936.500,00
7.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	1.822.222.356,00
7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	152.994.400,00
7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	56.162.000,00
7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	54.676.000,00
7.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	100.336.050,00
7.01.02.2.01	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	30.546.000,00
7.01.02.2.04	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	69.790.050,00
7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	47.100.000,00
7.01.03.2.01	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	12.100.000,00
7.01.03.2.03	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	35.000.000,00
7.01.05	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	50.490.000,00
7.01.05.2.01	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	50.490.000,00
7.01.06	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	15.133.400,00
7.01.06.2.01	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	15.133.400,00
7.01.0.00.0.00.08.00	KECAMATAN SAJIRA	2.509.602.390,00
7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	2.214.239.790,00
7.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	41.035.500,00
7.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	1.930.429.390,00
7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	108.584.100,00
7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	66.580.800,00
7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	67.610.000,00
7.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	164.890.600,00
7.01.02.2.01	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	30.150.000,00
7.01.02.2.04	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	134.740.600,00
7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	58.396.000,00
7.01.03.2.01	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	16.056.000,00
7.01.03.2.03	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	42.340.000,00
7.01.05	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	49.980.000,00
7.01.05.2.01	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	49.980.000,00
7.01.06	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	22.096.000,00
7.01.06.2.01	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	22.096.000,00
7.01.0.00.0.00.09.00	KECAMATAN MAJA	2.412.147.200,00
7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	2.212.498.950,00
7.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	25.124.000,00
7.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	1.902.692.450,00
7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	129.510.000,00
7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	73.172.500,00
7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	82.000.000,00
7.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	74.486.000,00
7.01.02.2.01	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	30.828.000,00
7.01.02.2.04	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	43.658.000,00
7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	49.110.250,00
7.01.03.2.01	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	19.770.250,00
7.01.03.2.03	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	29.340.000,00
7.01.05	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	49.980.000,00
7.01.05.2.01	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	49.980.000,00
7.01.06	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	26.072.000,00
7.01.06.2.01	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	26.072.000,00
7.01.0.00.0.00.10.00	KECAMATAN CURUGBITUNG	2.591.886.554,00
7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	2.384.828.304,00
7.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	33.382.000,00
7.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	2.067.921.254,00



KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN	ANGGARAN RKPD (Rp.)
7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	99.007.300,00
7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	120.957.750,00
7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	63.560.000,00
7.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	80.747.250,00
7.01.02.2.01	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	19.887.500,00
7.01.02.2.04	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	60.859.750,00
7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	55.191.000,00
7.01.03.2.01	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	19.085.000,00
7.01.03.2.03	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	36.106.000,00
7.01.05	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	50.710.000,00
7.01.05.2.01	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	50.710.000,00
7.01.06	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	20.410.000,00
7.01.06.2.01	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	20.410.000,00
7.01.0.00.0.00.11.00	KECAMATAN MUNCANG	1.906.800.331,00
7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	1.689.376.081,00
7.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	56.194.500,00
7.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	1.369.974.131,00
7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	125.154.550,00
7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	80.642.900,00
7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	57.410.000,00
7.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	69.221.500,00
7.01.02.2.01	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	32.470.250,00
7.01.02.2.04	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	36.751.250,00
7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	73.882.750,00
7.01.03.2.01	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	33.340.000,00
7.01.03.2.03	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	40.542.750,00
7.01.05	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	49.800.000,00
7.01.05.2.01	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	49.800.000,00
7.01.06	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	24.520.000,00
7.01.06.2.01	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	24.520.000,00
7.01.0.00.0.00.12.00	KECAMATAN SOBANG	1.756.898.170,00
7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	1.461.534.620,00
7.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	32.915.400,00
7.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	1.226.909.420,00
7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	79.227.500,00
7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	57.713.550,00
7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	64.768.750,00
7.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	164.264.550,00
7.01.02.2.01	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	20.008.000,00
7.01.02.2.04	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	144.256.550,00
7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	66.645.000,00
7.01.03.2.01	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	21.040.000,00
7.01.03.2.03	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	45.605.000,00
7.01.05	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	39.300.000,00
7.01.05.2.01	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	39.300.000,00
7.01.06	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	25.154.000,00
7.01.06.2.01	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	25.154.000,00
7.01.0.00.0.00.13.00	KECAMATAN BOJONGMANIK	1.979.092.316,00
7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	1.830.010.316,00
7.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	51.787.400,00
7.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	1.528.249.366,00
7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	113.667.400,00
7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	98.916.250,00



KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN	ANGGARAN RKPD (Rp.)
7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	37.389.900,00
7.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	53.033.000,00
7.01.02.2.01	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	17.251.000,00
7.01.02.2.04	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	35.782.000,00
7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	36.804.000,00
7.01.03.2.01	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	20.014.000,00
7.01.03.2.03	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	16.790.000,00
7.01.05	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	49.250.000,00
7.01.05.2.01	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	49.250.000,00
7.01.06	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	9.995.000,00
7.01.06.2.01	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	9.995.000,00
7.01.0.00.0.00.14.00	KECAMATAN CIRINTEN	2.219.547.760,00
7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	2.022.258.510,00
7.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	35.063.000,00
7.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	1.710.631.510,00
7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	117.069.900,00
7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	106.618.100,00
7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	52.876.000,00
7.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	77.434.750,00
7.01.02.2.01	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	33.998.000,00
7.01.02.2.04	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	43.436.750,00
7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	51.812.000,00
7.01.03.2.01	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	23.012.000,00
7.01.03.2.03	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	28.800.000,00
7.01.05	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	49.980.000,00
7.01.05.2.01	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	49.980.000,00
7.01.06	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	18.062.500,00
7.01.06.2.01	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	18.062.500,00
7.01.0.00.0.00.15.00	KECAMATAN CIPANAS	2.643.628.612,00
7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	2.383.492.612,00
7.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	32.487.000,00
7.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	2.106.195.762,00
7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	98.547.250,00
7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	93.862.600,00
7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	52.400.000,00
7.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	123.242.500,00
7.01.02.2.01	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	27.396.000,00
7.01.02.2.04	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	95.846.500,00
7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	71.649.500,00
7.01.03.2.01	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	24.019.500,00
7.01.03.2.03	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	47.630.000,00
7.01.05	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	49.980.000,00
7.01.05.2.01	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	49.980.000,00
7.01.06	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	15.264.000,00
7.01.06.2.01	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	15.264.000,00
7.01.0.00.0.00.16.00	KECAMATAN LEBAKGEDONG	2.018.441.915,00
7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	1.720.366.965,00
7.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	28.106.000,00
7.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	1.452.565.800,00
7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	124.599.100,00
7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	59.937.750,00
7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	55.158.315,00



KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN	ANGGARAN RKPD (Rp.)
7.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	130.377.550,00
7.01.02.2.01	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	16.561.000,00
7.01.02.2.04	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	113.816.550,00
7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	114.342.400,00
7.01.03.2.01	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	114.342.400,00
7.01.05	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	49.615.000,00
7.01.05.2.01	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	49.615.000,00
7.01.06	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	3.740.000,00
7.01.06.2.01	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	3.740.000,00
7.01.0.00.0.00.17.00	KECAMATAN GUNUNGKENCANA	2.303.172.361,00
7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	2.105.597.961,00
7.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	60.234.900,00
7.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	1.705.864.161,00
7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	98.768.100,00
7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	121.312.500,00
7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	119.418.300,00
7.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	105.365.900,00
7.01.02.2.01	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	21.824.000,00
7.01.02.2.04	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	83.541.900,00
7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	29.642.000,00
7.01.03.2.01	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	15.042.000,00
7.01.03.2.03	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	14.600.000,00
7.01.05	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	49.980.000,00
7.01.05.2.01	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	49.980.000,00
7.01.06	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	12.586.500,00
7.01.06.2.01	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	12.586.500,00
7.01.0.00.0.00.18.00	KECAMATAN CILELES	2.432.874.782,00
7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	2.165.231.482,00
7.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	38.873.750,00
7.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	1.849.312.182,00
7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	132.718.750,00
7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	68.810.800,00
7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	75.516.000,00
7.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	121.924.300,00
7.01.02.2.01	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	22.300.000,00
7.01.02.2.04	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	99.624.300,00
7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	79.954.500,00
7.01.03.2.01	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	15.622.000,00
7.01.03.2.03	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	64.332.500,00
7.01.05	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	49.980.000,00
7.01.05.2.01	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	49.980.000,00
7.01.06	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	15.784.500,00
7.01.06.2.01	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	15.784.500,00
7.01.0.00.0.00.19.00	KECAMATAN BANJARSARI	2.327.323.086,00
7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	2.119.764.186,00
7.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	55.614.000,00
7.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	1.786.547.986,00
7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	120.891.600,00
7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100.335.600,00
7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	56.375.000,00
7.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	75.786.900,00



KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN	ANGGARAN RKPD (Rp.)
7.01.02.2.01	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	27.942.500,00
7.01.02.2.04	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	47.844.400,00
7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	72.917.000,00
7.01.03.2.01	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	11.107.000,00
7.01.03.2.03	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	61.810.000,00
7.01.05	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	48.520.000,00
7.01.05.2.01	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	48.520.000,00
7.01.06	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	10.335.000,00
7.01.06.2.01	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	10.335.000,00
7.01.0.00.0.00.20.00	KECAMATAN CIJAKU	2.219.086.664,00
7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	1.955.676.464,00
7.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	69.470.400,00
7.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	1.647.575.839,00
7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	112.193.900,00
7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	67.441.825,00
7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	58.994.500,00
7.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	142.433.800,00
7.01.02.2.01	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	32.195.000,00
7.01.02.2.04	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	110.238.800,00
7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	26.280.000,00
7.01.03.2.01	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	4.380.000,00
7.01.03.2.03	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	21.900.000,00
7.01.05	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	78.062.400,00
7.01.05.2.01	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	78.062.400,00
7.01.06	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	16.634.000,00
7.01.06.2.01	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	16.634.000,00
7.01.0.00.0.00.21.00	KECAMATAN CIGEMBLONG	1.904.270.681,00
7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	1.690.187.281,00
7.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	67.596.150,00
7.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	1.318.287.581,00
7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	122.334.050,00
7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	101.979.500,00
7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	79.990.000,00
7.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	142.858.650,00
7.01.02.2.01	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	21.746.250,00
7.01.02.2.04	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	121.112.400,00
7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	35.728.750,00
7.01.03.2.01	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	12.368.750,00
7.01.03.2.03	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	23.360.000,00
7.01.05	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	30.180.000,00
7.01.05.2.01	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	30.180.000,00
7.01.06	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	5.316.000,00
7.01.06.2.01	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	5.316.000,00
7.01.0.00.0.00.22.00	KECAMATAN MALINGPING	2.862.035.440,00
7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	2.613.076.040,00
7.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	16.914.500,00
7.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	2.347.175.964,00
7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	92.984.150,00
7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	107.392.450,00
7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	48.608.976,00
7.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	79.053.400,00
7.01.02.2.01	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	38.749.500,00



KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN	ANGGARAN RKPD (Rp.)
7.01.02.2.04	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	40.303.900,00
7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	56.954.000,00
7.01.03.2.01	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	26.579.000,00
7.01.03.2.03	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	30.375.000,00
7.01.05	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	49.980.000,00
7.01.05.2.01	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	49.980.000,00
7.01.06	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	62.972.000,00
7.01.06.2.01	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	62.972.000,00
7.01.0.00.0.00.23.00	KECAMATAN WANASALAM	2.317.054.030,00
7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	2.098.125.030,00
7.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	53.003.000,00
7.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	1.772.986.190,00
7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	79.300.900,00
7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	118.508.650,00
7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	74.326.290,00
7.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	104.437.350,00
7.01.02.2.01	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	31.399.600,00
7.01.02.2.04	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	73.037.750,00
7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	52.869.500,00
7.01.03.2.01	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	14.319.500,00
7.01.03.2.03	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	38.550.000,00
7.01.05	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	30.180.000,00
7.01.05.2.01	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	30.180.000,00
7.01.06	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	31.442.150,00
7.01.06.2.01	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	31.442.150,00
7.01.0.00.0.00.24.00	KECAMATAN PANGGARANGAN	2.122.707.618,00
7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	1.859.923.318,00
7.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	27.935.500,00
7.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	1.560.612.690,00
7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	104.704.700,00
7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	89.413.300,00
7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	77.257.128,00
7.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	117.127.800,00
7.01.02.2.01	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	32.615.000,00
7.01.02.2.04	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	84.512.800,00
7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	60.353.000,00
7.01.03.2.01	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	7.563.000,00
7.01.03.2.03	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	52.790.000,00
7.01.05	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	49.980.000,00
7.01.05.2.01	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	49.980.000,00
7.01.06	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	35.323.500,00
7.01.06.2.01	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	35.323.500,00
7.01.0.00.0.00.25.00	KECAMATAN CIHARA	2.372.086.115,00
7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	2.138.041.565,00
7.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	53.999.650,00
7.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	1.759.401.565,00
7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	126.786.250,00
7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	119.559.100,00
7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	78.295.000,00
7.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	91.070.550,00
7.01.02.2.01	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	20.682.000,00
7.01.02.2.04	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	70.388.550,00
7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	51.686.000,00



KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN	ANGGARAN RKPD (Rp.)
7.01.03.2.01	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	13.809.000,00
7.01.03.2.03	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	37.877.000,00
7.01.05	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	30.150.000,00
7.01.05.2.01	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	30.150.000,00
7.01.06	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	61.138.000,00
7.01.06.2.01	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	61.138.000,00
7.01.0.00.0.00.26.00	KECAMATAN BAYAH	2.271.319.579,00
7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	2.071.143.029,00
7.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	33.539.000,00
7.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	1.714.630.479,00
7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	120.491.000,00
7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	142.812.550,00
7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	59.670.000,00
7.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	85.213.550,00
7.01.02.2.01	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	17.608.750,00
7.01.02.2.04	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	67.604.800,00
7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	53.218.000,00
7.01.03.2.01	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	13.268.000,00
7.01.03.2.03	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	39.950.000,00
7.01.05	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	45.690.000,00
7.01.05.2.01	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	45.690.000,00
7.01.06	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	16.055.000,00
7.01.06.2.01	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	16.055.000,00
7.01.0.00.0.00.27.0000	KECAMATAN CIBEER	2.698.308.970,00
7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	2.447.616.770,00
7.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	31.547.400,00
7.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	2.117.387.870,00
7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	144.337.750,00
7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	62.235.750,00
7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	92.108.000,00
7.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	78.966.200,00
7.01.02.2.01	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	36.371.800,00
7.01.02.2.04	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	42.594.400,00
7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	61.651.600,00
7.01.03.2.01	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	32.026.600,00
7.01.03.2.03	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	29.625.000,00
7.01.05	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	49.980.000,00
7.01.05.2.01	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	49.980.000,00
7.01.06	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	60.094.400,00
7.01.06.2.01	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	60.094.400,00
7.01.0.00.0.00.28.00	KECAMATAN CILOGRANG	1.971.701.352,00
7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	1.810.853.952,00
7.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	57.809.150,00
7.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	1.435.177.352,00
7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	90.926.600,00
7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	118.975.850,00
7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	107.965.000,00
7.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	60.242.400,00
7.01.02.2.01	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	16.177.000,00
7.01.02.2.04	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	44.065.400,00
7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	39.062.000,00
7.01.03.2.01	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	18.770.000,00
7.01.03.2.03	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	20.292.000,00



KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN	ANGGARAN RKPD (Rp.)
7.01.05	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	49.980.000,00
7.01.05.2.01	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	49.980.000,00
7.01.06	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	11.563.000,00
7.01.06.2.01	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	11.563.000,00
8	UNSUR PEMERINTAHAN UMUM	3.915.089.498,00
8.01	KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	3.915.089.498,00
8.01.0.00.0.00.01.00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	3.915.089.498,00
8.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	1.915.501.488,00
8.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	70.845.000,00
8.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	1.586.909.738,00
8.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	112.106.300,00
8.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	57.344.200,00
8.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	88.296.250,00
8.01.02	PROGRAM PENGUATAN IDEOLOGI PANCASILA DAN KARAKTER KEBANGSAAN	100.820.000,00
8.01.02.2.01	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	100.820.000,00
8.01.03	PROGRAM PENINGKATAN PERAN PARTAI POLITIK DAN LEMBAGA PENDIDIKAN MELALUI PENDIDIKAN POLITIK DAN PENGEMBANGAN ETIKA SERTA BUDAYA POLITIK	1.358.482.010,00
8.01.03.2.01	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan	1.358.482.010,00
8.01.05	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL, DAN BUDAYA	223.710.000,00
8.01.05.2.01	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya	223.710.000,00
8.01.06	PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITASI PENANGANAN KONFLIK SOSIAL	316.576.000,00
8.01.06.2.01	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial	316.576.000,00

Sumber : Bapeliitbangda Kab. Lebak.

1.1.3. Penerapan Standar Pelayanan Minimal

Dalam ketentuan umum Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal, Standar Pelayanan Minimal yang selanjutnya disingkat SPM adalah ketentuan tentang jenis dan mutu pelayanan dasar yang merupakan urusan wajib daerah yang berhak diperoleh setiap warga secara minimal. Pemberian otonomi yang seluas-luasnya kepada Daerah diarahkan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat atau kesejahteraan rakyat melalui peningkatan pelayanan, pemberdayaan, dan peran serta masyarakat. Di samping itu melalui otonomi luas, dalam lingkungan strategis globalisasi, Daerah diharapkan mampu meningkatkan daya saing dengan memperhatikan prinsip demokrasi, pemerataan, keadilan, keistimewaan, dan kekhususan serta potensi dan keanekaragaman Daerah dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia. Upaya percepatan terwujudnya kesejahteraan masyarakat atau kesejahteraan rakyat tersebut dalam lingkungan strategis globalisasi dengan menggunakan prinsip pemerataan dan keadilan salah satunya diwujudkan melalui penetapan dan penerapan SPM.



Tabel 1.19

Target Dan Indikator Penerima Layanan Standar Pelayanan Minimal

NO	JENIS PELAYANAN DASAR	INDIKATOR PENCAPAIAN	TARGET CAPAIAN
URUSAN BIDANG PENDIDIKAN			
1	Pendidikan Dasar	Jumlah Warga Negara Usia 7-15 Tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan dasar (SD/Mi, SMP/MTs)	100%
2	Pendidikan Kesetaraan	Jumlah Warga Negara Usia 7-18 Tahun yang belum menyelesaikan pendidikan dasar dan atau menengah yang berpartisipasi dalam pendidikan kesetaraan	100%
3	Pendidikan Anak Usia Dini	Jumlah Warga Negara Usia 5-6 Tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan PAUD	100%
URUSAN BIDANG KESEHATAN			
1	Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Jumlah Ibu Hamil yang mendapatkan layanan kesehatan	100%
2	Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	Jumlah Ibu Bersalin yang mendapatkan layanan kesehatan	100%
3	Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir	Jumlah Bayi Baru Lahir yang mendapatkan layanan kesehatan	100%
4	Pelayanan kesehatan balita	Jumlah Balita yang mendapatkan layanan kesehatan	100%
5	Pelayanan kesehatan pada usia pendidikan dasar	Jumlah Warga Negara usia pendidikan dasar yang mendapatkan layanan kesehatan	100%
6	Pelayanan kesehatan pada usia produktif	Jumlah Warga Negara usia produktif yang mendapatkan layanan kesehatan	100%
7	Pelayanan kesehatan pada usia lanjut	Jumlah warga negara usia lanjut yang mendapatkan layanan kesehatan	100%
8	Pelayanan kesehatan penderita hipertensi	Jumlah Warga Negara penderita hipertensi yang mendapatkan layanan kesehatan	100%
9	Pelayanan kesehatan penderita diabetes melitus	Jumlah Warga Negara penderita <i>diabetes mellitus</i> yang mendapatkan layanan kesehatan	100%
10	Pelayanan kesehatan orang dengan gangguan jiwa berat	Jumlah Warga Negara dengan gangguan jiwa berat yang terlayani kesehatan	100%
11	Pelayanan kesehatan orang terduga tuberkulosis	Jumlah Warga Negara terduga <i>tuberculosis</i> yang mendapatkan layanan kesehatan	100%
12	Pelayanan kesehatan orang dengan risiko terinfeksi virus yang melemahkan daya tahan tubuh manusia (<i>Human Immunodeficiency Virus</i>)	Jumlah Warga Negara dengan risiko terinfeksi virus yang melemahkan daya tahan tubuh manusia (<i>Human Immunodeficiency Virus</i>) yang mendapatkan layanan kesehatan	100%
URUSAN BIDANG PUPR			
1	Penyediaan Kebutuhan pokok air minum sehari-hari	Jumlah Warga Negara yang memperoleh kebutuhan pokok air minum sehari-hari	100%
2	Penyediaan Pelayanan Pengolahan Air limbah Domestik	Jumlah Warga Negara yang memperoleh layanan pengolahan air limbah domestik	100%
URUSAN BIDANG PERUMAHAN RAKYAT			
1	Penyediaan & rehabilitasi rumah yg layak huni bagi korban bencana Kab/kota	Jumlah Warga Negara korban bencana yang memperoleh rumah layak huni	100%
2	Fasilitasi penyediaan rumah yang layak huni bagi masyarakat yang terkena relokasi program Pemerintah Daerah kabupaten/kota	Jumlah Warga Negara yang terkena relokasi akibat program Pemerintah Daerah kabupaten/kota yang memperoleh fasilitasi penyediaan rumah yang layak huni	100%
URUSAN BIDANG TRANTIBUMLINMAS			



NO	JENIS PELAYANAN DASAR	INDIKATOR PENCAPAIAN	TARGET CAPAIAN
1	Pelayanan ketentraman dan ketertiban Umum	Jumlah Warga Negara yang memperoleh layanan akibat dari penegakan hukum Perda dan perkara	100%
2	Pelayanan informasi rawan bencana	Jumlah Warga Negara yang memperoleh layanan informasi rawan bencana	100%
3	Pelayanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana	Jumlah Warga Negara yang memperoleh layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana	100%
4	Pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana	Jumlah Warga Negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana	100%
5	Pelayanan Penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran	Jumlah Warga Negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan Evakuasi korban kebakaran	100%
URUSAN BIDANG SOSIAL			
1	Rehabilitasi sosial dasar penyandang disabilitas telantar di luar panti	Jumlah Warga Negara penyandang disabilitas yang memperoleh rehabilitasi sosial diluar panti	100%
2	Rehabilitasi sosial dasar anak telantar di luar panti	Jumlah anak telantar yang memperoleh rehabilitasi sosial diluar panti	100%
3	Rehabilitasi sosial dasar lanjut usia terlantar diluar panti	Jumlah Warga Negara lanjut usia terlantar yang memperoleh rehabilitasi sosial diluar panti	100%
4	Rehabilitasi sosial dasar tuna sosial khususnya gelandangan dan pengemis di luar panti	Jumlah Warga Negara/ gelandangan dan pengemis yang memperoleh rehabilitasi sosial dasar tuna sosial diluar panti	100%
5	Perlindungan dan jaminan sosial pada saat tanggap & paska bencana bagi korban bencana kab/kota	Jumlah Warga Negara korban bencana kab/kota yang memperoleh perlindungan dan jaminan sosial	100%

Sumber : Bagian Tata Pemerintahan dan Kerjasama Setda Kab. Lebak.



BAB II

CAPAIAN KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH

2.1. Capaian Kinerja Makro

Indikator makro merupakan indikator gabungan (komposit) dari berbagai kegiatan pembangunan ekonomi maupun sosial. Indikator makro pembangunan tersebut terdiri dari pertumbuhan ekonomi, inflasi, pendapatan perkapita, dan penurunan jumlah pengangguran. Yang bertujuan untuk memberi gambaran tentang ukuran keberhasilan pencapaian visi dan misi kepala daerah dan wakil kepala daerah yang ditetapkan menjadi Indikator Kinerja Utama (IKU) daerah dan indikator kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah yang ditetapkan menjadi Indikator Kinerja Kunci (IKK) pada akhir periode masa jabatan.

Pertumbuhan ekonomi adalah indikator utama yang sangat penting untuk menjamin kesinambungan pembangunan untuk menggerakkan roda pembangunan. Tanpa pertumbuhan ekonomi, maka kegiatan program pembangunan akan mengalami stagnasi berujung pada peningkatan jumlah pengangguran dan peningkatan jumlah kemiskinan. Dengan demikian indikator kinerja daerah merupakan akumulasi kinerja dari Perangkat Daerah. Adapun capaian indikator makro penyelenggaraan pemerintah daerah Kabupaten Lebak sebagaimana tabel berikut.

Tabel 2.1
Perbandingan Capaian Kinerja Makro Kabupaten Lebak
Tahun 2020 dan Tahun 2021

NO.	INDIKATOR KINERJA MAKRO	CAPAIAN KINERJA 2020	CAPAIAN KINERJA 2021	PERUBAHAN
1	INDEKS PEMBANGUNAN MANUSIA (IPM)	63,91	64,03	0,12
3	ANGKA KEMISKINAN	9,24	10,29	1,05
4	ANGKA PENGANGGURAN (TPT)	9,63	7,86	-1,77
2	PERTUMBUHAN EKONOMI (LPE)	-0,88	3,08	3,96
5	PDRB/Kapita (dalam jutaan rupiah)	22,22	21,78	-0,44
6	KETIMPANGAN PENDAPATAN (GINI RATIO)	0,314	0,332	0,018

Sumber : Bapelitbangda Kab. Lebak, 2021.

Indeks Pembangunan Manusia (IPM) menjelaskan bagaimana penduduk dapat mengakses hasil pembangunan dalam memperoleh pendapatan, kesehatan, pendidikan dan sebagainya. Pembangunan manusia di Kabupaten Lebak pada Tahun 2021 mengalami kemajuan yang ditandai dengan meningkatnya Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kabupaten Lebak. Pada



tahun 2021 IPM Kabupaten Lebak mencapai 64,03 meningkat 0,12 point dibandingkan Tahun 2020 yang besarnya 63,91. Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE) Kabupaten Lebak untuk tahun 2021 menunjukkan kinerja positif. Pertumbuhan Ekonomi mengalami kenaikan yang sangat signifikan dari -0,88 pada tahun 2020 naik menjadi 3,08 atau 3,96 point pada tahun 2021. Untuk Angka Kemiskinan Kabupaten Lebak pada tahun 2021 sedikit mengalami kenaikan sebesar 10,29 atau meningkat 1,05 dibanding dengan tahun 2020 sebesar 9,24. Ini diakibatkan oleh dampak dari adanya pandemi *covid-19* yang masih belum usai. Pada Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Kabupaten Lebak pada tahun 2021 menunjukkan kinerja positif juga dengan mengalami penurunan sebesar 7,86 atau -1,77 dibanding tahun 2020 sebesar 9,63. Sedangkan Pendapatan per kapita Kabupaten Lebak untuk tahun 2021 terealisasi sebesar 21.78 Juta mengalami perubahan -0,44 dengan tahun sebelumnya. Pada Ketimpangan Pendapatan (Ratio Gini) Angka ketimpangan pendapatan atau ratio gini Kabupaten Lebak sebesar 0,332 mengalami sedikit peningkatan dari tahun sebelumnya yaitu 0,018 meskipun demikian Pemerintah Kabupaten Lebak masih berhasil menekan ketimpangan pendapatan yang terjadi di tengah masyarakat yang masih dilanda pandemi *covid-19* yang belum usai.

2.2. Capaian Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan

Capaian Kinerja Penyelenggaraan urusan Pemerintahan merupakan gambaran dari keberhasilan daerah dalam mengatur dan mengurus urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah berdasarkan peraturan perundang-undangan tentang pemerintahan daerah. Capaian kinerja penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah mengukur kinerja pemerintahan daerah berdasarkan indikator kinerja kunci yang memuat data/informasi kinerja setiap urusan pemerintahan sesuai dengan indikator masing-masing urusan pemerintahan dan urusan penunjang. Data/informasi setiap indikator wajib diisi oleh pemerintah daerah secara lengkap pada masing-masing urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah. Indikator kinerja kunci yang digunakan dapat diukur secara objektif dan dapat diperbandingkan antar Daerah. Adapun capaian kinerja penyelenggaraan urusan pemerintahan Kabupaten Lebak sebagaimana Tabel berikut:

2.2.1. INDIKATOR KINERJA KUNCI KELUARAN (OUTPUT)

Tabel 2.2
Capaian Indikator Kinerja Kunci Keluaran Kab. Lebak

NO.	FOKUS	NO.	INDIKATOR KINERJA KUNCI KELUARAN	RUMUS	ISIAN ELEMEN DATA LPPD	CAPAIAN KINERJA
A. URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB PELAYANAN DASAR						
1.	PENDIDIKAN	1	Jumlah Satuan Pendidikan Anak Usia Dini Terakreditasi (Negeri dan Swasta)		202	202,00
		2	Jumlah peserta didik PAUD (Negeri dan Swasta) yang menerima perlengkapan dasar		0	0,00



NO.	FOKUS	NO.	INDIKATOR KINERJA KUNCI KELUARAN	RUMUS	ISIAN ELEMEN DATA LPPD	CAPAIAN KINERJA
			peserta didik dari Pemerintah Daerah			
		3	Jumlah peserta didik PAUD (Negeri dan Swasta) yang menerima pembebasan biaya Pendidikan		7216	7216,00
		4	Jumlah kebutuhan minimal pendidik PAUD (Negeri dan Swasta)		313	313,00
		5	Jumlah pendidik pada PAUD (Negeri dan Swasta)		552	552,00
		6	Jumlah pendidik PAUD (Negeri dan Swasta) yang memiliki ijazah diploma empat (D- IV) atau sarjana (S1) bidang pendidikan anak usia dini, kependidikan lain atau psikologi dan sertifikat projesi guru pendidikan anak usia dini		313	313,00
		7	Jumlah kepala sekolah PAUD (Negeri dan Swasta) yang memiliki ijazah D-IV atau S1, sertifikat pendidik dan surat tanda tamat pendidikan dan pelatihan calon kepala sekolah untuk PAUD formal atau sertifikat pendidikan dan pelatihan kepala satuan PAUD non- formal dari lembaga pemerintah		197	197,00
		8	Jumlah SD dan SMP Negeri Terakreditasi		928	928,00
		9	Jumlah peserta didik jenjang sekolah dasar (Negeri dan Swasta) yang menerima perlengkapan dasar peserta didik dari Pemerintah Daerah		0	0,00
		10	Jumlah peserta didik jenjang sekolah menengah pertama (Negeri dan Swasta) yang menerima perlengkapan dasar peserta didik dari Pemerintah Daerah		0	0,00
		11	Jumlah peserta didik pada jenjang sekolah dasar (Negeri dan Swasta) yang menerima pembebasan biaya pendidikan		134259	134259,00
		12	Jumlah peserta didik pada jenjang sekolah menengah pertama (Negeri dan Swasta) yang menerima pembebasan biaya Pendidikan		46930	46930,00
		13	Jumlah kebutuhan minimal pendidik pada jenjang sekolah dasar (Negeri dan Swasta)		6179	6179,00
		14	Jumlah kebutuhan minimal pendidik pada jenjang sekolah menengah pertama (Negeri dan Swasta)		2637	2637,00
		15	Jumlah pendidik pada jenjang sekolah dasar (Negeri dan Swasta)		6179	6179,00
		16	Jumlah pendidik pada jenjang sekolah menengah pertama (Negeri dan Swasta)		2637	2637,00
		17	Jumlah kebutuhan minimal tenaga kependidikan pada jenjang sekolah dasar (Negeri dan Swasta)		1182	1182,00
		18	Jumlah kebutuhan minimal tenaga kependidikan pada jenjang sekolah menengah pertama (Negeri dan Swasta)		615	615,00



NO.	FOKUS	NO.	INDIKATOR KINERJA KUNCI KELUARAN	RUMUS	ISIAN ELEMEN DATA LPPD	CAPAIAN KINERJA
		19	Jumlah tenaga kependidikan pada jenjang sekolah dasar (Negeri dan Swasta)		1182	1182,00
		20	Jumlah tenaga kependidikan pada jenjang sekolah menengah pertama (Negeri dan Swasta)		615	615,00
		21	Jumlah pendidik pada jenjang sekolah dasar (Negeri dan Swasta) yang memiliki ijazah diploma empat (D-IV) atau sarjana (S1) dan sertifikat pendidik		5270	5270,00
		22	Jumlah pendidik pada jenjang sekolah menengah pertama (Negeri dan Swasta) yang memiliki ijazah diploma empat (D-IV) atau sarjana (S1) dan sertifikat pendidik		2596	2596,00
		23	Jumlah kepala sekolah pada jenjang sekolah dasar (Negeri dan Swasta) yang memiliki ijazah D-IV atau S1, sertifikat pendidik dan surat tanda tamat pendidikan dan pelatihan calon kepala sekolah		699	699,00
		24	Jumlah kepala sekolah pada jenjang sekolah menengah pertama (Negeri dan Swasta) yang memiliki ijazah D-IV atau S1, sertifikat pendidik dan surat tanda tamat pendidikan dan pelatihan calon kepala sekolah		209	209,00
		25	Jumlah tenaga penunjang lainnya pada jenjang sekolah dasar (Negeri dan Swasta) yang memiliki ijazah SMA/ sederajat		0	0,00
		26	Jumlah tenaga penunjang lainnya pada jenjang sekolah menengah pertama (Negeri dan Swasta) yang memiliki ijazah SMA/ sederajat		0	0,00
		27	Jumlah SD dan SMP Negeri Terakreditasi		928	928,00
		28	Jumlah peserta didik jenjang sekolah dasar yang menerima perlengkapan dasar peserta didik dari Pemerintah Daerah		0	0,00
		29	Jumlah peserta didik jenjang sekolah menengah pertama yang menerima perlengkapan dasar peserta didik dari Pemerintah Daerah		0	0,00
		30	Jumlah peserta didik pada jenjang sekolah dasar yang menerima pembebasan biaya Pendidikan		134259	134259,00
		31	Jumlah peserta didik pada jenjang sekolah menengah pertama yang menerima pembebasan biaya pendidikan		46930	46930,00
		32	Jumlah kebutuhan minimal pendidik pada jenjang sekolah dasar		6179	6179,00
		33	Jumlah kebutuhan minimal pendidik pada jenjang sekolah menengah pertama		2637	2637,00
		34	Jumlah pendidik pada jenjang sekolah dasar		6179	6179,00
		35	Jumlah pendidik pada jenjang sekolah menengah pertama		2637	2637,00
		36	Jumlah kebutuhan minimal tenaga kependidikan pada jenjang sekolah dasar		1182	1182,00



NO.	FOKUS	NO.	INDIKATOR KINERJA KUNCI KELUARAN	RUMUS	ISIAN ELEMEN DATA LPPD	CAPAIAN KINERJA
		37	Jumlah kebutuhan minimal tenaga kependidikan pada jenjang sekolah menengah pertama		615	615,00
		38	Jumlah tenaga kependidikan pada jenjang sekolah dasar		1182	1182,00
		39	Jumlah tenaga kependidikan pada jenjang sekolah menengah pertama		615	615,00
		40	Jumlah pendidik pada jenjang sekolah dasar yang memiliki ijazah diploma empat (D-IV) atau sarjana (S1) dan sertifikat pendidik		5270	5270,00
		41	Jumlah pendidik pada jenjang sekolah menengah pertama yang memiliki ijazah diploma empat (D-IV) atau sarjana (S1) dan sertifikat pendidik		2596	2596,00
		42	Jumlah kepala sekolah pada jenjang sekolah dasar yang memiliki ijazah D-IV atau S1, sertifikat pendidik dan surat tanda tamat pendidikan dan pelatihan calon kepala sekolah		699	699,00
		43	Jumlah kepala sekolah pada jenjang sekolah menengah pertama yang memiliki ijazah D-IV atau S1, sertifikat pendidik dan surat tanda tamat pendidikan dan pelatihan calon kepala sekolah		209	209,00
		44	Jumlah tenaga penunjang lainnya pada jenjang sekolah dasar yang memiliki ijazah SMA/ sederajat		0	0,00
		45	Jumlah tenaga penunjang lainnya pada jenjang sekolah menengah pertama yang memiliki ijazah SMA/ sederajat		0	0,00
		46	Jumlah satuan pendidikan kesetaraan terakreditasi (Negeri dan Swasta)		16	16,00
		47	Jumlah peserta didik pendidikan kesetaraan (Negeri dan Swasta) yang menerima perlengkapan dasar peserta didik dari Pemerintah Daerah		0	0,00
		48	Jumlah peserta didik		0	0,00
		49	Pendidikan kesetaraan (Negeri dan Swasta) yang menerima pembebasan biaya pendidikan		6791	6791,00
		50	Jumlah kebutuhan minimal pendidik pada satuan pendidikan kesetaraan (Negeri dan Swasta)		152	152,00
		51	Jumlah pendidik pada satuan pendidikan kesetaraan (Negeri dan Swasta)		152	152,00
		52	Jumlah pendidik pada satuan pendidikan kesetaraan (Negeri dan Swasta) yang memiliki ijazah diploma empat (D-IV) atau sarjana (S1)		152	152,00
		53	Jumlah kepala sekolah pada jenjang sekolah dasar yang memiliki ijazah D-IV atau S1, sertifikat pendidik dan surat tanda tamat pendidikan dan pelatihan calon kepala sekolah		699	699,00
		54	Jumlah kepala sekolah pada satuan pendidikan kesetaraan (Negeri dan Swasta) yang memiliki ijazah D-IV atau S1		38	38,00



NO.	FOKUS	NO.	INDIKATOR KINERJA KUNCI KELUARAN	RUMUS	ISIAN ELEMEN DATA LPPD	CAPAIAN KINERJA
2.	KESEHATAN	55	Jumlah RS Rujukan kabupaten /kota yang memenuhi sarana, prasarana dan alat kesehatan (SPA) sesuai standar		0	0,00
		56	Jumlah dukungan logistik kesehatan yang tersedia		66,37	66,37
		57	Jumlah SDM kesehatan untuk pelayanan antenatal		1.760,00	1760,00
		58	Jumlah dukungan logistik kesehatan yang tersedia		60,79	60,79
		59	Jumlah SDM kesehatan untuk pelayanan persalinan sesuai standar		1.760,00	1760,00
		60	Jumlah dukungan logistik kesehatan yang tersedia		30,17	30,17
		61	Jumlah SDM kesehatan untuk pelayanan neonatal esensial sesuai standar		1.792,00	1792,00
		62	Jumlah dukungan logistik kesehatan yang tersedia		11,59	11,59
		63	Jumlah SDM kesehatan untuk pelayanan kesehatan balita sesuai standar		1.844,00	1844,00
		64	Jumlah dukungan logistik kesehatan yang tersedia		87,30	87,30
		65	Jumlah SDM kesehatan untuk pelayanan kesehatan anak usia pendidikan dasar sesuai standar		1.844,00	1844,00
		66	Jumlah dukungan logistik kesehatan yang tersedia		36,04	36,04
		67	Jumlah SDM kesehatan untuk pelayanan kesehatan sesuai standar		1.844,00	1844,00
		68	Jumlah SDM kesehatan untuk pelayanan kesehatan sesuai standar		60,32	60,32
		69	Jumlah dukungan logistik kesehatan yang tersedia		1.844,00	1844,00
		70	Jumlah SDM kesehatan untuk pelayanan kesehatan sesuai standar		40,65	40,65
		71	Jumlah dukungan logistik kesehatan yang tersedia		1.844,00	1844,00
		72	Jumlah SDM kesehatan untuk pelayanan kesehatan sesuai standar		21,30	21,30
		73	Jumlah dukungan logistik kesehatan yang tersedia		1.844,00	1844,00
		74	Jumlah SDM kesehatan untuk pelayanan kesehatan sesuai standar		61,82	61,82
75	Jumlah dukungan logistik kesehatan yang tersedia		1.844,00	1844,00		
76	Jumlah SDM kesehatan untuk pelayanan kesehatan sesuai standar		99,51	99,51		
77	Jumlah dukungan logistik kesehatan yang tersedia		1.844,00	1844,00		
78	Jumlah SDM kesehatan untuk pelayanan kesehatan sesuai standar		63,99	63,99		
79	Jumlah dukungan logistik kesehatan yang tersedia		1.844,00	1844,00		
80	Jumlah SDM kesehatan untuk pelayanan kesehatan sesuai standar		61,99	61,99		
3.	PEKERJAAN UMUM	81	Luas kawasan permukiman rawan banjir di WS kewenangan kabupaten/kota (ha)		0	0,00
		82	Panjang sungai di kawasan permukiman yang rawan banjir		0	0,00



NO.	FOKUS	NO.	INDIKATOR KINERJA KUNCI KELUARAN	RUMUS	ISIAN ELEMEN DATA LPPD	CAPAIAN KINERJA
			di WS kewenangan kabupaten/kota (m)			
		83	Luas kawasan permukiman sepanjang pantai yang rawan abrasi erosi dan akresi di WS kewenangan kabupaten/kota (ha)		0	0,00
		84	Panjang pantai di kawasan permukiman yang rawan abrasi, erosi, akresi di WS kewenangan kabupaten/kota (m)		0	0,00
		85	Rencana Tata Pengaturan air dan tata pengairan/rencana pengelolaan sumber daya air WS Kewenangan kabupaten/kota		0	0,00
		86	Rencana Teknis tata pengaturan air dan tata pengairan/rencana pengelolaan sumber daya air kewenangan kabupaten/kota		0	0,00
		87	Data prasarana dan sarana pengaman pantai dan sungai milik pemerintah kabupaten/kota		0	0,00
		88	Luas kawasan permukiman rawan banjir di WS kewenangan kabupaten/kota (ha)		0	0,00
		89	Panjang sungai di kawasan permukiman yang rawan banjir di WS kewenangan kabupaten/kota (m)		0	0,00
		90	Luas kawasan permukiman sepanjang pantai yang rawan abrasi erosi dan akresi di WS kewenangan kabupaten/kota (ha)		0	0,00
		91	Panjang pantai di kawasan permukiman yang rawan abrasi, erosi, akresi di WS kewenangan kabupaten/kota (m)		0	0,00
		92	Rencana Tata Pengaturan air dan tata pengairan/rencana pengelolaan sumber daya air WS Kewenangan kabupaten/kota		0	0,00
		93	Rencana Teknis tata pengaturan air dan tata pengairan/rencana pengelolaan sumber daya air kewenangan kabupaten/kota		0	0,00
		94	Data prasarana dan sarana pengaman pantai dan sungai milik pemerintah kabupaten/kota		0	0,00
		95	Persentase panjang jaringan irigasi primer dalam kondisi baik		44,79	44,79
		96	Persentase panjang jaringan irigasi sekunder dalam kondisi baik		94,02	94,02
		97	Persentase panjang jaringan irigasi tersier dalam kondisi baik		0	0,00
		98	Pemenuhan dokumen RISPAM kabupaten/kota		0	0,00
		99	Tersusun dan ditetapkannya JAKSTRADA Kab/ Kota		0	0,00
		100	Jumlah BUMD dan atau UPTD Kab/Kota penyelenggaraan SPAM		0	0,00



NO.	FOKUS	NO.	INDIKATOR KINERJA KUNCI KELUARAN	RUMUS	ISIAN ELEMEN DATA LPPD	CAPAIAN KINERJA
		101	Jumlah izin yang diberikan kepada Badan Usaha untuk melakukan penyelenggaraan SPAM		0	0,00
		102	Jumlah kerja sama penyelenggaraan SPAM dengan pemerintah Pusat dan Pemerintah daerah lain		0	0,00
		103	Jumlah rumah dengan akses unit pengolahan setempat untuk kegiatan pemenuhan pelayanan dasar menggunakan SPALD S		2800	2800,00
		104	Jumlah rumah dengan akses sambungan rumah untuk kegiatan pemenuhan pelayanan dasar menggunakan SPALD-T		3450	3450,00
		105	Jumlah rumah dengan akses unit pengolahan setempat dan data jumlah rumah dengan akses sambungan rumah untuk kegiatan pemenuhan pelayanan dasar menggunakan SPALD S dan SPALD T		6250	6250,00
		106	Jumlah rumah yang sudah menerima pelayanan jasa penyedotan lumpur tinja		0	0,00
		107	Jumlah rumah yang sudah menerima pelayanan jasa pengolahan lumpur tinja		0	0,00
		108	Jumlah rumah yang sudah menerima pelayanan jasa pengolahan air limbah domestic		0	0,00
		109	Kinerja penyediaan pelayanan SPALD S akses dasar	Rumah yang memiliki akses pengolahan berupa cubluk atau tanki septik	0	0,00
				Rumah di wilayah pengembangan SPALD dengan kepadatan penduduk pada wilayah terbangun <25 jiwa/ha	0	
		110	Kinerja penyediaan pelayanan SPALD S akses aman	Rumah yang lumpur tinjanya telah diolah di IPLT	0	0,00
				Rumah di wilayah pengembangan SPALD S dengan kepadatan penduduk pada wilayah terbangun >25 jiwa/ha	0	
		111	Kinerja penyediaan pelayanan SPALD T akses aman	Rumah yang memiliki sambungan rumah dan air limbahnya diolah di IPALD	0	0,00
				Rumah di wilayah Pengembangan SPALD T	0	
		112	Kinerja penyediaan unit pengolahan setempat	Rumah yang memiliki akses unit pengolahan setempat	0	0,00
				Jumlah rumah yang termasuk dalam wilayah pengembangan SPALD S	0	
		113	Kinerja penyediaan sarana pengangkutan lumpur tinja	Jumlah sarana pengangkutan yang tersedia	0	0,00
				Jumlah sarana pengangkutan yang dibutuhkan kabupaten	0	
		114	Kinerja penyediaan prasarana pengolahan lumpur tinja	Jumlah kapasitas pengolahan lumpur tinja yang tersedia	0	0,00
				Jumlah kapasitas pengolahan lumpur tinja yang dibutuhkan kabupaten	0	
		115	Kinerja penyediaan sambungan rumah yang tersambung ke IPALD	Jumlah rumah yang memiliki sambungan rumah yang tersambung dengan IPALD	0	0,00
				Jumlah rumah yang dilayani dengan SPALD-T pada kabupaten	0	
		116	Kinerja penyediaan jasa penyedotan lumpur tinja	Jumlah rumah yang tangki septiknya sudah disedot	0	0,00



NO.	FOKUS	NO.	INDIKATOR KINERJA KUNCI KELUARAN	RUMUS	ISIAN ELEMEN DATA LPPD	CAPAIAN KINERJA
				Jumlah rumah yang termasuk dalam wilayah pengembangan SPALD S	0	
		117	Rasio bangunan gedung (kecuali rumah tinggal tunggal dan rumah deret sederhana) yang laik fungsi	Jumlah bangunan gedung (kecuali rumah tinggal tunggal dan rumah deret sederhana) yang laik fungsi yang berlaku	0	0,00
				Jumlah bangunan gedung (kecuali rumah tinggal tunggal dan rumah deret sederhana)	0	
		118	Jumlah IMB yang diberikan oleh Pemerintah Kab/Kota dalam tahun eksisting		0	0,00
		119	Penetapan Peraturan Daerah tentang Bangunan/Gedung		0	0,00
		120	Penetapan Keputusan Bupati/Walikota tentang Tim Ahli Bangunan/ Gedung		0	0,00
		121	Jumlah bangunan gedung yang ditetapkan oleh Bupati/Walikota untuk dilindungi dan dilestarikan		0	0,00
		122	Jumlah bangunan gedung yang ditetapkan oleh Bupati/Walikota untuk kepentingan strategis daerah provinsi		0	0,00
		123	Jumlah bangunan gedung negara mili Pemerintah Kab/Kota		0	0,00
		124	Jumlah bangunan gedung negara milik pemerintah kabupaten/kota yang dipelihara/dirawat		0	0,00
		125	Panjang jalan berdasarkan yang ditetapkan kepala daerah dalam SK jalan kewenangan Kab/Kota		773,93	773,93
		126	Panjang jalan yang dibangun		16,27	16,27
		127	Panjang jembatan yang dibangun		70	70,00
		128	Panjang jalan yang ditingkatkan (struktur/fungsi)		57,315	57,32
		129	Panjang jembatan yang diganti/dilebarkan		0	0,00
		130	Panjang jalan yang direkonstruksi atau direhabilitasi		23,12	23,12
		131	Panjang jembatan yang direhabilitasi		0	0,00
		132	Panjang jalan yang Dipelihara		276	276,00
		133	Panjang jembatan yang dipelihara		10	10,00
		134	Jumlah Pelatihan Tenaga operator/teknisi/analisis di wilayah kabupaten/kota		1	1,00
		135	Jumlah tenaga kerja operator/teknisi/analisis yang terlatih di wilayah kabupaten/kota		80	80,00
		136	Jumlah tenaga kerja konstruksi terlatih yang tersertifikasi operator/teknisi/analisis di wilayah kabupaten/ kota		68	68,00
		137	Terselenggaranya Sistem Informasi Pembina Jasa Konstruksi Cakupan kabupaten/kota yang aktif dengan data termutakhir		100	100,00
		138	Tersedianya data dan informasi potensi pasar jasa konstruksi di wilayah kabupaten/ kota untuk tahun berjalan yang bersumber dari APBD Kab/Kota		0	0,00



NO.	FOKUS	NO.	INDIKATOR KINERJA KUNCI KELUARAN	RUMUS	ISIAN ELEMEN DATA LPPD	CAPAIAN KINERJA
		139	Tersedianya data dan informasi potensi pasar jasa konstruksi di wilayah kabupaten/kota untuk tahun berjalan yang bersumber dari APBN		0	0,00
		140	Tersedianya data dan informasi potensi pasar jasa konstruksi di wilayah kabupaten/ kota untuk tahun berjalan yang bersumber dari pendanaan lainnya		0	0,00
		141	Tersedianya data dan informasi paket pekerjaan jasa konstruksi sesuai kewenangannya yang sudah dan sedang dilaksanakan oleh badan usaha jasa konstruksi yang termutakhir secara berkala		0	0,00
		142	Tersedianya data dan profil OPD sub-urusan jasa konstruksi kabupaten/ kota		1	1,00
		143	Tersedianya data dan informasi pelatihan tenaga operator dan teknisi/ analis konstruksi di wilayah kabuapten/kota yang dilaksanakan sendiri atau melalui kerjasama dengan Lembaga Pendidikan dan Pelatihan Kerja (LPPK) yang diregistrasi oleh menteri yang membidangi jasa konstruksi, asosiasi profesi, perguruan tinggi dan instansi pemerintah lainnya.		0	0,00
		144	Tersedianya data dan informasi tenaga kerja konstruksi yang terlatih di wilayah kabupaten/ kota yang dibuktikan dengan sertifikat pelatihan operator dan teknisi/ analis		0	0,00
		145	Tersedianya data dan informasi tenaga kerja konstruksi terlatih yang tersertifikasi operator/ teknisi/ analis di wilayah kab/kota		0	0,00
		146	Tersedianya data dan informasi badan usaha yang mendapatkan pembinaan di wilayah kabupaten/kota		0	0,00
		147	Tersedianya data dan informasi pemenuhan komitmen permohonan IUJK badan usaha dan TDUP yang disetujui		0	0,00
		148	Tersedianya data dan informasi hasil pengawasan ketidaksesuaian jenis, sifat, klasifikasi, layanan usaha, bentuk dan/ atau kualifikasi usaha dengan kegiatan usaha jasa konstruksi yang menjadi kewenangan pengawasannya		0	0,00
		149	Tersedianya data dan informasi kecelakaan konstruksi pada proyek yang menjadi kewenangan pengawasannya		0	0,00
		150	Tersedianya data dan informasi hasil pengawasan ketidaksesuaian jenis, sifat, klasifikasi, layanan usaha, bentuk dan/ atau kualifikasi usaha dengan segmentasi pasar jasa konstruksi yang menjadi kewenangan pengawasannya		0	0,00



NO.	FOKUS	NO.	INDIKATOR KINERJA KUNCI KELUARAN	RUMUS	ISIAN ELEMEN DATA LPPD	CAPAIAN KINERJA
		151	Jumlah badan usaha yang memiliki IUJKN di wilayah kab/kota		0	0,00
		152	Jumlah usaha perseorangan yang memiliki TDUP di wilayah kabupaten/kota		0	0,00
		153	Jumlah badan usaha yang memiliki IUJKN yang terlibat dalam proyek di wilayah Kab/Kota		0	0,00
		154	Jumlah badan usaha yang mendapatkan pembinaan di wilayah Kab/Kota		0	0,00
		155	Jumlah pemenuhan komitmen permohonan IUJK badan usaha dan TDUP yang disetujui		0	0,00
		156	Jumlah pengawasan terkait ketidaksesuaian jenis, sifat, klasifikasi, layanan usaha, bentuk dan/atau kualifikasi usaha dengan kegiatan usaha jasa konstruksi yang menjadi kewenangan pengawasannya		0	0,00
		157	Jumlah kecelakaan konstruksi pada proyek yang menjadi kewenangan pengawasannya		0	0,00
		158	Jumlah pengawasan terkait ketidaksesuaian jenis, sifat, klasifikasi, layanan usaha, bentuk dan/atau kualifikasi usaha dengan segmentasi pasar jasa konstruksi yang menjadi kewenangan pengawasannya		0	0,00
4.	PERUMAHAN RAKYAT	159	Jumlah rumah yang berada pada kawasan rawan bencana dan rencana penanganannya		992	992,00
		160	Jumlah rumah yang terkena bencana alam		0	0,00
		161	Jumlah RT, KK dan Jiwa korban yang rumahnya terkena bencana alam		0	0,00
		162	Jumlah unit rumah korban bencana yang direhabilitasi sesuai dengan rencana aksi		0	0,00
		163	Jumlah unit rumah korban bencana yang dibangun kembali sesuai dengan rencana aksi		4	4,00
		164	Jumlah unit rumah korban bencana yang dibangun baru /relokasi sesuai dengan rencana aksi		0	0,00
		165	Jumlah unit dan lokasi rumah sewa yang akan menjadi tempat tinggal sementara korban bencana		0	0,00
		166	Jumlah RT, KK dan Jiwa korban bencana yang terfasilitasi		0	0,00
		167	Jumlah, luasan dan lokasi pencadangan lahan		0	0,00
		168	Jumlah rumah tangga penerima layanan yang telah mendapatkan fasilitasi ganti kerugian aset properti berdasarkan rencana pemenuhan SPM		0	0,00
		169	Jumlah rumah tangga penerima kegiatan layanan yang belum mendapatkan fasilitasi penggantian hak atas tanah dan/ atau bangunan berdasarkan rencana pemenuhan SPM		0	0,00



NO.	FOKUS	NO.	INDIKATOR KINERJA KUNCI KELUARAN	RUMUS	ISIAN ELEMEN DATA LPPD	CAPAIAN KINERJA
		170	Jumlah rumah tangga penerima kegiatan layanan subsidi uang sewa berdasarkan rencana pemenuhan SPM		0	0,00
		171	Jumlah rumah tangga penerima layanan yang telah mendapatkan penyediaan rumah layak huni berdasarkan rencana pemenuhan SPM		0	0,00
		172	Jumlah rumah tangga penerima layanan yang belum mendapatkan penyediaan rumah layak huni berdasarkan rencana pemenuhan SPM		0	0,00
		173	Jumlah total luasan (Ha) pengadaan tanah		0	0,00
		174	Jumlah luasan (Ha) kawasan permukiman kumuh < 10 Ha		130,03	130,03
		175	Jumlah unit peningkatan kualitas RTLH		438	438,00
		176	Jumlah luasan (ha) penanganan infrastruktur kawasan kumuh		44,8	44,80
		177	Jumlah rumah di kab/ kota		0	0,00
		178	Jumlah unit Peningkatan Kualitas RTLH		438	438,00
		179	Jumlah rumah tidak layak huni		45287	45287,00
		180	Jumlah rumah yang tidak dihuni		0	0,00
		181	Rasio rumah dan KK	Jumlah KK	341603	100,00
				Jumlah Total Unit Rumah	341603	
		182	Jumlah rumah pembangunan baru		0	0,00
		183	Jumlah perumahan yang terfasilitasi PSU		10	10,00
		184	Jumlah unit rumah yang sudah difasilitasi air minum		0	0,00
		185	Jumlah unit rumah yang terfasilitasi jalan lingkungan		0	0,00
		186	Jumlah unit rumah yang terfasilitasi akses sanitasi (on site / off site)		0	0,00
		187	Jumlah perumahan yang terfasilitasi RTNH		0	0,00
		188	Jumlah unit rumah yang terfasilitasi akses PJU		0	0,00
		189	Jumlah pengembang yang tersertifikasi		0	0,00
		190	Jumlah pengembang yang teregistrasi		0	0,00
		191	Jumlah pengembang yang mendapat penyuluhan atau pelatihan		0	0,00
5.	PENYELENGGARAAN KETERTIBAN UMUM DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT	192	Jumlah pelanggaran dan pengaduan trantibum lintas kab/ kota yang ditangani		65	65,00
		193	Jumlah Satlinmas yang terlatih dan dikukuhkan		5.607	5607,00
		194	Jumlah Perda dan Perkada yang ditegakkan		7	7,00
		195	Jumlah Polisi Pamong Praja yang memiliki kualitas sebagai PPNS		2	2,00
		196	Tersedianya SOP dalam penegakan Perda dan Perkada serta penanganan gangguan trantibum		8	8,00
		197	Tersedianya sarana prasarana minimal		YA	YA
		198		Kemajuan pekerjaan dokumen yang disusun	0	0,00



NO.	FOKUS	NO.	INDIKATOR KINERJA KUNCI KELUARAN	RUMUS	ISIAN ELEMEN DATA LPPD	CAPAIAN KINERJA
			Persentas penyelesaian dokumen KRB sampai dengan dinyatakan sah/ legal	Jumlah satu dokumen KRB yang lengkap dan sudah disahkan	0	
		199	Persentase jumlah penduduk di kawasan rawan bencana yang memperoleh informasi rawan bencana sesuai jenis ancaman bencana	Jumlah Penduduk di kawasan rawan bencana yang memperoleh informasi rawan bencana sesuai jenis ancaman bencana	0	0,00
				Seluruh penduduk di kawasan rawan bencana sesuai jenis ancaman bencana	0	
		200	Persentase penyelesaian dokumen RPB sampai dinyatakan sah/legal	Kemajuan pekerjaan dokumen yang disusun	0	0,00
				Jumlah satu dokumen KRB yang lengkap dan sudah disahkan	0	
		201	Persentase penyelesaian dokumen Renkon sampai dinyatakan sah/legal	Kemajuan pekerjaan dokumen yang disusun	0	0,00
				Jumlah satu dokumen Renkon yang lengkap dan sudah disahkan	0	
		202	Persentase jumlah aparatur dan warga negara yang ikut pelatihan	Jumlah aparatur dan warga negara yang ikut pelatihan	0	0,00
				Jumlah aparatur dengan warga negara di kawasan rawan bencana	0	
		203	Persentase warga negara yang ikut pelatihan	Jumlah warga negara yang ikut pelatihan	0	0,00
				Jumlah warga negara yang berada di kawasan rawan bencana	0	
		204	Persentase warga negara yang mendapat layanan pusdalops penanggulangan bencana dan sarana prasarana penanggulangan bencana	Jumlah warga negara yang mendapat layanan pusdalops	0	0,00
				Jumlah warga negara yang berada di kawasan rawan bencana	0	
		205	Persentase warga negara yang mendapat peralatan perlindungan	Jumlah warga negara yang mendapat layanan peralatan perlindungan	0	0,00
				Jumlah warga negara yang berada di kawasan rawan bencana	0	
		206	Persentase kecepatan respon kurang dari 24 jam untuk setiap status KLB	Jumlah kecepatan respon kurang dari 24 jam untuk setiap penetapan KLB	0	0,00
				Jumlah seluruh penetapan status KLB	0	
		207	Persentase kecepatan respon kurang dari 24 jam untuk setiap status darurat bencana	Jumlah kecepatan respon kurang dari 24 jam untuk setiap penetapan darurat bencana	0	0,00
				Jumlah seluruh penetapan status darurat bencana	0	
		208	Persentase jumlah petugas yang aktif dalam penanganan darurat bencana	Jumlah petugas yang aktif dalam penanganan darurat bencana	0	0,00
				Jumlah keseluruhan petugas dalam penanganan darurat bencana	0	
		209	Persentase jumlah korban berhasil dicari, ditolong dan dievakuasi terhadap kejadian bencana	Jumlah korban berhasil dicari, ditolong dan dievakuasi	0	0,00
				Perkiraan jumlah korban keseluruhan dari bencana	0	
		210	Jumlah dan jenis layanan penyelamatan dan evakuasi pada kondisi membahayakan manusia (operasi darurat non kebakaran) oleh Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan di kabupaten/kota		59	59,00
		211	Tersedianya pos sektor damkar yang dilengkapi sarana prasarana damkar, sarana		1	1,00



NO.	FOKUS	NO.	INDIKATOR KINERJA KUNCI KELUARAN	RUMUS	ISIAN ELEMEN DATA LPPD	CAPAIAN KINERJA
			prasarana penyelamatan di kantor kecamatan			
		212	Tersedianya aparaturnya selama 24 jam yang dilaksanakan secara bergantian (shift) di kantor kecamatan		1	1,00
		213	Pos Damkar yang dilengkapi dengan sarana/prasarana damkar, sarana prasarana penyelamatan dan evakuasi di setiap keluarahan/desa		0	0,00
		214	Jumlah dan jenis sarana prasarana pemadaman, penyelamatan dan evakuasi		1	1,00
		215	Jumlah aparaturnya pemadam kebakaran yang memenuhi Standar Kualifikasi Pemadam sebagaimana dimaksud Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2009 tentang Standar Kualifikasi Aparatur Pemadam Kebakaran		0	0,00
		216	Jumlah relawan kebakaran di bawah binaan Dimas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan atau perangkat daerah yang menyelenggarakan sub urusan kebakaran		0	0,00
		217	Jumlah peningkatan kapasitas aparaturnya pemadam kebakaran		0	0,00
6.	PELAYANAN SOSIAL	218	Jumlah layanan data dan pengaduan yang dimiliki		0	0,00
		219	Jumlah data penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gepeng yang masuk dalam data terpadu FM dan OTM		0	0,00
		220	Jumlah Tim Reaksi Cepat yang dibentuk		0	0,00
		221	Jumlah penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gepeng yang dijangkau		25	25,00
		222	Jumlah kendaraan roda empat yang akses khusus layanan kedaruratan yang dimiliki		2	2,00
		223	Jumlah penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gepeng yang menerima paket permakanan sesuai standar gizi		178	178,00
		224	Jumlah rumah singgah/shelter /tempat tinggal sementara yang dimiliki sesuai standar		2	2,00
		225	Jumlah penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gepeng yang menerima paket sandang		150	150,00
		226	Jumlah penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gepeng yang memanfaatkan alat bantu		45	45,00
		227	Jumlah alat bantu yang tersedia di rumah singgah/shelter		5	5,00
		228	Jumlah paket perbekalan kesehatan yang tersedia		0	0,00
		229	Jumlah penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gepeng yang memanfaatkan paket perbekalan kesehatan		0	0,00
		230	Jumlah tenaga Kesehatan yang disediakan di rumah singgah		0	0,00



NO.	FOKUS	NO.	INDIKATOR KINERJA KUNCI KELUARAN	RUMUS	ISIAN ELEMEN DATA LPPD	CAPAIAN KINERJA
		231	Jumlah pekerja sosial profesional dan/atau TKS dan/atau relawan sosial yang disediakan		35	35,00
		232	Jumlah penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gepeng yang mendapatkan bimbingan fisik, mental dan sosial sesuai standar di keluarga, masyarakat, Dinas Sosial, Rumah Singgah/Shelter dan/ atau pusat kesejahteraan sosial		30	30,00
		233	Jumlah bimbingan sosial yang dilaksanakan kepada keluarga dan masyarakat		2	2,00
		234	Jumlah penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gepeng yang difasilitasi untuk mendapatkan dokumen kependudukan		0	0,00
		235	Jumlah penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gepeng yang mendapatkan akses layanan pendidikan dan Kesehatan dasar		0	0,00
		236	Jumlah penyandang disabilitas, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gepeng yang mendapatkan layanan penelusuran keluarga		3	3,00
		237	Jumlah penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gepeng yang direunifikasi dengan keluarga		2	2,00
		238	Jumlah penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gepeng yang dirujuk		0	0,00
		239	Jumlah korban bencana yang mendapatkan makanan		40	40,00
		240	Jumlah korban bencana yang menerima paket sandang		40	40,00
		241	Jumlah tempat penampungan pengungsi yang dimiliki		2	2,00
		242	Jumlah paket permakanan khusus bagi kelompok rentan		2	2,00
		243	Jumlah korban bencana yang menerima pelayanan dukungan psikososial		0	0,00
		244	Jumlah pekerja sosial profesional/tenaga kesejahteraan sosial dan/atau relawan sosial yang tersedia		225	225,00
B. URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB NON PELAYANAN DASAR						
1.	TENAGA KERJA	245	Dokumen perencanaan tenaga kerja kabupaten/ kota		4	4,00
		246	Persentase akurasi proyeksi indikator dalam rencana tenaga kerja	Realisasi indikator	0	0,00
				Target Indikator	0	
		247	Jumlah perusahaan yang menyusun rencana tenaga kerja di kabupaten/kota		107	107,00
		248	Persentase penerapan Program PBK dengan kualifikasi klaster	Jumlah penerapan program PBK kualifikasi KKNI atau okupasi pada tahun n	0	0,00
				Keseluruhan program pelatihan baik kualifikasi kompetensi maupun klaster pada tahun n	0	
249	Persentase instruktur bersertifikat kompetensi	Jumlah Instruktur Bersertifikat Kompetensi pada tahun n	5	100,00		



NO.	FOKUS	NO.	INDIKATOR KINERJA KUNCI KELUARAN	RUMUS	ISIAN ELEMEN DATA LPPD	CAPAIAN KINERJA
				Jumlah instruktur seluruhnya pada tahun n	5	
		250	Rasio jumlah instruktur terhadap peserta pelatihan	Jumlah Instruktur pada tahun n	5	1,19
				Jumlah peserta pelatihan pada tahun n	420	
		251	Persentase LPK yang terakreditasi	Jumlah LPK yang terakreditasi pada tahun n	57	78,08
				Jumlah seluruh LPK pada tahun n	73	
		252	Persentase LPK yang memiliki perizinan	Jumlah LPK yang memiliki perizinan pada tahun n	73	100,00
				Jumlah LPK yang terdata pada tahun n	73	
		253	Jumlah penganggur yang dilatih		480	480,00
		254	Persentase lulusan bersertifikat pelatihan	Jumlah lulusan pelatihan bersertifikat pelatihan pada tahun n	510	100,00
				Jumlah orang yang dilatih pada tahun n	510	
		255	Persentase penyerapan lulusan	Jumlah lulusan yang bekerja pada tahun n	0	0,00
				Jumlah lulusan pada tahun n	0	
		256	Lulusan bersertifikat kompetensi	Jumlah lulusan pelatihan bersertifikat kompetensi pada tahun n	0	0,00
				Jumlah lulusan bersertifikat pelatihan pada tahun n	0	
		257	Jumlah Calon Pekerja Migran Indonesia (CPMI)/ Calon Tenaga Kerja Indonesia (CTKI) yang diberikan pelatihan	CPMI dilatih	50	30,86
				CPMI terdaftar	162	
		258	Jumlah pelatihan Calon Pekerja Migran Indonesia (CPMI)/Calon Tenaga Kerja Indonesia (CTKI)		162	162,00
		259	Persentase perusahaan yang menerapkan program peningkatan produktivitas	Jumlah perusahaan yang menerapkan program peningkatan produktivitas pada tahun n	158	66,39
				Jumlah perusahaan pada tahun n	238	
		260	Data tingkat produktivitas total		0	0,00
		261	Persentase perusahaan yang telah memiliki Peraturan Perusahaan (PP)	Jumlah perusahaan yang telah memiliki PP pada tahun n	81	69,83
				Jumlah perusahaan yang memiliki tenaga kerja 10 orang atau lebih	116	
		262	Persentase perusahaan yang telah memiliki Perjanjian Kerja Bersama (PKB)	Jumlah perusahaan yang telah memiliki PKB pada tahun n	32	160,00
				Jumlah perusahaan yang memiliki SP/SB	20	
		263	Rekapitulasi tahunan jumlah konfederasi SP/SB yang tercatat, federasi SP/SB yang tercatat, SP/SB di perusahaan yang tercatat, SP/SB di luar perusahaan yang tercatat dan anggota SP/SB di perusahaan		0	0,00
		264	Persentase perusahaan yang sudah menyusun struktur skala upah	Jumlah perusahaan yang sudah menyusun struktur dan skala upah	92	78,63
				Jumlah perusahaan yang telah mengatur syarat kerja (yang diatur dalam PP atau PKB)	117	
		265	Persentase perusahaan yang telah terdaftar sebagai peserta BPJS Ketenagakerjaan	Jumlah perusahaan yang sudah terdaftar sebagai peserta BPJS ketenagakerjaan	152	100,00
				Jumlah perusahaan berdasarkan perusahaan wajib lapor	152	
		266	Persentase jumlah perusahaan yang berselisih	Jumlah perusahaan yang berselisih	5	3,29



NO.	FOKUS	NO.	INDIKATOR KINERJA KUNCI KELUARAN	RUMUS	ISIAN ELEMEN DATA LPPD	CAPAIAN KINERJA
				Jumlah perusahaan pada tahun n	152	
		267	Jumlah mogok kerja		0	0,00
		268	Jumlah penutupan perusahaan		3	3,00
		269	Jumlah perselisihan kepentingan		0	0,00
		270	Jumlah perselisihan antar Serikat Pekerja/ Serikat Buruh (SP/SB) dalam 1 (satu) perusahaan		0	0,00
		271	Jumlah perselisihan PHK		7	7,00
		272	Jumlah pekerja/buruh yang ter-PHK		0	0,00
		273	Jumlah perselisihan yang diselesaikan melalui perundingan bipartite		5	5,00
		274	Lembaga Kerja Sama (LKS) Tripartit kabupaten/kota yang diberdayakan		17	17,00
		275	Persentase perselisihan hubungan industrial yang diselesaikan melalui Perjanjian Bersama oleh Mediator Hubungan Industrial	Jumlah perjanjian bersama	45	900,00
				Jumlah kasus perselisihan	5	
		276	Jumlah lowongan kerja yang tersedia di wilayah kabupaten/kota		363	363,00
		277	Jumlah pencari kerja yang terdaftar di kab/kota		6736	6736,00
		278	Jumlah Bursa Kerja Khusus (BKK) wilayah kab/kota		363	363,00
		279	Jumlah Tenaga Kerja Khusus terdaftar dalam satu kabupaten/kota		452	452,00
		280	Jumlah Pejabat Fungsional Pengantar Kerja		0	0,00
		281	Jumlah Lembaga Penempatan Tenaga Kerja Swasta (LPTKS) antar kerja lokal dalam satu wilayah kab/kota		8	8,00
		282	Jumlah perjanjian kerja yang disahkan oleh dinas bidang ketenagakerjaan kab/kota		64	64,00
		283	Jumlah penempatan tenaga kerja melalui Informasi Pasar Kerja (IPK) Online (SISNAKER)		0	0,00
		284	Jumlah Calon Pekerja Migran Indonesia (CPMI)/Calon Tenaga Kerja Indonesia (CTKI) yang mendapatkan sosialisasi	Jumlah CPM/CTKI yang mendapatkan sosialisasi	50	30,30
				Jumlah CPM/CTKI	165	
		285	Jumlah Calon Pekerja Migran Indonesia (CPMI)/Calon Tenaga Kerja Indonesia (CTKI) yang terdata		165	165,00
		286	Jumlah Pekerja Migran Indonesia (PMI)/ Tenaga Kerja Indonesia (TKI) yang mendapatkan fasilitasi kepulangan	fasilitasi PMI yang dipulangkan	0	0,00
				PMI yang dipulangkan	0	
		287	Jumlah Pekerja Migran Indonesia (PMI)/ Tenaga Kerja Indonesia (TKI) yang mendapatkan pendidikan dan pelatihan kerja	PMI/TKI yang mendapatkan pendidikan dan pelatihan kerja	0	0,00
				Jumlah PMI/TKI	82	
		288	Data pemberdayaan Pekerja Migran Indonesia (PMI)/Tenaga Kerja Indonesia (TKI) purna dan keluarganya	Jumlah PMI/TKI purna dan keluarganya yang diberdayakan	60	100,00
				Jumlah PMI/TKI purna dan keluarganya	60	
		289	Jumlah Layanan Terpadu Satu Atap (LTSA) yang dibentuk	Jumlah LTSA yang dibentuk	0	0,00
				Jumlah daerah kantong PMI/TKI	0	



NO.	FOKUS	NO.	INDIKATOR KINERJA KUNCI KELUARAN	RUMUS	ISIAN ELEMEN DATA LPPD	CAPAIAN KINERJA
2.	PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	290	Jumlah lembaga pemerintah tingkat daerah kabupaten/ kota yang telah dilatih PUG		33	33,00
		291	Jumlah program/ kegiatan PUG pada perangkat daerah yang sudah dievaluasi melalui analisis gender di tingkat kabupaten/ kota		25	25,00
		292	Jumlah media massa (cetak, elektronik) yang bekerja sama dengan pemkab/ kota (dinas pppa) untuk melakukan KIE pencegahan kekerasan terhadap anak		12	12,00
		293	Jumlah lembaga layanan anak yang telah memiliki standar pelayanan minimal		70	70,00
		294	Persentase korban kekerasan anak yang terlayani	Jumlah korban kekerasan anak yang dilayani	70	100,00
				Jumlah korban kekerasan anak di tingkat kabupaten	70	
		295	Jumlah lembaga layanan anak yang mendapat pelatihan		0	0,00
		296	Jumlah lembaga layanan anak yang mendapatkan bantuan keuangan/ fasilitas oleh pemkab/kota (APBD kab/kota)		0	0,00
		297	Jumlah organisasi kemasyarakatan yang bergerak dlm bidang perempuan tingkat kabupaten/kota yang mendapatkan pelatihan		0	0,00
		298	Jumlah kader perempuan tingkat kabupaten/kota yang sudah dilatih		20	20,00
		299	Jumlah lembaga layanan pemberdayaan perempuan yang mendapat pelatihan		0	0,00
		300	Jumlah lembaga layanan pemberdayaan perempuan yang mendapatkan bantuan keuangan oleh pemerintah kabupaten/kota		0	0,00
		301	Jumlah kebijakan/ program pencegahan kekerasan terhadap perempuan termasuk TPPO pada perangkat daerah yang sudah dievaluasi		0	0,00
		302	Jumlah lembaga penyediaan layanan perlindungan hak perempuan yang telah terstandardisasi		0	0,00
		303	Persentase korban Kekerasan perempuan yang terlayani	Jumlah korban kekerasan perempuan yang mendapatkan layanan	0	0,00
Jumlah korban kekerasan terhadap perempuan	0					
3.	PANGAN	304	Tersedianya infrastruktur perudangan dan sarana pendukung lainnya untuk penyimpanan cadangan pangan		2	2,00
		305	Tersalurkannya pangan pokok dan pangan lainnya		325.211	325211,00
		306	Tersedianya regulasi harga minimum daerah untuk pangan lokal		0	0,00
		307	Terlaksananya kegiatan pemberdayaan masyarakat dalam rangka pemenuhan konsumsi pangan yang beragam dan bergizi seimbang		1	1,00
		308	Tersedianya peta ketahanan dan kerentanan pangan		1	1,00



NO.	FOKUS	NO.	INDIKATOR KINERJA KUNCI KELUARAN	RUMUS	ISIAN ELEMEN DATA LPPD	CAPAIAN KINERJA		
		309	Tertanganinya kerawanan pangan		3,03	3,03		
		310	Tersalurkannya cadangan pangan pada daerah rentan rawan pangan		12.000	12000,00		
		311	Terlaksananya Pengawasan keamanan pangan segar		97,50	97,50		
4.	PERTANAHAN	312	SK Izin Lokasi Yang Diterbitkan Oleh Bupati/Wali kota	Jumlah izin lokasi yang diterbitkan + Jumlah surat penolakan permohonan izin lokasi setelah melalui proses (ditolak seluruhnya)	0	0,00		
				Jumlah permohonan izin lokasi dalam 1 tahun	0			
		313	SK Bupati/Wali kota tentang Penetapan Tanah Obyek Landreform yang bersumber dari Tanah Kelebihan Maksimum/ Absentee dan Daftar Subyek	Jumlah penerbitan SK Penetapan Tanah Obyek Landreform yang bersumber dari Tanah Kelebihan Maksimum/ Absentee	0	0,00		
				Jumlah permohonan yang diusulkan Panitia Pertimbangan Landreform	0			
		314	SK Bupati/Wali kota tentang Penetapan Besarnya Ganti Rugi Kepada Bekas Pemilik Tanah Kelebihan Maksimum/ Absentee	Jumlah luas tanah yang telah dibayarkan ganti rugi kepada bekas pemilik tanah Kelebihan Maksimum/ Absentee	0	0,00		
				Jumlah luas tanah yang telah ditetapkan sebagai tanah obyek landreform yang berasal dari tanah kelebihan maksimum absentee dan daftar subyek	0			
		315	Dokumen Izin membuka tanah	Jumlah dokumen izin membuka tanah yang disetujui + Jumlah izin membuka tanah yang ditolak	0	0,00		
				Jumlah dokumen izin membuka tanah yang dimohon dalam 1 tahun	0			
		316	Dokumen Perencanaan Penggunaan Tanah kabupaten/kota	Jumlah dokumen penetapan site lokasi pembangunan fisik	0	0,00		
				Jumlah dokumen penetapan site lokasi pembangunan fisik yang direncanakan dalam 1 tahun	0			
		5.	LINGKUNGAN HIDUP	317	Hasil perhitungan kabupaten terhadap :	Indeks kualitas air (IKA)	57,89	57,89
						Indeks Kualitas Udara (IKU)	79,94	79,94
Indeks tutupan hutan (ITH)	39,76					39,76		
318	Tersedianya data dan informasi penanganan sampah di wilayah kabupaten/kota				36,80	36,80		
319	Data izin PPLH dan PUU LH yang diterbitkan oleh pemerintah daerah kabupaten/kota			Izin lingkungan, izin PPLH dan PUU LH yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten	38	61,29		
				Jumlah usulan permohonan yang teregistrasi	62			
320	Rasio pejabat pengawas LH di daerah (PPLHD) di Kabupaten/ Kota terhadap usaha yang izin lingkungan, izin PPLH dan PUULH yang diterbitkan oleh pemerintah kabupaten/kota			Jumlah PPLHD yang ada	1	0,19		
				Jumlah kegiatan dan atau usaha yang izin lingkungan, izin PPLH dan PUU LH yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten	532			
321	Penetapan hak MHA terkait dengan PPLH yang berada di Daerah kabupaten/ kota			Jumlah MHA yang diakui	5	250,00		
				Jumlah usulan MHA	2			
322	Terfasilitasinya kegiatan peningkatan pengetahuan dan ketrampilan masyarakat hukum adat terkait PPLH			Jumlah MHA yang mendapatkan pelatihan	0	0,00		
				Jumlah MHA yang ada	522			
323	Jumlah lembaga kemasyarakatan yang diberikan diklat	Jumlah lembaga kemasyarakatan yang diberikan diklat/rencana	0	0,00				



NO.	FOKUS	NO.	INDIKATOR KINERJA KUNCI KELUARAN	RUMUS	ISIAN ELEMEN DATA LPPD	CAPAIAN KINERJA
				Target lembaga kemasyarakatan yang akan diberikan diklat	0	
		324	Penanganan Pengaduan masyarakat terkait izin lingkungan, izin PPLH dan PUU LH yang di terbitkan oleh Pemerintah daerah kabupaten/kota, lokasi usaha dan dampaknya di Daerah kabupaten/kota yang ditangani	Pengaduan masyarakat yang ditangani	25	100,00
				Total jumlah pengaduan masyarakat yang teregistrasi	25	
6.	ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	325	Penerbitan akta perkawinan	Jumlah akta perkawinan yang diterbitkan	467	100,00
				Peristiwa perkawinan yang dilaporkan	467	
		326	Penerbitan akta perceraian	Jumlah akta perceraian yang diterbitkan	28	100,00
				Peristiwa perceraian yang dilaporkan	28	
		327	Penerbitan akta Kematian	Jumlah akta Kematian yang diterbitkan	5732	27,99
				Peristiwa Kematian yang dilaporkan	20482	
		328	Penyajian data Kependudukan	Jumlah penyajian data kependudukan skala kabupaten dalam satu tahun	2	50,00
				2 tahun	4	
7.	PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	329	Jumlah desa yang terfasilitasi dalam kerja sama antar desa		0	0,00
		330	Jumlah desa yang melakukan kerja sama antar desa tahun berjalan dikurangi jumlah desa yang melakukan kerja sama antar desa tahun sebelumnya		0	0,00
		331	Jumlah lembaga kemasyarakatan dan lembaga adat di desa yang terfasilitasi dalam peningkatan kapasitas dan diberdayakan		3078	3078,00
		332	Jumlah peningkatan desa yang lembaga kemasyarakatan dan lembaga adatnya melaksanakan kegiatan ekonomi produktif dan pemberdayaan		143	143,00
		333	Jumlah desa yang terfasilitasi dalam kerja sama antar desa		0	0,00
		334	Jumlah desa yang melakukan kerja sama antar desa tahun berjalan dikurangi jumlah desa yang melakukan kerja sama antar desa tahun sebelumnya		0	0,00
		335	Jumlah lembaga kemasyarakatan dan lembaga adat di desa yang terfasilitasi dalam peningkatan kapasitas dan diberdayakan		3078	3078,00
		336	Jumlah peningkatan desa yang lembaga kemasyarakatan dan lembaga adatnya melaksanakan kegiatan ekonomi produktif dan pemberdayaan		143	143,00
		337	Tersedianya dokumen Grand Design Pembangunan Kependudukan (GDPK) yang di Perdakan		1	1,00
8.	PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	338	Median Usia Kawin Pertama Perempuan (MUKP) seluruh wanita umur 25-49 tahun		0	0,00
		339	Angka Kelahiran Remaja umur 15-19 tahun (Age Specific Fertility Rate/ASFR 15- 19)		2,28	2,28



NO.	FOKUS	NO.	INDIKATOR KINERJA KUNCI KELUARAN	RUMUS	ISIAN ELEMEN DATA LPPD	CAPAIAN KINERJA
		340	Persentase masyarakat yang terpapar isi pesan Program KKBPK (advokasi dan KIE)	Jumlah masyarakat yang terpapar isi pesan Program KKBPK (advokasi dan KIE) Jumlah sasaran masyarakat Program KKBPK (advokasi dan KIE)	95854 95854	100,00
		341	Jumlah stakeholders/ pemangku kepentingan dan mitra kerja (termasuk organisasi kemasyarakatan) yang berperan serta aktif dalam pengelolaan progra, KKBPK		1	1,00
		342	Persentase Fasilitasi Kesehatan (Faskes) yang siap melayani KB MKJP	Jumlah Faskes yang siap melayani KB MKJP Jumlah Faskes	49 49	100,00
		343	Persentase Peserta KB Aktif (PA) Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)	Jumlah peserta KB Aktif Jumlah PUS	243141 316301	76,87
		344	Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota yang memiliki Kelompok Kerja KKBPK yang efektif	Jumlah kelompok kerja KKBPK yang efektif	0	0,00
		345	Persentase pelayanan KB Pasca Persalinan	Jumlah peserta KB pasca persalinan menurut metode kontrasepsi cara moderen Jumlah sasaran peserta KB pasca persalinan	1202222 1202222	100,00
		346	Persentase kesertaan KB di Kabupaten dan Kota dengan kesertaan rendah	Daftar Desa/Kelurahan yang memiliki persentase kesertaan KB paling rendah dalam satu Kabupaten. Data/informasi yang diambil adalah 50% dari total seluruh Desa/Kelurahan dengan persentase kesertaan KB paling rendah	0	0,00
		347	Persentase kesertaan KB keluarga Penerima Bantuan Iuran (PBI)	Jumlah peserta KB pada keluarga penerima PBI Jumlah keluarga PBI	72202 72202	100,00
9.	PERHUBUNGAN	348	Persentase tersedianya fasilitas penyelenggaraan terminal penumpang angkutan tipe C	Jumlah fasilitas penyelenggaraan terminal penumpang angkutan jalan tipe C yang tersedia Jumlah fasilitas penyelenggaraan terminal penumpang angkutan jalan sesuai dengan standar pelayanan penyelenggaraan terminal angkutan jalan	0 0	0,00
		349	Terlaksananya pelayanan uji berkala	Jumlah kendaraan yang diuji pertahun Jumlah kendaraan wajib uji	0 0	0,00
		350	Penetapan tarif angkutan orang antar kota dalam Kabupaten, serta angkutan perkotaan dan pedesaan kelas ekonomi	Jumlah penetapan tarif lintas penyeberangan Jumlah lintas penyeberangan dalam kabupaten	0 0	0,00
		351	Persentase pelaksanaan manajemen dan rekayasa lalu lintas untuk jaringan jalan Kabupaten atau Kota	Jumlah pemasangan perlengkapan Jalan Kabupaten Target kebutuhan perlengkapan jalan kabupaten	0 0	0,00
		352	Persentase pelaksanaan manajemen dan rekayasa lalu lintas untu jaringan jalan Kabupaten/Kota	Jumlah pemasangan perlengkapan Jalan Kabupaten Target kebutuhan perlengkapan jalan kabupaten	0 0	0,00
10.	KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	353	Persentase perangkat daerah yang terkoneksi di Jaringan Intra Pemerintah atau menggunakan akses internet yang diamankan yang disediakan oleh Dinas Kominfo	Jumlah OPD yang saling terkoneksi di jaringan intra pemerintah atau menggunakan akses internet yang diamankan yang disediakan oleh Dinas Kominfo Jumlah OPD	18 61	29,51
		354	Persentase perangkat daerah yang menggunakan akses internet yang berkualitas yang disediakan Dinas Kominfo	Jumlah OPD yang menggunakan akses internet yang berkualitas yang disediakan Dinas Kominfo	0	0,00



NO.	FOKUS	NO.	INDIKATOR KINERJA KUNCI KELUARAN	RUMUS	ISIAN ELEMEN DATA LPPD	CAPAIAN KINERJA
				Jumlah OPD	61	
		355	Tersedianya sistem elektronik komunikasi intra pemerintah yang disediakan Dinas Kominfo (berbasis suara, video, teks, data dan sinyal lainnya) dengan memanfaatkan jaringan intra pemerintah	Sistem elektronik komunikasi intra pemerintah yang disediakan dinas kominfo (berbasis suara, video, teks, data, dan sinyal lainnya) dengan memanfaatkan jaringan intra pemerintah (Ya atau Tidak)	YA	YA
		356	Persentase kegiatan (event), perangkat daerah dan pelayanan publik pada Pemerintah Daerah yang dimanfaatkan secara daring dengan memanfaatkan domain dan sub domain Instansi Penyelenggara Negara sesuai dengan Peraturan Menteri Kominfo Nomor 5 Tahun 2015	Jumlah kegiatan (event), perangkat daerah dan pelayanan publik pada Pemerintah Daerah yang diselenggarakan secara daring dengan memanfaatkan domain dan sub domain Instansi Penyelenggara Negara sesuai dengan PM Kominfo No.05/2015	72	100,00
				Jumlah kegiatan (event), perangkat daerah dan pelayanan publik pada Pemerintah Daerah	72	
		357	Persentase perangkat daerah yang memiliki portal dan situs web yang sesuai standar	Jumlah Perangkat Daerah yang memiliki portal dan situs web yang sesuai standar	61	100,00
				Jumlah Perangkat Daerah	61	
		358	Persentase perangkat daerah yang mengimplementasikan layanan aplikasi umum dan aplikasi khusus yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan	Jumlah Perangkat Daerah yang mengimplementasikan layanan aplikasi umum dan aplikasi khusus yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan	12	19,67
				Jumlah Perangkat Daerah	61	
		359	Persentase layanan SPBE (layanan publik dan layanan administrasi pemerintahan) yang tercantum dalam dokumen proses bisnis yang telah diimplementasikan secara elektronik	Layanan SPBE (layanan publik dan layanan administrasi pemerintahan) yang tercantum dalam dokumen proses bisnis yang telah diimplementasikan secara elektronik	0	0,00
				Jumlah layanan	72	
		360	Persentase layanan SPBE (layanan publik dan layanan administrasi pemerintahan) yang memanfaatkan sertifikat elektronik	Jumlah layanan SPBE (layanan publik dan layanan administrasi pemerintahan) yang memanfaatkan sertifikat elektronik	2	2,78
				Jumlah layanan	72	
		361	Persentase sistem elektronik yang terdaftar sesuai ketentuan peraturan perundang - undangan	Jumlah sistem elektronik yang terdaftar sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan	2	100,00
				Jumlah sistem elektronik	2	
		362	Persentase layanan publik dan layanan administrasi yang terintegrasi dengan sistem penghubung layanan pemerintah	Jumlah layanan publik dan layanan administrasi yang terintegrasi dengan sistem penghubung layanan pemerintah	4	100,00
				Jumlah layanan publik dan layanan administrasi	4	
		363	Persentase perangkat daerah yang menggunakan layanan pusat data pemerintah	Jumlah Perangkat Daerah yang menggunakan layanan pusat data pemerintah	3	100,00
				Jumlah Perangkat Daerah	3	
		364	Persentase perangkat daerah yang menyimpan data di pusat data pemerintah	Persentase Perangkat Daerah yang menyimpan data di pusat data pemerintah	0	0,00
				Jumlah Perangkat Daerah	61	
		365	Persentase perangkat daerah yang memperbaharui datanya sesuai siklus jenis data (sesuai renstra kominfo)	Jumlah Perangkat Daerah yang memperbaharui datanya sesuai siklus jenis data	30	49,18
				Jumlah Perangkat Daerah	61	
		366	Persentase data yang dapat berbagi pakai	Jumlah data yang dapat berbagi pakai	13	100,00



NO.	FOKUS	NO.	INDIKATOR KINERJA KUNCI KELUARAN	RUMUS	ISIAN ELEMEN DATA LPPD	CAPAIAN KINERJA
				Jumlah data yang dimiliki Pemerintah Daerah	13	
		367	Persentase perangkat Daerah yang mengimplementasi inovasi yang mendukung smart city	Jumlah Perangkat Daerah yang mengimplementasi inovasi yang mendukung smart city	2	3,28
				Jumlah Perangkat Daerah	61	
		368	Persentase ASN pengelola TIK yang tersertifikasi kompetensi di bawah pengelolaan Dinas Kominfo	Jumlah ASN pengelola TIK yang tersertifikasi kompetensi di bawah pengelolaan Dinas Kominfo	8	100,00
				Jumlah ASN pengelola TIK	8	
		369	Tersedianya peraturan daerah atau peraturan kepala daerah terkait implementasi e-government		YA	YA
		370	Persentase komunitas masyarakat/mitra strategis pemerintah daerah provinsi yang menyebarkan informasi dan kebijakan pemerintah dan pemerintah provinsi	Jumlah komunitas masyarakat/mitra strategis pemerintah daerah kabupaten yang menyebarkan informasi dan kebijakan pemerintah	0	0,00
				Jumlah komunitas masyarakat/mitra strategis pemerintah daerah kabupaten	0	
		371	Persentase konten informasi terkait program dan kebijakan pemerintah dan pemerintah provinsi sesuai dengan strategi komunikasi (STRAKOM)	Jumlah konten informasi terkait program dan kebijakan pemerintah Kabupaten sesuai dengan strategi komunikasi (STRAKOM)	0	0,00
				Jumlah konten informasi terkait program dan kebijakan pemerintah kabupaten	0	
		372	Persentase diseminasi dan layanan informasi publik yang dilaksanakan sesuai dengan strategi komunikasi (STARKOM) dan SOP yang telah ditetapkan	Jumlah diseminasi dan layanan informasi publik yang dilaksanakan sesuai dengan strategi komunikasi (STARKOM) dan SOP	0	0,00
				Jumlah diseminasi dan layanan informasi publik	0	
11.	KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH	373	Persentase fasilitasi penerbitan izin usaha simpan pinjam untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan dalam daerah kabupaten/kota	Jumlah penerbitan izin usaha simpan pinjam koperasi pada tahun yang dilaporkan	0	0,00
				Jumlah usaha simpan pinjam koperasi yang belum mempunyai izin usaha simpan pinjam	452	
		374	Persentase fasilitasi penerbitan izin pembukaan kantor cabang, cabang pembantu dan kantor kas usaha simpan pinjam oleh koperasi untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan dalam daerah kabupaten/kota	Jumlah penerbitan izin pembukaan kantor cabang, cabang pembantu dan kantor kas usaha simpan pinjam pada tahun yang dilaporkan	2	100,00
				Jumlah permohonan izin pembukaan kantor cabang, cabang pembantu dan kantor kas usaha simpan pinjam pada tahun yang dilaporkan	2	
		375	Persentase pemeriksaan dan pengawasan yang dilakukan untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan dalam daerah kabupaten/kota	Jumlah koperasi yang diperiksa dan diawasi	40	4,69
				Jumlah Koperasi yang ada	853	
		376	Persentase usaha simpan pinjam oleh koperasi yang dinilai kesehatannya untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan dalam daerah kabupaten/kota	Jumlah usaha simpan pinjam oleh koperasi yang dinilai kesehatannya	40	4,68
				Jumlah usaha simpan pinjam oleh koperasi yang ada	854	
		377	Persentase koperasi yang mengikuti pelatihan untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan dalam daerah kabupaten/kota	Jumlah koperasi yang mengikuti pendidikan dan pelatihan	102	11,96
				Jumlah Koperasi yang ada	853	



NO.	FOKUS	NO.	INDIKATOR KINERJA KUNCI KELUARAN	RUMUS	ISIAN ELEMEN DATA LPPD	CAPAIAN KINERJA
		378	Persentase jumlah anggota koperasi yang telah mengikuti pelatihan perkoperasian untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan dalam daerah kabupaten/kota	Jumlah anggota koperasi yang mengikuti pelatihan perkoperasian Jumlah anggota koperasi yang ada	224 853	26,26
		379	Persentase koperasi yang telah menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan perkoperasian untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan dalam daerah kabupaten/kota	Jumlah koperasi yang telah menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan Jumlah Koperasi yang ada	0 854	0,00
		380	Persentase koperasi yang diberikan dukungan fasilitasi pembiayaan		0	0,00
		381	Persentase fasilitasi penerbitan sertifikat Nomor Induk Koperasi (NIK) untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan dalam daerah kabupaten/kota	Jumlah koperasi yang telah diterbitkan sertifikat Nomor Induk Koperasi (NIK) Jumlah Koperasi yang ada	92 853	10,79
		382	Persentase koperasi yang diberikan dukungan fasilitasi pembiayaan untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan dalam daerah kabupaten/kota	Jumlah koperasi yang diberikan dukungan fasilitasi pembiayaan Jumlah Koperasi yang ada	1 853	0,12
		383	Persentase koperasi yang diberikan dukungan fasilitasi pemasaran untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan dalam daerah kabupaten/ kota	Jumlah koperasi yang diberikan dukungan fasilitasi pemasaran Jumlah Koperasi yang ada	1 853	0,12
		384	Persentase koperasi yang diberikan dukungan fasilitasi pendampingan kelembagaan dan usaha untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan dalam daerah kabupaten/ kota	Jumlah koperasi yang diberikan dukungan fasilitasi pendampingan kelembagaan dan usaha Jumlah Koperasi yang ada	0 853	0,00
		385	Persentase koperasi yang diberikan dukungan fasilitasi kemitraan untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan dalam daerah kabupaten/kota	Jumlah koperasi yang diberikan dukungan fasilitasi kemitraan Jumlah Koperasi yang ada	0 853	0,00
		386	Rasio pertumbuhan wirausaha baru yang berskala mikro	Jumlah pertumbuhan wirausaha baru Jumlah wirausaha yang ada	58624 117269	49,99
		387	Persentase jumlah usaha mikro yang diinput ke dalam sistem online data system (ODS)	Jumlah usaha mikro yang diinput ke dalam sistem online data system (ODS) Jumlah usaha mikro yang ada	23769 117269	20,27
		388	Persentase jumlah usaha mikro yang bermitra	Jumlah usaha mikro yang bermitra Jumlah usaha mikro yang ada	700 117269	0,60
		389	Persentase jumlah usaha mikro yang diberikan dukungan fasilitasi standarisasi dan sertifikasi produk usaha	Jumlah usaha mikro yang diberikan dukungan fasilitasi standarisasi dan sertifikasi Jumlah usaha mikro yang belum memiliki standarisasi dan sertifikasi produk	300 117269	0,26
		390	Persentase jumlah usaha mikro yang diberikan dukungan fasilitasi pemasaran	Jumlah usaha mikro yang diberikan dukungan fasilitasi pemasaran Jumlah usaha mikro yang belum mendapat dukungan pemasaran	500 117269	0,43
		391	Rasio usaha mikro yang diberikan dukungan fasilitasi pelatihan	Jumlah usaha mikro yang diberikan dukungan fasilitasi pelatihan Jumlah usaha mikro yang ada	300 117269	0,26
		392	Persentase usaha mikro yang diberikan pendampingan melalui Lembaga pendampingan	Jumlah usaha mikro yang diberikan pendampingan kelembagaan dan usaha Jumlah usaha mikro yang ada	300 117269	0,26
12.	PENANAMAN MODAL	393	PERDA mengenai pemberian fasilitas/ intensif penanaman modal yang menjadi		0	0,00



NO.	FOKUS	NO.	INDIKATOR KINERJA KUNCI KELUARAN	RUMUS	ISIAN ELEMEN DATA LPPD	CAPAIAN KINERJA
			kewenangan daerah kabupaten/kota			
		394	Standar operasional prosedur pelaksanaan pemberian fasilitas/ insentif penanaman modal		0	0,00
		395	Laporan evaluasi pelaksanaan pemberian fasilitas/ insentif penanaman modal		0	0,00
		396	Kegiatan seminar bisnis, forum, one on one meeting		0	0,00
		397	Kegiatan pameran penanaman modal		0	0,00
		398	Kegiatan penerimaan misi penanaman modal		1	1,00
		399	Konsultasi perizinan dan non perizinan penanaman modal		69	69,00
		400	Penerbitan perizinan dan non perizinan penanaman modal		4368	4368,00
		401	Laporan realisasi penanaman modal		1.526.104.170.000	1526104170000,00
		402	Pembinaan aparatur penanaman modal tingkat kabupaten/ kota		10	10,00
		403	Pembinaan penanaman modal PMA dan PMDN		120	120,00
		404	Tersedianya data dan informasi perizinan dan non perizinan provinsi kabupaten/kota		28	28,00
13.	KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA	405	Jumlah pemuda yang mendapat pelatihan kewirausahaan		455	455,00
		406	Jumlah pemuda yang mendapat bantuan kewirausahaan		0	0,00
		407	Jumlah pemuda yang medapat pelatihan kader pengembang kepemimpinan, kepedulian, kesukarelawanan dan kepeloporan pemuda		280	280,00
		408	Jumlah pengelola organisasi kepemudaan yang mendapat pelatihan manajemen organisasi kepemudaan		82	82,00
		409	Jumlah pelatih olah raga yang memiliki kompetensi di satuan2 pendidikan		1363	1363,00
		410	Jumlah penyelenggaraan event OR prestasi tingkat daerah		3	3,00
14.	STATISTIK	411	Tersedianya buku profil daerah		1	1,00
		412	Jumlah survey statistik sektoral yang dilakukan		33	33,00
		413	Jumlah kompilasi statistik sektoral yang dilakukan		1	1,00
		414	Jumlah survey statistik sektoral yang mendapat rekomendasi BPS		0	0,00
		415	Jumlah kompilasi statistik sektoral yang mendapat rekomendasi dr BPS		1	1,00
		416	Persentase kelengkapan metadata kegiatan statistik sektoral	Jumlah metadata kegiatan statistik sektoral	33	1100,00
				Jumlah kegiatan statistik sektoral	3	
		417	Persentase kelengkapan metadata variabel sektoral	Jumlah metadata indikator statistik sektoral	33	1100,00
				Jumlah indikator statistik sektoral	3	
15.	PERSANDIAN	418	Persentase kegiatan strategis yang telah diamankan melalui kegiatan pengamanan sinyal dibanding banyaknya jumlah	Jumlah kegiatan strategis teramankan	0	0,00
				Jumlah kegiatan strategis yang ada	0	



NO.	FOKUS	NO.	INDIKATOR KINERJA KUNCI KELUARAN	RUMUS	ISIAN ELEMEN DATA LPPD	CAPAIAN KINERJA
			kegiatan strategis yang harus diamankan			
		419	Persentase sistem elektronik yang telah menerapkan prinsip sistem manajemen yang telah menerapkan prinsip-prinsip manajemen keamanan informasi (SMKI) dan atau aplikasi persandian dibanding jumlah sistem elektronik yang ada pada pemerintah daerah	Jumlah SE yang menerapkan SMKI diamankan sertifikat elektronik atau aplikasi persandian Jumlah SE yang ada	0 0	0,00
		420	Persentase sistem elektronik/asset informasi yang telah diaudit dengan resiko kategori rendah	Jumlah SE atau asset informasi yang telah diaudit dengan resiko kategori rendah Jumlah SE yang ada	0 0	0,00
		421	Persentase titik yang diamankan dibanding dengan jumlah seluruh titik pada pemerintah (PHKS) yang ditetapkan	Jumlah titik teramankan Jumlah titik pada PHKS	0 0	0,00
16.	KEBUDAYAAN	422	Jumlah obyek pemajuan kebudayaan yang dilindungi (inventarisasi, pengamanan, pemeliharaan, penyelamatan dan publikasi)		17	17,00
		423	Jumlah obyek Pemajuan kebudayaan yang dikembangkan (penyebarluasan, pengkajian, penayaan keberagaman)		17	17,00
		424	Jumlah obyek pemajuan kebudayaan yang dimanfaatkan (membangun karakter bangsa, meningkatkan ketahanan budaya, dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat)		528	528,00
		425	Jumlah SDM, lembaga dan pranata yang dibina (peningkatan kompetensi, standarisasi dan sertifikasi, serta peningkatan kapasitas tata kelola)		17	17,00
		426	Register cagar Budaya (pendaftaran, pengisian, penetapan, pencatatan, pemeringkatan, penghapusan)		64	64,00
		427	Perlindungan cagar Budaya kabupaten/kota (penyelamatan, zonasi, pemeliharaan dan pemugaran)		1	1,00
		428	Layanan perijzinan membawa cagar budaya kabupaten ke luar kabupaten dengan dukungan data Pengembangan cagar budaya kabupaten (penelitian, revitalisasi, adaptasi)		0	0,00
		429	Pemanfaatan cagar budaya Provinsi (dalam hal agama, sosial, pendidikan, ilmu pengetahuan, teknologi, kebudayaan, dan pariwisata)		0	0,00
		430	Pengelolaan, pengamanan, pengembangan dan pemanfaatan koleksi museum		1	1,00
		431	Peningkatan akses masyarakat dalam penyelenggaraan dan pelaksanaan kegiatan museum	Jumlah pengunjung museum	5221	5221,00
		432	Peningkatan akses masyarakat dalam pengelolaan sarana dan prasarana museum.	Jumlah berpartisipasi dalam pengelolaan museum	1	1,00
		433	Pengelolaan, pengamanan, pengembangan dan pemanfaatan koleksi museum		1	1,00



NO.	FOKUS	NO.	INDIKATOR KINERJA KUNCI KELUARAN	RUMUS	ISIAN ELEMEN DATA LPPD	CAPAIAN KINERJA
		434	Pembentukan tim pendaftaran cagar budaya		0	0,00
		435	Pembentukan tim ahli cagar budaya provinsi		0	0,00
		436	Fasilitas sertifikasi tim ahli cagar budaya		0	0,00
		437	Pemetaan sdm cagar budaya dan permuseuman		35	35,00
		438	Peningkatan kompetensi sdm cagar budaya dan permuseuman		0	0,00
		439	Penyediaan sarana dan prasarana pendaftaran cagar budaya dan permuseuman		0	0,00
		440	Penyelenggaraan kegiatan museum yang melibatkan masyarakat		2	2,00
17.	PERPUSTAKAAN	441	Rasio ketercukupan koleksi perpustakaan dengan penduduk	Koleksi perpustakaan yang tersedia diberbagai perpustakaan di wilayahnya (dalam eksemplar) Jumlah Penduduk di wilayahnya (dalam jiwa)	37732 1402324	2,69
		442	Persentase kemanfaatan perpustakaan oleh masyarakat	Jumlah kunjungan pemustaka yang memanfaatkan perpustakaan baik secara online maupun onsite Jumlah Penduduk di wilayahnya (dalam jiwa)	125699 1402324	8,96
		443	Rasio ketercukupan tenaga perpustakaan dengan penduduk	Ketersediaan tenaga perpustakaan di berbagai perpustakaan di wilayahnya Jumlah Penduduk di wilayahnya (dalam jiwa)	18 1402324	0,00
		444	Persentase perpustakaan sesuai standar nasional perpustakaan	Jumlah perpustakaan sesuai standar nasional perpustakaan Jumlah perpustakaan dari berbagai jenis yang terdaftar di wilayahnya	400 2145	18,65
		445	Jumlah pasyarakat gemar membaca di masyarakat		274	274,00
		446	Jumlah naskah kuno yang diakuisisi/dialih media (digitalisasi)/ terdaftar yang ada di wilayahnya		0	0,00
		447	Jumlah naskah kuno yang dialih aksara dan dialih bahasa		0	0,00
		448	Jumlah koleksi budaya etnis nusantara yang tersimpan dan/atau terdaftar yang ada di wilayahnya (item)		0	0,00
18.	KEARSIPAN	449	Persentase arsip aktif yang telah dibuatkan daftar arsip	Jumlah arsip aktif yang telah dibuatkan daftar arsip Jumlah seluruh arsip aktif	6502 10837	60,00
		450	Persentase arsip in-aktif yang telah dibuatkan daftar arsip	Jumlah arsip in-aktif yang telah dibuatkan daftar arsip Jumlah seluruh arsip in-aktif	4194 5992	69,99
		451	Persentase arsip statis yang telah dibuatkan sarana bantu temu baik	Jumlah arsip statis yang telah dibuatkan sarana bantu temu baik Jumlah seluruh arsip statis	554 693	79,94
		452	Persentase jumlah arsip yang dimasukkan dalam SIKN melalui JIKN	Jumlah arsip yang dimasukkan dalam SIKN melalui JIKN Jumlah seluruh arsip dinamis dan arsip statis pemerintahan kabupaten	14017 17522	80,00
		453	Pemusnahan arsip yang sesuai NSPK		2	2,00
		454	Perlindungan dan penyelamatan arsip akibat bencana yang sesuai NSPK		0	0,00



NO.	FOKUS	NO.	INDIKATOR KINERJA KUNCI KELUARAN	RUMUS	ISIAN ELEMEN DATA LPPD	CAPAIAN KINERJA
		455	Penyelamatan arsip perangkat daerah Kabupaten/Kota yang digabung dan atau dibubarkan dan pemekaran daerah kecamatan/ kelurahan yang sesuai NSPK di provinsi		1	1,00
		456	Autentifikasi arsip statis dan arsip hasil alih media yang dikelola oleh lembaga kearsipan kabupaten/kota yang sesuai NSPK		920	920,00
		457	Pencarian arsip statis yang pengelolaannya menjadi kewenangan daerah Kabupaten/ Kota yang dinyatakan hilang dalam bentuk daftar pencarian arsip yang sesuai NSPK		30	30,00
		458	Penerbitan izin penggunaan arsip yang bersifat tertutup yang disimpan di lembaga kearsipan daerah Kabupaten/Kota yang sesuai NSPK		1	1,00
C. URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN						
1.	KELAUTAN DAN PERIKANAN	459	Jumlah rumah tangga nelayan yang melakukan diversifikasi usaha (RTP)		0	0,00
		460	Persentase Tempat Pelelangan Ikan yang operasional	Jumlah TPI yang operasional	10	90,91
				Jumlah seluruh TPI yang ada di wilayah kabupaten	11	
		461	Jumlah Izin Usaha Perikanan (IUP) di bidang pembudidayaan ikan yang usahanya dalam 1 (satu) Daerah kabupaten/kota yang diterbitkan		2	2,00
		462	Jumlah pembudidaya ikan yang memperoleh kegiatan pemberdayaan (pendidikan dan pelatihan/penyuluhan dan pendampingan/ kemitraan usaha/ kemudahan akses iptek dan informasi/dan penguatan kelembagaan)		99	99,00
		463	Jumlah benih budidaya air tawar dan air payau yang di produksi		2.078.810	2078810,00
2.	PARIWISATA	464	Jumlah entitas pengelolaan destinasi		42	42,00
		465	Jumlah kelengkapan infrastruktur dasar, fasilitas umum, dan fasilitas pariwisata		9	9,00
		466	Jumlah tanda daftar usaha pariwisata per sub jenis usaha di kabupaten/kota		8	8,00
		467	Jumlah wisatawan mancanegara per kebangsaan		7	7,00
		468	Jumlah promosi event daerah yang terlaksana di dalam negeri		5	5,00
		469	Jumlah event luar negeri yang diikuti kabupaten/ kota		0	0,00
		470	Jumlah industri pariwisata daerah yang berpartisipasi pada even promosi pariwisata di dalam negeri		4	4,00
		471	Persentase tenaga kerja di sektor pariwisata yang disertifikasi	Jumlah tenaga kerja pariwisata tersertifikasi	46	38,66
				Jumlah tenaga kerja pariwisata	119	
		472	Persentase SDM peserta pembekalan sektor kepariwisataan	Jumlah peserta pembekalan sektor kepariwisataan	130	100,00
Jumlah sasaran pembekalan sektor kepariwisataan	130					



NO.	FOKUS	NO.	INDIKATOR KINERJA KUNCI KELUARAN	RUMUS	ISIAN ELEMEN DATA LPPD	CAPAIAN KINERJA	
		473	Jumlah lokasi yang memperoleh pemberdayaan masyarakat dan pembinaan kemitraan usaha masyarakat		0	0,00	
3.	PERTANIAN	474	Jumlah Sarana dan prasana pertanian yang diberikan		134	134,00	
		475	Prasaran pertanian yang digunakan		134	134,00	
		476	Penerbitan izin usaha pertanian		23	23,00	
		477	Persentase prasarana yang digunakan	Jumlah prasarana yang aktif digunakan	134	100,00	
				Jumlah prasarana yang dibangun	134		
		478	Persentase jumlah usulan izin usaha pertanian kab/kota	Jumlah usulan yang difasilitasi	23	100,00	
				Jumlah usulan usaha pertanian	23		
479	Persentase fasilitasi penanggulangan bencana	Jumlah area yang dapat ditanggulangi	2626,8	27,43			
		Luas area terkena bencana	9575				
4.	KEHUTANAN	480	Tersedianya dokumen rencana pengelolaan Tahura		0	0,00	
		481	Pemberdayaan masyarakat di daerah penyangga		0	0,00	
		482	Pemulihan ekosistem pada Tahura		0	0,00	
		483	Menurunnya gangguan kawasan TAHURA		0	0,00	
5.	ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL	484	Penerbitan izin pemanfaatan langsung panas bumi dalam daerah kab/kota		1	1,00	
6.	PERDAGANGAN	485	Persentase perizinan yang diterbitkan sesuai dengan ketentuan untuk izin :	1. Pusat perbelanjaan	Jumlah izin pusat perbelanjaan yang diterbitkan ≤5 hari kerja	0	0,00
					Jumlah permohonan izin pusat perbelanjaan yang dokumennya sudah lengkap dan benar	0	
				2. Toko swalayan	Jumlah izin toko swalayan yang diterbitkan ≤5 hari kerja	17	
			Jumlah permohonan izin toko swalayan yang dokumennya sudah lengkap dan benar	17			
		486	Persentase penerbitan TDG	Jumlah penerbitan TDG ≤5 hari kerja	8	100,00	
				Jumlah permohonan penerbitan TDG	8		
		487	Persentase Gudang yang tidak mempunyai TDG	Jumlah penerbitan TDG	117	100,00	
				Jumlah gudang yang ada di kabupaten	117		
		488	Persentase penerbitan STPW yang tepat waktu untuk :				
			Penerima waralaba dari waralaba dalam negeri	Jumlah STPW untuk penerima waralaba dari waralaba dalam negeri yang terbit ≤2 hari kerja sejak berkas permohonan diterima secara lengkap dan atau benar	0	0,00	
				Jumlah permohonan STPW untuk penerima waralaba dari waralaba dalam negeri	0		
			Penerima waralaba lanjutan dari waralaba dalam negeri	Jumlah STPW untuk penerima lanjutan waralaba dari waralaba dalam negeri yang terbit ≤2 hari kerja sejak berkas permohonan diterima secara lengkap dan atau benar	0	0,00	
	Jumlah permohonan STPW untuk penerima waralaba lanjutan dari waralaba dalam negeri	0					



NO.	FOKUS	NO.	INDIKATOR KINERJA KUNCI KELUARAN	RUMUS	ISIAN ELEMEN DATA LPPD	CAPAIAN KINERJA
			Penerima waralaba lanjutan dari waralaba luar negeri	Jumlah STPW untuk penerima lanjutan waralaba dari waralaba luar negeri yang terbit ≤2 hari kerja sejak berkas permohonan diterima secara lengkap dan atau benar	0	0,00
				Jumlah permohonan STPW untuk penerima waralaba lanjutan dari waralaba luar negeri	0	
		489	Persentase pemeriksaan fasilitas penyimpanan bahan berbahaya dan pengawasan distribusi, pengemasan dan pelabelan bahan berbahaya di tingkat daerah Kab/Kota	Jumlah pemeriksaan fasilitas penyimpanan bahan berbahaya dan pengawasan distribusi, pengemasan dan pelabelan bahan berbahaya di tingkat daerah Kabupaten	0	0,00
				Jumlah permohonan SIUP bahan berbahaya bagi pengecer	0	
		490	Persentase penerbitan SKA yang tepat waktu	Jumlah SKA yang terbit ≤1 hari kerja (1 x 24 jam)	0	0,00
				Jumlah permohonan penerbitan SKA yang dokumennya telah diterima dengan lengkap dan benar	0	
		491	Persentase pengembangan dan pengelolaan sarana distribusi perdagangan di wilayah kerjanya		57,07	57,07
		492	Persentase koefisien variasi harga antar waktu		0	0,00
		493	Jumlah pupuk dan pestisida yang tersalurkan		18284,2	18284,20
		494	Persentase alat-alat ukur, takar, timbang dan perlengkapannya (UTTP) yang ditera/ tera ulang dalam tahun berjalan	Jumlah total UTTP yang ditera dan ditera ulang pada tahun berjalan	2396	68,95
				Jumlah potensi UTTP yang wajib ditera dan tera ulang di wilayah kabupaten	3475	
		495	Persentase kesesuaian BDKT yang diawasi terhadap ketentuan yang berlaku	Jumlah sample BDKT yang diawasi dalam tahun berjalan sesuai ketentuan yang berlaku	110	1375,00
				Total sample BDKT yang diawasi dalam tahun berjalan	8	
7.	PERINDUSTRIAN	496	Persentase jumlah penetapan izin usaha kawasan industri (IUKI) dan izin perluasan kawasan industri (IPKI) yang lokasinya di daerah kabupaten/ kota	Jumlah realisasi izin yang diterbitkan	0	0,00
				Jumlah permohonan atau pengajuan izin yang masuk	0	
		497	Persentase terselesaikannya dokumen RPIK sampai dengan ditetapkannya menjadi PERDA		0	0,00
		498	Persentase Jumlah izin yang diterbitkan usaha industri (IUI) kecil dan IUI menengah yang diterbitkan	Jumlah realisasi izin yang diterbitkan	25	100,00
				Jumlah permohonan atau pengajuan izin yang masuk	25	
		499	Persentase jumlah izin perluasan industri (IPIU) bagi industri Kecil dan menengah yang diterbitkan	Jumlah realisasi izin yang diterbitkan	0	0,00
				Jumlah permohonan atau pengajuan izin yang masuk	0	
		500	Persentase data perusahaan industri kecil, menengah dan perusahaan kawasan industri di Kabupaten/ Kota yang masuk dalam SIIINas terhadap total populasi perusahaan industri kecil, menengah dan perusahaan kawasan industri di Kabupaten/Kota	Jumlah data perusahaan industri kecil, menengah dan perusahaan kawasan industri di Kabupaten/ Kota di SIIINas	29	72,50
				Total populasi perusahaan industri kecil, menengah dan perusahaan kawasan industri di kabupaten	40	
8.	TRANSMIGRASI	501	Jumlah kawasan transmigrasi yang difasilitasi penetapannya		0	0,00



NO.	FOKUS	NO.	INDIKATOR KINERJA KUNCI KELUARAN	RUMUS	ISIAN ELEMEN DATA LPPD	CAPAIAN KINERJA
		502	Jumlah satuan Pemukiman transmigrasi yang difasilitasi pembangunannya		0	0,00
		503	Jumlah satuan pemukiman yang dibina		0	0,00

Sumber : Bagian Tata Pemerintahan dan Kerjasama Setda Kab. Lebak.

2.2.2. INDIKATOR KINERJA KUNCI HASIL (OUTCOME)

Tabel 2.3

Capaian Indikator Kinerja Kunci Hasil Kab. Lebak

NO.	FOKUS	NO.	INDIKATOR KINERJA KUNCI HASIL	RUMUS	ISIAN ELEMEN DATA LPPD	CAPAIAN KINERJA		
A. URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB PELAYANAN DASAR								
1.	PENDIDIKAN	1	Tingkat partisipasi warga negara usia 5-6 tahun yang berpartisipasi dalam PAUD	Jumlah anak usia 5-6 tahun yang sudah tamat atau sedang belajar di satuan PAUD	21.631	39,36		
				Jumlah anak usia 5-6 tahun pada provinsi bersangkutan	54.959			
		2	Tingkat partisipasi warga negara usia 7-12 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan dasar	Jumlah anak usia 7-12 tahun yang sedang belajar di sekolah dasar	157.997	97,69		
				Jumlah anak usia 7-12 tahun pada provinsi bersangkutan	161.730			
		3	Tingkat partisipasi warga negara usia 13-15 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan menengah pertama	Jumlah anak usia 13-15 tahun yang sedang belajar di sekolah menengah pertama	71.106	89,19		
				Jumlah anak usia 13-15 tahun pada provinsi yang bersangkutan	79.723			
		4	Tingkat partisipasi warga negara usia 7-18 tahun yang belum menyelesaikan pendidikan dasar dan menengah yang berpartisipasi dalam pendidikan kesetaraan	Jumlah anak usia 7-18 tahun yang belum menyelesaikan pendidikan dasar dan menengah yang sudah tamat/ sedang belajar di pendidikan kesetaraan	1.866	0,81		
				Jumlah anak usia 7-18 tahun yang belum menyelesaikan pendidikan dasar dan menengah pada provinsi yang bersangkutan	230.969			
		2.	KESEHATAN	5	Rasio Daya Tampung Rumah Sakit Rujukan	Jumlah daya tampung rumah sakit rujukan di kabupaten/kota	1.041	0,72
						Jumlah penduduk di kabupaten/kota	1.441.291	
6	Persentase RS Rujukan Tingkat kabupaten/kota yang terakreditasi			Jumlah RS rujukan yang terakreditasi	4	100,00		
				Jumlah RS di kabupaten/kota	4			
7	Persentase ibu hamil mendapatkan pelayanan kesehatan ibu hamil			Jumlah ibu hamil yang mendapatkan pelayanan kesehatan	22.449	91,82		
				Jumlah ibu hamil di kabupaten/kota	24.450			
8	Persentase ibu bersalin mendapatkan pelayanan persalinan			Jumlah ibu bersalin yang mendapatkan pelayanan persalinan	21.136	86,09		
				Jumlah ibu bersalin di kabupaten/kota	24.550			
9	Persentase bayi baru lahir mendapatkan pelayanan kesehatan bayi baru lahir			Jumlah bayi baru lahir yang mendapatkan layanan kesehatan sesuai standar	22.493	99,29		
				Jumlah bayi baru lahir di kabupaten/kota	22.654			
10	Cakupan pelayanan kesehatan balita sesuai standar	Jumlah balita yang mendapatkan layanan kesehatan sesuai standar	112.027	95,91				
		Jumlah balita di kabupaten/kota	116.809					



NO.	FOKUS	NO.	INDIKATOR KINERJA KUNCI HASIL	RUMUS	ISIAN ELEMEN DATA LPPD	CAPAIAN KINERJA		
		11	Persentase anak usia pendidikan dasar yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	Jumlah anak usia pendidikan dasar yang mendapatkan layanan kesehatan sesuai standar	85.098	41,89		
				Jumlah anak pendidikan dasar di kabupaten/kota	203.140			
		12	Persentase orang usia 15-29 tahun mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar	Jumlah orang usia 15-29 tahun yang mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar	317.318	39,36		
				Jumlah orang usia 15-29 tahun di kabupaten/kota	806.174			
		13	Persentase warga negara usia 60 tahun ke atas mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar	Jumlah orang usia 60 tahun ke atas yang mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar	68.557	45,17		
				Jumlah warga negara usia 60 tahun ke atas di kabupaten/kota	151.764			
		14	Persentase penderita hipertensi yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	Jumlah penderita hipertensi yang mendapatkan layanan kesehatan sesuai standar	72.407	31,63		
				Jumlah penderita hipertensi di kabupaten/kota	228.883			
		15	Persentase penderita DM yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	Jumlah penderita DM yang mendapatkan layanan kesehatan sesuai standar	14.264	60,26		
				Jumlah penderita DM di kabupaten/kota	23.671			
		16	Persentase ODGJ berat yang mendapatkan pelayanan kesehatan jiwa sesuai standar	Jumlah penderita ODGJ yang mendapatkan layanan kesehatan sesuai standar	2.084	50,22		
				Jumlah penderita ODGJ di kabupaten/kota	4.150			
		17	Persentase orang terduga TBC mendapatkan pelayanan TBC sesuai standar	Jumlah penderita TBC yang mendapatkan layanan kesehatan sesuai standar	2.977	65,50		
				Jumlah penderita TBC di kabupaten/kota	4.545			
		18	Persentase orang dengan resiko terinfeksi HIV mendapatkan pelayanan deteksi dini HIV sesuai standar	Jumlah orang dengan resiko terinfeksi HIV yang mendapatkan pelayanan deteksi dini HIV sesuai standar	16.161	65,29		
				Jumlah orang dengan resiko terinfeksi HIV di kabupaten/kota	24.751			
		3.	PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	19	Rasio luas kawasan permukiman rawan banjir yang terlindungi oleh infrastruktur pengendalian banjir di WS Kewenangan kabupaten/kota	Luas kawasan permukiman rawan banjir yang terlindungi oleh infrastruktur pengendalian banjir di WS Kewenangan kabupaten/kota (ha)	1	100,00
						Luas kawasan permukiman rawan banjir di WS kewenangan kabupaten/kota (ha)	1	
20	Rasio luas kawasan permukiman sepanjang pantai rawan abrasi, erosi, dan akresi yang terlindungi oleh infrastruktur pengaman pantai di WS Kewenangan kabupaten/kota			Luas kawasan permukiman rawan abrasi yang terlindungi oleh infrastruktur pengendalian pengaman pantai di WS Kewenangan kabupaten/kota (ha)	1	100,00		
				Luas kawasan permukiman sepanjang pantai rawan abrasi di WS kewenangan kabupaten/kota (ha)	1			
21	Rasio luas daerah irigasi kewenangan kabupaten/kota yang dilayani oleh jaringan irigasi			Luas irigasi kewenangan kabupaten/kota yang dilayani oleh jaringan yang dibangun (ha) ditingkatkan (ha) dioperasikan dan pelihara (ha)	49.264	50,77		
				luas daerah irigrasi kewenangan kabupaten kota	97.041			



NO.	FOKUS	NO.	INDIKATOR KINERJA KUNCI HASIL	RUMUS	ISIAN ELEMEN DATA LPPD	CAPAIAN KINERJA
		22	Persentase jumlah rumah tangga yang mendapatkan akses terhadap air minum melalui SPAM jaringan perpipaan dan bukan jaringan perpipaan terlindungi terhadap rumah tangga di seluruh kabupaten/kota	jumlah kumulatif masyarakat yang rumah tangga yang mendapatkan akses terhadap air minum melalui SPAM jaringan perpipaan dan bukan jaringan perpipaan terlindungi di dalam sebuah kabupaten/kota Jumlah total proyeksi rumah tangga di seluruh kabupaten/kota tersebut	187.379 445.744	42,04
		23	Persentase jumlah rumah tangga yang memperoleh layanan pengolahan air limbah domestik	jumlah rumah yang memiliki akses pengolahan berupa cubluk + jumlah rumah yang lumpur tinjanya di olah di PLT + jumlah rumah yang memiliki sambungan rumah dan air limbahnya diolah di IPALD Jumlah rumah di kabupaten/kota	187.112 445.744	41,98
		24	Rasio kepatuhan IMB kabupaten/ kota	Jumlah pemanfaatan IMB yang sesuai peruntukannya Jumlah IMB yang berlaku	765 765	100,00
		25	Tingkat Kemantapan Jalan kabupaten/kota	Panjang jalan kewenangan provinsi yang mantap Panjang jalan keseluruhan di wilayah kabupaten/kota	527,27 773,93	68,13
		26	Rasio tenaga operator/teknisi/ analisis yang memiliki sertifikat kompetensi	Jumlah tenaga konstruksi yang terlatih di wilayah kab kota yang dibuktikan dengan sertifikat pelatihan operator dan teknis/ analis Jumlah kebutuhan tenaga operator dan teknis/analisis di wilayah kabupaten/kota	721 4.588	15,71
		27	Rasio proyek yang menjadi kewenangan pengawasannya tanpa kecelakaan konstruksi	Jumlah proyek yang menjadi kewenangan pengawasannya tanpa kecelakaan konstruksi jumlah total proyek yang menjadi kewenangan pengawasannya	302 302	100,00
4.	PERUMAHAN	28	Penyediaan dan rehabilitasi rumah layak huni bagi korban bencana kabupaten/kota	jumlah unit rumah korban bencana yang ditangani pada tahun 2021 jumlah total rencana unit rumah korban bencana yang ditangani pada tahun 2021	4 992	0,40
		29	Fasilitasi penyediaan rumah layak huni bagi masyarakat terdampak relokasi program pemerintah kabupaten/kota	Rumah tangga penerima fasilitas penggantian hak atas penguasaan tanah dan atau bangunan+rumah tangga penerima subsidi uang sewa+rumah tangga penerima penyediaan rumah layak huni Jumlah total rumah tangga terkena relokasi program pemerintah daerah yang memenuhi kriteria penerima layanan	1 1	100,00
		30	Persentase kawasan permukiman kumuh dibawah 10 ha di kab/ kota yang ditangani	Luas kawasan permukiman kumuh dibawah 10 ha yang ditangani (ha) Luas kawasan permukiman kumuh dibawah 10 ha	44,80 130,05	34,45
		31	Berkurangnya jumlah unit RTLH (Rumah Tidak Layak Huni)	Jumlah unit rumah tidak layak huni Jumlah total unit rumah kabupaten/kota	- 341.603	0,00
		32	Jumlah perumahan yang sudah dilengkapi PSU (Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum)	Jumlah unit perumahan yang sedang dibangun terfasilitasi PSU Jumlah unit perumahan kabupaten/kota	10 86	11,63



NO.	FOKUS	NO.	INDIKATOR KINERJA KUNCI HASIL	RUMUS	ISIAN ELEMEN DATA LPPD	CAPAIAN KINERJA
5.	TRANTIBUMLINMAS	33	Persentase Gangguan Trantibum yang dapat diselesaikan	Jumlah pengaduan yang ditangani	65	100,00
				Jumlah pengaduan pelanggaran yang masuk	65	
		34	Persentase Perda dan Perkada yang ditegakkan	Jumlah Perda/Perkada yang memuat sanksi yang ditegakkan	9	64,29
				Jumlah keseluruhan Perda dan Perkada yang memuat sanksi	14	
		35	Jumlah warga negara yang memperoleh layanan informasi rawan bencana	Jumlah warga negara yang memperoleh layanan informasi rawan bencana	61.000	61000,00
		36	Jumlah warga negara yang memperoleh layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana	Jumlah warga negara yang memperoleh layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana	60	60,00
		37	Jumlah warga negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana	Jumlah warga negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana	4.440	4440,00
		38	Persentase pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran	Jumlah layanan pemadaman, penyelamatan dan evakuasi korban terdampak kebakaran di kabupaten kota dalam tingkat waktu tanggap oleh Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan atau Perangkat daerah + Jumlah layanan pemadaman di kab/kota dalam tingkat waktu tanggap oleh relawan kebakaran yang dibentuk dan atau di bawah pembinaan Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan atau Perangkat Daerah	41	68,33
				Jumlah kejadian kebakaran di kabupaten/kota	60	
		39	Waktu tanggap (response time) penanganan kebakaran	Rata-rata waktu tanggap, dihitung dari pelaporan, penyiapan tim dan peralatan, jarak tempuh dan kesiapan pemadaman kebakaran	20	20,00
6.	SOSIAL	40	Persentase penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gelandangan pengemis yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di luar panti (indikator SPM)	Jumlah penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gelandangan pengemis yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di luar panti	15	1,29
				Populasi penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gelandangan pengemis	1.162	
		41	Persentase korban bencana alam dan sosial yang terpenuhi kebutuhan dasarnya pada saat dan setelah tanggap darurat bencana daerah kabupaten/kota	Jumlah korban bencana alam dan sosial yang terpenuhi kebutuhan dasarnya dalam satu tahun anggaran	348	71,60
				populasi korban bencana alam dan sosial yang membutuhkan perlindungan dan jaminan sosial pada saat dan setelah tanggap darurat bencana daerah kabupaten kota	486	
B. URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB NON PELAYANAN DASAR						
1.	KETENAGAKERJAAN	42	Persentase kegiatan yang dilaksanakan yang mengacu ke rencana tenaga kerja	Jumlah kegiatan keseluruhan yang dilaksanakan yang mengacu ke RTKD	2	100,00
				Jumlah kegiatan keseluruhan yang dilaksanakan di kabupaten/kota	2	
		43	Persentase Tenaga Kerja Bersertifikat Kompetensi	Jumlah tenaga kerja yang memiliki sertifikat kompetensi	8.970	58,44



NO.	FOKUS	NO.	INDIKATOR KINERJA KUNCI HASIL	RUMUS	ISIAN ELEMEN DATA LPPD	CAPAIAN KINERJA
				Jumlah tenaga kerja keseluruhan	15.348	
		44	Tingkat Produktivitas Tenaga Kerja	PDRB tahun berjalan (atas dasar harga konstan) Jumlah tenaga kerja	20.646.560 15.348	134522,80
		45	Persentase Perusahaan yang menerapkan tata kelola kerja yang layak (PP/PKB, LKS Bipartit, Struktur Skala Upah, dan terdaftar peserta BPJS Ketenagakerjaan)	Jumlah perusahaan yang menerapkan tata kelola kerja yang layak Jumlah perusahaan	107 154	69,48
		46	Persentase Tenaga Kerja Yang Ditempatkan (Dalam Dan Luar Negeri) Melalui Mekanisme Layanan Antar Kerja Dalam Wilayah Kabupaten/Kota	Jumlah pencari kerja yang ditempatkan Jumlah pencari kerja yang terdaftar	2.888 9.970	28,97
2.	PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	47	Persentase ARG pada belanja langsung APBD	Jumlah ARG pada belanja langsung APBD	1	0,00
				Jumlah seluruh belanja langsung di APBD	2.643.466.844.441	
		48	Persentase anak korban kekerasan yang ditangani instansi terkait Kabupaten/Kota	Jumlah anak (penduduk usia kurang 18 tahun) korban kekerasan yang ditangani instansi tingkat kabupaten/kota yang didampingi	70	0,02
				Jumlah anak (penduduk usia kurang 18 tahun)	448.929	
49	Rasio kekerasan terhadap perempuan, termasuk TPPO (per 100.000 penduduk perempuan)	Jumlah perempuan yang mengalami kekerasan	14	2,00		
		Jumlah penduduk perempuan	701.378			
3.	PANGAN	50	Persentase ketersediaan pangan (Tersedianya cadangan beras/jagung sesuai kebutuhan)	Jumlah cadangan pangan	480.226,70	0,28
				Jumlah kebutuhan pangan	170.943.296	
4.	PERTANAHAN	51	Persentase pemanfaatan tanah yang sesuai dengan peruntukkan tanahnya diatas izin lokasi dibandingkan dengan luas izin lokasi yang diterbitkan	Luas tanah sesuai peruntukkan izin lokasi	2.138.291	100,00
				Seluruh luas tanah sesuai peruntukkan izin lokasi	2.138.291	
		52	Persentase Penetapan Tanah Untuk Pembangunan Fasilitas Umum	Jumlah penetapan tanah untuk pembangunan fasilitas umum	4	80,00
				Jumlah kebutuhan tanah untuk pembangunan fasilitas umum	5	
		53	Tersedianya Lokasi Pembangunan Dalam Rangka Penanaman Modal	Luas tanah yang telah dimanfaatkan sesuai dengan peruntukannya di atas izin lokasi	2.138.291	100,00
				Luas izin lokasi yang diterbitkan	2.138.291	
		54	Tersedianya Tanah Obyek Landreform (TOL) yang siap didistribusikan yang berasal dari Tanah Kelebihan Maksimum dan Tanah Absentee	Jumlah penerima tanah obyek landreform dengan luasan yang diterima lebih besar sama dengan 0.5 ha	2.475	100,00
				Jumlah pemerima tanah obyek landreform	2.475	
		55	Tersedianya tanah untuk masyarakat	Luas tanah yang telah dimanfaatkan berdasarkan izin membuka tanah	2.138.291	100,00
				luas izin membuka tanah yang diterbitkan	2.138.291	
		56	Penanganan sengketa tanah garapan yang dilakukan melalui mediasi	Jumlah sengketa tanah garapan yang ditangani	1	100,00
				Jumlah pengaduan sengketa tana garapan	1	
5.	LINGKUNGAN HIDUP	57	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) Kabupaten/Kota	Indeks Kualitas Air	57,89	57,25
				Indeks Kualitas Udara	79,94	
				Indeks Tutupan Hutan	39,76	
		58		Total volume sampah yang dapat ditangani	74.372,49	36,80



NO.	FOKUS	NO.	INDIKATOR KINERJA KUNCI HASIL	RUMUS	ISIAN ELEMEN DATA LPPD	CAPAIAN KINERJA
			Terlaksananya Pengelolaan Sampah di Wilayah kabupaten/kota	Total volume timbunan sampah kabupaten/kota	202.099,04	
		59	Ketaatan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan terhadap izin lingkungan, izin PPLH dan PUU LH yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah kabupaten/kota	Jumlah penanggung jawab usaha dan atau kegiatan yang melanggar terhadap izin lingkungan dan izin PPLH yang diterbitkan pemerintah kabupaten/kota	36	33,96
				usaha dan atau kegiatan dilakukan pemeriksaan	106	
6.	KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL	60	Perekaman KTP Elektronik	Jumlah penduduk wajib KTP-el yang telah melakukan perekaman	1.000.249	97,58
				Jumlah penduduk wajib KTP-el	1.025.083	
		61	Persentase anak usia 01-7 tahun kurang 1 (satu) hari yang memiliki KIA	Jumlah anak usia 0-17 tahun kurang 1 (satu) hari yang sudah memiliki KIA	136.348	30,22
				Jumlah anak usia 0-17 tahun	451.125	
		62	Kepemilikan akta kelahiran	Jumlah anak usia 0-18 tahun yang sudah memiliki akta lahir	438.553	93,11
				Jumlah anak usia 0-18 tahun	470.985	
63	Jumlah OPD yang telah memanfaatkan data kependudukan berdasarkan perjanjian kerja sama	Jumlah OPD yang telah memanfaatkan data kependudukan berdasarkan perjanjian kerja sama	5	8,20		
		Jumlah OPD	61			
7.	PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	64	Persentase pengentasan desa tertinggal	Jumlah desa tertinggal yang memenuhi kriteria desa berkembang per tahun berdasarkan Indeks Desa Membangun per tahun	198	110,00
				Jumlah desa tertinggal (per awal tahun-n)	180	
		65	Persentase Peningkatan Status Desa Mandiri	Jumlah desa berkembang yang memenuhi kriteria desa mandiri per tahun berdasarkan Indeks Desa Membangun per tahun	21	16,15
				Jumlah desa berkembang (per awal tahun-n)	130	
8.	PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KB	66	TFR (Angka Kelahiran Total)	ASFR = Angka Kelahiran Menurut Kelompok Umur	2,60	2,60
				Jumlah peserta KB aktif modern	72,22	
		67	Persentase pemakaian kontrasepsi Modern (Modern Contraceptive Prevalence Rate/mCPR)	Jumlah pasangan usia subur	316.301	23,13
				Jumlah PUS yang ingin ber-KB tetapi tidak terlayani	73.160	
68	Persentase kebutuhan ber-KB yang tidak terpenuhi (unmet need)	Jumlah Pasangan Usia Subur	316.301			
9.	PERHUBUNGAN	69	Rasio konektivitas Kabupaten/Kota	bobot angkutan jalan (IK1)	1	1,00
				bobot angkutan sungai, danau, dan penyeberangan (IK2)	-	
		70	V/C Ratio di Jalan Kabupaten/Kota	V/C Ratio di Jalan Kabupaten/Kota	0,43	0,43
10.	KOMINFO	71	Persentase Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang terhubung dengan akses internet yang disediakan oleh Dinas Kominfo	Jumlah OPD yang terhubung dengan akses internet yang disediakan oleh dinas kominfo	-	0,00
				Jumlah OPD	61	
		72	Persentase Layanan Publik yang diselenggarakan secara online dan terintegrasi	Jumlah layanan publik diselenggarakan secara online dan terintegrasi	61	100,00
				Jumlah layanan publik	61	
		73	Persentase Masyarakat Yang Menjadi Sasaran Penyebaran Informasi Publik, Mengetahui Kebijakan Dan Program Prioritas Pemerintah Dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah masyarakat yang menjadi sasaran penyebaran informasi publik, mengetahui kebijakan dan program prioritas pemerintah dan pemerintah kabupaten/kota	856.801	59,45
Jumlah penduduk	1.441.291					



NO.	FOKUS	NO.	INDIKATOR KINERJA KUNCI HASIL	RUMUS	ISIAN ELEMEN DATA LPPD	CAPAIAN KINERJA
11.	KOPERASI DAN UKM	74	Meningkatnya Koperasi yang berkualitas	Jumlah koperasi yang meningkat kualitasnya berdasarkan RAT, volume usaha dan aset	86	10,07
				Jumlah seluruh koperasi	854	
		75	Meningkatnya Usaha Mikro yang menjadi wirausaha	Jumlah usaha mikro yang menjadi wirausaha	58.624	49,99
Jumlah usaha mikro keseluruhan	117.269					
12.	PENANAMAN MODAL	76	Persentase peningkatan investasi di Kabupaten /Kota	Jumlah investasi PMDN dan PMA tahun 2021	18.966.601.214.343	8,75
				Jumlah investasi PMDN dan PMA tahun 2020	17.440.497.044.343	
13.	KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA	77	Tingkat partisipasi pemuda dalam kegiatan ekonomi mandiri	Jumlah pemuda (16-30 tahun) yang berwirausaha di kabupaten/kota	368	0,10
				Jumlah pemuda (umur 16-30 tahun) di kabupaten/kota	358.514	
		78	Tingkat partisipasi pemuda dalam organisasi kepemudaan dan organisasi sosial kemasyarakatan	Jumlah pemuda (16-30 tahun) yang menjadi anggota aktif pada organisasi kepemudaan dan organisasi sosial kemasyarakatan di kabupaten/kota	789	0,22
				Jumlah pemuda (umur 16-30 tahun) di kabupaten/kota	358.514	
		79	Peningkatan Prestasi Olahraga	Jumlah perolehan medali pada event olahraga nasional dan internasional	79	79,00
14.	STATISTIK	80	Persentase Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang menggunakan data statistik dalam menyusun perencanaan pembangunan daerah	Jumlah OPD yang menggunakan data statistik dalam menyusun perencanaan pembangunan daerah	61	100,00
				Jumlah OPD	61	
		81	Persentase OPD yang menggunakan data statistik dalam melakukan evaluasi pembangunan daerah	Jumlah OPD yang menggunakan data statistik dalam melakukan evaluasi pembangunan daerah	61	100,00
				Jumlah OPD	61	
15.	PERSANDIAN	82	Tingkat keamanan informasi pemerintah	Jumlah nilai per area keamanan informasi	235	100,00
				Jumlah area penilaian	235	
16.	BUDAYA	83	Terlestarikannya Cagar Budaya	Jumlah cagar budaya yang dilestarikan	62	100,00
				Jumlah cagar budaya yang terdata	62	
17.	PERPUSTAKAAN	84	Nilai tingkat kegemaran membaca masyarakat	Nilai tingkat kegemaran membaca masyarakat yang diukur menggunakan survei/kajian kegemaran membaca masyarakat	59	59,00
		85	Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat	Nilai Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat yang didapatkan dengan metode sensus dengan mengukur sejumlah unsur pembangunan literasi masyarakat (UPLM) dan aspek masyarakat (AM)	9	9,00
18.	KEARSIPAN	86	Tingkat ketersediaan arsip sebagai bahan akuntabilitas kinerja, alat bukti yang sah dan pertanggungjawaban nasional	Persentase arsip aktif yang telah dibuatkan daftar arsip	60	71,25
				Persentase arsip inaktif yang telah dibuatkan daftar arsip	70	
				Persentase arsip statis yang telah dibuatkan sarana bantu temu balik	75	
				Persentase jumlah arsip yang dimasukkan dalam SIKN melalui JIKN	80	
		87	Tingkat keberadaan dan keutuhan arsip sebagai bahan pertanggungjawaban setiap aspek kehidupan berbangsa dan bernegara untuk	Tingkat kesesuaian kegiatan pemusnahan arsip dengan NSPK	85	97,50
Tingkat kesesuaian kegiatan perlindungan dan	100					



NO.	FOKUS	NO.	INDIKATOR KINERJA KUNCI HASIL	RUMUS	ISIAN ELEMEN DATA LPPD	CAPAIAN KINERJA
			kepentingan negara, pemerintahan, pelayanan publik dan kesejahteraan rakyat	penyelamatan arsip dari bencana dengan NSPK		
				Tingkat kesesuaian kegiatan penyelamatan arsip Perangkat Daerah Provinsi yang digabung dan/atau dibubarkan dan pemekaran daerah Kabupaten/Kota dengan NSPK	100	
				Tingkat kesesuaian kegiatan autentifikasi arsip statis dan arsip hasil alih media dengan NSPK	100	
				Tingkat kesesuaian kegiatan pencarian arsip statis dengan NSPK	100	
				Tingkat kesesuaian kegiatan penerbitan izin penggunaan arsip yang bersifat tertutup dengan NSPK	100	
URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN						
1.	KELAUTAN DAN PERIKANAN	88	Jumlah Total Produksi Perikanan (Tangkap dan Budidaya) dari seluruh kabupaten/kota di wilayah provinsi (sumber data: one data KKP)	Jumlah Total Produksi Perikanan (Tangkap dan Budidaya) Kabupaten/Kota	10.196,91	10196,91
2.	PARIWISATA	89	Persentase pertumbuhan jumlah wisatawan mancanegara per kebangsaan	Jumlah wisatawan mancanegara tahun 2021	12	31,58
				Jumlah wisatawan mancanegara tahun 2020	38	
		90	Persentase peningkatan perjalanan wisatawan nusantara yang datang ke Kabupaten/Kota	Jumlah wisatawan nusantara tahun 2021	405.941	196,92
				Jumlah wisatawan nusantara tahun 2020	206.143	
		91	Tingkat Hunian Akomodasi	Jumlah kamar yang terjual	14.401	8,41
				Jumlah kamar yang tersedia	171.185	
92	Kontribusi sektor pariwisata terhadap PDRB harga berlaku	Jumlah Kontribusi sektor pariwisata terhadap PDRB harga berlaku	1.422,89	4,64		
		Total PDRB harga berlaku	30.644,75			
93	Kontribusi sektor pariwisata terhadap PAD	Jumlah Pendapatan dari sektor pariwisata	128.500.000	0,07		
		Jumlah total PAD	171.363.772.029			
3.	PERTANIAN	94	Produktivitas pertanian per hektar per tahun	Produktivitas pertanian per hektar per tahun	6,15	0,01
				Luas Panen	110.265	
		95	Persentase Penurunan Kejadian dan Jumlah Kasus Penyakit Hewan Menular	Jumlah kejadian penyakit kasus tahun 2021	66	122,22
Jumlah kejadian penyakit kasus tahun 2020	54					
4.	ESDM	96	Persentase perusahaan pemanfaatan panas bumi yang memiliki ijin di kabupaten/kota	Jumlah perusahaan pemanfaatan panas bumi yang memiliki ijin	1	100,00
				Jumlah perusahaan pemanfaatan panas bumi	1	
5.	PERDAGANGAN	97	Persentase pelaku usaha yang memperoleh izin sesuai dengan ketentuan (IUPP/SIUP Pusat Perbelanjaan dan IUTM/IUTS/SIUP Toko Swalayan)	Jumlah pelaku usaha yang telah memiliki izin sesuai ketentuan	17	100,00
				Jumlah pelaku usaha di wilayah kabupaten/kota	17	
		98	Persentase kinerja realisasi pupuk	Realisasi pupuk	18.284,20	14,29
				Rencana Definitif Kebutuhan Kelompok (RDKK)	127.987,94	
		99	Persentase alat-alat ukur, takar, timbang dan perlengkapannya (UTTP) bertanda tera sah yang berlaku	Jumlah UTTP bertanda tera yang berlaku pada tahun berjalan	3.475	86,88
				Jumlah potensi UTTP yang wajib ditera dan tera ulang di wilayah kabupaten/kota	4.000	
6.	PERINDUSTRIAN	100		Jumlah Industri kecil dan menengah tahun 2021	16.857	99,75



NO.	FOKUS	NO.	INDIKATOR KINERJA KUNCI HASIL	RUMUS	ISIAN ELEMEN DATA LPPD	CAPAIAN KINERJA
			Pertambahan jumlah industri kecil dan menengah di Kabupaten/Kota	Jumlah Industri kecil dan menengah tahun 2020	16.899	
		101	Persentase pencapaian sasaran pembangunan industri termasuk turunan indikator pembangunan industri dalam RIPIN yang ditetapkan dalam RPIK	Persentase pencapaian sasaran pembangunan industri termasuk turunan indikator pembangunan industri dalam RIPIN yang ditetapkan dalam RPIK	-	0,00
		102	Persentase jumlah hasil pemantauan dan pengawasan dengan jumlah Izin Usaha Industri (IUI) Kecil dan Industri Menengah yang dikeluarkan oleh instansi terkait	Jumlah izin yang dipantau dan dianalisis dalam laporan hasil pemantauan	1	4,00
				Jumlah izin yang dikeluarkan	25	
		103	Persentase jumlah hasil pemantauan dan pengawasan dengan jumlah Izin Perluasan Industri (IPIU) Kecil dan Industri Menengah yang dikeluarkan oleh instansi terkait	Jumlah izin yang dipantau dan dianalisis dalam laporan hasil pemantauan	1	100,00
				Jumlah izin yang dikeluarkan	1	
		104	Persentase jumlah hasil pemantauan dan pengawasan dengan jumlah Izin Usaha Kawasan Industri (IUKI) dan Izin Perluasan Kawasan Industri (IPKI) yang lokasinya di Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah izin yang dipantau dan dianalisis dalam laporan hasil pemantauan	1	100,00
				Jumlah izin yang dikeluarkan	1	
		105	Tersedianya informasi industri secara lengkap dan terkini	Keterkinian informasi industri	267	54,94
				Kelengkapan informasi industri meliputi	486	
7.	TRANSMIGRASI	106	-			

Sumber : Bagian Tata Pemerintahan dan Kerjasama Setda Kab. Lebak.

2.2.3. INDIKATOR KINERJA KUNCI UNTUK FUNGSI PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN

Tabel 2.4
Capaian Indikator Kinerja Kunci Fungsi Penunjang
Urusan Pemerintahan Kab. Lebak

NO.	FOKUS	NO.	INDIKATOR KINERJA KUNCI	RUMUS	ISIAN ELEMEN DATA LPPD	CAPAIAN KINERJA
FUNGSI PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN						
1.	PENUNJANG	1	Rasio Belanja Pegawai Di Luar Guru dan Tenaga Kesehatan	Jumlah belanja pegawai di luar guru dan tenaga kesehatan	817.241.665.916	27,98
				Total belanja APBD	2.920.409.223.229	
		2	Rasio Pendapatan Asli Daerah (PAD)	Jumlah PAD	359.883.118.451	1,24
				Jumlah PDRB Non Migas	29.076.693.660.000	
		3	Mauritas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP)	Tingkat Mauritas SPIP	2	2,00
		4	Peningkatan Kapabilitas Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP)	Tingkat Kualitas APIP	3	3,00
		5	Rasio Belanja Urusan Pemerintahan Umum (dikurangi transfer expenditures)	Total Belanja Urusan Pemerintahan	2.255.207.983.867	6,94
Tranfer expenditures	2.052.499.442.531					
Total belanja APBD	2.920.409.223.229					
6	Opini Laporan Keuangan	Opini BPK atas Laporan Keuangan Tahun Anggaran 2021	WTP	WTP		
7	Persentase jumlah total proyek konstruksi yang dibawa ke tahun berikutnya yang	Jumlah kontrak infrastruktur dengan nilai besar yang perlu pembangunan dalam 3 kuartal	21	3,30		

**BAB II****LPPD KABUPATEN LEBAK TAHUN ANGGARAN 2021**

NO.	FOKUS	NO.	INDIKATOR KINERJA KUNCI	RUMUS	ISIAN ELEMEN DATA LPPD	CAPAIAN KINERJA
			ditandatangani pada kuartal pertama	yang ditandatangani pada kuartal pertama tahun 2021		
				Jumlah kontrak keseluruhan tahun 2021	636	
		8	Persentase Jumlah Pengadaan yang Dilakukan Dengan Metode Kompetitif	Jumlah pengadaan yang dilakukan dengan metode kompetitif	636	13,28
				Jumlah keseluruhan pengadaan baik yang dilakukan dengan metode kompetitif maupun tanpa metode kompetitif	4.790	
		9	Rasio nilai belanja yang dilakukan melalui pengadaan	Jumlah nilai belanja langsung yang melalui pengadaan	415.292.898.329,11	15,71
				Total belanja langsung	2.643.466.844.441	
		10	Rasio Pegawai Pendidikan Tinggi dan Menengah/Dasar (PNS tidak termasuk guru dan tenaga kesehatan)	Jumlah pegawai menurut pendidikan Perguruan Tinggi ke atas	7.587	84,76
				Total seluruh PNS	8.951	
		11	Rasio pegawai Fungsional (PNS tidak termasuk guru dan tenaga kesehatan)	Jumlah pegawai PNS fungsional (di luar guru dan tenaga kesehatan)	106	3,31
				Seluruh jumlah pegawai pemerintah (PNS tidak termasuk guru dan tenaga kesehatan)	3.201	
		12	Rasio Jabatan Fungsional bersertifikat Kompetensi (PNS tidak termasuk guru dan tenaga kesehatan)	Jumlah pegawai fungsional yang memiliki sertifikat kompetensi	59	55,66
				Seluruh jumlah pegawai fungsional (PNS tidak termasuk guru dan tenaga kesehatan)	106	
		13	Deviasi realisasi belanja terhadap belanja total dalam APBD	Nilai absolut dari total belanja dalam realisasi	2.643.466.844.441	0,96
				Total belanja APBD dikurangi satu	2.747.614.915.401,40	
		14	Deviasi realisasi PAD terhadap anggaran PAD dalam APBD	Nilai absolut dari total PAD dalam realisasi	385.187.891.432	113,64
				Total PAD dalam APBD dikurangi satu	338.941.257.475	
		15	Assets Management	Total Assets Management	YA	YA
				1. Apakah ada daftar asset tetap? (Ya/Tidak)	YA	
				2. Apakah ada manual untuk menyusun daftar asset tetap? (Ya/Tidak)	YA	
				3. Apakah ada proses inventarisasi asset tahunan? (Ya/Tidak)	YA	
				4. Apakah nilai asset tercantum dalam laporan anggaran? (Ya/Tidak)	YA	
		16	Rasio Anggaran Sisa Terhadap Total Belanja Dalam APBD Tahun Sebelumnya	Nilai realisasi SiLPA	288.086.981.713,05	0,10
				Total belanja anggaran tahun sebelumnya	2.747.614.915.401,40	
		17	Informasi tentang sumber daya yang tersedia untuk pelayanan	Realisasi belanja untuk unit pelayanan dapat diakses di website pemda	2.222.188.559.323	89,00
				Belanja anggaran untuk unit pelayanan dapat diakses di website pemda	2.496.881.155.109	
		18	Akses publik terhadap informasi keuangan daerah	Jumlah dokumen yang dipublikasikan di website pemda	3	100,00
				Total jumlah dokumen yang telah dirinci	3	

Sumber : Bagian Tata Pemerintahan dan Kerja Sama Setda Kab. Lebak.



2.3. Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah

Akuntabilitas kinerja adalah bentuk transparansi capaian keberhasilan kinerja Pemerintah Kabupaten Lebak kepada masyarakat selama satu tahun periode. Manfaat pengukuran kinerja antara lain untuk memberikan gambaran kepada stakeholder dan masyarakat tentang pelaksanaan misi Bupati dalam rangka mewujudkan tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan.

Akuntabilitas kinerja daerah merupakan representasi dari keberhasilan Pemerintah Kabupaten Lebak dalam mencapai 12 sasaran strategis yang diukur dalam 20 Indikator Kinerja Utama (IKU sampai dengan akhir tahun 2021). Nilai Akuntabilitas kinerja diperoleh dengan membandingkan antara realisasi dengan target sasaran strategis yang tercapai.

Tahun 2021 merupakan tahun ketiga pelaksanaan RPJMD Pemerintah Kabupaten Lebak tahun 2019-2024. Laporan ini memuat hasil capaian kinerja yang diukur dalam 20 Indikator Kinerja Utama (IKU). Keberhasilan Program yang dicapai terangkum dalam 12 sasaran strategis.

A. Target Kinerja Dalam Perjanjian Kinerja

Perjanjian kinerja menjabarkan target yang akan menunjukkan nilai kuantitatif yang melekat pada setiap indikator kinerja sasaran strategis dan merupakan perbandingan bagi proses pengukuran keberhasilan satuan kerja perangkat daerah yang dilakukan setiap akhir periode pelaksanaan. Perjanjian kinerja Tahun 2021 disusun setelah APBD Kabupaten Lebak Tahun 2021 disahkan dan setelah mendapatkan pendampingan dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi.

Perjanjian Kinerja Pemerintah Kabupaten Lebak Tahun 2021 dirinci pada tabel 2.3 sebagai berikut :

Tabel 2.5
Perjanjian Kinerja Tahun 2021

NO	MISI/TUJUAN/SASARAN	INDIKATOR TUJUAN/ INDIKATOR SASARAN	SATUAN	TARGET 2021
1	Meningkatnya aksesibilitas dan kualitas layanan pendidikan yang terjangkau dan merata	Indeks Pendidikan	Poin	0,55
2	Meningkatnya aksesibilitas dan kualitas layanan kesehatan yang terjangkau dan merata	Indeks kesehatan	Persen	0,709
3	Menurunnya penduduk miskin	Tingkat Kemiskinan	Persen	9,5
4	Terkendalinya Pertumbuhan Penduduk	Laju Pertumbuhan Penduduk	Persen	0,38
5	Meningkatnya peran kepemudaan dan olahraga	Indeks Pembangunan Kepemudaan	Poin	46,65
6	Meningkatnya pemberdayaan perempuan	Indeks Pembangunan Gender	Poin	78,89
7	Meningkatnya Pertumbuhan Ekonomi yang Berkualitas	PDRB Perkapita	Rupiah	23000000
		LPE	Persen	5
		Daya Beli	Rupiah	8000000
		Indeks Williamson	Persen	0,40 - 0,7
		Tingkat Pengangguran Terbuka	Persen	9,3



NO	MISI/TUJUAN/SASARAN	INDIKATOR TUJUAN/ INDIKATOR SASARAN	SATUAN	TARGET 2021
		Kontribusi Sektor Pariwisata pada PDRB	Persen	5
8	Meningkatnya infrastruktur publik untuk mendukung kelancaran distribusi barang dan orang serta menjamin ketersediaan air untuk irigasi	Indeks Infrastruktur Publik	Persen	70,61
9	Meningkatnya infrastruktur dasar untuk memenuhi kebutuhan dasar masyarakat yang layak	Indeks Infrastruktur Dasar	Persen	76,48
10	Menurunnya angka kecelakaan lalulintas	Persentase Penurunan Angka Kecelakaan Lalulintas	Persen	4,38
11	Terwujudnya lingkungan hidup yang berkelanjutan	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)	Poin	67,16
12	Meningkatnya kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah dan kualitas pelayanan publik (sasaran 10)	Nilai SAKIP	Poin	82
		Opini BPK	Poin	WTP
		Indeks Kapasitas Fiskal Daerah	Poin	2,16
		IKM	Poin	86

Sumber : PK Bupati tahun 2021

B. Pengukuran Capaian Kinerja Dibandingkan Dengan Target Perjanjian Kinerja

Pengukuran capaian kinerja Pemerintah Kabupaten Lebak Tahun 2021 dilakukan dengan cara membandingkan antara target (rencana) dan realisasi Indikator Kinerja Utama (IKU) pada masing-masing persepektif. Adapun penjelasan capaian setiap sasaran strategis adalah sebagai berikut:

Tabel 2.6
Perbandingan Capaian Kinerja Dengan Target Perjanjian Kinerja

No	SASARAN	Indikator Kinerja Utama (IKU)	Target 2021	Realisasi 2021	Capaian 2021 (%)
1	Meningkatnya aksesibilitas dan kualitas layanan pendidikan yang terjangkau dan merata	Indeks Pendidikan	0,55	0,55	100,00
2	Meningkatnya aksesibilitas dan kualitas layanan kesehatan yang terjangkau dan merata	Indeks kesehatan	0,709	0,728	102,68
3	Menurunnya penduduk miskin	Tingkat Kemiskinan	9,5	10,29	92,32
4	Terkendalinya Pertumbuhan Penduduk	Laju Pertumbuhan Penduduk	0,38	1,88	20,21
5	Meningkatnya peran kepemudaan dan olahraga*)	Indeks Pembangunan Kepemudaan	46,65		
6	Meningkatnya pemberdayaan perempuan	Indeks Pembangunan Gender	78,89	79	100,14
7	Meningkatnya Pertumbuhan Ekonomi yang Berkualitas*)	PDRB Perkapita	23.000.000	23.000.000	100,00
		LPE	5	2	40,00
		Daya Beli	8.000.000	8.724.000	109,05
		Indeks Williamson	0,40 - 0,7		



No	SASARAN	Indikator Kinerja Utama (IKU)	Target 2021	Realisasi 2021	Capaian 2021 (%)
		Tingkat Pengangguran Terbuka	9,3	7,86	118,32
		Kontribusi Sektor Pariwisata pada PDRB	5	5	100,00
8	Meningkatnya infrastruktur publik untuk mendukung kelancaran distribusi barang dan orang serta menjamin ketersediaan air untuk irigasi	Indeks Infrastruktur Publik	70,61	69,61	98,58
9	Meningkatnya infrastruktur dasar untuk memenuhi kebutuhan dasar masyarakat yang layak	Indeks Infrastruktur Dasar	76,48	77,35	101,13
10	Menurunnya angka kecelakaan lalulintas	Persentase Penurunan Angka Kecelakaan Lalulintas	4,38	4,38	100
11	Terwujudnya lingkungan hidup yang berkelanjutan	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)	67,16	62,85	93,58
12	Meningkatnya kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah dan pelayanan publik**)	Nilai Sakip	82		
		Opini BPK	WTP	WTP	100,00
		Indeks Kapasitas Fiskal Daerah	2,16	1,494	69,17
		IKM	86	78,65	91,45

Sumber : Perbup P-RKPD tahun 2021 dan dari olahan data Bapelitbangda

C. Pengukuran Capaian Kinerja Dibandingkan Dengan Tahun Sebelumnya

Pengukuran target kinerja dari sasaran strategis yang telah ditetapkan akan dilakukan dengan membandingkan antara target kinerja dengan realisasi kinerja. Kriteria penilaian yang diuraikan sebelumnya selanjutnya dipergunakan untuk mengukur kinerja Pemerintah Kabupaten Lebak untuk tahun 2021. Pencapaian Kinerja secara rinci ditunjukkan sebagai berikut :

Tabel 2.7
Capaian Kinerja Dibandingkan Dengan Tahun Sebelumnya

1. Meningkatnya Aksesibilitas dan Kualitas Layanan Pendidikan yang Terjangkau dan Merata								
No	Indikator	Satuan	Tahun 2020		Capaian Kinerja Th. 2020 (%)	Tahun 2021		Capaian Kinerja Th. 2021 (%)
			Target	Realisasi		Target	Realisasi	
1	indeks pendidikan	Poin	0,546	0,546	100,00	0,55	0,55	100
Rata-Rata Pencapaian Kinerja (%)					100,00			100
2. Meningkatnya Aksesibilitas dan Kualitas Layanan Kesehatan yang Terjangkau dan Merata								
No	Indikator	Satuan	Tahun 2020		Capaian Kinerja Th. 2020 (%)	Tahun 2021		Capaian Kinerja Th. 2021 (%)
			Target	Realisasi		Target	Realisasi	
1	Indeks kesehatan	Persen	0,705	0,726	102,98	0,709	0,728	102,68
Rata-Rata Pencapaian Kinerja (%)					102,98			102,68
3. Menurunnya Penduduk Miskin								
No	Indikator	Satuan	Tahun 2020			Tahun 2021		



			Target	Realisasi	Capaian Kinerja Th. 2020 (%)	Target	Realisasi	Capaian Kinerja Th. 2021 (%)
1	Tingkat Kemiskinan	Persen	9,5	9,24	102,98	9,5	10,29	92,32
Rata-Rata Pencapaian Kinerja (%)					102,98			92,32
4. Terkendalinya Pertumbuhan Penduduk								
No	Indikator	Satuan	Tahun 2020		Capaian Kinerja Th. 2020 (%)	Tahun 2021		Capaian Kinerja Th. 2021 (%)
			Target	Realisasi		Target	Realisasi	
1	Laju Pertumbuhan Penduduk	Persen	0,45%	1,8%	25,00	0,38	1,88	20,21
Rata-Rata Pencapaian Kinerja (%)					25,00			20,21
5. Meningkatnya Peran Kepemudaan Dan Olahraga								
No	Indikator	Satuan	Tahun 2020		Capaian Kinerja Th. 2020 (%)	Tahun 2021		Capaian Kinerja Th. 2021 (%)
			Target	Realisasi		Target	Realisasi	
1	Indeks Pembangunan Kepemudaan*)	Poin	46,15	46,15	100	46,65		
Rata-Rata Pencapaian Kinerja (%)					100,00			
6. Meningkatnya Pemberdayaan Perempuan								
No	Indikator	Satuan	Tahun 2020		Capaian Kinerja Th. 2020 (%)	Tahun 2021		Capaian Kinerja Th. 2021 (%)
			Target	Realisasi		Target	Realisasi	
1	Indeks Pembangunan Gender	Poin	78,78	79,00	100,28	78,89	79	100,14
Rata-Rata Pencapaian Kinerja (%)					100,28			100,14
7. Meningkatnya Pertumbuhan Ekonomi yang Berkualitas								
No	Indikator	Satuan	Tahun 2020		Capaian Kinerja Th. 2020 (%)	Tahun 2021		Capaian Kinerja Th. 2021 (%)
			Target	Realisasi		Target	Realisasi	
1	PDRB Perkapita	Juta Rupiah	23,00	22,22	96,61	23,00	23,00	100,00
2	LPE	Persen	(-0,2) - 1,5	-0,88	77,70	5	2	40,00
3	Daya Beli	Rupiah	8.000.000	8.690.000	108,63	8.000.000	8.724.000	109,05
4	Indeks Wiliamson*)	Poin	<0,40-0,7	0,62	100,00	0,40 - 0,7		
5	Tingkat Pengangguran Terbuka	Persen	9,3	8,73	106,53	9,3	7,86	118,32
6	Kontribusi Sektor Pariwisata pada PDRB	Persen	5,00	5,00	100,00	5	5	100
Rata-Rata Pencapaian Kinerja (%)					96,13			93,47
8. Meningkatnya Infrastruktur Publik untuk Mendukung Kelancaran Distribusi Barang dan Orang serta Menjamin Ketersediaan Air untuk Irigasi								
No	Indikator	Satuan	Tahun 2020		Capaian Kinerja Th. 2020 (%)	Tahun 2021		Capaian Kinerja Th. 2021 (%)
			Target	Realisasi		Target	Realisasi	
1	Indeks Infrastruktur Publik	Persen	69,88	69,34	99,23	70,61	69,61	98,58
Rata-Rata Pencapaian Kinerja (%)					99,23			98,58
9. Meningkatnya Infrastruktur Dasar untuk Memenuhi Kebutuhan Dasar Masyarakat yang Layak								
No	Indikator	Satuan	Tahun 2020		Capaian Kinerja Th. 2020 (%)	Tahun 2021		Capaian Kinerja Th. 2021 (%)
			Target	Realisasi		Target	Realisasi	
1	Indeks Infrastruktur Dasar	Persen	74,82	74,62	99,73	76,48	77,35	101,13
Rata-Rata Pencapaian Kinerja (%)					99,73			101,13
10. Menurunnya Angka Kecelakaan Lalu Lintas								
No	Indikator	Satuan	Tahun 2020		Capaian Kinerja Th. 2020 (%)	Tahun 2021		Capaian Kinerja Th. 2021 (%)
			Target	Realisasi		Target	Realisasi	



1	Presentase penurunan angka kecelakaan lalulintas	Persen	4,20	4,50	107,14	4,38	4,38	100
Rata-Rata Pencapaian Kinerja (%)					107,14			100
11. Terwujudnya Lingkungan Hidup yang Berkelanjutan								
No	Indikator	Satuan	Tahun 2020		Capaian Kinerja Th. 2020 (%)	Tahun 2021		Capaian Kinerja Th. 2021 (%)
			Target	Realisasi		Target	Realisasi	
1	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)	Poin	66,83	72,26	108,13	67,16	62,85	93,58
Rata-Rata Pencapaian Kinerja (%)					108,13			93,58
12. Meningkatkan Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah dan Pelayanan Publik								
No	Indikator	Satuan	Tahun 2020		Capaian Kinerja Th. 2020 (%)	Tahun 2021		Capaian Kinerja Th. 2021 (%)
			Target	Realisasi		Target	Realisasi	
1	Nilai SAKIP**)	Poin	81	77,51	95,69	82		
2	Indeks Kapasitas Fiskal Daerah	Poin	2,06	1,502	72,91	2,16	1,494	69,16
3	Opini BPK	Poin	WTP	WTP	100,00	WTP	WTP	100
4	IKM	Poin	85	78,96	92,89	86	78,65	91,45
Rata-Rata Pencapaian Kinerja (%)					90,37			88,79

Sumber : Perbup P-RKPD tahun 2021 dan dari olahan data Bapelitbangda

Keterangan:

*) indikator tidak digunakan lagi pada RPJMD-P

***) indikator belum terdapat penetapan nilai/ indeks

D. Pengukuran Capaian Kinerja Dibandingkan Dengan Target Dalam Pembangunan Jangka Menengah

Pengukuran capaian kinerja Pemerintah Kabupaten Lebak Tahun 2021 selain dilakukan dengan cara membandingkan antara target (rencana) dan realisasi Indikator Kinerja Utama (IKU) juga dibandingkan dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) pada masing-masing persepektif. Adapun penjelasan capaian setiap sasaran strategis adalah sebagai berikut:

Tabel 2.8
Capaian Kinerja Dibandingkan Dengan Target
Dalam Pembangunan Jangka Menengah

No	SASARAN	Indikator	Target 2021	Realisasi 2021	Capaian 2021 (%)	Status Capaian	Target Akhir RPJMD	Capaian Target Akhir 2021 (%)
1	Meningkatnya daya saing Sumber Daya Manusia (Sasaran 1)	Indeks Pendidikan	0,55	0,55	100	✓	0,565	100
		Indeks kesehatan	0,709	0,728	102,67	✓	0,778	93,57
		Indeks Pembangunan Gender	78,89	79	100,14	✓	79,11	100
2	Terkendalinya Pertumbuhan Penduduk (sasaran 2)	Laju Pertumbuhan Penduduk	1,88	1,88	100	✓	1,88	100
3	Meningkatnya Pertumbuhan Ekonomi yang Berkualitas (sasaran 3)	LPE	5	2	40	X	5	40
		PDRB Perkapita	23.000.000	23.000.000	100	✓	25.450.000	90,37
		Daya Beli	8.811.000	8.724.000	99,01	▲	9.017.000	96,75
		Tingkat Pengangguran Terbuka	9,5	7,86	82,74	✓	8,75	111,3
		Tingkat Kemiskinan	9,2	10,29	94,6	X	9	87,46



No	SASARAN	Indikator	Target 2021	Realisasi 2021	Capaian 2021 (%)	Status Capaian	Target Akhir RPJMD	Capaian Target Akhir 2021 (%)
4	Meningkatnya Ketahanan Pangan Daerah (sasaran 4)	Indeks Ketahanan Pangan	71,37	Realise Bulan Feb dari Badan Ketahanan Pangan			72,58	
5	Tumbuhnya Sektor Pariwisata Daerah (sasaran 5)	Kontribusi sector pariwisata pada PDRB	5	5	100	√	5,5	90,9
6	Meningkatnya ketersediaan Infrastruktur Publik (sasaran 6)	Indeks Infrastruktur Publik	69,81	69,61	99,7	▲	70,92	98,15
7	Meningkatnya ketersediaan Infrastruktur Dasar (sasaran 7)	Indeks Infrastruktur Dasar	75,73	77,35	102	√	76,21	101,49
8	Meningkatnya ketersediaan dan kualitas Infrastruktur Perhubungan (sasaran 8)	Presentase penurunan angka kecelakaan lalulintas	4,38	4,38	100	√	4,80	91,25
9	Terwujudnya lingkungan hidup yang berkelanjutan (sasaran 9)	Indeks Kualitas Udara	57,64	79,94	138,69	√	57,84	138,20
		Indeks Kualitas Air	52,60	57,89	110,06	√	52,80	109,64
		Indeks Kualitas Tutupan Lahan	39,91	39,76	99,62	x	44,26	89,83
10	Meningkatnya kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah dan kualitas pelayanan publik (sasaran 10)	Nilai SAKIP	78	Belum terbit			85	
		Opini BPK	WTP	WTP	100	√	WTP	100
		Indeks Kapasitas Fiskal Daerah	1,516	1,494	98,54	x	1,797	83,1
		IKM terhadap Pelayanan Publik	80,61	78,65	97,57	x	81,29	96,75
		Indeks SPBE	3,55	2,86	80,56	x	3,65	78,35
		Sistem Merit	251,5	251,5	100	√	255	98,62
		Maturitas SPIP	3	3	100	√	3	100

Sumber : Perbup P-RKPD tahun 2021 dan dari olahan data Bapelitbangda

Keterangan Status Capaian :

1. Realisasi Kinerja \geq Target Kinerja: Mencapai/ Melampaui Target (√)
2. Realisasi Kinerja $<$ Target Kinerja, tetapi $>$ Realisasi Tahun Sebelumnya: Tidak Mencapai Target, tetapi Meningkatkan (▲)
3. Realisasi Kinerja $<$ Target Kinerja : Tidak Mencapai Target (X)

E. Analisis Efisiensi Penggunaan Sumber Daya Dikaitkan Dengan Hasil (Kinerja) Yang Telah Dicapai

Tabel 2.9
Analisis Pencapaian Sasaran

1. Meningkatkan daya saing Sumber Daya Manusia (Sasaran 1)					
No	Indikator	Satuan	Tahun 2021		Capaian Kinerja Th. 2021 (%)
			Target	Realisasi	
1	Indeks Pendidikan	Poin	0,55	0,55	100
2	Indeks Kesehatan	Persen	0,709	0,728	102,67
3	Indeks Pembangunan Gender	Poin	78,89	79	100,14
Rata-Rata Pencapaian Kinerja (%)					100,93
2. Terkendalinya Pertumbuhan Penduduk (sasaran 2)					
No	Indikator	Satuan	Tahun 2021		Capaian Kinerja Th. 2021 (%)
			Target	Realisasi	
1	Laju Pertumbuhan Penduduk	Persen	1,8	1,8	100
Rata-Rata Pencapaian Kinerja (%)					100
3. Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi yang Berkualitas (sasaran 3)					



No	Indikator	Satuan	Tahun 2021		Capaian Kinerja Th. 2021 (%)
			Target	Realisasi	
1	LPE	Persen	5	2	34,84
2	PDRB Perkapita	Rupiah	23.000.000	23.000.000	100
3	Daya Beli	Rupiah	8.811.000	8.724.000	97,91
4	Tingkat Pengangguran Terbuka	Persen	9,5	7,86	120,8
5	Tingkat Kemiskinan	Persen	9,2	10,29	89,41
Rata-Rata Pencapaian Kinerja (%)					88,59
4. Meningkatkan Ketahanan Pangan Daerah (sasaran 4)					
No	Indikator	Satuan	Tahun 2021		Capaian Kinerja Th. 2021 (%)
			Target	Realisasi	
1	Indeks Ketahanan Pangan	Persen	71,37	Realise Bulan Feb dari Badan Ketahanan Pangan	
Rata-Rata Pencapaian Kinerja (%)					
5. Tumbuhnya Sektor Pariwisata Daerah (sasaran 5)					
No	Indikator	Satuan	Tahun 2021		Capaian Kinerja Th. 2021 (%)
			Target	Realisasi	
1	Kontribusi sektor pariwisata pada PDRB	Persen	5	5	100
Rata-Rata Pencapaian Kinerja (%)					100
6. Meningkatkan ketersediaan Infrastruktur Publik (sasaran 6)					
No	Indikator	Satuan	Tahun 2021		Capaian Kinerja Th. 2021 (%)
			Target	Realisasi	
1	Indeks Infrastruktur Publik	Persen	70,61	69,61	98,58
Rata-Rata Pencapaian Kinerja (%)					98,58
7. Meningkatkan ketersediaan Infrastruktur Dasar (sasaran 7)					
No	Indikator	Satuan	Tahun 2021		Capaian Kinerja Th. 2021 (%)
			Target	Realisasi	
1	Indeks Infrastruktur Dasar	Persen	76,48	77,35	101,13
Rata-Rata Pencapaian Kinerja (%)					101,13
8. Meningkatkan ketersediaan dan kualitas Infrastruktur Perhubungan (sasaran 8)					
No	Indikator	Satuan	Tahun 2021		Capaian Kinerja Th. 2021 (%)
			Target	Realisasi	
1	Presentase penurunan angka kecelakaan lalulintas	Persen	4,38	4,38	100
Rata-Rata Pencapaian Kinerja (%)					100
9. Terwujudnya lingkungan hidup yang berkelanjutan (sasaran 9)					
No	Indikator	Satuan	Tahun 2021		Capaian Kinerja Th. 2021 (%)
			Target	Realisasi	
1	Indeks Kualitas Udara	Persen	57,64	79,94	138,69
2	Indeks Kualitas Air	Persen	52,60	57,89	110,06
3	Indeks Kualitas Tutupan Lahan	Persen	39,91	39,76	99,62
Rata-Rata Pencapaian Kinerja (%)					116,12
10. Meningkatkan kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah dan kualitas pelayanan publik (sasaran 10)					
No	Indikator	Satuan	Tahun 2021		Capaian Kinerja Th. 2021 (%)
			Target	Realisasi	
1	Nilai SAKIP	Poin	78	Belum terbit	
2	Opini BPK	Poin	WTP	WTP	100
3	Indeks Kapasitas Fiskal Daerah	Poin	1,516	1,494	98,5
4	IKM terhadap Pelayanan Publik	Poin	80,61	78,65	97,57
5	Indeks SPBE	Poin	3,55	2,86	80,56
6	Sistem Merit	Poin	251,5	251,5	100
7	Maturitas SPIP	Poin	3	3	100
Rata-Rata Pencapaian Kinerja (%)					96,10

Sumber : Perbup P-RKPD tahun 2021 dan dari olahan data Bapelitbangda

Untuk mempermudah interpretasi atas pencapaian kinerja program/kegiatan serta indikator sasaran sebagaimana table 2.7 di atas, digunakan skala nilai peringkat kinerja berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 adalah sebagai berikut :

1. $91\% \leq 100\%$: Sangat Tinggi
2. $76\% \leq 90\%$: Tinggi
3. $66\% \leq 75\%$: Sedang



4. $51\% \leq 65\%$: Rendah
5. ≤ 50 : Sangat Rendah

Dari table 2.7 di atas diperoleh data terdapat 24 indikator sasaran dengan tingkat ketercapaian kinerja sebagai berikut :

1. Terdapat 19 indikator sasaran atau 79,16% yang berperingkat kinerja **sangat tinggi**;
2. Terdapat 2 indikator sasaran atau 8,3% yang berperingkat kinerja **tinggi**;
3. Terdapat 0 indikator sasaran atau 0% yang berperingkat kinerja **sedang**;
4. Terdapat 1 indikator sasaran atau 4,1% yang berperingkat **sangat rendah**;
5. Terdapat 2 indikator sasaran 8,3% yang peringkat kerjanya belum ada penetapan pengukuran/penilaiannya, karena saat laporan ini dibuat LHE Sakip dan indeks ketahanan pangan belum terbit;
6. Rata-rata realisasi capaian kinerja Pemerintah Kabupaten Lebak Tahun 2021 mencapai 98,65% atau berperingkat kinerja **sangat tinggi**.

F. Analisis Program dan Kegiatan yang Mendukung Pencapaian Target Kinerja

Program dan kegiatan yang mendukung pencapaian target kinerja dalam mendukung pencapaian target kinerja tersebut, sesuai data P-RKPD tahun 2021, tidak terlepas dari dilaksanakan 123 program pembangunan dengan 4 prioritas pembangunan yaitu : 1) Peningkatan kualitas dan tata kelola Pemerintahan Daerah dan penguatan regulasi dalam mendukung investasi, 2) Peningkatan pembangunan infrastruktur untuk mendukung daya saing perekonomian dan wilayah pasca bencana secara berkelanjutan, 3) Peningkatan kualitas sumber daya manusia yang kreatif dan berdaya saing tinggi, dan 4) Penciptaan nilai tambah ekonomi pada objek destinasi pariwisata potensial.

Pada Perubahan RKPD (P-RKPD) tahun 2021 terdapat 10 sasaran dengan 24 indikator kinerja sebagaimana tabel 2.7, dan terdapat 1 sasaran yakni meningkatnya pertumbuhan ekonomi yang berkualitas yang rata-rata pencapaiannya paling rendah dibanding indikator lainnya yaitu 88,59%. Ini dikarenakan pencapaian target Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE) hanya terealisasi 2% dari target 5% atau capaian kerjanya hanya 34,84% (sangat rendah), yang disebabkan Pandemi Covid-19 sejak tahun 2020 belum berakhir dan mempengaruhi pertumbuhan ekonomi masyarakat serta berpengaruh kepada kinerja pemerintah.

Namun secara umum sebagian besar indikator sasaran telah tercapai dengan baik sehingga rata-rata pencapaian kinerja pembangunan di Kabupaten Lebak berperingkat sangat tinggi atau 98,65% sebagaimana skala nilai dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010.

Oleh Karena itu, laporan ini dibuat sebagaimana mestinya sebagai wujud pertanggungjawaban kinerja Pemerintah Kabupaten Lebak kepada publik selama satu tahun periode sekaligus menjadi bahan evaluasi perbaikan kinerja kedepannya dalam rangka pembangunan berkelanjutan.



BAB III

CAPAIAN KINERJA PELAKSANAAN

TUGAS PEMBANTUAN

Penyelenggaraan Tugas Pembantuan adalah cerminan dari sistem dan prosedur penugasan Pemerintah Pusat dan/atau Pemerintah Provinsi kepada Kota/Kabupaten untuk menyelenggarakan urusan pemerintahan dan pembangunan yang disertai dengan kewajiban melaporkan pelaksanaannya dan mempertanggung jawabkannya kepada yang memberi penugasan. Pemberian Tugas Pembantuan Pemerintah Pusat dan/atau Pemerintah Provinsi kepada Kota/Kabupaten dimaksudkan untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas penyelenggaraan pemerintahan, pengelolaan pembangunan dan pelayanan umum. Tugas Pembantuan diselenggarakan karena tidak semua wewenang dan tugas pemerintahan dapat dilakukan dengan menggunakan asas desentralisasi dan asas dekonsentrasi.

Sebagai konsekuensi dari penyelenggaraan tugas pembantuan ini, Pemerintah sebagai pemberi tugas mengalokasikan anggaran serta menyusun pedoman pelaksanaannya berdasar masing-masing Kementerian/Lembaga/Direktorat Jenderal (Ditjen) melalui Kementerian Keuangan Republik Indonesia (Bendahara Umum Negara) berupa Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) kepada Satuan Kerja (Satker) Pemerintah Kabupaten/Kota yang ada di daerah, demikian pula Pemerintah Daerah berkewajiban untuk mempertanggungjawabkan pelaksanaannya kepada pemberi tugas pembantuan.

1. Dasar Hukum Penyelenggaraan Tugas Pembantuan

- a. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
- b. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
- c. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
- d. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);



- e. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
- f. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2015 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2016 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 278, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5767);
- g. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 106 Tahun 2000 tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Dalam Pelaksanaan Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 203, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4023);
- h. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 52 Tahun 2001 tentang Penyelenggaraan Tugas Pembantuan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4106);
- i. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2008 tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4816);
- j. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 248/PMK.07/2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 156/PMK.07/2008 tentang Pedoman Pengelolaan Dana Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan.

2. Gambaran Umum Pelaksanaan Tugas Pembantuan

Pemerintah Kabupaten Lebak pada Tahun Anggaran 2021 disamping menyelenggarakan Urusan Wajib, Urusan Pilihan dan Urusan Penunjang Pemerintahan. Pemerintah Kabupaten Lebak juga telah menerima 4 (empat) DIPA Tugas Pembantuan untuk Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana serta Urusan Pertanian yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi (APBD Provinsi). Tugas Pembantuan (TP) Tahun Anggaran 2021 berasal dari :

- A. Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia dengan Surat Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Tahun Anggaran 2021 Nomor : SP DIPA-047.01.1.664962/2021 Digital Stamp : 7713-4108-0918-2303 Revisi ke 04 Tanggal : 05 Agustus 2021 dengan total anggaran sebesar Rp.984.740.700,- yang berasal dari



- dana Rupiah Murni untuk Program Pengarusutamaan Gender Dan Pemberdayaan Perempuan, Program Pemenuhan Hak Anak (PHA) serta Program Perlindungan Khusus Anak yang diberikan kepada Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Lebak.
- B. Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Republik Indonesia dengan Surat Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Tahun Anggaran 2021 Nomor : SP DIPA-068.01-0/2021 Digital Stamp : 5533-6415-5604 dengan total anggaran sebesar Rp.11.534.853.000,- yang berasal dari dana Rupiah Murni untuk Program Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Program Keluarga Berencana (KB) serta Program Pemberdayaan dan Peningkatan Keluarga Sejahtera (KS) yang diberikan kepada Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana.
- C. Kementerian Pertanian Republik Indonesia dengan Surat Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Tahun Anggaran 2021 Satker Provinsi Banten Nomor : SP DIPA-018.03.4.299380/2021 dengan total anggaran sebesar Rp.3.714.375.000,- merupakan Tugas Pembantuan Provinsi yang diberikan kepada Kabupaten Lebak dan dilaksanakan oleh Dinas Pertanian Kabupaten Lebak yang berasal dari dana Rupiah Murni untuk Program Ketersediaan, Akses dan Konsumsi Pangan Berkualitas.
- D. Dinas Pertanian Provinsi Banten dengan Surat Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Tahun Anggaran 2021 Nomor : SP DIPA-018.08.4.299387/2020 dengan total anggaran sebesar Rp.1.613.200.000,- untuk Program Ketersediaan, Akses dan Konsumsi Pangan Berkualitas yang diberikan kepada Dinas Pertanian.

3. Capaian Kinerja Pelaksanaan Tugas Pembantuan

3.1. Tugas Pembantuan Pusat yang Dilaksanakan oleh Daerah Kabupaten

Alokasi dana tugas pembantuan kepada Kabupaten merupakan bagian anggaran Kementerian/Lembaga yang diberikan sesuai dengan beban dan jenis penugasan, dengan kewajiban Kabupaten melaporkan dan mempertanggungjawabkan kepada kementerian/lembaga yang memberikan penugasan. Kementerian/Lembaga yang memberikan Tugas Pembantuan kepada Pemerintah Kabupaten Lebak pada Tahun 2021 adalah Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia, Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Republik Indonesia dan Kementerian Pertanian Republik Indonesia.

3.1.1. Target Kinerja

1. Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia

Target kinerja Tugas Pembantuan (TP) Tahun Anggaran 2021 Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia dengan Surat Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA)



Tahun Anggaran 2021 Nomor : SP DIPA-047.01.1.664962/2021 Digital Stamp : 7713-4108-0918-2303 Revisi ke 04 Tanggal : 05 Agustus 2021 dengan total anggaran sebesar Rp.984.740.700,- diantaranya adalah :

- a. Pelembagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) pada Lembaga Pemerintah;
- b. Pemberdayaan Perempuan Bidang Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi pada Organisasi Kemasyarakatan;
- c. Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan;
- d. Pelembagaan PHA pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah dan Dunia Usaha;
- e. Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak;
- f. Pencegahan Kekerasan terhadap Anak yang melibatkan para pihak lingkup Daerah;
- g. Penyediaan Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus yang Memerlukan Koordinasi Tingkat Daerah.

2. Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Republik Indonesia
Target kinerja Tugas Pembantuan (TP) Tahun Anggaran 2021 Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Republik Indonesia dengan Surat Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Tahun Anggaran 2021 Nomor : SP DIPA-068.01-0/2021 Digital Stamp : 5533-6415-5604 dengan total anggaran sebesar Rp.11.534.853.000,- diantaranya adalah :

- a. Pemaduan dan Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Daerah Provinsi dengan Pemerintah Daerah Kabupaten dalam rangka Pengendalian Kuantitas Penduduk;
- b. Pelaksanaan Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk dan KB sesuai Kearifan Budaya Lokal;
- c. Pengendalian dan Pendistribusian Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi serta Pelaksanaan Pelayanan KB di Daerah Kabupaten;
- d. Pemberdayaan dan Peningkatan Peran serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota dalam Pelaksanaan dan Pembinaan Kesertaan ber-KB;
- e. Pelaksanaan Pembangunan Keluarga melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga.

3. Kementerian Pertanian Republik Indonesia

Target kinerja Tugas Pembantuan (TP) Tahun Anggaran 2021 Kementerian Pertanian Republik Indonesia dengan Surat Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Tahun Anggaran 2021 Satker Provinsi Banten Nomor : SP DIPA-018.03.4.299380/2021 dengan total anggaran sebesar Rp. 3.714.375.000,- diantaranya adalah :

- a. Pengembangan komoditas padi sawah seluas 6500 Ha;
- b. Pengembangan komoditas Jagung Hibrida 2500 Ha;
- c. Pengembangan Kawasan Ubi Kayu seluas 200 Ha.

**3.1.2. Realisasi**

1. Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia

Capaian realisasi anggaran dapat direalisasikan sebesar Rp.972.828.124,- atau 98,79%. Dan untuk realisasi capaian kinerja tingkat capaiannya adalah 100%.

2. Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Republik Indonesia

Capaian realisasi anggaran dapat direalisasikan sebesar Rp.11.360.831.511,- atau 98,49%. Dan untuk realisasi capaian kinerja tingkat capaiannya adalah 100%.

3. Kementerian Pertanian Republik Indonesia

Capaian realisasi anggaran dapat direalisasikan sebesar Rp.3.478.425.000,- atau 93,65%. Sedangkan untuk realisasi capaian kinerja pada pengembangan komoditas padi sawah seluas 6500 Ha dengan tingkat capaian kinerja 100%, pengembangan komoditas Jagung Hibrida 2500 Ha dengan tingkat capaian kinerja 100%, dan pengembangan Kawasan Ubi Kayu seluas 200 Ha dengan tingkat capaian kinerja 100%.

Rincian anggaran dan realisasi Tugas Pembantuan Pusat yang Dilaksanakan oleh Daerah Kabupaten Tahun Anggaran 2021 dapat kami sajikan sebagaimana tabel di bawah ini :



Tabel 3.1

Matriks Capaian Kinerja Pelaksanaan Tugas Pembantuan Pusat yang Dilaksanakan oleh Daerah

No	Kementerian/ Lembaga	Dasar Pelaksanaan Penugasan (TP)	Program, Kegiatan, Output, dan Rincian Kegiatan	Lokasi	SKPD Pelaksana	Alokasi Anggaran	Realisasi Anggaran	%	Realisasi Capaian Kegiatan	%
1	KEMENTERIAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	SP DIPA - 047.01.1.664 962/2021 DS: 7713- 4108-0918- 2303 Revisi ke-04 Tanggal: 05 Agustus 2021	PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN			449.658.900	443.932.690	98,73		100
			Pelebagaian Pengarusutamaan Gender (PUG) pada Lembaga Pemerintah Kewenangan Kabupaten/ Kota			65.789.900	65.497.630	99,56	33 OPD	100
			Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pelaksanaan PUG termasuk PPRG	Kab. Lebak	DP3AP2KB	65.789.900	65.497.630	98,73	33 OPD 25 Dokumen	100
			Pemberdayaan Perempuan Bidang Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi pada Organisasi Kemasyarakatan Kewenangan Kabupaten/ Kota			120.194.000	119.902.230	99,76	27 Organisasi	100
			Sosialisasi Peningkatan Partisipasi Perempuan di Bidang Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi	Kab. Lebak	DP3AP2KB	86.712.500	86.420.730	99,66	27 Organisasi	100
			Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Peningkatan Partisipasi Perempuan dan Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi	Kab. Lebak	DP3AP2KB	33.481.500	33.481.500	100,00	1 Perda	100
			Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/ Kota			263.675.000	258.532.830	98,05	573 PKK & KK	100
			Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/ Kota	Kab. Lebak	DP3AP2KB	263.675.000	258.532.830	98,05	1 Kecamatan 373 TP.PKK 2 Raperda	100



BAB III
LPPD BUPATI LEBAK TAHUN ANGGARAN 2021

			PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA)			78.284.800	77.401.260	98,87	100% Presentase Lembaga Masyarakat yang Aktif dalam Lembaga Perlindungan dan Pemenuhan Hak Anak	100
			Pelebagaan PHA pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/ Kota			58.782.400	58.165.630	98,95	100% Presentase Lembaga Masyarakat yang Aktif dalam Lembaga Perlindungan dan Pemenuhan Hak Anak	100
			Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pemenuhan Hak Anak pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/ Kota	Kab. Lebak	DP3AP2KB	42.609.900	41.993.130	98,55	5 Forum Anak	100
			Koordinasi dan Sinkronisasi Pelebagaan Pemenuhan Hak Anak Kewenangan Kabupaten/ Kota	Kab. Lebak	DP3AP2KB	16.172.500	16.172.500	98,049808	5 Anak 2 Kali Rapat	100
			Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/ Kota			19.502.400	19.235.630	98,63	1 PKA	100
			Penyediaan Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/ Kota	Kab. Lebak	DP3AP2KB	19.502.400	19.235.630	98,63	15 PATBM	100
			PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK			456.797.000	451.494.174	98,84	100% Presentase Penanganan Kasus Kekerasan Anak	100
			Pencegahan Kekerasan terhadap Anak yang			128.372.000	126.155.230	98,27	20 Unit	100

**BAB III****LPPD BUPATI LEBAK TAHUN ANGGARAN 2021**

			melibatkan para pihak lingkup Daerah Kabupaten/ Kota							
			Advokasi Kebijakan dan Pendampingan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan terhadap Anak Kewenangan Kabupaten/ Kota	Kab. Lebak	DP3AP2KB	73.282.000	71.065.230	96,98	2 Pertemuan	100
			Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Pencegahan Kekerasan terhadap Anak Kewenangan Kabupaten/ Kota	Kab. Lebak	DP3AP2KB	55.090.000	55.090.000	100,00	2 Kegiatan	100
			Penyediaan Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus yang Memerlukan Koordinasi Tingkat Daerah Kabupaten/Kota			328.425.000	325.338.944	99,06	75% Presentase Kasus Anak berhadapan dengan ABH	100
			Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Pendampingan Anak yang memerlukan Perlindungan Khusus Kewenangan Kabupaten/ Kota	Kab. Lebak	DP3AP2KB	328.425.000	325.338.944	99,06	50 Kasus	100
2	BADAN KEPENDUDUKAN DAN KELUARGA BERENCANA NASIONAL	SP DIPA - 068.01-0/2021 DS: 5533-6415-5604	PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA			13.310.000	4.310.000	32,38	100% TFR	100
			Pemaduan dan Sinkroniasi Kebijakan Pemerintah Daerah Provinsi dengan Pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota dalam rangka Pengendalian Kuantitas Penduduk			13.310.000	4.310.000	32,38	100% TFR	100
			Penyusunan dan Pemanfaatan Grand Design Pembangunan Kependudukan (GDPK) Tingkat Kabupaten/ Kota	Kab. Lebak	DP3AP2KB	13.310.000	4.310.000	32,38	1 Dokumen	100
			PROGRAM KELUARGA BERENCANA (KB)			11.496.773.000	11.331.751.511	98,56	100% TFR	100
			Pelaksanaan Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk dan KB sesuai Kearifan Budaya Lokal			54.450.400	54.033.630	99,23	4 Item Media KIE	100

**BAB III****LPPD BUPATI LEBAK TAHUN ANGGARAN 2021**

			Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Program KKBPK sesuai Kearifan Budaya Lokal	Kab. Lebak	DP3AP2KB	54.450.400	54.033.630	99,23	28 Kecamatan	100
			Pengendalian dan Pendistribusian Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi serta Pelaksanaan Pelayanan KB di Daerah Kabupaten/ Kota			10.036.093.400	9.878.472.171	98,43	100% TFR	100
			Penyusunan Rencana Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi (Alokon) dan Sarana Penunjang Pelayanan KB	Kab. Lebak	DP3AP2KB	153.254.400	150.078.780	97,93	1 Dokumen	100
			Penyediaan Sarana Penunjang Pelayanan KB	Kab. Lebak	DP3AP2KB	1.517.879.000	1.373.736.900	90,50	28 Kecamatan	100
			Dukungan Operasional Pelayanan KB Bergerak	Kab. Lebak	DP3AP2KB	8.364.960.000	8.354.656.491	99,88	4954 Akseptor	100
			Pemberdayaan dan Peningkatan Peran serta Organisasi Masyarakat Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota dalam Pelaksanaan dan Pembinaan Kesertaan ber-KB			1.406.229.200	1.399.245.710	99,50	100% TFR	100
			Pelaksanaan dan Pengelolaan Program KKBPK di Kampung KB	Kab. Lebak	DP3AP2KB	1.406.229.200	1.399.245.710	99,50	2174 Orang	100
			PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS)			24.770.000	24.770.000	100,00	100% TFR	100
			Pelaksanaan Pembangunan Keluarga melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga			24.770.000	24.770.000	100,00	100% TFR	100
			Orientasi dan Pelatihan Teknis Pengelola Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Pembedayaan Ekonomi Keluarga/ UPPKS)	Kab. Lebak	DP3AP2KB	24.770.000	24.770.000	100	53 Kel. BKB	100
								28 Kel. BKL		
								27 Kel. BKR		
								100 Orang		
3	KEMENTERIAN PERTANIAN/ DIREKTORAT JENDERAL	SP DIPA-018.03.4.299 380/2021 Satker Dinas	PROGRAM KETERSEDIAAN, AKSES DAN KOMSUMSI PANGAN BERKUALITAS			3.714.375.000	3.478.425.000	93,65	100%	100



BAB III
LPPD BUPATI LEBAK TAHUN ANGGARAN 2021

TANAMAN PANGAN	Pertanian Provinsi Banten	Kegiatan Bantuan Benih Padi Inbrida			1.719.375.000	1.617.787.500	94,09	6.500 Ha	100
		Benih Padi Inbrida	Banjarsari; Bayah; Bojongmanik; Cibadak; Cibeber; Cigemblong; Cihara; Cikukur; Cileles; Ciligrang; Cimarga; Cipanas; Cirinten; Curugbitung; Gunungkencana; Kalanganyar; Lebakgedong; Leuwidamar; Maja; Malingping; Muncang; Pangarangan; Sajira; Sobang; Wanasalam; Warunggunung.	Dinas Pertanian	1.719.375.000	1.617.787.500	94,09	6.500 Ha	100
		Kegiatan Bantuan Benih Jagung Hibrida			1.575.000.000	1.459.012.500	93	2.500 Ha	100
		Bantuan Jagung Hibrida	Banjarsari; Bojongmanik; Cibeber; Cihara; Cijaku; Cileles; Ciligrang; Cimarga; Gunungkencana; Maja; Malingping; Muncang; Pangarangan; Sajira; Sobang; Wanasalam.	Dinas Pertanian	1.575.000.000	1.459.012.500	93	2.500 Ha	100
		Kegiatan Aneka Kacang Dan Umbi			420.000.000	401.625.000	95,63	200 Ha	100
		Kawasan Ubi Kayu	Banjarsari; Bayah; Cihara; Cileles; Ciligrang; Cimarga; Cipanas; Curugbitung; Malingping; Sajira; Sobang; Wanasalam.	Dinas Pertanian	420.000.000	401.625.000	95,63	200 Ha	100

Sumber : DP3AP2KB dan Dinas Pertanian Kab. Lebak.



3.2. Tugas Pembantuan Provinsi yang Dilaksanakan oleh Daerah Kabupaten

3.2.1. Target Kinerja

Target kinerja Tugas Pembantuan (TP) Tahun Anggaran 2021 Dinas Pertanian Provinsi Banten dengan Surat Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Tahun Anggaran 2021 Nomor : SP DIPA-018.08.4.299387/2020 dengan total anggaran sebesar Rp.1.613.200.000,- adalah untuk Kegiatan Pengelolaan Air Irigasi Untuk Pertanian.

3.2.2. Realisasi

Capaian realisasi anggaran dapat direalisasikan sebesar Rp.1.613.200.000,- atau 100%. Dan untuk realisasi capaian kinerja pada Kegiatan Pengelolaan Air Irigasi Untuk Pertanian tingkat capaiannya adalah 100%.

Rincian anggaran dan realisasi Tugas Pembantuan Provinsi yang Dilaksanakan oleh Daerah Kabupaten Tahun Anggaran 2021 dapat kami sajikan sebagaimana tabel dibawah ini.



Tabel 3.2

Matriks Capaian Kinerja Pelaksanaan Tugas Pembantuan Provinsi yang Dilaksanakan oleh Daerah

No	Kementerian/ Lembaga	Dasar Pelaksanaan Penugasan (TP)	Program, Kegiatan, Output, dan Rincian Kegiatan	Lokasi	SKPD Pelaksana	Alokasi Anggaran	Realisasi anggaran	%	Realisasi Capaian Kegiatan	%
1	DINAS PERTANIAN PROV. BANTEN	SP DIPA - 018.08.4.299387 /2020	PROGRAM KETERSEDIAAN, AKSES DAN KONSUMSI PANGAN BERKUALITAS			1.613.200.000	1.613.200.000	100		
			Kegiatan Pengelolaan Air Irigasi Untuk Pertanian			1.613.200.000	1.613.200.000	100		
			Output Kegiatan : Terlaksananya kegiatan pembangunan irigasi perpipaan sebanyak 3 unit di 3 lokasi	1. Kelompok tani Karya Bakti, Ds. Cihambali, Kec. Cibeber 2. Kelompok tani Cimanyangray, Ds. Cihambali, Kec. Gunung Kencana 3. Kelompok tani Dukuh, Ds. Parungkujang, Kec. Cileles	Dinas Pertanian Kab. Lebak	252.000.000	252.000.000	100	3 Unit	100
			Terlaksananya kegiatan pembangunan embung sebanyak 2 unit di 2 lokasi	1. Kelompok tani Taruna Tani, Ds. Cidikit, Kec. Bayah 2. Kelompok tani Sri Utami, Ds. Cimandiri, Kec. Panggarangan	Dinas Pertanian Kab. Lebak	240.000.000	240.000.000	100	2 Unit	100
			Terlaksananya kegiatan pembangunan irigasi perpompaan besar wilayah barat sebanyak 2 unit di 2 lokasi	1. Kelompok tani Sang reka Jaya, Ds. Cidikit, Kec. Bayah 2. Kelompok tani Bangkit, Ds. Margatirta, Kec. Cimarga	Dinas Pertanian Kab. Lebak	215.200.000	215.200.000	100	2 Unit	100
			Terlaksananya kegiatan pembangunan irigasi perpompaan menengah wilayah barat sebanyak 2 unit di 2 lokasi	1. Kelompok tani Mukti Jaya, Ds. Kramatjaya, Kec. Gunungkencana 2. Kelompok tani Harapan Sejahtera, Ds. Sukajadi, Kec. Panggarangan	Dinas Pertanian Kab. Lebak	156.000.000	156.000.000	100	2 Unit	100
			Terlaksananya kegiatan pembangunan rehabilitasi jaringan irigasi teriser sebanyak 10 unit di 10 lokasi	1. Kelompok tani Mekarsari II, Desa Mekarjaya, Kec. Panggarangan	Dinas Pertanian Kab. Lebak	750.000.000	750.000.000	100	10 Unit	100



BAB III
LPPD BUPATI LEBAK TAHUN ANGGARAN 2021

				<ol style="list-style-type: none">2. Kelompok tani Sri Tani Prung, Desa Pagelaran, Kec. Malingping.3. Kelompok tani Wargi Harapan, Ds. Cimancak, Kec. Bayah4. Kelompok tani Anugrah Tani, Ds. Banjarsari, Kec. Banjarasri5. Kelompok tani Harapan, ds. Hariang, Kec. Sobang6. Kelompok tani Mekar Harapan, Ds. Mekarwangi, Kec. Muncang7. Kelompok tani Keusal, Ds. Leuwidamar, Kec. Leuwidamar8. Kelompok tani Marga Tani, Ds. Maraya, Kec. Sajira.9. Kelompok tani Cikawung, Ds. Sukamarga, Kec. Sajira1. Kelompoktani Banyu Aren, Ds. Sukaresmi Kec. Sobang						
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Sumber : Dinas Pertanian Kab. Lebak



3.3. Permasalahan dan Kendala

1. DP3AP2KB

Permasalahan yang dihadapi dalam pelaksanaan capaian kinerja yang diwujudkan dalam rangka mewujudkan Visi, Misi, Program, dan Kegiatan Tahun 2021 yang menjadi faktor penghambat pelayanan DP3AP2KB Kab. Lebak sebagai berikut :

- a. Tidak terpenuhinya Pertemuan Regional Tingkat Nasional akibat *Covid-19*;
- b. Terbatasnya SDM yang mempunyai di DP3AP2KB dalam Pengolahan Data Makro-Mikro terkait pendataan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana;
- c. Sulitnya Akses Jalur Lintas Kendaraan di Daerah Kabupaten Lebak dalam Pelaksanaan Wawar Pencegahan *Covid-19*;
- d. Sulitnya Akses Internet yang tidak tersebar merata di seluruh Wilayah Kabupaten Lebak menyebabkan Pendataan dan Program Kegiatan yang berjalan selama Tahun Anggaran 2021 terhambat;
- e. Kurangnya Tenaga PLKB di tingkat Kecamatan maupun Tingkat Desa/Kelurahan;
- f. Masih rendahnya kesertaan KB Pria;
- g. Rendahnya Tingkat Pengetahuan dan Kemampuan Pengelola Program KKBPK lini lapangan (PPKBD, Sub PPKBD, Kelompok KB);
- h. Masih terbatasnya kemampuan pengurus kelompok BKB, BKR, BKL dalam pelaksanaan pembangunan ketahanan keluarga;
- i. Masih lemahnya koordinasi antara tim penanganan korban kekerasan terhadap perempuan dan anak;
- j. Belum berkembangnya anggota Focal Point OPD dalam penyusunan perencanaan yang berbasis Gender;
- k. Masih Tingginya Kasus Kekerasan terhadap Perempuan dan Anak karena kurangnya Tenaga dan Akses jalur lintas ke Lokasi kasus terjadi;
- l. Masih Terbatasnya Sarana dan Prasarana serta Kegiatan yang Responsif Anak;
- m. Tidak meratanya Kader Perlindungan Anak Terpadu Berbasis Masyarakat yang mendapatkan Pembinaan dari Pemerintah Daerah.

2. Dinas Pertanian

Permasalahan yang dihadapi oleh Dinas Pertanian Kab. Lebak selama pelaksanaan kegiatan diantaranya adalah sebagai berikut :

- a. Penyampaian laporan akhir yang cenderung lambat;
- b. Pembahasan SID dengan konsultan sering tertunda;
- c. Terjadi keterlambatan dalam pelaksanaan, hal tersebut di karenakan adanya pandemi *covid-19* dan intensitas curah hujan yang tinggi;
- d. Kurang maksimalnya pengawasan, hal ini di karenakan selain adanya pandemi *covid-19* yang menuntut untuk bekerja dari rumah (WFH).



3.4. Saran dan Tindak Lanjut

1. DP3AP2KB

Adapun rencana tindak lanjut terkait permasalahan di atas adalah perkiraan daripada program dan kegiatan yang direncanakan dalam rencana kerja di Tahun berikutnya memperhatikan evaluasi hasil renja di Tahun sebelumnya dengan perencanaan yang matang dan lebih baik lagi. Lebih memperhatikan kebutuhan-kebutuhan prioritas yang akan dilaksanakan pada rencana kerja tahun anggaran 2022, sehingga meminimalisir kesenjangan anggaran yang sudah ditargetkan dengan realisasi yang ada.

2. Dinas Pertanian

Upaya pemecahan masalah dari permasalahan tersebut adalah sebagai berikut :

- a. Pemberitahuan secara intensif kepada pengelola kegiatan APBN TP 2021 agar segera menyampaikan laporan akhir baik secara lisan maupun melalui media social;
- b. Menentukan batas waktu penyampaian hasil SID oleh konsultan;
- c. Menentukan batas waktu penyampaian laporan akhir;
- d. Melakukan perubahan jadwal pelaksanaan kegiatan sesuai dengan peraturan yang berlaku;
- e. Memaksimalkan pegawai yang Work From Office (WFO) untuk melakukan pengawasan;
- f. Pengawasan pelaksanaan pekerjaan dilakukan oleh pejabat terkait dan tim Teknis.



BAB IV

PENERAPAN DAN PENCAPAIAN STANDAR PELAYANAN MINIMAL

Dalam rangka memberikan pelayanan dasar yang wajib diterima masyarakat, maka sesuai dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 Tentang Standar Pelayanan Minimal yang diatur lebih rinci dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 100 Tahun 2018 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal, maka Pemerintah Daerah Kabupaten Lebak menerapkan 6 (enam) Bidang Urusan Standar Pelayanan Minimal (SPM) yang ditujukan untuk memberikan pelayanan publik secara maksimal kepada masyarakat, yang berorientasi terhadap terwujudnya pelayanan publik yang prima.

Pemerintah Kabupaten Lebak menerapkan Standar Pelayanan Minimal (SPM) dalam menyelenggarakan urusan wajib pelayanan dasar dengan tujuan peningkatan pelayanan prima yang secara langsung menyentuh kepentingan masyarakat umum sehingga terwujud suatu pelayanan prima menuju *Good Governance*. Laporan pelaksanaan SPM di Urusan Pendidikan, Urusan Kesehatan, Urusan Pekerjaan Umum, Urusan Perumahan Rakyat, Urusan Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Pelindungan Masyarakat dan Urusan Sosial dilaporkan sebagai berikut :

4.1. Urusan Pendidikan

A. Jenis Pelayanan Dasar

Jenis pelayanan dasar pada SPM Urusan Pendidikan yang dilaksanakan oleh Dinas Pendidikan Kabupaten Lebak berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 100 Tahun 2018 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal terdiri atas Pendidikan Dasar, Pendidikan Kesetaraan, dan Pendidikan Anak Usia Dini.

B. Target Pencapaian Standar Pelayanan Minimal

Target pencapaian adalah target yang ditetapkan oleh Pemerintahan Daerah dalam mencapai SPM selama kurun waktu tertentu. Target Pencapaian SPM Urusan Pendidikan yang ditetapkan oleh Dinas Pendidikan Kabupaten Lebak Tahun 2021 adalah sebagai berikut :

Tabel 4.1

Target Pencapaian Standar Pelayanan Minimal Urusan Pendidikan

No	Jenis Pelayanan Dasar	Jumlah Sasaran	Target Pelayanan	%
1	Pendidikan Dasar	168.154	168.154	100
2	Pendidikan Kesetaraan	264.221	264.221	100
3	Pendidikan Anak Usia Dini	79.999	79.999	100

Sumber : Laporan SPM Dinas Pendidikan Kab. Lebak.



C. Realisasi

Realisasi Pencapaian SPM Urusan Pendidikan yang berhasil dicapai oleh Dinas Pendidikan Kabupaten Lebak Tahun 2021 adalah sebagai berikut :

Tabel 4.2

Realisasi Pencapaian Standar Pelayanan Minimal Urusan Pendidikan

No	Jenis Pelayanan Dasar	Target	Capaian	%	Ket
1	Pendidikan Dasar	168.154	162.782	96,81	
2	Pendidikan Kesetaraan	264.221	192.344	72,80	
3	Pendidikan Anak Usia Dini	79.999	25.925	32,41	

Sumber : Laporan SPM Dinas Pendidikan Kab. Lebak.

D. Alokasi Anggaran

Alokasi Anggaran dalam rangka mendukung penerapan dan pencapaian target Standar Pelayanan Minimal Urusan Pendidikan pada Tahun Anggaran 2021 yang ditetapkan dan dilaksanakan oleh Dinas Pendidikan Kabupaten Lebak di alokasikan sebesar Rp.249.208.391.600,00 dan dapat terealisasi sebesar Rp.256.792.576.258,00 atau 103.04% atau melebihi pagu dikarenakan untuk belanja Bantuan Operasional Sekolah (BOS) pagu yang di DPA hanya pencatatan untuk realisasinya berdasarkan transfer dana dari Pemerintah Pusat ke sekolah masing-masing.

E. Dukungan Personil

Sebagai sebuah organisasi, tercapainya visi dan misi Dinas Pendidikan Kabupaten Lebak ditentukan oleh kerjasama antara seluruh sistem organisasi, bidang, lini, staf, dan unit pelaksana teknis yang telah dibentuk berdasarkan tugas, pokok, dan fungsinya masing-masing. Karena itu dukungan seluruh sistem pada berbagai lini organisasi dan staf yang ada sangat menentukan bagi keberhasilan program kerja Dinas Pendidikan Kabupaten Lebak. Di samping itu, kemampuan manajerial pemimpin dalam menggerakkan orang lain untuk mencapai tujuan organisasi, juga memberikan kontribusi yang sangat menentukan bagi tercapainya tujuan organisasi Dinas Pendidikan Kabupaten Lebak. Dalam upaya mendorong pencapaian Standar Pelayanan Minimal (SPM), Kondisi Sumber daya Manusia (SDM) yang ada di lingkungan Dinas Pendidikan Kabupaten Lebak adalah sebagai berikut :

Tabel 4.3

Jumlah Pegawai Dinas Pendidikan Kabupaten Lebak Tahun 2021

No	Jenis /Kualifikasi	Jumlah
1.	Eselon	
	a. II a	0
	b. III a	1
	c. III b	4
	d. IV a	27



No	Jenis / Kualifikasi	Jumlah
	e. IV b	1
2.	Jabatan Fungsional	
	1. Fungsional Guru (TK, SD, SMP)	9.399
	a. Pangkat/Golongan	
	(1) Golongan IV	2.141
	(2) Golongan III	6.354
	(3) Golongan II	904
	b. Pendidikan	
	(1) S3	-
	(2) S2	291
	(3) S1/D4	7.943
	(4) D3	558
	(5) D2	55
	(6) D1	-
	2. Fungsional Pengawas (TK, SD, SMP)	
	a. Pangkat/Golongan	86
	(1) Golongan IV	86
	(2) Golongan III	
	b. Pendidikan	
	(1) S3	1
	(2) S2	14
	(3) S1/D4	71
	3. Fungsional Perencana	1
3.	JABATAN STRUKTURAL	
	a. Pangkat/Golongan	89
	(1) IV	28
	(2) III	49
	(3) II	12
	(4) I	0
	b. Pendidikan	89
	(1) S3	0
	(2) S2	6
	(3) S1/D4	70
	(4) D3	5
	(5) D2	4
	(6) D1	
	(7) SMA Sederajat	4
	(8) SMP Sederajat	0
	(9) SD Sederajat	0

Sumber : Laporan SPM Dinas Pendidikan Kab. Lebak.

F. Permasalahan dan Solusi

1. Permasalahan

- Pandemi *Covid-19* berdampak sangat besar bagi Pendidikan Dasar, Pendidikan Kesetaraan dan Pendidikan Anak Usia Dini. Seluruh satuan pendidikan tidak melakukan pembelajaran secara tatap muka dan diganti dengan pembelajaran dalam jaringan dan luar jaringan;
- Meningkatnya jumlah anak usia sekolah yang putus sekolah akibat perkawinan dini terutama pada satuan pendidikan SMP;
- Program dan kegiatan yang telah direncanakan dan ditetapkan tidak dapat dilaksanakan karena adanya *refocusing* dan realokasi anggaran untuk percepatan penanganan Pandemi *Covid-19*;



- d. Masih ada kelayakan sarana dan prasarana sekolah;
 - e. Masih ada penataan sistem sarana dan prasaarana Pendidikan;
 - f. Belum terpenuhinya 8 standar nasional Pendidikan;
 - g. Jumlah Kebututuhan guru dan tenaga administrasi belum terpenuhi.
2. Solusi
- a. Melaksanakan pembelajaran dengan sistem guru kunjung pada tempat kegiatan belajar (TKB) siswa secara berkelompok dengan peserta pembelajaran tidak lebih dari 10 orang siswa;
 - b. Melalui Kementerian Pendidikan memberikan bantuan kuota internet untuk guru dan siswa untuk mengurangi beban orang tua terhadap biaya Pendidikan;
 - c. Melakukan *review* terhadap program dan kegiatan serta target yang telah ditetapkan untuk mencapai target pencapaian SPM Pendidikan;
 - d. Angka Partisipasi Sekolah pada usia belajar sembilan tahun (SD dan SMP) perlu ditingkatkan;
 - e. Memantapkan kondisi kelayakan sarana dan prasaran sekolah;
 - f. Meningkatkan kinerja sistem sarana dan prasarana sekolah;
 - g. Meningkatkan pemenuhan RKAS sesuai dengan 8 standar nasional Pendidikan;
 - h. Mengusulan pemenuhan/kebutuhan guru dan tenaga administrasi kepada Bupati agar bisa diangkat menjadi P3K.

4.2. Urusan Kesehatan

A. Jenis Pelayanan Dasar

Jenis pelayanan dasar pada SPM Urusan Kesehatan yang dilaksanakan oleh Dinas Kesehatan Kabupaten Lebak berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 100 Tahun 2018 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal terdiri atas Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil, Pelayana Kesehatan Ibu Bersalin, Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir, Pelayanan Kesehatan Balita, Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar, Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif, Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut, Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi, Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus, Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat, Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis dan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi Virus yang Melemahkan Daya Tahan Tubuh Manusia (*Human Immunodeficiency Virus*).

B. Target Pencapaian Standar Pelayanan Minimal

Target pencapaian adalah target yang ditetapkan oleh Pemerintahan Daerah dalam mencapai SPM selama kurun waktu tertentu. Target



Pencapaian SPM Urusan Kesehatan yang ditetapkan oleh Dinas Kesehatan Kabupaten Lebak Tahun 2021 adalah sebagai berikut :

Tabel 4.4

Target Pencapaian Standar Pelayanan Minimal Urusan Kesehatan

No	Jenis Pelayanan Dasar	Jumlah Sasaran	Target Pelayanan	%
1	Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	24.450	24.450	100
2	Pelayana Kesehatan Ibu Bersalin	24.550	24.550	100
3	Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir	22.654	22.654	100
4	Pelayanan Kesehatan Balita	116.809	116.809	100
5	Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	203.140	203.140	100
6	Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif	806.174	806.174	100
7	Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut	151.764	151.764	100
8	Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi	228.883	228.883	100
9	Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus	23.671	23.671	100
10	Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat	4.150	4.150	100
11	Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	4.545	4.545	100
12	Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi Virus yang Melemahkan Daya Tahan Tubuh Manusia (<i>Human Immunodeficiency Virus</i>)	24.751	24.751	100

Sumber : Laporan SPM Dinas Kesehatan Kab. Lebak.

C. Realisasi

Realisasi Pencapaian SPM Urusan Kesehatan yang berhasil dicapai oleh Dinas Kesehatan Kabupaten Lebak Tahun 2021 adalah sebagai berikut:

Tabel 4.5

Realisasi Pencapaian Standar Pelayanan Minimal Urusan Kesehatan

No	Jenis Pelayanan Dasar	Target	Capaian	%	Ket
1	Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	24.450	22.449	91.82	
2	Pelayana Kesehatan Ibu Bersalin	24.550	21.136	86.09	
3	Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir	22.654	22.493	99.29	
4	Pelayanan Kesehatan Balita	116.809	112.027	95.91	
5	Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	203.140	85.098	41.89	
6	Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif	806.174	317.318	39.36	
7	Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut	151.764	68.557	50,69	
8	Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi	228.883	72.407	31.63	
9	Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus	23.671	14.264	60.26	



No	Jenis Pelayanan Dasar	Target	Capaian	%	Ket
10	Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat	4.150	2.084	50.22	
11	Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	4.545	2.977	65.50	
12	Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi Virus yang Melemahkan Daya Tahan Tubuh Manusia (<i>Human Immunodeficiency Virus</i>)	24.751	16.161	65.29	

Sumber : Laporan SPM Dinas Kesehatan Kab. Lebak.

D. Alokasi Anggaran

Alokasi Anggaran dalam rangka mendukung penerapan dan pencapaian target Standar Pelayanan Minimal Urusan Kesehatan pada Tahun Anggaran 2021 yang ditetapkan dan dilaksanakan oleh OPD induk Dinas Kesehatan, UPTD Puskesmas dan RSUD Adjidarmo Kabupaten Lebak di alokasikan sebesar Rp.606.854.684.860,- dan dapat terealisasi sebesar Rp.468.148.572.443,00 atau 77.14%.

E. Dukungan Personil

Tenaga Kesehatan di Kabupaten Lebak Tahun 2021 berdasarkan Sistem Informasi SDM Kemkes 2021, berjumlah 3.158 orang, dengan latarbelakang profesi dan tempat kerja yang berbeda, untuk lebih jelas dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 4.6
Jumlah Tenaga Kesehatan di Kabupaten Lebak Tahun 2021

No.	Jenis Tenaga Kesehatan	Tenaga Kesehatan (SI)				Asisten tenaga Kesehatan (Diploma)				Total
		PNS		Non PNS		PNS		Non PNS		
		L	P	L	P	L	P	L	P	
1	Medis	52	87	110	134					383
2	Psikologi Klinis	0	0	0	0					0
3	Keperawatan	190	190	502	500	4	5	9	6	1406
4	Kebidanan	0	466	1	815	0	12	0	42	1336
5	Kefarmasian	14	25	41	93	0	3	14	17	207
6	Kesehatan Masyarakat	20	19	11	19					69
7	Kesehatan Lingkungan	4	13	5	7	1	2	0	0	32
8	Gizi	5	15	7	8	0	3	0	1	39
9	Keterampilan Fisik	1	0	4	2					7
10	Keteknisian Medis	3	10	6	16	3	0	0	1	39
11	Teknik Biomedika	14	12	20	40	1	0	3	3	93
12	Kesehatan Tradisional	0	0	0	0					0
13	Nakes lainnya	2	2	3	3					10
Sub Jumlah		305	839	710	1637	9	25	26	70	3621
Tenaga Penunjang										0
	Struktural	39	27	5	3					74
	Dukungan Manajemen	65	62	626	432					1185
	Pendidikan dan Pelatihan	0	0	0	1					1
Sub Jumlah		104	89	631	436					1260
Total Per Kabupaten		409	928	1341	2073	9	25	26	70	4.881
		4.751				130				

Sumber : Laporan SPM Dinas Kesehatan Kab. Lebak.

**F. Permasalahan dan Solusi****1. Permasalahan****a. Tahap Perencanaan**

- 1) Pemegang program belum fokus memprioritaskan penggunaan dana sepenuhnya dalam pencapaian SPM Kesehatan;
- 2) Belum optimalnya pemanfaatan tool SPM dalam perencanaan dan penganggaran program ataupun kegiatan;
- 3) Terbatasnya menu kegiatan untuk pembiayaan untuk pembelian Bahan Medis Habis Pakai penunjang scrining kesehatan untuk pelayanan SPM Kesehatan seperti stik glukosa dan kolesterol dari dana alokasi dak non fisik.

b. Sumber daya Kesehatan

- 1) Kurang optimalnya pelaksanaan ANC (Belum 10 T) terutama temu wicara antara petugas dan ibu hamil;
- 2) Pergantian atau rotasi tenaga Kesehatan;
- 3) Tenaga bidan desa yang tidak mau tinggal di desa binaannya;
- 4) Kurang mobilisasi dan pemberdayaan yang dilakukan baik oleh tenaga kesehatan ataupun masyarakat dalam upaya pencapaian sasaran SPM.

c. Anggaran

- 1) Pemanfaatan dana jampersal belum dimanfaatkan secara optimal oleh para ibu bersalin yang tidak mempunyai jaminan;
- 2) Pembiayaan terbesar Kesehatan digunakan untuk sarana pendukung pelayanan SPM.

d. Kemitraan dengan lembaga sosial masyarakat atau OPD masih kurang;**e. Masih adanya budaya masyarakat yang kurang mendukung Kesehatan :**

- 1) Belum semua ibu hamil mendapat pelayanan sesuai standar diantara pentingnya imunisasi;
- 2) Masih adanya beberapa desa yang menolak program contoh program imunisasi;
- 3) Tingkat kepercayaan masyarakat kedukun paraji masih tinggi Keputusan untuk penolong persalinan masih didominasi oleh orang tuanya, yang mana sering diputuskan agar ditolong oleh paraji ketika bersalin;
- 4) Masih banyaknya masyarakat belum mau bersalin difaskes karena dirasa lebih nyaman dan biasa lahir dirumah dan belum sadar bahaya resiko persalinan diluar faskes;
- 5) Belum optimalnya memanfaatkan rumah tunggu persalianan yang telah disediakan oleh pemerintah dalam mendekatkan pelayanan persalinan;
- 6) Masih sedikitnya budaya memeriksa kesehatan secara berkala pada fasilitas Kesehatan;



- 7) Masih rendahnya pelaporan masyarakat secara mandiri terkait kasus ODGJ kepada petugas Kesehatan;
 - 8) Adanya putus berobat/tidak melanjutkan pemeliharaan kesehatannya pada fasilitas kesehatan karena dirasakan kesehatannya sudah membaik.
- f. Perlunya optimalisasi penggunaan sarana dan prasarana pendukung guna Pencapaian SPM :
- 1) Belum optimalnya penggunaan database yang telah ada (aspak) dalam perencanaan kebutuhan sarana dan prasarana penunjang SPM;
 - 2) Hanya beberapa puskesmas yang merencanakan kebutuhan sarana dan prasarana dan pembiayaan kegiatan pendukung pelayanan SPM Kesehatan;
 - 3) Masih perlu penambahan alat kesehatan UKS KIT dan UKGS kit di tiap puskesmas.
- g. Belum semua puskesmas mempunyai SOP pelayanan Kesehatan dipuskesmas;
- h. Faktor geografis yang sulit di beberapa desa kondisi lingkungan yang kurang memadai syarat kesehatan
- i. Belum optimalnya dukungan stakeholder, lintas sektor dan program terkait dengan pencapaian percepatan SPM :
- 1) Belum adanya SK Bupati dalam rangka pelaksanaan Pelayanan SPM;
 - 2) Belum diterbitkannya SK Bupati terkait jumlah sasaran SPM.
- j. Pencatatan dan pelaporan
- 1) Belum Optimalnya sistem pencatatan dan pelaporan SPM;
 - 2) Terdapat perbedaan data sasaran antar pengelola kegiatan dilingkungan dinas;
 - 3) Belum optimalnya pemanfaatan data Program Pis-PK;
 - 4) Register pencatatan hasil pelayanan SPM bidang kesehatan sesuai standart yang baku belum tersedia dan dilakukan manual;
 - 5) Pelaporan pelayanan kesehatan terutama lansia berbasis pos pelayanan sehingga data pencapaian masih rendah;
 - 6) Pelaporan SPM dilakukan dalam akhir tahun;
 - 7) Belum semua fasilitas kesehatan swasta melaporkan capaian SPM bidang kesehatan.
- k. Kejadian Pandemi *Covid-19*, yang berdampak pada pelayanan Kesehatan secara langsung, terutama pelayanan kesehatan pada usia.
2. Solusi
- a. Perlu diadakan pertemuan dalam rangka pembahasan penyusunan perencanaan SPM bidang Kesehatan;



- b. Perlu adanya kebijakan pemda terkait pelayanan kesehatan minimal dikabupaten misal terkait tenaga bidan desa tinggal di desa misalnya sewa rumah atau insentif;
- c. Meningkatkan kapasitas tenaga kesehatan melalui pelatihan atau workshop bagi petugas Kesehatan khusus pelayanan Kesehatan;
- d. Memanfaatkan dukungan Dana Alokasi Khusus Non Fisik seperti Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) dan jampersal untuk percepatan SPM, dengan mensinergiskan dan memadukan program dan kegiatan yang bersumber dana dari APBD, agar lebih efektif dan efisien. Perlu ditingkatkan penganggaran guna pemenuhan logistik SPM Kesehatan serta memanfaatkan pendanaan bantuan sosial dari Program Jaminan Kesehatan Nasional untuk percepatan pencapaian tujuan SPM;
- e. Mengusulkan pendanaan program dan kegiatan dalam rangka percepatan pencapaian SPM ke Provinsi Banten melalui dana perimbangan atau bagi hasil cukai rokok atau dekon lainnya;
- f. Memanfaatkan dukungan dana alokasi dana desa sesuai menu permendes dalam upaya pemberdayaan dan penggerak masyarakat untuk berperilaku hidup bersih dan sehat (PHBS);
- g. Perlu ditingkatkan kemitraan dan dikembangkan dengan lembaga sosial yang bergerak dibidang Kesehatan;
- h. Perlu Wadah/tempat pelayanan yang dikembangkan seperti Pos Pelayanan Kesehatan Usia Lanjut, Kegiatan Prolanis dll;
- i. Perlu dikembangkan sarana kendaraan yang dapat menjangkau pelayanan kesehatan terutama ibu bersalin;
- j. Meningkatkan sarana dan prasarana termasuk pemenuhan obat dan alkes serta BMHP melalui dana alokasi khusus fisik untuk program dan kegiatan yang berkaitan dengan percepatan pencapaian SPM;
- k. Perlu dikembangkan aplikasi pencatatan dan pelaporan SPM berbasis web dipuskesmas yang teintegrasi dengan pelayanan Kesehatan;
- l. Perlu dikembangkan strategi baru dalam pelayanan SPM sehubungan dengan dampak pandemi *Covid-19*.

4.3. Urusan Pekerjaan Umum

A. Jenis Pelayanan Dasar

Jenis pelayanan dasar pada SPM Urusan Pekerjaan Umum yang dilaksanakan oleh Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Lebak berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 100 Tahun 2018 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal terdiri atas Penyediaan Kebutuhan Pokok Air Minum Sehari-Hari dan Penyediaa Pelayanan Pengolaha Air Limbah Domestik.



B. Target Pencapaian Standar Pelayanan Minimal

Target pencapaian adalah target yang ditetapkan oleh Pemerintahan Daerah dalam mencapai SPM selama kurun waktu tertentu. Target Pencapaian SPM Urusan Pekerjaan Umum yang ditetapkan oleh Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Lebak Tahun 2021 adalah sebagai berikut :

Tabel 4.7
Target Pencapaian Standar Pelayanan Minimal
Urusan Pekerjaan Umum

No	Jenis Pelayanan Dasar	Jumlah Sasaran	Target Pelayanan	%
1	Penyediaan Kebutuhan Pokok Air Minum Sehari-Hari	65,30	65,30	100
2	Penyediaan Pelayanan Pengolahan Air Limbah Domestik	73,07	73,07	100

Sumber : Laporan SPM Dinas PUPR Kab. Lebak.

C. Realisasi

Realisasi Pencapaian SPM Urusan Pekerjaan Umum yang berhasil dicapai oleh Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Lebak Tahun 2021 adalah sebagai berikut :

Tabel 4.8
Realisasi Pencapaian Standar Pelayanan Minimal
Urusan Pekerjaan Umum

No	Jenis Pelayanan Dasar	Target	Capaian	%	Ket
1	Penyediaan Kebutuhan Pokok Air Minum Sehari-Hari	65,30	72,73	111,38	
2	Penyediaan Pelayanan Pengolahan Air Limbah Domestik	73,07	72,63	99,40	

Sumber : Laporan SPM Dinas PUPR Kab. Lebak.

D. Alokasi Anggaran

Alokasi Anggaran dalam rangka mendukung penerapan dan pencapaian target Standar Pelayanan Minimal Urusan Pekerjaan Umum pada Tahun Anggaran 2021 yang ditetapkan dan dilaksanakan oleh Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Lebak yang bersumber dari APBD Kabupaten Lebak di alokasikan sebesar Rp.43.467.433.330,00 dan dapat terealisasi sebesar Rp.41.213.637.405,00 atau 94,81%.

E. Dukungan Personil

Dukungan personil yang menggambarkan jumlah personil pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang atau pegawai yang terlibat dalam proses penerapan dan pencapaian SPM dengan status PNS sebanyak 207 orang dan 118 orang status Non PNS, berikut data personil sesuai dengan jenis dan kualifikasinya adalah sebagai berikut :



Tabel 4.9

Jumlah PNS dan Non PNS Dinas PUPR 2021

No	Jenis/Kualifikasi	Jumlah
A	PNS	207
1	Eselon :	
	a. II b	1
	b. III a	1
	c. III b	5
	d. IV a	26
	e. IV b	8
2	Jabatan Fungsional	-
3	Pangkat/golongan	
	a. IV	10
	b. III	54
	c. II	97
	d. I	46
4	Jenjang Pendidikan	
	a. S3	-
	b. S2	12
	c. S1/DIV	41
	d. SM / D.I / D.III	5
	e. SMA Sederajat	81
	f. SMP Sederajat	16
	g. SD Sederajat	37
B	Non PNS	118
	a. S1/DIV	41
	b. SM / D.I / D.III	2
	c. SMA Sederajat	57
	d. SMP Sederajat	18

Sumber : Laporan SPM Dinas PUPR Kab. Lebak

F. Permasalahan dan Solusi

1. Permasalahan

a. Tangki Saptik :

- 1) Masyarakat yang belum memiliki MCK biasanya berdomisili di daerah terpencil sehingga susah diakses kendaraan tangki tinja (roda 3);
- 2) Kesadaran masyarakat untuk memelihara masih kurang;
- 3) Akses air bersih di Kabupaten Lebak belum merata sehingga MCK individual belum efektif di beberapa tempat.

b. IPAL :

- 1) Kesulitan lahan siap hibah terutama di kawasan perkotaan maupun padat penduduk;
- 2) Sebagian masyarakat masih belum mau IPAL berada di samping rumahnya;
- 3) Lokasi lahan di bagian hilir pemukiman dan tidak ada akses jalan untuk dropping material maupun penyedotan lumpur tinja;
- 4) Kesadaran Masyarakat pengguna untuk merawat greas trap maupun bak control masih kurang.

2. Solusi

a. Tangki Saptik :



- 1) Pembuatan akses jalan minimal jalan setapak yang bisa di lewati kendaraan roda 3;
 - 2) Edukasi dan sosialisasi ke masyarakat untuk merubah pola fikir;
 - 3) Penyediaan akses air bersih untuk masyarakat sasaran program sanitasi.
- b. IPAL :
- 1) Lahan kalau bisa di fasilitasi pihak desa atau daerah mengingat dibeberapa tempat sangat membutuhkan;
 - 2) Penggunaan jalan lingkungan sepanjang akses lalu lintas bisa di alihkan atau ada alternatif akses jalan masyarakat;
 - 3) Sosialisasi tentang cara kerja IPAL dan apa saja fasilitas pendukung IPAL agar masyarakat tereduksi;
 - 4) Peningkatan kapasitas Kelompok Penerima Pemanfaat (KPP) IPAL dilakukan secara berkala dan terjadwal sehingga kinerja IPAL tetap bisa di kontrol;
 - 5) Desa memperbanyak akses jalan ke pemukiman masyarakat.

4.4. Urusan Perumahan Rakyat

A. Jenis Pelayanan Dasar

Jenis pelayanan dasar pada SPM Urusan Perumahan Rakyat yang dilaksanakan oleh Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman serta Pertanahan Kabupaten Lebak berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 100 Tahun 2018 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal terdiri atas Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah yang Layak Huni bagi Korban Bencana dan Fasilitasi Penyediaan Rumah yang Layak Huni bagi Masyarakat yang Terkena Relokasi Program Pemerintah Daerah Kabupaten.

B. Target Pencapaian Standar Pelayanan Minimal

Target pencapaian adalah target yang ditetapkan oleh Pemerintahan Daerah dalam mencapai SPM selama kurun waktu tertentu. Target Pencapaian SPM Urusan Perumahan Rakyat yang ditetapkan oleh Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman serta Pertanahan Kabupaten Lebak Tahun 2021 adalah sebagai berikut :

Tabel 4.10
Target Pencapaian Standar Pelayanan Minimal
Urusan Perumahan Rakyat

No	Jenis Pelayanan Dasar	Jumlah Sasaran	Target Pelayanan	%
1	Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah yang Layak Huni bagi Korban Bencana	992	992	100
2	Fasilitasi Penyediaan Rumah yang Layak Huni bagi Masyarakat yang Terkena Relokasi Program Pemerintah Daerah Kabupaten	0	0	100

Sumber : Laporan SPM Dinas PRKPP Kab. Lebak.



C. Realisasi

Realisasi Pencapaian SPM Urusan Perumahan Rakyat yang berhasil dicapai oleh Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman serta Pertanahan Kabupaten Lebak Tahun 2021 adalah sebagai berikut :

Tabel 4.11
Realisasi Pencapaian Standar Pelayanan Minimal
Urusan Perumahan Rakyat

No	Jenis Pelayanan Dasar	Target	Capaian	%	Ket
1	Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah yang Layak Huni bagi Korban Bencana	992	4	0,40	
2	Fasilitasi Penyediaan Rumah yang Layak Huni bagi Masyarakat yang Terkena Relokasi Program Pemerintah Daerah Kabupaten	0	0	100	

Sumber : Laporan SPM Dinas PRKPP Kab. Lebak.

D. Alokasi Anggaran

Alokasi Anggaran dalam rangka mendukung penerpan dan pencapaian target Standar Pelayanan Minimal Urusan Perumahan Rakyat pada Tahun Anggaran 2021 yang ditetapkan dan dilaksanakan oleh Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman serta Pertanahan Kabupaten Lebak yang bersumber dari APBD Kabupaten Lebak di alokasikan sebesar Rp.6.570.519.760,00 dan dapat terealisasikan sebesar Rp.6.190.007.810,00 atau 94,21%. Adanya keterbatasan anggaran, maka Pemerintah Daerah Kabupaten Lebak hanya menyediakan anggaran sampai pada pengadaan dan pematangan lahan untuk relokasi rumah korban bencana, dengan alokasi anggaran sebagai berikut:

1. Pengadaan lahan relokasi bencana Kecamatan Maja Rp.134.128.000,-;
2. Pengadaan lahan relokasi bencana Kecamatan Curugbitung Rp.61.200.000,-;
3. Pengadaan lahan relokasi bencana Kecamatan Sajira Rp.1.869.088.000,-;
4. Pengadaan lahan relokasi bencana Kecamatan Sajira Rp.1.235.550.000,-;
5. Pematangan lahan relokasi bencana Kecamatan Sajira Rp.1.042.663.000,-;
6. Pematangan lahan relokasi bencana Kecamatan Cipanas Rp.1.703.867.000,-.

E. Dukungan Personil

Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan didukung oleh 22 Orang PNS dan 27 Orang Non PNS, dengan dukungan pejabat eselon sebagai berikut :



Tabel 4.12

Jumlah PNS dan Non PNS Dinas PRKPP 2021

No	Jenis/Kualifikasi	Jumlah
A	PNS	22
1	Eselon :	
	a. II b	1
	b. III a	1
	c. III b	2
	d. IV a	8
2	Non Esselon	10
B	Non PNS	27
Total		49

Sumber : Laporan SPM Dinas PRKPP Kab. Lebak

F. Permasalahan dan Solusi

1. Permasalahan

a. Lokasi

Lokasi lahan relokasi yang berkontur sehingga perlu dilakukannya pematangan lahan terlebih dahulu agar kondisi lapah siap bangun.

b. Organisasi

Masih kurangnya kesinergian antar sektor dan jumlah personil pengelola program belum memadai.

c. Anggaran

Keterbatasan anggaran dari pemerintah sehingga tidak semua jenis pelayanan dasar bisa terlayani dengan maksimal.

2. Solusi

a. Lokasi relokasi di lahan yang tidak berkontur;

b. Perlu adanya regulasi yang bijak dan terkoordinasi kuat dan lintas sektoral;

c. Peningkatan anggaran agar capaian pelaksanaan SPM maksimal.

4.5. Urusan Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat

A. Jenis Pelayanan Dasar

Jenis pelayanan dasar pada SPM Urusan Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat yang dilaksanakan oleh Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran dan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Lebak berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 100 Tahun 2018 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal terdiri atas Pelayanan Ketenteraman dan Ketertiban Umum, Pelayanan Informasi Rawan Bencana, Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana, Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana dan Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana.



B. Target Pencapaian Standar Pelayanan Minimal

Target pencapaian adalah target yang ditetapkan oleh Pemerintahan Daerah dalam mencapai SPM selama kurun waktu tertentu. Target Pencapaian SPM Urusan Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat yang ditetapkan oleh Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran dan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Lebak Tahun 2021 adalah sebagai berikut :

Tabel 4.13

Target Pencapaian Standar Pelayanan Minimal**Urusan Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat**

No	Jenis Pelayanan Dasar	Jumlah Sasaran	Target Pelayanan	%
1	Pelayanan Ketentraman dan Ketertiban Umum	71	71	100
2	Pelayanan Informasi Rawan Bencana	1.402.324	1.402.324	100
3	Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	60	60	100
4	Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	27.150	27.150	100
5	Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Kebakaran	100	100	100

Sumber : Laporan SPM Satpol PP dan Damkar dan BPBD Kab. Lebak.

C. Realisasi

Realisasi Pencapaian SPM Urusan Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat yang berhasil dicapai oleh Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran dan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Lebak Tahun 2021 adalah sebagai berikut :

Tabel 4.14

Realisasi Pencapaian Standar Pelayanan Minimal**Urusan Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat**

No	Jenis Pelayanan Dasar	Target	Capaian	%	Ket
1	Pelayanan Ketentraman dan Ketertiban Umum	71	65	91,55	
2	Pelayanan Informasi Rawan Bencana	1.402.324	1.402.324	100	
3	Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	60	60	100	
4	Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	27.150	21.830	80,41	
5	Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Kebakaran	100	84,03	84,03	

Sumber : Laporan SPM Satpol PP dan Damkar dan BPBD Kab. Lebak.



D. Alokasi Anggaran

Alokasi Anggaran dalam rangka mendukung penerpan dan pencapaian target Standar Pelayanan Minimal Urusan Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat pada Tahun Anggaran 2021 yang ditetapkan dan dilaksanakan oleh Satuan Polisi Pamong Praja Dan Pemadam Kebakaran dan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Lebak yang bersumber dari APBD Kabupaten Lebak di alokasikan sebesar Rp.8.808.337.350,00 dan dapat terealisasi sebesar Rp.8.215.590.444,00 atau 93,27%.

E. Dukungan Personil

Personil yang dimiliki Satuan Polisi Pamong Praja Dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Lebak belum dapat mengakomodir seluruh tuntutan dan aspirasi masyarakat dalam menjaga ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat serta penanggulangan bencana kebakaran. Personil Sat Pol PP Dan Damkar Lebak saat ini baru mencapai 142 orang yang terdiri dari PNS : 50 orang, *Supporting Staff* : 1 orang, Tenaga Bantuan Jasa Keamanan Dan Ketertiban : 82 orang dan Anggota Sekretariat Sat Linmas : 9 orang, termasuk di dalamnya terdapat 2 orang Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS).

Jumlah pegawai di lingkungan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Lebak Tahun 2021 sebanyak 47 orang terdiri dari PNS : 10 orang, Sukwan/Honorer : 9 orang dan Tenaga Koordinator Tingkat Kecamatan : 28 orang.

F. Permasalahan dan Solusi

1. Permasalahan

- a. Belum mencukupi rasio ketersediaan personil dibandingkan dengan jumlah penduduk yang ada. Idealnya jumlah personil Sat Pol PP sedikitnya 251-350 orang untuk kabupaten dan 12 orang untuk masing-masing kecamatan, jumlah tersebut tentunya disesuaikan pula dengan luas wilayah dan jumlah penduduk. Begitu pula dengan personil Damkar dan Linmas yang dimiliki jauh dari mencukupi dalam menangani tuntutan masyarakat. termasuk di dalamnya hanya ada 2 orang Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS).
- b. Merebaknya Wabah Covid-19 yang menyebabkan konsentrasi dan sumber daya khususnya personel yang dimiliki oleh Sat Pol PP Dan Damkar Lebak tercurah pada kegiatan pencegahan untuk memutus rantai penyebaran wabah Covid-19 bersama dengan TNI, POLRI dan perangkat daerah terkait dalam rangka implementasi kebijakan AKB dan PPKM sehingga kegiatan-kegiatan Sat Pol PP Dan Damkar Lebak yang telah direncanakan tidak bisa dilaksanakan secara optimal.
- c. Keterbatasan anggaran, sarana dan prasarana menyebabkan layanan Trantibum dan Pemadam kebakaran untuk seluruh kabupaten menyebabkan belum optimal.



- d. Selain itu untuk pelaksanaan Pelayanan Penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran luasnya cakupan pelayanan tidak sebanding dengan jumlah Posko PMK yang hanya ada 2 Unit yang berkedudukan di Rangkasbitung dan Malingping, dimana setidaknya terdapat 1 Pos PMK di tiap kecamatan (28 Kecamatan). Begitu pun dengan Sarana dan Prasarananya harus sesuai dengan ketentuan yang ada.
 - e. Kesadaran Masyarakat dan pengetahuan dalam mentaati peraturan perundang-undangan daerah dan pencegahan bahaya kebakaran masih rendah sehingga masih banyak terjadinya pelanggaran dan penyebab kebakaran akibat faktor kelalaian manusia salah satunya yaitu membakar sampah atau lahan pada musim kemarau dengan tanpa diawasi, sehingga api menjadi tidak terkendali dan merambat ke permukiman penduduk.
 - f. Ada Beberapa Indikator SPM Bidang Urusan Bencana yang tidak mendapatkan dukungan dana untuk pelaksanaan kegiatan/program sehingga target tidak tercapai, beberapa indikator SPM yang tidak mencapai target salah satunya yaitu persentase penyelesaian dokumen KRB sampai dengan dinyatakan sah/ legal dan persentase penyelesaian dokumen RPB sampai dinyatakan sah/legal sehingga tidak bisa mentukan target dan realisasi. Selain tersebut di atas banyak permasalahan yang kurang mendukung pada tercapainya SPM Bidang Bencana sebagai berikut :
 - 1) Banyaknya penduduk yang tinggal di daerah rawan bencana;
 - 2) Luasnya wilayah penanganan bencana;
 - 3) Kelembagaan
 - a) Keterbatasan sarana dan prasarana dalam mendukung mitigasi di daerah rawan bencana;
 - b) Belum dilakukan kajian kebencanaan alam dan pemetaan wilayah peta rawan bencana;
 - c) Keterbatasan tenaga personil dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana;
 - d) Belum tersususnya dokumen Kajian Resiko Bencana.
 - 4) Kepemimpinan : koordinasi ke luar dalam membangun kemitraan dengan pemangku kepentingan belum optimal.
 - 5) Pengetahuan : belum memadainya kapasitas sumber daya manusia BPBD dalam penyelenggaraan penanganan bencana.
2. Solusi
- a. Memaksimalkan potensi yang dimiliki baik itu sarana dan prasana maupun personil yang ada dalam menangani permasalahan di masyarakat;
 - b. Meningkatkan koordinasi dengan OPD dan Instansi lainnya (Pemprov. Banten, TNI, POLRI, dll) yang berkaitan dengan masalah



- yang dihadapi, dengan demikian dapat mengatasi permasalahan yang dihadapi secara efektif dan komprehensif;
- c. Meningkatkan kekuatan yang dibutuhkan, baik dari segi anggaran, jumlah personil maupun sarana dan prasarana agar tercapai rasio yang sesuai dengan kebutuhan. Meningkatkan kapasitas melalui diklat formil maupun informal;
 - d. Meningkatkan partisipasi aktif masyarakat dalam menjaga ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat serta penanggulangan bencana kebakaran dengan Pol PP Kecamatan (Kasi Trantibum sebagai Ka Satpol PP Kecamatan) dan Anggota Satlinmas Desa sebagai motor penggeraknya;
 - e. Memaksimalkan kegiatan/program yang mendapat dukungan dana dan melaksanakan kegiatan dengan membuat evaluasi pemanfaatan yang lebih efektif dan efisien dengan tetap mengedepankan akuntabilitas, adapun langkah-langkah yang haru ditempuh untuk tercapainya SPM sebagai berikut :
 - 1) Dibuatkan Peraturan Daerah tentang penanggulangan bencana gunanya untuk mengambil kebijakan dalam penyelenggaraan penanganan bencana;
 - 2) Dokumen tematik sebaran daerah rawan bencana;
 - 3) Penyusunan dokumen Kajian Risiko Bencana (KRB);
 - 4) Penyusunan dokumen Pengurangan Risiko Bencana (PRB);
 - 5) Diklat aparatur dan Sosialisasi/ Pelatihan bagi masyarakat dalam pencegahan dan kesiapsiagaan untuk menghadapi bencana;
 - 6) Perlunya penambahan personil Penanggulangan bencana;
 - 7) Perlunya pembentukan pos lapangan di daerah rawan bencana untuk meningkatkan efektivitas penanganan bencana;
 - 8) Pengalokasikan dana yang memadai dalam upaya mendukung kegiatan terutama yang berkaitan dengan penerapan dan pencapaian Standar Pelayanan Minimal (SPM);
 - 9) Perlunya penambahan sarana dan prasarana operasional penanganan bencana;
 - 10) Ketersediaan logistik kebutuhan dasar;
 - 11) Mengoperasikan PUSDALOP.

4.6. Urusan Sosial

A. Jenis Pelayanan Dasar

Jenis pelayanan dasar pada SPM Urusan Sosial yang dilaksanakan oleh Dinas Sosial Kabupaten Lebak berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 100 Tahun 2018 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal terdiri atas Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar di Luar Panti, Rehabilitasi Sosial Dasar Anak Terlantar di Luar Panti, Rehabilitasi Sosial Dasar Lanjut Usia Terlantar di Luar Panti,



Rehabilitasi Sosial Dasar Tuna Sosial Khususnya Gelandangan dan Pengemis di Luar Panti serta Perlindungan Dan Jaminan Sosial pada Saat Tanggap dan Paska Bencana Bagi Korban Bencana.

B. Target Pencapaian Standar Pelayanan Minimal

Target pencapaian adalah target yang ditetapkan oleh Pemerintahan Daerah dalam mencapai SPM selama kurun waktu tertentu. Target Pencapaian SPM Urusan Sosial yang ditetapkan oleh Dinas Sosial Kabupaten Lebak Tahun 2021 adalah sebagai berikut :

Tabel 4.15
Target Pencapaian Standar Pelayanan Minimal Urusan Sosial

No	Jenis Pelayanan Dasar	Jumlah Sasaran	Target Pelayanan	%
1	Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar di Luar Panti	4.236	4.236	100
2	Rehabilitasi Sosial Dasar Anak Terlantar di Luar Panti	15	15	100
3	Rehabilitasi Sosial Dasar Lanjut Usia Terlantar di Luar Panti	15	15	100
4	Rehabilitasi Sosial Dasar Tuna Sosial Khususnya Gelandangan dan Pengemis di Luar Panti serta Perlindungan	20	20	100
5	Jaminan Sosial pada Saat Tanggap dan Paska Bencana Bagi Korban Bencana	70	70	100

Sumber : Laporan SPM Dinas Sosial Kab. Lebak.

C. Realisasi

Realisasi Pencapaian SPM Urusan Sosial yang berhasil dicapai oleh Dinas Sosial Kabupaten Lebak Tahun 2021 adalah sebagai berikut :

Tabel 4.16
Realisasi Pencapaian Standar Pelayanan Minimal Urusan Sosial

No	Jenis Pelayanan Dasar	Target	Capaian	%	Ket
1	Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar di Luar Panti	4.236	3.951	93,20	
2	Rehabilitasi Sosial Dasar Anak Terlantar di Luar Panti	15	15	100	
3	Rehabilitasi Sosial Dasar Lanjut Usia Terlantar di Luar Panti	15	15	100	
4	Rehabilitasi Sosial Dasar Tuna Sosial Khususnya Gelandangan dan Pengemis di Luar Panti serta Perlindungan	20	-	-	Kegiatan mengalami reconfusing (anggaran di nalkan)
5	Jaminan Sosial pada Saat Tanggap dan Paska Bencana Bagi Korban Bencana	70	70	100	

Sumber : Laporan SPM Dinas Sosial Kab. Lebak.



D. Alokasi Anggaran

Alokasi Anggaran dalam rangka mendukung penerpan dan pencapaian target Standar Pelayanan Minimal Urusan Sosial pada Tahun Anggaran 2021 yang ditetapkan dan dilaksanakan oleh Dinas Sosial Kabupaten Lebak yang bersumber dari APBD Kabupaten Lebak di alokasikan sebesar Rp.3.816.126.810,00 dan dapat terealisasi sebesar Rp.3.567.809.280,00 atau 93,49%.

E. Dukungan Personil

Tenaga Sosial di Kabupaten lebak berjumlah 271 orang, dengan latarbelakang profesi dan tempat kerja yang berbeda, untuk lebih jelas dapat dilihat berikut ini :

Tabel 4.17
Jumlah Tenaga Sosial Kabupaten Lebak Tahun 2021

No.	Jenis Tenaga	Tempat Kerja		
		Dinas Sosial	Kecamatan	Lapangan
1	PNS Eselon IV.a	10		
2	PNS Eselon III.a	3		
3	PNS Eselon III.b	1		
4	PNS Eselon II.b	1		
5	Non Struktural	7		
6	Honorer	23		
7	Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan (TKSK)		28	
8	Koordinator TKSK		1	
9	Tenaga Pekerja Sosial (Peksos)			2
10	Pendamping PKH		195	
Jumlah		45	224	2
		271		

Sumber : Laporan SPM Dinas Sosial Kab. Lebak.

F. Permasalahan dan Solusi

1. Permasalahan

a. Tahap Perencanaan

- 1) Pemegang program belum fokus memprioritaskan penggunaan dana sepenuhnya dalam pencapaian SPM Bidang Sosial;
- 2) Belum optimalnya pemanfaatan tool SPM dalam perencanaan dan penganggaran program ataupun kegiatan.

b. Sumber Daya Tenaga Sosial

- 1) Masih kurangnya pegawai dengan kompetensi Kesejahteraan Sosial;
- 2) SDM ditingkat Desa dan Kecamatan masih perlu peningkatan kompetensi terkait urusan Kesejahteraan Sosial.

c. Anggaran

- 1) Pemanfaatan dana terkait program kegiatan peningkatan kesejahteraan sosial bagi PPKS mengalami pengurangan akibat refocusing. Sehingga banyak program kegiatan yang tidak



- berjalan maksimal;
- 2) Pada beberapa kegiatan pembiayaan terbesar digunakan untuk pembiayaan belanja Jasa Pegawai Non- ASN.
- d. Kemitraan dengan Lembaga Kesejahteraan Sosial, Lembaga Sosial Masyarakat atau OPD masih kurang;
 - e. Perlunya optimalisasi penggunaan sarana dan prasarana pendukung guna Pencapaian SPM :
 - 1) Belum optimalnya penggunaan database terkait Data Kemiskinan dalam pemberian layanan sosial untuk mencapai percepatan pencapaian SPM;
 - 2) Masih belum optimalnya ketersediaan alat bantu bagi penyandang disabilitas PPKS pada Fasilitas Rumah Singgah.
 - f. Belum semua kegiatan pelayanan kesejahteraan sosial mempunyai SOP;
 - g. Faktor geografis yang sulit di beberapa desa menyebabkan penjangkauan dalam pemberian pelayanan sosial menjadi terhambat;
 - h. Pencatatan dan pelaporan
 - 1) Belum Optimalnya sistem pencatatan dan pelaporan SPM;
 - 2) Terdapat perbedaan data sasaran antar pengelola kegiatan dilingkungan dinas;
 - 3) Belum optimalnya pemanfaatan data SIKS-NG, PMKS dan DTKS;
 - 4) Register pencatatan hasil pelayanan SPM bidang sosial sesuai standart yang baku belum tersedia dan dilakukan secara manual;
 - 5) Pelaporan pelayanan sosial terkait lansia masih kurang sehingga data pencapaian masih rendah;
 - 6) Pelaporan SPM dilakukan dalam akhir tahun;
 - 7) Belum semua lembaga kesejahteraan sosial melaporkan capaian pelayananan yang terdapat di lembaganya;
 - i. Kejadian Pandemi *Covid-19* yang berdampak pada pelayanan Sosial secara langsung.
2. Solusi
- a. Meningkatkan sarana dan prasarana dalam pemenuhan alat bantu bagi penyandang disabilitas melalui Dana Alokasi Khusus Fisik untuk penggunaan program dan kegiatan yang berkaitan dengan percepatan pencapaian SPM;
 - b. Memanfaatkan Program Bantuan Sosial dari Pemerintah Pusat (Kemensos) untuk percepatan pencapaian tujuan SPM;
 - c. Perlu dikembangkannya Lembaga Kesejahteraan Sosial Lanjut Usia di wilayah Kabupaten Lebak guna mempercepat capaian SPM Lanjut Usia;
 - d. Mengusulkan pendanaan Program dan Kegiatan dalam rangka



percepatan pencapaian SPM ke Provinsi Banten melalui Dana Perimbangan atau Bagi Hasil atau Dekon lainnya;

- e. Meningkatkan kapasitas kompetensi Tenaga Kesejahteraan Sosial melalui pelatihan atau workshop bagi petugas Sosial.

4.7. Program dan Kegiatan

Dalam rangka penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM) Pemerintah Kabupaten Lebak melalui 7 Organisasi Perangkat Daerah pengampu SPM dengan menerapkan 6 (Enam) bidang urusan SPM dengan rincian Program dan Kegiatan Urusan Pemerintahan Wajib berkaitan dengan Pelayanan Dasar yang mendukung dalam penerapan dan pencapaian SPM, sebagai berikut :

Tabel 4.18
Program dan Kegiatan Penunjang SPM

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Ralisasi	%
SPM BIDANG URUSAN PENDIDIKAN	249.208.391.600	256.792.576.258	103,04
PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	249.208.391.600	256.792.576.258	103,04
Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	137.137.779.231	144.120.941.301	105,09
Penambahan Ruang Kelas Baru	1.611.520.000	1.538.686.000	95,48
Pembangunan Ruang Unit Kesehatan Sekolah	485.710.000	466.750.000	96,10
Pembangunan Perpustakaan Sekolah	366.368.000	351.927.000	96,06
Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas	14.547.135.000	13.890.708.350	95,49
Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU	2.127.562.000	2.034.308.000	95,62
Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Unit Kesehatan Sekolah	137.200.000	129.938.000	94,71
Rehabilitasi Sedang/Berat Perpustakaan Sekolah	651.272.000	631.561.000	96,97
Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	318.769.000	303.179.000	95,11
Rehabilitasi Sedang/Berat Rumah Dinas Kepala Sekolah/Guru/Penjaga Sekolah	354.602.000	345.723.000	97,50
Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa	4.017.100.000	4.017.086.000	100,00
Penyelenggaraan Proses Belajar dan Ujian Bagi Peserta Didik	485.130.000	442.838.100	91,28
Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa	242.053.700	232.417.700	96,02
Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah	111.793.357.531	119.735.819.151	107,10
Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	88.765.667.269	89.836.379.757	101,21
Pembangunan Perpustakaan Sekolah	471.603.000	432.544.125	91,72
Pembangunan Laboratorium	536.827.000	535.659.327	99,78
Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	218.248.000	217.987.476	99,88
Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah	8.057.088.850	7.750.485.645	96,19
Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Guru Sekolah	695.160.000	486.085.281	69,92
Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Unit Kesehatan Sekolah	75.880.000	53.056.757	69,92



Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Ralisasi	%
Rehabilitasi Sedang/Berat Perpustakaan Sekolah	508.555.000	487.519.288	95,86
Rehabilitasi Sedang/Berat Laboratorium	2.185.164.000	2.091.321.061	95,71
Rehabilitasi Sedang/Berat Rumah Dinas Kepala Sekolah/Guru/Penjaga Sekolah	210.000.000	199.435.018	94,97
Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	1.090.040.150	844.762.420	77,50
Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa	5.463.400.000	5.368.812.000	98,27
Penyelenggaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik	358.312.200	340.765.200	95,10
Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa	288.642.500	116.680.000	40,42
Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah	68.606.746.569	70.911.266.159	103,36
Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)	16.836.145.100	16.566.997.700	98,40
Pembangunan Gedung/Ruang Kelas/Ruang Guru PAUD	834.615.400	808.965.200	96,93
Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik PAUD	16.001.529.700	15.758.032.500	98,48
Pengelolaan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	6.468.800.000	6.268.257.500	96,90
Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa Nonformal/Kesetaraan	722.300.000	703.657.500	97,42
Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Nonformal/Kesetaraan	5.746.500.000	5.564.600.000	96,83
SPM BIDANG URUSAN KESEHATAN	229.987.042.048	173.869.025.947	75,60
PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	189.991.789.328	138.881.374.360	73,10
Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	73.171.371.381	40.999.989.934	56,03
Pengembangan Puskesmas	4.897.106.920	3.680.706.404	75,16
Rehabilitasi dan Pemeliharaan Puskesmas	5.000.000.000	4.585.444.626	91,71
Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	4.409.213.680	2.113.505.492	47,93
Pengadaan dan Pemeliharaan Alat Kalibrasi	99.100.000	43.919.000	44,32
Pengadaan Obat, Vaksin	4.984.366.606	4.740.285.775	95,10
Pengadaan Bahan Habis Pakai	53.781.584.175	25.836.128.637	48,04
Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	105.848.672.420	89.192.294.955	84,26
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	1.585.789.600	279.882.975	17,65
Kesehatan Ibu Bersalin	6.706.854.000	6.504.538.400	96,98
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif	150.000.000	149.999.850	100,00
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat	9.783.000	5.740.000	58,67
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV	150.000.000	150.000.000	100,00
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB)	12.842.437.020	9.570.300.014	74,52
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	31.531.300	28.862.080	91,53



Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Ralisasi	%
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Tradisional, Akupuntur, Asuhan Mandiri, dan Tradisional Lainnya	106.947.200	100.715.600	94,17
Pengelolaan Upaya Kesehatan Khusus	134.836.500	74.793.010	55,47
Pengelolaan Upaya Pengurangan Risiko Krisis Kesehatan dan Pasca Krisis Kesehatan	33.446.400	32.552.510	97,33
Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	86.326.200	54.457.885	63,08
Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	50.640.106.200	50.335.448.905	99,40
Operasional Pelayanan Puskesmas	30.665.016.000	21.140.394.606	68,94
Pelaksanaan Akreditasi Fasilitas Kesehatan di Kabupaten/Kota	2.705.599.000	764.609.120	28,26
Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan secara Terintegrasi	30.437.800	28.515.500	93,68
Pengelolaan Data dan Informasi Kesehatan	30.437.800	28.515.500	93,68
Penerbitan Izin Rumah Sakit Kelas C, D dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	10.941.307.727	8.660.573.971	79,15
Peningkatan Mutu Pelayanan Fasilitas Kesehatan	10.901.388.477	8.659.673.971	79,44
Penyiapan Perumusan dan Pelaksanaan Pelayanan Kesehatan Rujukan	39.919.250	900.000	2,25
PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN	39.401.363.020	34.659.776.341	87,97
Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumberdaya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM di Wilayah Kabupaten/Kota	39.131.630.320	34.418.249.641	87,96
Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan sesuai Standar	39.131.630.320	34.418.249.641	87,96
Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	269.732.700	241.526.700	89,54
Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	269.732.700	241.526.700	89,54
PROGRAM SEDIAAN FARMASI, ALAT KESEHATAN DAN MAKANAN MINUMAN	187.916.000	55.970.910	29,79
Pemberian Izin Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)	40.898.000	11.750.910	28,73
Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Perizinan Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan, dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)	20.449.000	11.750.910	57,46
Penyediaan dan Pengelolaan Data Perizinan dan Tindak Lanjut Pengawasan Izin Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan, dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)	20.449.000	-	0,00
Penerbitan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga	97.745.000	40.860.000	41,80



Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Ralisasi	%
Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga	97.745.000	40.860.000	41,80
Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Post Market pada Produksi dan Produk Makanan Minuman Industri Rumah Tangga	49.273.000	3.360.000	6,82
Pemeriksaan Post Market pada Produk Makanan- Minuman Industri Rumah Tangga yang Beredar dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan	49.273.000	3.360.000	6,82
PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	405.973.700	271.904.336	66,98
Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	125.452.000	91.879.776	73,24
Peningkatan Upaya Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat	125.452.000	91.879.776	73,24
Pelaksanaan Sehat dalam rangka Promotif Preventif Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	280.521.700	180.024.560	64,17
Penyelenggaraan Promosi Kesehatan dan Gerakan Hidup Bersih dan Sehat	280.521.700	180.024.560	64,17
SPM BIDANG URUSAN PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	43.467.433.330	41.213.637.405	94,81
PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM	24.773.060.280	23.164.891.905	93,51
Kegiatan Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota	24.773.060.280	23.164.891.905	93,51
Sub Kegiatan Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis SPAM	365.515.680	325.846.640	89,15
Sub Kegiatan Pembangunan SPAM Jaringan Perpipaan di Kawasan Perdesaan	24.309.790.350	22.793.331.265	93,76
Sub Kegiatan Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Penyelenggaraan SPAM oleh Pemerintah Desa dan Kelompok Masyarakat	97.754.250	45.714.000	46,76
PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH	18.694.373.050	18.048.745.500	96,55
Kegiatan Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota	18.694.373.050	18.048.745.500	96,55
Sub Kegiatan Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota	13.880.663.450	13.674.984.500	98,52
Supervisi Pembangunan/ Rehabilitasi/ peningkatan/ perluasan Sistem Pengolahan Air Limbah Domestik TerPusat Skala Kota	4.589.644.550	4.243.600.000	92,46



Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Ralisasi	%
Sub Kegiatan Sosialisasi dan Pemberdayaan Masyarakat terkait Penyediaan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik	224.065.050	130.161.000	58,09
SPM BIDANG URUSAN PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN	6.570.519.760	6.190.007.810	94,21
PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN	6.570.519.760	6.190.007.810	94,21
Pembangunan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota	6.570.519.760	6.190.007.810	94,21
Penyusunan Site Plan dan/atau Detail Engineering Design (DED) bagi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota	416.997.500	387.461.400	92,92
Pengadaan Lahan untuk Pembangunan Rumah bagi Korban Bencana	6.153.522.260	5.802.546.410	94,30
SPM BIDANG URUSAN KETENTRAMAN, KETERTIBAN UMUM DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT	8.808.337.350	8.215.590.444	93,27
PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	4.034.124.500	3.980.996.510	98,68
Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	3.931.338.300	3.878.600.910	98,66
Pencegahan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan, dan Pengawasan	1.236.702.100	1.235.285.750	99,89
Penindakan atas Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Berdasarkan Perda dan Perkada melalui Penertiban dan Penanganan Unjuk Rasa dan Kerusuhan Massa	2.645.636.200	2.595.564.160	98,11
Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam rangka Ketentraman dan Ketertiban Umum	49.000.000	47.751.000	97,45
Penegakan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Bupati/Wali Kota	102.786.200	102.395.600	99,62
Pengawasan atas Kepatuhan terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Wali Kota	50.000.000	49.649.200	99,30
Penanganan atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Wali Kota	52.786.200	52.746.400	99,92
PROGRAM PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN, PENYELAMATAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NON KEBAKARAN	223.500.000	218.623.000	97,82
Pencegahan, Pengendalian, Pemadaman, Penyelamatan, dan Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	223.500.000	218.623.000	97,82
Pencegahan Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	12.637.000	8.300.000	65,68
Pemadaman dan Pengendalian Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	210.863.000	210.323.000	99,74



Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Ralisasi	%
PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA	4.550.712.850	4.015.970.934	88,25
Pelayanan Informasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota	99.955.000	92.907.500	92,95
Sosialisasi, Komunikasi, Informasi Edokasi (KIE) Rawan Bencana Kabupaten/Kota	99.955.000	92.907.500	92,95
Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	1.448.125.650	1.202.335.104	83,03
Pengendalian oprasai dan penyediaan sarana prasarana kesiapsiagaan terhadap bencana kab./kota	5.991.000	5.960.000	99,48
Penyediaan peralatan perlindungan dan kesiapsiagaan terhadap bencana	810.837.000	713.588.000	88,01
Penanganan Pascabencana Kabupaten/Kota	440.002.650	333.007.904	75,68
Pengembangan Kapasitas Tim Reaksi Cepat (TRC) bencana Kabupaten /kota	191.295.000	149.779.200	78,30
Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	3.002.632.200	2.720.728.330	90,61
Pencarian, pertolongan dan evakuasi korban bencana kabupaten/ kota	731.262.200	693.352.640	94,82
Penyediaan logistik penyelamatan dan evakuasi korban bencana kabupaten/kota	2.271.370.000	2.027.375.690	89,26
SPM BIDANG URUSAN SOSIAL	3.816.126.810	3.567.809.280	93,49
PROGRAM REHABILITASI SOSIAL	432.194.500	404.068.150	93,49
Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial	129.007.300	106.481.260	82,54
Penyediaan Permakanan	76.824.800	75.741.260	98,59
Penyediaan Alat Bantu	13.500.000	13.250.000	98,15
Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual, dan Sosial	6.925.000	5.220.000	75,38
Pemberian Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis dan Masyarakat	7.057.500	5.220.000	73,96
Pemberian Layanan Kedaruratan	24.700.000	7.050.000	28,54
Rehabilitasi Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA di Luar Panti Sosial	303.187.200	297.586.890	98,15
Penyediaan Permakanan	32.342.400	32.025.630	99,02
Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual, dan Sosial	103.142.400	102.375.630	99,26
Pemberian Layanan Rujukan	167.702.400	163.185.630	97,31
PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL	160.514.350	153.114.770	95,39
Pemeliharaan Anak-Anak Terlantar	13.837.500	11.670.000	84,34
Penjangkauan Anak-Anak Terlantar	13.837.500	11.670.000	84,34
Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	146.676.850	141.444.770	96,43
Pendataan Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	32.792.400	31.640.630	96,49
Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	113.884.450	109.804.140	96,42
PROGRAM PENANGANAN BENCANA	3.223.417.960	3.010.626.360	93,40
Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/Kota	3.187.083.560	2.975.569.730	93,36



Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Ralisasi	%
Penyediaan Makanan	227.692.600	205.778.770	90,38
Penanganan Khusus bagi Kelompok Rentan	2.959.390.960	2.769.790.960	93,59
Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat terhadap Kesiapsiagaan Bencana Kabupaten/Kota	36.334.400	35.056.630	96,48
Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Taruna Siaga Bencana	36.334.400	35.056.630	96,48

Sumber : BKAD Kab. Lebak



BAB V PENUTUP

Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten Lebak merupakan laporan atas pelaksanaan program kerja Pemerintah Daerah dalam satu tahun anggaran, yang meliputi Laporan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah, Laporan Tugas Pembantuan, Laporan Tugas Umum Pemerintahan dan Laporan Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah guna memenuhi ketentuan Pasal 70 ayat (4) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

Secara menyeluruh Hasil pencapaian Target kinerja program yang dilaksanakan sepanjang tahun 2021 merupakan realisasi dari seluruh aktivitas pelaksanaan program dan kegiatan yang dijalankan oleh jajaran Pemerintah Kabupaten Lebak bersama DPRD berdasarkan dokumen perencanaan pembangunan yang telah ditetapkan.

Kami selaku penyelenggara Pemerintahan Daerah, menyadari bahwa dalam pelaksanaannya, masih banyak permasalahan yang belum ditangani secara optimal karena terkendala dengan aspek lain, baik terkait dengan keterbatasan anggaran, SDM maupun regulasi. Tentu saja hal tersebut tidak mengurangi upaya-upaya yang ditempuh oleh Pemerintah Kabupaten Lebak dalam rangka peningkatan pelaksanaan pembangunan dimasa yang akan datang.

Demikian buku laporan ini kami susun, tentu saja masih banyak kekurangannya, Untuk itu, kami pun membuka hati untuk menerima kritik, saran, serta masukan yang konstruktif dari semua pihak untuk lebih meningkatkan kapasitas daerah guna mewujudkan peningkatan daya saing, pelayanan publik, dan kesejahteraan masyarakat serta penentuan status (peringkat) kinerja daerah secara Nasional di dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan.

SIX FANTASTIC

Enam Objek Wisata

sebagai Destinasi Pariwisata Unggulan
Kabupaten Lebak



PEMERINTAH KABUPATEN LEBAK